

DINAMIKA MOBILITAS PENDUDUK DI WILAYAH PERBATASAN

Mita Noveria
Aswatini
Suko Bandiyono
Eniarti Djohan
Alvini Pranoto
Ade Latifa
Bayu Setiawan

**PUSAT PENELITIAN KEPENDUDUKAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
PPK-LIPI, 2006**

KATA PENGANTAR

Wilayah perbatasan mempunyai peran yang strategis karena berfungsi sebagai 'garis' pembatas dengan negara tetangga dan sekaligus juga menjadi pintu gerbang untuk memasuki wilayah suatu negara. Daerah perbatasan menjadi areal tempat berlangsungnya mobilitas penduduk, yang merupakan salah satu fenomena kependudukan, melewati batas negara. Dalam konteks yang lebih luas, mobilitas penduduk melewati garis perbatasan tidak hanya menyangkut perpindahan orang dan barang, melainkan juga perpindahan ideologi. Oleh karena itu, dengan perannya yang strategis daerah perbatasan perlu mendapat perhatian yang lebih besar dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.

Sebagai salah satu pusat penelitian yang mempunyai kompetensi di bidang kependudukan, Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI telah melakukan berbagai penelitian di beberapa wilayah perbatasan sejak lebih dari satu dekade terakhir. Penelitian difokuskan pada isu-isu yang terkait dengan kondisi sosial demografi penduduk serta berbagai kebijakan pembangunan di daerah perbatasan. Salah satu isu yang menjadi fokus penelitian adalah mobilitas penduduk, baik melintasi perbatasan negara maupun mobilitas internal menuju dan dari daerah perbatasan. Penelitian-penelitian tersebut antara lain dilakukan di Kabupaten Sangihe Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, yang berbatasan dengan negara Philipina, di Kabupaten Bulungan dan Nunukan di Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Malaysia serta Kabupaten Jayapura dan Merauke yang berbatasan dengan negara Papua Nugini. Mengingat masing-masing daerah perbatasan mempunyai kekhasan, maka fokus penelitian berbeda antar tiap-tiap wilayah perbatasan, sesuai dengan kekhasannya.

Buku ini memuat tulisan-tulisan yang mengangkat berbagai isu yang berkaitan dengan mobilitas penduduk di wilayah perbatasan. Data yang digunakan terutama adalah hasil penelitian Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI (PPK-LIPI) dari beberapa penelitian di wilayah perbatasan yang dilakukan sejak tahun 1990-an. Semoga buku ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai berbagai isu yang terkait dengan mobilitas penduduk di daerah perbatasan.

Para peneliti telah bekerja keras untuk menyelesaikan tulisan-tulisan dalam buku ini. Terima kasih diucapkan kepada mereka yang telah bekerja keras mewujudkan buku ini. Meskipun para peneliti telah menggerahkan semua upaya untuk selesainya buku ini, disadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam tulisan-tulisan di buku ini. Untuk itu, saran dan kritik membangun sangat diperlukan demi penyempurnaan buku ini.

Jakarta, Desember 2006

Kepala Pusat Penelitian Kependudukan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Dr. Ir. Aswatini, APU
NIP. 320003450

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
MOBILITAS PENDUDUK DI WILAYAH PERBATASAN: Sebuah Pengantar.....	1
<i>Mita Noveria</i>	
MOBILITAS INTERNASIONAL PENDUDUK DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA	11
<i>Aswatini</i>	
MOBILITAS PENDUDUK SEBATIK-TAWAU: Dari Perdagangan Sampai Pengobatan	33
<i>Mita Noveria</i>	
MOBILITAS PENDUDUK SANGIHE	57
<i>Suko Bandiyono</i>	
DINAMIKA MOBILITAS PENDUDUK DI WILAYAH PERBATASAN NTT KE PERAIRAN AUSTRALIA	77
<i>Alvini Pranoto</i>	
DINAMIKA MOBILITAS SOSIAL – BUDAYA MASYARAKAT SKOU DI PERBATASAN PAPUA UTARA	97
<i>Eniarti B. Djohan</i>	
FEMINISASI MIGRASI: Studi Kasus di Wilayah Perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.....	119
<i>Ade Latifa</i>	
PERDAGANGAN LINTAS BATAS BELU-TIMOR LESTE DAN KEBERADAAN PASAR PERBATASAN	145
<i>Bayu Setiawan</i>	

MOBILITAS PENDUDUK DI WILAYAH PERBATASAN: Sebuah Pengantar

Mita Noveria

Mobilitas penduduk melintasi wilayah perbatasan negara merupakan fenomena kependudukan yang lazim ditemukan, bahkan telah terjadi sejak waktu lama. Kedekatan jarak geografis memungkinkan penduduk dari dua negara yang berbatasan melakukan mobilitas melewati batas negara. Mobilitas ini dilakukan baik secara tradisional maupun modern (formal). Mobilitas tradisional dilakukan tanpa menggunakan paspor dan pelakunya hanya melapor pada pos perbatasan terdekat untuk memperoleh izin (pas) lintas batas, seperti yang terjadi di wilayah perbatasan Provinsi Papua dengan Papua Nugini, di wilayah perbatasan Sulawesi Utara (Sangir Talaud) dengan Filipina serta di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan negara Malaysia. Selanjutnya, mobilitas dengan cara modern (formal) dilakukan dengan menggunakan paspor dan atau visa untuk memasuki wilayah negara tetangga.

Berbagai faktor berperan dalam mobilitas penduduk di wilayah perbatasan. Ikatan kekeluargaan dan kekerabatan serta kesamaan etnis merupakan faktor yang dominan menyebabkan terjadinya mobilitas tradisional (lihat Bandiyono, dkk. 2004; La Pona, dkk., 2001; Raharto, dkk., 1995). Fenomena ini antara lain terjadi dikalangan penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan Provinsi Papua yang memiliki tanah ulayat dan tanah garapan di negara Papua Nugini. Oleh karena itu, merupakan fenomena yang biasa bagi penduduk di perbatasan Papua untuk pergi berladang di lahan mereka yang secara territorial berada dalam wilayah negara Papua Nugini. Demikian juga sebaliknya, orang-orang dari Papua Nugini biasa datang ke wilayah Papua antara lain untuk urusan keluarga. Sementara itu, di wilayah perbatasan Sangir Talaud (dengan Filipina) mobilitas penduduk terjadi karena kegiatan perdagangan, disamping juga karena ikatan kekeluargaan.

Selanjutnya, keinginan untuk mendapatkan pelayanan sosial yang lebih baik juga menjadi penyebab terjadinya mobilitas melewati wilayah perbatasan negara. Studi-studi mengenai mobilitas penduduk di wilayah perbatasan menemukan bahwa kesenjangan pembangunan antara wilayah Indonesia dengan negara tetangga, menyebabkan penduduk perbatasan lebih berorientasi pada negara tetangga dalam banyak aspek kehidupan (Raharto, dkk., 1994; Widayatun, dkk., 1999; Hamid, 2005).

Disamping alasan-alasan tersebut, faktor ekonomi dan kondisi politik berperan pula dalam terjadinya mobilitas penduduk ini (Raharto, dkk., 1995; Bandiyono, dkk., 1995; Raharto & Djohan, 1999; Widayatun, dkk., 1999). Beberapa isu di wilayah perbatasan yang telah berhasil diidentifikasi seperti *illegal logging*, perdagangan dan penyelundupan (barang), penempatan pekerja migran yang tidak tercatat serta perdagangan manusia merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan aktivitas mobilitas penduduk karena faktor ekonomi. Oleh karenanya, mobilitas penduduk di wilayah perbatasan menjadi kajian yang strategis untuk dilakukan.

Mobilitas melewati wilayah perbatasan ini tidak hanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan, melainkan juga oleh mereka yang berasal dari daerah lain. Kelompok ini pada umumnya adalah penduduk usia produktif yang akan bekerja ke luar negeri, misalnya ke Malaysia dan Singapura. Bagi mereka, wilayah perbatasan merupakan daerah transit sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan, baik dengan status tenaga kerja resmi (terdaftar) maupun tidak tercatat (tenaga kerja *illegal*). Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh PPK-LIPI mengenai mobilitas TKI ke luar negeri mendapatkan bahwa keberangkatan sebagian besar diantara calon TKI dilakukan melalui beberapa daerah transit di wilayah perbatasan, seperti Kabupaten Nunukan (Kalimantan Timur), Entikong (Kalimantan Barat) serta Kota Batam dan Tanjung Pinang di Kepulauan Riau (Raharto, dkk., 2002; Hugo, dkk., 1996)

Disamping mobilitas yang melampaui batas negara, mobilitas penduduk di wilayah perbatasan juga terjadi secara internal. Artinya, perpindahan terjadi dari dan ke berbagai daerah lain di Indonesia. Sebagian perpindahan ini terjadi secara spontan, terutama yang dilandasi oleh motif ekonomi karena adanya peluang usaha (baca: ekonomi) di wilayah perbatasan, akan tetapi sebagian lainnya dilakukan melalui pengaturan pemerintah. Termasuk dalam kelompok ini adalah pegawai negeri dan anggota TNI yang dipindahugaskan ke daerah perbatasan serta peserta program transmigrasi ke kawasan perbatasan. Penempatan transmigran di wilayah perbatasan ini disamping untuk tujuan pembangunan secara umum, juga untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara karena banyak wilayah perbatasan berpenduduk sangat jarang (Widayatun, dkk., 1999).

Sejalan dengan berbagai perubahan yang terjadi seperti arah kebijakan dan orientasi pembangunan, tidak tertutup kemungkinan terjadi pula perubahan dalam besaran, pola dan kecenderungan mobilitas penduduk di wilayah perbatasan. Sebagai contoh, pada masa pemberlakuan otonomi daerah dimana sebagian kewenangan pemerintah pusat diberikan kepada daerah, pembangunan wilayah perbatasan lebih mendapat perhatian karena perencanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini

memungkinkan pelayanan sosial, misalnya penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan, dapat lebih ditingkatkan. Dengan kondisi tersebut, diharapkan mobilitas penduduk wilayah perbatasan ke negara tetangga untuk mencari pelayanan kesehatan dapat dikurangi, dan bahkan dapat dihentikan sama sekali. Namun demikian, keadaan yang berlawanan dapat pula terjadi. Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang berakibat pada kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Ditambah dengan keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri, semakin banyak penduduk yang berkeinginan untuk bekerja ke luar negeri. Akibatnya, mobilitas penduduk lintas perbatasan menjadi semakin besar karena wilayah perbatasan merupakan daerah transit bagi sebagian mereka yang akan bekerja ke luar negeri.

Meskipun mobilitas penduduk di wilayah perbatasan mencakup berbagai isu strategis, dalam kenyataannya kajian dan diskusi mengenai topik ini masih belum mendapat perhatian yang sama besarnya dengan isu-isu (kependudukan) lainnya. Padahal, mobilitas penduduk yang sekaligus juga menyebabkan terjadinya aliran barang dan ideologi dapat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah perbatasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa institusi, termasuk Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI (PPK-LIPI) telah melakukan kajian dan penelitian mengenai mobilitas penduduk di wilayah perbatasan. Akan tetapi, hasil kajian dan penelitian masih terpisah-pisah dengan fokus yang berbeda satu sama lain.

Berdasarkan kenyataan tersebut, melalui buku ini disajikan isu-isu mobilitas penduduk di wilayah perbatasan secara komprehensif, mencakup semua aspek yang terkait dengan fenomena kependudukan tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh pemahaman dan gambaran mengenai dinamika mobilitas penduduk di wilayah perbatasan dari waktu ke waktu dan berbagai isu yang terkait dengannya. Pemahaman mengenai mobilitas ini sangat penting terutama untuk mengurangi dampak negatif yang kemungkinan timbul akibat fenomena kependudukan tersebut. Gambaran dan analisis tentang mobilitas penduduk ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembangunan wilayah perbatasan pada umumnya. Secara rinci buku ini menyajikan tulisan-tulisan yang berisi:

1. Kajian mobilitas penduduk di wilayah perbatasan, mencakup arus, besaran, pelaku, pola, serta alasan-alasan yang mendasarinya.
2. Analisis terhadap isu-isu yang muncul dan terkait dengan mobilitas penduduk di wilayah perbatasan serta kecenderungan perubahannya, baik akibat perubahan berbagai kondisi di tingkat lokal, nasional maupun regional.

Beberapa Isu yang Diangkat dalam Buku ini

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, mobilitas penduduk tidak hanya semata-mata menyangkut perpindahan orang/manusia secara geografis, akan tetapi juga membawa dampak terhadap berbagai aspek kehidupan lainnya. Disamping itu, banyak isu lain yang terkait dengannya, yang pada umumnya bervariasi menurut karakteristik masing-masing daerah, termasuk di daerah perbatasan. Sebagai contoh, perdagangan dan ikatan kekeluargaan menjadi isu yang dominan diantara pelintas batas di wilayah perbatasan Sangir Talaud dengan Filipina dan di juga perbatasan Papua dengan Papua Nugini, seperti telah dikemukakan sebelumnya. Sementara itu, isu ikatan keluarga jarang ditemui di wilayah perbatasan lainnya seperti Kepulauan Riau dengan Malaysia atau Singapura.

Untuk memberikan gambaran mengenai berbagai isu yang terkait dengan mobilitas penduduk di wilayah perbatasan buku ini menyajikan tulisan-tulisan yang berfokus pada:

- Isu ekonomi yang antara lain melihat (a) hubungan perdagangan antara masyarakat di perbatasan dua negara, termasuk ketergantungan masyarakat suatu negara terhadap barang-barang yang berasal dari negara lain seperti ketergantungan masyarakat Papua Nugini di perbatasan Papua Barat terhadap barang-barang dari Indonesia; (b) mobilitas penduduk yang berkaitan dengan usaha ekonomi, baik migrasi keluar melintasi wilayah perbatasan, seperti yang dilakukan oleh penduduk dari berbagai daerah di Indonesia yang bekerja ke Malaysia atau nelayan Indonesia yang mencari ikan melintasi batas perairan negara memasuki wilayah Australia, maupun migrasi masuk menuju wilayah perbatasan.
- Isu sosial budaya, dengan melihat mobilitas penduduk dari faktor-faktor sosial budaya. Mobilitas penduduk yang terjadi akibat adanya hubungan kekerabatan antara masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dua negara merupakan salah satu topik bahasan yang termasuk dalam isu sosial budaya. Sebagai contoh, di daerah perbatasan Propinsi Papua dan negara Papua Nugini mobilitas penduduk (orang Skou) terjadi akibat adanya hubungan kekerabatan antara masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Jika mengacu pada batas teritorial negara kelompok masyarakat tersebut merupakan warga dari dua negara yang berbeda, akan tetapi mereka mempunyai etnis yang sama. Oleh karena itu, isu perkawinan dan hak ulayat sangat terkait dengan mobilitas penduduk di daerah perbatasan. Selanjutnya, permasalahan sosial yang muncul akibat adanya migran kembali, seperti di Nunukan (dari Malaysia) dan di

Sangir Talaud (dari Filipina) serta keberadaan migran karena adanya program transmigrasi menuju wilayah perbatasan negara dapat pula menjadi topik dalam isu ini.

Mengingat isu-isu yang muncul di berbagai wilayah perbatasan berbeda satu sama lainnya, maka penonjolan isu-isu yang spesifik untuk masing-masing daerah perbatasan akan menjadi salah satu pertimbangan dalam masing-masing tulisan di buku ini. Hal ini penting untuk memberikan gambaran mengenai kekhasan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dengan demikian, berbagai program, baik untuk pengelolaan mobilitas, khususnya, dan pembangunan wilayah perbatasan pada umumnya, dapat direncanakan sesuai dengan kondisi spesifik yang ada di daerah.

Data yang Digunakan

Semua tulisan yang ada dalam buku ini memanfaatkan data-data primer yang sudah dikumpulkan oleh (peneliti-peneliti) PPK-LIPI pada tahun-tahun sebelumnya, terutama sejak awal tahun 1990-an serta analisis data sekunder yang tersedia di instansi-instansi lain, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), baik pusat maupun daerah, kantor imigrasi (daerah) serta dinas kependudukan dan tenaga kerja (daerah). Beberapa tulisan juga menggunakan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan bersamaan dengan penelitian tahun 2006, disamping data sekunder. Selain dari itu juga dilakukan tinjauan terhadap bahan-bahan (literature) yang sudah ada, berkaitan dengan mobilitas penduduk di wilayah perbatasan serta dinamikanya.

Analisa data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Data-data kualitatif dan kuantitatif sudah banyak dikumpulkan dalam penelitian-penelitian yang dilakukan PPK-LIPI tahun-tahun sebelumnya. Data tersebut meliputi berbagai isu berkaitan dengan mobilitas penduduk di wilayah perbatasan, misalnya isu kesejahteraan, hubungan sosial budaya antar masyarakat dengan etnis yang sama namun terpisahkan oleh batas administratif dua negara serta perdagangan *illegal* dan penyelundupan. Data-data kuantitatif berasal dari data survei-survei nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), baik berupa data Sensus Penduduk maupun survei-survei yang lebih terfokus seperti survei sosial ekonomi (SUSENAS). Data sensus penduduk dan survei nasional ini juga tersedia di BPS dalam bentuk data dasar (*raw data*) yang kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan penulisan.

Unit analisis dalam penulisan ini berupa analisis di tingkat nasional maupun daerah (propinsi atau kabupaten/kota). Untuk penjelasan-penjelasan yang lebih bersifat kualitatif, analisis dilakukan di tingkat daerah yang

mencakup kecamatan dan desa, sesuai dengan data kualitatif yang tersedia dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan PPK-LIPI.

Tulisan dalam Buku ini

Sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk menyajikan gambaran mengenai berbagai isu yang terkait dengan mobilitas penduduk di wilayah perbatasan, buku ini berisi berbagai tulisan dengan fokus yang berbeda-beda. Fokus dalam masing-masing tulisan disesuaikan dengan konteks dan karakteristik daerah perbatasan, mengingat masing-masing wilayah mempunyai kekhasan. Tulisan pertama yang disajikan dalam buku ini membahas isu migrasi penduduk di wilayah perbatasan dengan penekanan pada daerah perbatasan Provinsi Sulawesi Utara dengan negara Philipina. Dalam tulisan ini juga dikemukakan konsep-konsep tentang migrasi penduduk sebagai konteks untuk menjelaskan mobilitas penduduk di wilayah perbatasan.

Mobilitas penduduk di perbatasan Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Pulau Sebatik, dengan negara bagian Sabah (Malaysia) menjadi salah satu fokus kajian dalam buku ini. Tulisan tersebut memuat gambaran mengenai pelaku, pola dan motif yang melatarbelakangi terjadinya kegiatan mobilitas penduduk. Berbelanja kebutuhan sehari-hari serta kunjungan keluarga merupakan alasan yang dominan yang menjadi penyebab mobilitas penduduk di wilayah perbatasan Pulau Sebatik dengan Kota Tawau di negara bagian Sabah. Selanjutnya, tulisan ini juga menyoroti perubahan-perubahan yang terjadi pada fenomena mobilitas penduduk, baik akibat kondisi dalam negeri maupun karena berbagai perubahan yang terjadi di negara tetangga.

Di samping tulisan yang pertama, dua tulisan lainnya dalam buku ini juga mengkaji mobilitas penduduk di wilayah perbatasan Provinsi Sulawesi Utara (daerah Sangir Talaud) dengan Philipina. Tulisan yang pertama menyajikan diskripsi yang umum mengenai fenomena mobilitas penduduk, baik mobilitas internal menuju daerah Sangir Talaud maupun mobilitas internasional antar kedua wilayah ini. Dalam tulisan ini sejarah mobilitas penduduk (internal dan internasional) dikupas secara lengkap, mulai dari zaman penjajahan Belanda disertai dengan faktor-faktor penyebab terjadinya kegiatan tersebut. Tulisan ini diperkaya pula dengan informasi mengenai migrasi kembali orang-orang Sangir yang pindah ke daerah Mindanao di Philipina Selatan sebelum tahun 1960-an. Tulisan kedua yang mengangkat mobilitas penduduk di daerah perbatasan Sangir Talaud dengan Philipina ini berfokus pada isu feminisasi migrasi. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai feminisasi migrasi di daerah perbatasan tersebut, dalam tulisan ini disajikan gambaran singkat yang terkait dengan isu feminisasi migrasi secara umum, mencakup konsep serta kondisi sosial demografi yang berkaitan

dengannya. Selanjutnya, untuk memberi konteks terhadap feminisasi migrasi, diberikan pula gambaran mobilitas penduduk secara ringkas.

Mobilitas penduduk di daerah perbatasan paling timur Indonesia juga mendapat perhatian dalam buku ini. Salah satu tulisan dalam buku ini membahas fenomena mobilitas penduduk (baca: orang Skou) di daerah perbatasan Provinsi Papua dengan negara Papua Nugini. Berbeda dengan fenomena mobilitas penduduk yang cenderung dimotivasi oleh kegiatan ekonomi, mobilitas orang Skou lebih didasari oleh faktor sosial budaya karena adanya hubungan kekerabatan diantara kelompok penduduk yang terpisah akibat adanya penetapan batas teritorial negara setelah mereka mendiami lokasi tempat tinggal mereka.

Satu tulisan dalam buku ini mengangkat isu mobilitas penduduk melewati batas perairan provinsi Nusa Tenggara Timur (di sekitar Pulau Rote) dengan negara Australia. Kegiatan ini dilakukan oleh nelayan yang berasal dari berbagai suku seperti Madura, Bugis, Makassar dan Buton. Jika sebelumnya nelayan Indonesia bebas melayari perairan yang mengelilingi kedua negara, setelah penetapan batas teritorial negara yang dilakukan pada tahun 1974, berbagai perubahan terjadi dalam kegiatan pelayaran mereka.

Wilayah perbatasan Provinsi NTT dengan negara Timor Leste juga diangkat dalam tulisan terakhir pada buku ini. Tulisan tersebut memberikan penekanan pada isu perdagangan, dengan memberikan fokus pada perdagangan di pasar tradisional. Seperti halnya nelayan di perairan perbatasan Indonesia dengan Australia, kegiatan perdagangan penduduk di wilayah perbatasan NTT dengan Timor Leste juga mengalami berbagai perubahan setelah menetapan batas teritorial negara secara formal.

Daftar Pustaka

- Bandiyono, Suko, dkk., 1995. Mobilitas *Penduduk Daerah Perbatasan: Timor Timur*. Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPT-LIPI). Seri Penelitian PPT-LIPI No. 6/1995.
- , 2004. Mobilitas *Penduduk di Perbatasan PAPUA-PNG*. Sebuah Peluang dan Tantangan. Yogyakarta: BRIDGE Publishing.
- Hamid, Rusnawar. 2005. *Carut Marut Pembangunan Kawasan Perbatasan (Kalimantan Barat - Sarawak)*. http://rudyct.tripod.com/sem2_023/rusnawir.htm. 1/18/2005.
- http://www.myanmar.com/Arm_Peace/develop.html. 4/14/2005.
Development of Border Areas for the Consolidation of National Solidarity.
- La Pona, dkk. 2001. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Migrasi Internasional (Legal) RI-PNG (Studi Kasus : di Desa Skouw Yambe dan Skouw Mabo). <http://digilib.menlh.go.id/go.php?id=ijptuncen-gdl-res-1996-la-689-migrasi&PHPSESSI...>
- Raharto, Aswatini, dkk. 1995. *Migrasi Kembali Orang Sangir Talaud dari Pulau-Pulau di Wilayah Filipina*. Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPT-LIPI). Seri Penelitian PPT-LIPI No. 2/1995.
- , 2002. Kebutuhan Informasi Bagi Tenaga Kerja Migran Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Timur dan Riau. Pusat Penelitian Kependudukan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI). Seri Penelitian PPK-LIPI No. 39/2002.
- Raharto, Aswatini dan Eniarti Djohan. 1999. *Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Daerah Perbatasan Kalimantan Timur: Konsep dan Strategi Alternatif Pembangunan*. Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPT-LIPI). Seri Penelitian PPT-LIPI No. 36/1999.
- Raharto, Aswatini, Suko Bandiyono dan Mujiyani. 2000. Mobilitas Penduduk di Kawasan Kerjasama Regional. Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPT-LIPI).

Widayatun, Bayu Setiawan dan Aswatini Raharto. 1999. *Laporan Pembangunan Wilayah Perbatasan Kabupaten Sangir Talaud: Konsep dan Strategi Alternatif Pembangunan*. Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPT-LIPI). Seri Penelitian PPT-LIPI No. 37/1999.

MOBILITAS INTERNASIONAL PENDUDUK DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA

Aswatini

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia mempunyai wilayah darat dan laut yang berbatasan dengan 10 negara. Di wilayah darat, Indonesia berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, Papua Nugini dan Republik Demokratik Timor Leste, dengan wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Di wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, palau, Australia, Republik Demokratik Timor Leste dan Papua Nugini. Batas di wilayah laut ini terdapat di 92 pulau-pulau terluar yang tersebar di 17 provinsi, mulai dari Nanggroe Aceh Darussalam sampai Papua (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004: 6, 12-16).

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi wilayah perbatasan di Indoensia dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar yaitu (1) berkaitan dengan kebijakan pembangunan; (2) ekonomi dan sosial budaya serta (3) pertahanan dan keamanan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004: 18-23). Ketiga permasalahan tersebut sangat berkaitan dengan kondisi penduduk di wilayah perbatasan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dan salah satu variabel demografi yang erat berhubungan dengan kuantitas dan kualitas penduduk adalah mobilitas penduduk.

Ketimpangan pembangunan wilayah perbatasan dengan wilayah lainnya di Indonesia, serta dengan wilayah di negara tetangga yang berbatasan langsung mengakibatkan ketertinggalan wilayah perbatasan. Keadaan ini mendorong terjadinya mobilitas penduduk secara permanen maupun non permanen, baik menuju wilayah lain di Indoensia maupun menyebrang ke negara tetangga. Adanya hubungan sosial budaya yang sudah terjalin secara turun temurun dengan penduduk di wilayah negara tetangga juga menyebabkan penduduk di wilayah perbatasan kedua negara terbiasa dengan pola mobilitas penduduk secara tradisional dan memiliki pemahaman akan kondisi yang lebih baik di negara tetangga. Akibatnya banyak diantara mereka yang lebih berorientasi ke negara tetangga. Kondisi ini akan berdampak terhadap pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan tersebut. Wilayah perbatasan, karenanya, merupakan daerah kritis, salah satunya disebabkan karena terjadinya mobilitas penduduk melintasi batas

internasional antara dua negara. Penduduk di daerah perbatasan pulang pergi melintasi batas dua negara yang memiliki kondisi sosial, kondisi ekonomi, sistem politik dan peraturan yang berbeda. Mereka juga membawa serta uang, barang, ide-ide, perilaku dan inovasi yang akan mempunyai dampak signifikan terhadap daerah asal maupun daerah yang dituju.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang dinamika mobilitas penduduk di wilayah perbatasan terutama perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia dan Filipina, Indonesia dan Papua Nugini serta Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Pembahasan mencakup pola-pola mobilitas spasial yang terjadi melintasi batas negara Indonesia, proses dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta konsekuensi sosia dan ekonomi dari mobilitas tersebut : apa faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh mobilitas penduduk wilayah perbatasan ini ?.

Konsep dan Definisi

Mobilitas penduduk mempunyai dua pengertian yaitu mobilitas sosial dan mobilitas spasial. Dalam tulisan ini yang menjadi fokus adalah mobilitas spasial (yang dapat diikuti oleh mobilitas sosial). Mobilitas penduduk spasial dapat diartikan sebagai berbagai bentuk pergerakan penduduk yang mencakup pergerakan harian yang ulang alik sampai pergerakan yang berdampak terhadap perubahan tempat tinggal untuk jangka waktu lama, bahkan untuk selama hidup individu yang melakukan mobilitas tersebut (Young, 1980: 112-113). Karena itu, mobilitas penduduk spasial dapat diklasifikasikan menurut waktu (*time*) : harian, periodik, musiman, jangka panjang, tidak beraturan (*irregular*) dan tetap (*permanent*); dan tempat (*space*): dari desa ke desa, desa ke kota, kota ke kota, kota ke desa atau dari satu wilayah geografis ke wilayah lainnya. Mobilitas penduduk yang permanen atau semi permanen dan melintasi batas formal geografis suatu wilayah yang menyebabkan perubahan tempat tinggal permanen disebut dengan migrasi penduduk (Gould and Prothero, 1975: 42-45, dalam Young, 1980: 112-113). Karena itu migrasi didefinisikan sebagai:

A form of geographic or spatial mobility involving a change of usual residence between clearly defined geographic units. (Shryock and Siegel, 1976: 349).

Berdasarkan definisi ini, tidak semua perubahan tempat tinggal biasanya dapat dikategorikan sebagai migrasi. Ada tiga dimensi yang digunakan dalam mengkласifikasi mobilitas penduduk sebagai migrasi, yaitu (Pressat, 1985:144-145).

1. Terjadi secara permanen.
2. Melintasi batas-batas administratif suatu wilayah. Jadi harus didefinisikan batas wilayah tertentu dimana mobilitas penduduk dapat dikategorikan sebagai migrasi (*migration defining area*).
3. Harus ditentukan jarak waktu tertentu dimana mobilitas tersebut terjadi (*migration defining period*).

Secara konvensional, dengan mempertimbangkan batas wilayah (*migration defining area*) migrasi dibagi lagi menjadi dua yaitu

1. Migrasi internal, yaitu perpindahan tempat tinggal penduduk secara permanen atau semi permanen yang melewati batas administratif daerah, tetapi masih dalam satu wilayah negara.
2. Migrasi internasional, yaitu perpindahan tempat tinggal penduduk secara permanen atau semi permanen yang melintasi batas administratif negara (Bogue, 1959: 488-489, dalam Hauser; 1969: 752).

Berdasarkan dimensi-dimensi diatas (*migration defining area* dan *migration defining period*), perjalanan untuk keperluan pariwisata (*tourist trips*) meskipun melintasi batas administratif wilayah; mobilitas ulang alik (*commuting*) dan pengembara (*nomadic*) tidak dapat diklasifikasikan sebagai migrasi. Hanya perubahan tempat tinggal penduduk yang relatif permanen, antara dua daerah yang jelas batas-batas geografik, politik, atau statistik, yang biasanya dikategorikan sebagai migrasi (Shryock and Siegel, 1976: 349). Secara umum, semua pergerakan penduduk tersebut dapat didefinisikan sebagai mobilitas penduduk.

Pendekatan Dalam Studi Mobilitas Penduduk

Dalam studi demografi, mobilitas penduduk menunjukkan perpindahan ruang (spasial), fisik atau geografik, tetapi dalam studi sosiologi, mobilitas umumnya diartikan sebagai perubahan dalam status, misalnya dalam pekerjaan dan tingkat kehidupan/kemampuan ekonomi Untuk membedakannya digunakan istilah mobilitas geografis dan mobilitas sosial (Shryock dan Siegel, 1976: 373).

Data agregat dalam studi mobilitas geografis penduduk, dapat menggambarkan pola dan arah arus mobilitas penduduk berdasarkan ciri-cirinya seperti umur, jenis kelamin pekerjaan, pendidikan dan lainnya. Ini adalah pendekatan demografi formal dalam analisis tentang mobilitas penduduk. Tetapi demographer juga mengaplikasikan teori-teori disiplin ilmu sosial lainnya untuk menjelaskan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang menyebabkan mobilitas penduduk atau yang disebabkan oleh mobilitas penduduk tersebut. Karena itu, demographer, karena kebutuhannya, telah

menjembatani jurang berbagai disiplin (Keely, 2000). Orientasi studi tentang mobilitas penduduk dipengaruhi oleh masing-masing disiplin ilmu, tetapi tidak ada satu disiplin ilmu yang dapat digunakan untuk analisis secara menyeluruh. Tabel 1, sebagai contoh, menunjukkan teori-teori migrasi¹ yang dikembangkan dari berbagai pendekatan ilmu, diantaranya geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi.

Geografer memfokuskan analisis mobilitas spasial penduduk pada pola geografis serta arah dari pergerakan tersebut dan menghubungkannya dengan faktor-faktor sosial, ekonomi dan perubahan lingkungan (Willis, 1987: 7). Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pola dan arah mobilitas penduduk ini adalah daya tarik dari suatu tempat serta jarak dari kedua tempat tersebut (daerah asal dan daerah tujuan). Factor jarak penting dalam pendekatan geografi seperti yang ditunjukkan dalam *gravity model*. Model ini menunjukkan bahwa mobilitas penduduk antara dua tempat (daerah asal dan daerah tujuan) berhubungan langsung, secara proporsional, dengan masa tempat tersebut (misalnya ukuran besarnya kota) dan berbanding terbalik dengan jarak antara keduanya tempat tersebut.

Fokus analisis mobilitas penduduk untuk sejarahwan (*historians*) berangkat dari pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan tempat (terjadinya migrasi) dan waktu (kapan terjadinya migrasi) tertentu. Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan umumnya sama dengan analisis migarsi dalam disiplin ilmu lainnya menyangkut deteminan dan konsekuensi dari mobilitas penduduk: siapa yang melakukannya mobilitas?; kapan terjadinya?; kenapa mereka melakukan/tidak melakukan mobilitas?; bagaimana pengalaman perjalanan mereka?. Dalam analisis proses migrasi, sejarahwan mendahulukan pada penjelasan naratif tentang bagaimana kelompok-kelompok masyarakat menetap, membentuk komunitas mereka (didaerah tujuan), dan membentuk identitas mereka (Diner, 2000).

Sosiolog dalam analisis mobilitas penduduk menekankan pada pertanyaan: kenapa mobilitas penduduk terjadi (motivasi)?; dan bagaimana pola mobilitas penduduk ini dapat terus bertahan? (Heisler, 2000). Selain dari itu ada pula yang berpendapat bahwa sosiolog dalam analisisnya juga memfokuskan pada akibat social dan psikologis dari mobilitas sini terhadap individu dan penduduk di daerah asal, hubungan antara mobilitas spasial dengan mobilitas social serta proses akulturasi dan penyesuaian diri penduduk migrant di daerah tujuannya (Shryock dan Siegel, 1976; Willis, 1974). Pendekatan sosiologi dalam studi mobilitas penduduk juga sangat

¹ Migrasi merupakan salah satu bentuk atau pola mobilitas penduduk yang menyebabkan terjadinya perubahan tempat tinggal penduduk secara permanent. Untuk penjelasan tentang perbedaan mobilitas penduduk dengan migrasi penduduk, dapat dilihat dalam uraian bagian 2 tentang konsep dan definisi.

berhubungan dengan aspek demografi dalam melihat karakteristik penduduk (umur, jenis kelamin, jumlah anggota dan komposisi rumah tangga, pendidikan, suku bangsa) pelaku mobilitas; aspek geografi, dengan penekanan pada pentingnya faktor jarak dan dengan aspek ekonomi dengan penekanan pada pentingnya faktor ekonomi sebagai penyebab terjadinya mobilitas penduduk tersebut (Oberai, 1987).

Pendekatan ekonomi dalam studi mobilitas penduduk menekankan pentingnya selektivitas penduduk pelaku mobilitas. Pertanyaan utama yang akan dijawab adalah: Dalam konsensi bagaimana selektifitas terjadi, dan siapa yang terseleksi untuk melakukan mobilitas sehubungan dengan investasi dalam sumberdaya manusia dan kondisi pasar kerja (Chiswick, 2000). Karena itu, ekonom menekankan hubungan antara mobilitas penduduk dengan siklus pekerjaan, penyediaan (*supply*) tenaga kerja terlatih dan tidak terlatih (sehubungan dengan investasi sumberdaya manusia) pertumbuhan industri serta lapangan pekerjaan (kondisi pasar kerja). Pendekatan ekonomi dalam analisis mobilitas penduduk ini biasanya merupakan analisis makro sebagai penyesuaian terhadap mekanisme pasar kerja (Willis, 1974). Pada awalnya pendekatan ekonomi tidak mempertimbangkan faktor non-ekonomi sehingga analisisnya tidak terfokus pada tingkat individu dan rumah tangga dimana keputusan untuk melakukan mobilitas dibuat (*neoclassical economics*), tetapi sekarang ini ekonom juga mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam mobilitas penduduk pada tingkat individu dan rumah tangga (*new economics*) (Brettell dan Hollifield, 2000; Oberai, 1987).

Tabel 1
Teori mobilitas penduduk lintas disiplin ilmu

Disiplin ilmu	Contoh pertanyaan penelitian	Unit analisis	Teori yang dominan
Geografi	Bagaimana pola geografis dan arah dari mobilitas penduduk?	Lebih makro/penduduk	Gravity model
Sejarah	Bagaimana kita memahami pengalaman migrant?	Lebih mikro/individual dan kelompok	Mengabaikan teori dan pengujian hipotesis
Sosiologi	Apa yang menjelaskan penyatuhan migrant?	Lebih makro/ kelompok etnik dan kelas sosial	Strukturalis dan/atau fungsionalis
Ekonomi	Apa yang menjelaskan kecenderungan mobilitas penduduk dan bagaimana pengaruhnya?	Lebih mikro/individual	Rasionalis: <i>cost-benefit</i> dan <i>push-pull</i>

Sumber: Dimodifikasi dari Brettell dan Hollifield, 2000; Willis, 1974.

Pola Mobilitas Internasional Penduduk Wilayah Perbatasan Indonesia

Berdasarkan definisi yang sudah diuraikan dalam bagian 2, pola mobilitas penduduk yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia di Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dan Papua, yang melintasi batas negara (mobilitas internasional) dapat diklasifikasikan dalam

- Mobilitas non permanen, melintasi batas negara. Mobilitas ini, (1) termasuk mobilitas ulang-alik (*commuting*), umumnya terjadi dalam jarak dekat dan untuk waktu yang singkat misal, dalam satu hari pulang pergi dari daerah asal ke daerah tujuan, dan (2) mobilitas sirkuler (*circular mobility*), dalam hitungan hari untuk kunjungan keluarga, berdagang dan kunjungan sosial lainnya.
- migrasi internasional semi-permanen (*non-permanent migration*), termasuk mobilitas musimam (*seasonal migration*) melintasi batas negara, biasanya untuk kegiatan bekerja atau mengolah kebun.
- migrasi internasional permanen (*permanent migration*) melintasi batas negara, dimana pendatang tinggal lebih dari enam (6) bulan.

Ketiga pola mobilitas internasional penduduk di wilayah perbatasan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, ikatan kekerabatan, kondisi ekonomi serta kondisi politik dan keamanan di kedua negara, khususnya di wilayah negara yang langsung berbatasan. Faktor alam, misalnya jarak yang lebih dekat ke pusat-pusat kehidupan di negara tetangga dibandingkan negara sendiri, merupakan daya tarik yang menyebabkan penduduk wilayah perbatasan lebih mudah mendapatkan akses terhadap fasilitas kehidupan di negara tetangga dibandingkan di negaranya sendiri. Kondisi ekonomi yang lebih baik di negara tetangga juga menarik penduduk daerah perbatasan untuk lebih berorientasi ke negara tetangga dalam aktifitas ekonominya. Sebaliknya, kondisi keamanan dan politik yang tidak stabil di negara sendiri akan merupakan faktor pendorong bagi penduduk wilayah perbatasan untuk menyebrang mencari keamanan dan perlindungan di negara tetangga.

Mobilitas non-permanen termasuk mobilitas ulang-alik (sirkuler) penduduk di wilayah perbatasan Indonesia menyebrang ke negara tetangga dapat terjadi karena adanya keterkaitan sosial budaya, pemilikan tanah keluarga (tanah ulayat) dan karena ketergantungan ekonomi. Penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan sering mempunyai ikatan sosial budaya meskipun mereka secara geografis tinggal di wilayah negara yang berbeda. Banyak dari mereka yang berasal dari kelompok etnik yang sama seperti, sebagai contoh, penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina di Sulawesi Utara (Kepulauan Sangihe Talaud) dengan penduduk di wilayah Filipina Selatan (Pulau Balut dan Pulau Saranggane), penduduk wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Timur dengan

penduduk di Negara Bagian Sabah (Malaysia) serta penduduk di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini (PNG) di Kabupaten Jayapura, Papua dengan penduduk di daerah Wutung dan Vanimo di PNG (Raharto, 1995; Raharto *et al*, 1997/1998; Bandiyono *et al*, 2004). Kebanyakan mobilitas ini merupakan mobilitas jangka pendek dan sudah berlangsung sejak sebelum batas kedaulatan kedua negara ditentukan. Batas negara yang ditentukan pada jaman kolonial cenderung untuk memotong wilayah mobilitas tradisional penduduk di wilayah perbatasan sehingga memisahkan mereka yang sudah berinteraksi serta yang sudah berkawin mawin dalam dua wilayah kekuasaan negara yang berbeda.

Mobilitas penduduk diwilayah perbatasan Indonesia-Filipina di Kepulauan Sangihe Talaud, Sulawesi Utara, sebagai contoh sudah terjadi sejak sebelum abad ke 19 (Zaelany dan Augustina, 1995: 32). Mobilitas ini terutama disebabkan karena adanya ikatan kekerabatan penduduk dua wilayah ini yang menurut sejarah pernah disatukan dibawah satu kerajaan, yaitu Kerajaan Kandhar. Kerajaan Kandhar yang merupakan salah satu kerajaan di wilayah Kepulauan Sangihe Talaud pada abad ke 17, dikatakan mempunyai wilayah sampai wilayah Buntuan, Pulau Saranggane dan Kota Davao di Mindanao Selatan yang sekarang merupakan wilayah Negara Filipina (Departemen P dan K Sulut, 1980: 20; Watuseke, 1990: 8). Kerajaan Tabukan (juga di wilayah Kepulauan Sangihe Talaud) juga dikatakan mempunyai wilayah sampai ke Cotabato, juga sekarang termasuk wilayah Negara Filipina (Departemen P dan K Sulut, 1980: 21). Bahkan, salah satu suku bangsa yang dianggap penduduk asli di wilayah Filipina Selatan, yaitu Suku Sangil mempunyai bahasa dan adat istiadat yang sama dengan bahasa dan dialek serta adat istiadat penduduk Tabukan Utara di Kepulauan Sangihe (Aambong, 1991: 9). Dengan demikian, mobilitas penduduk antara wilayah-wilayah tersebut pada saat itu umum terjadi karena masih berada pada satu wilayah kekuasaan (kerajaan), yang memudahkan mobilitas orang-orang yang berada dalam wilayah tersebut. Karena itu, banyak ditemukan Orang Sangir yang tinggal di wilayah Filipina Selatan sejak berabad-abad yang lalu, menikah dengan penduduk asli dan berketurunan disana. Setelah kedaulatan kedua negara, Filipina dan Indonesia, kunjungan keluarga (dalam bentuk mobilitas non-permanen) merupakan pergerakan penduduk yang biasa terjadi antara penduduk di wilayah Kepulauan Sangihe Talaud dengan penduduk di pulau-pulau dan Wilayah Midanao Selatan di Filipina. Karena jarak yang relatif jauh terkait dengan sarana transportasi yang tersedia, migrasi ulang-alik (*commuting*) dalam satu hari tidak mungkin dilakukan.

Adanya hubungan kekerabatan dan kunjungan keluarga antara penduduk dua wilayah ini, menyebabkan timbulnya hubungan perdagangan (ekonomi) dan juga pemilikan atau pengusahaan lahan pertanian di wilayah negara tetangga. Lokasi Kepulauan Sangihe Talaud lebih dekat dengan

wilayah Filipina Selatan dibandingkan ke Wilayah Utara Pulau Sulawesi dan Pusat Pemerintahan dan ekonomi di Kota Manado. Untuk pergi ke Sulawesi Utara pada masa lalu masih sangat sulit. Kondisi arus laut yang kencang, ombak besar serta adanya pusaran-pusaran air berbahaya merupakan hambatan yang dijumpai dalam perjalanan tersebut. Dengan demikian, hubungan perdagangan lebih mudah dilakukan ke wilayah Filipina Selatan dibandingkan ke Sulawesi Utara, disamping didukung pula oleh adanya hubungan kekerabatan yang ada. Biasanya penduduk dari wilayah perbatasan di Kepulauan Sangihe Talaud membawa kopra untuk dijual di wilayah Filipina karena harganya disana lebih mahal. Mereka kembali ke Indonesia dengan membawa 9 bahan kebutuhan pokok, seperti bahan makanan. Untuk penduduk pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan Indonesia seperti Pulau Marore, Kawio dan Kawaluso, juga lebih mudah untuk pergi ke wilayah Filipina Selatan daripada ke Pulau Sangir Besar, yang merupakan daerah utama penghasil bahan makanan di wilayah Kepulauan Sangihe Talaud (Aambong, 1991: 8).

Kondisi wilayah Kepulauan Sangihe Talaud yang terbatas sumberdaya alamnya (tanah pertanian) juga menyebabkan penduduknya yang pergi ke wilayah Filipina Selatan untuk bekerja dan bahkan kemudian membuka tanah pertanian disana, seperti kebun kelapa. Keadaan ini dimungkinkan selain karena masih jarangnya penduduk di wilayah tersebut juga karena masih lemahnya kontrol negara terhadap mobilitas penduduk tradisional diwilayah perbatasan. Akibatnya terjadi arus mobilitas penduduk non-permanen yang teratur. Penduduk wilayah perbatasan di Indonesia dalam waktu-waktu tertentu pergi dan menetap di wilayah Filipina Selatan dalam jangka waktu singkat (kurang dari 6 bulan) untuk menengok dan mengolah kebunnya. Pada saat panen kelapa mereka pergi dan membuat kopra disana dan kembali ke Indonesia membawa barang-barang kebutuhan hidup. Pembukaan kebun di wilayah engara tetangga ini juga melahirkan pola mobilitas permanen, dimana penduduk dari wilayah perbatasan di Indonesia kemudian menetap di wilayah Filipina Selatan untuk mempertahankan penguasaan dan pemilikan atas tanah dan kebun yang sudah dibukanya. Mobilitas penduduk secara tradisional ini kemudian berkembang menjadi mobilitas dengan alasan-alasan politik. Sebagai contoh, selama jaman kolonial Belanda, banyak aktivis organisasi politik di Indonesia yang melarikan diri dari Kepulauan Sangihe -Talaud menuju Pulau Mindanao untuk menghindari penangkapan oleh Pemerintah Belanda (Kaurow, 1990). Keadaan ini menyebabkan banyaknya penduduk Indonesia, terutama Suku Sangir yang menetap di Wilayah Filipina Selatan. Sebelum kemerdekaan kedua negara, Indonesia dan Filipina, keberadaan orang-orang yang berasal dari wilayah Indonesia di Wilayah Filipina Selatan tidak

menjadi persoalan karena pemerintah kolonial tidak menaruh perhatian dan tidak merasa berkepentingan dengan pola mobilitas penduduk tradisional ini.

Setelah kemerdekaan Indonesia dan Filipina, menjadi masalah karena masing-masing negara ingin menegakkan kedaulatan wilayah negaranya masing-masing dan mobilitas penduduk antar kedua negara ini di wilayah perbatasan diatur dalam perjanjian *Border Crossing (Border Crossing Agreement/BCA)* pada tahun 1956, yang mengatur mobilitas penduduk untuk tujuan kunjungan keluarga, darmawisata dan berdagang. Dengan adanya BCA ini, penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah yang termasuk dalam ‘wilayah perbatasan’ dapat masuk ke ‘wilayah perbatasan’ di Filipina Selatan dengan menggunakan surat jalan dari kepala desa yang merupakan pas lintas batas (PLB), kemudian melapor ke camat administratif BCA yang sudah ditentukan, di wilayah Indonesia dan Filipina. Demikian pula dengan penduduk wilayah Filipina Selatan yang berkunjung ke Indonesia. Batas waktu untuk tinggal di negara tetangga ini adalah selama satu bulan (Raharto, 1955).

Berdasarkan perjanjian BCA tahun 1956, penduduk Indonesia yang datang ke wilayah Filipina Selatan sebelum tahun 1956 dapat dianggap sebagai pendatang tidak sah dan sewaktu-waktu dapat dikembalikan ke wilayah Indonesia (Tan-Cullamar, 1987: 99-139), dan pada tahun 1963-1965 pernah dilakukan pemulangan (repatriasi) awal warga Indonesia yang tinggal ‘secara tidak sah’ di wilayah Filipina Selatan, ke Sulawesi Utara. Tetapi karena proses *resettlement* mereka di Indonesia tidak berjalan lancar, banyak diantara mereka pada tahun 1967 kembali lagi ke wilayah Filipina Selatan.

Pada awal tahun 1980-an, mulai terjadi arus migrasi kembali warga Indonesia yang tinggal di wilayah Filipina Selatan, ke Indoensia secara spontan disebabkan karena dorongan keadaan ekonomi dan keamanan di Filipina yang bertambah buruk. Disamping itu, setelah kemerdekaan Indonesia dan Filipina, keberadaan warga Indoensia di wilayah negara Filipina dipertanyakan dan hak kepemilikan dan penguasaan atas lahan pertanian juga dibatasi. Sebaliknya, keadaan di Indonesia mulai stabil dan ekonominya juga membaik. Mereka yang kembali ini tidak seluruhnya kembali menetap di Kepulauan Sangihe Talaud, tetapi ada yang memilih pindah ke Pulau Halmahera karena tanah pertanian disana masih cukup luas, disamping keadaan alam yang tidak jauh berbeda dengan daerah asal mereka di Kepulauan Sangihe Talaud (Aswatini dkk, 1994).

Sampai saat ini masih ada ribuan warga Indonesia yang tinggal di wilayah Filipina Selatan, baik yang memang mempunyai keinginan untuk kembali ke Indoensia maupun yang ingin menetap di Filipina karena sudah menikah dengan penduduk asli disana. Mobilitas penduduk antara Kepulauan

Sangihe Talaud dengan Pulau-pulau di Wilayah Filipina Selatan juga masih terjadi meskipun tidak untuk tujuan menetap. Ikatan kekerabatan yang terjadi antara penduduk kedua wilayah menyebabkan adanya kunjungan keluarga yang kadang-kadang juga digunakan untuk berdagang. Selain dari itu ada juga penduduk yang sudah menetap kembali di Indonesia tetapi masih mempunyai dusun (kebun) di wilayah Filipina (Raharto dkk, 1995).

Mobilitas penduduk juga terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur. Latar belakang penduduk di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan Timur menunjukkan adanya hubungan kekerabatan yang erat antara penduduk di wilayah perbatasan Indonesia dan penduduk di wilayah perbatasan Malaysia. Pola hubungan ini dapat dikelompokkan menjadi dua (Djohan dan Yogaswara, 1889) yaitu:

1. Hubungan yang sudah ada sejak jaman nenek moyang mereka, sebelum ditentukannya batas negara, Malaysia dan Indonesia. Hubungan ini didasarkan pada garis (satu) keturunan atau hak ulayat tanah/lahan.
2. Hubungan yang terjadi karena adanya mobilitas penduduk dari wilayah Indonesia, yang berasal dari luar wilayah perbatasan di kalimantan Timur, ke Negara Bagian Sabah untuk mencari pekerjaan, seperti pendatang Suku Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan dan pendatang dari beberapa wilayah di provinsi Nusa Tenggara timur.

Pada pola hubungan pertama, misalnya dapat dilihat dalam kehidupan Suku Dayak Kayan dan Suku Tidung yang tinggal di wilayah perbatasan, baik di wilayah negara Indonesia maupun di wilayah negara Malaysia. Pola kehidupan tradisional bertani berpindah-pindah memisahkan kelompok-kelompok masyarakat secara geografis tetapi tidak menghilangkan ikatan kekerabatan yang terjalin diantara mereka serta hak atas tanah ulayat. Karena itu, sampai saat ini masih ditemukan penduduk di wilayah Kalimantan Timur, Indonesia, yang memiliki hak ulayat di wilayah Malaysia dan sebaliknya. Karena itu setelah kemerdekaan Indonesia dan Malaysia, meskipun mereka terpisah oleh batas negara, hubungan kekerabatan dan pemilikan hak ulayat tanah yang ada menyebabkan mereka masih berhubungan, juga dalam bentuk kunjungan keluarga untuk keperluan adat, yang berkembang menjadi hubungan perdagangan dan pekerjaan. Selain karena adanya hubungan kekerabatan antara suku-suku asli Kalimantan dengan penduduk Malaysia terutama di wilayah Negara Bagian yang terletak di daratan Pulau Kalimantan, ada pula mobilitas yang dilakukan ke Malaysia sebagai respon terhadap kesulitan ekonomi serta pemberontakan yang terjadi di Indonesia (Raharto dkk, 1998; Siagian 1995).

Kasus kedua merupakan fenomena yang relatif baru, dengan masuknya pendatang dari wilayah lain di Indonesia ke wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Bulungan dan Nunukan. Ada dua suku bangsa yang dominan dalam mobilitas ini yaitu Suku Bugis (Sulawesi Selatan) dan Orang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Orang Bugis sudah lebih dahulu datang dan menetap di wilayah perbatasan, baik di wilayah Indoensia maupun Malaysia, sedangkan orang Flores diperkirakan baru masuk ke wilayah perbatasan di Kalimantan Timur ini setelah tahun 1940, yang datang pertama karena dibawa Pemerintah Kolonial Belanda sebagai pekerja di pertambangan minyak. Selain dari itu juga ditemukan Orang Toraja, yang sekarang ini juga merupakan suku dominan pencari kerja ke Malaysia, melalui wilayah perbatasan di Kalimantan Timur ini. Dari masuknya dua kelompok suku bangsa ini ke wilayah perbatasan di Kalimantan Timur, terjadi pola hubungan masyarakat di Indonesia dan Malaysia yang juga seiring dengan perkembangan pola mobilitas penduduknya. Pola hubungan tersebut adalah (Djohan dan Yogaswara, 1998: 34-36):

1. Perkawinan antara suku Bugis yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia dan di daerah Asal di Sulawesi Selatan dengan Suku Bugis yang sudah tinggal di wilayah Malaysia. Adanya hubungan ini mengukuhkan pola mobilitas penduduk yang sudah terjadi di wilayah perbatasan.
2. Pekerjaan, dimana pendatang dari NTT yang bekerja di wilayah perbatasan kemudian memberikan informasi kepada keluarga yang masih tinggal di NTT, sehingga mereka kemudian datang untuk bekerja terutama di perkebunan di wilayah Negara Malaysia. Pola mobilitas untuk alasan pekerjaan ini sampai sekarang masih terjadi, dimana wilayah perbatasan Indonesia, khususnya Kota Nunukan, merupakan daerah transit sebelum mereka menyebrang untuk bekerja di wilayah Malaysia, khususnya negara Bagian Sabah.
3. Perdagangan, umumnya dilakukan oleh Orang Bugis, dimana dari Indoensia, wilayah Kabupaten Nunukan, khususnya Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik, mereka membawa hasil-hasil pertanian dan perikanan untuk dijual di wilayah Malaysia, terutama di Kota Tawau. Sebaliknya dari Kota Tawau mereka membawa barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari seperti beras, sabun, minyak gula dan lain-lain. Mobilitas ini umumnya merupakan mobilitas ulang-alik, karena jarak yang cukup dekat dari Kota Nunukan dan Pulau Sebatik ke Kota Tawau.

Warga Indonesia baik penduduk asli wilayah perbatasan maupun pendatang dari wilayah lain yang sudah menetap di wilayah perbatasan

Indonesia – Malaysia di Kalimantan Timur juga banyak yang sudah bermigrasi, menetap dan menjadi penduduk warga negara Malaysia, terutama di wilayah Negara Bagian Sabah. Sebagai contoh, wilayah Negara Bagian Sabah Malaysia sudah menjadi tujuan migrasi penduduk Indoensia terutama yang berasal dari Sulawesi Selatan, sejak pertengahan abad ke 19. Sebelum tahun 1967, warga Indonesia yang menetap di wilayah Sabah diberi kesempatan untuk memilih kewarganegaraan. Mereka yang memilih menjadi warganegara Malaysia dikategorikan sebagai migran permanen.

Setelah ada perjanjian lintas batas pada tahun 1967 yang diperbaharui pada tahun 1984, arus mobilitas penduduk di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan Timur mulai tercatat, termasuk juga arus mobilitas tenaga kerja (Bandiyono, 1998: 77). Perjanjian lintas batas ini initinya adalah untuk mengatur, dengan memberi kemudahan, mobilitas penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan yang sudah ditentukan di kedua negara, yang akan saling berkunjung, mengingat latar belakang hubungan kekerabatan yang terjalin diantara mereka. Berdasarkan perjanjian ini, penduduk tetap wilayah perbatasan tidak memerlukan pasport dan visa untuk berkunjung ke negara tetangga, tetapi cukup menggunakan Pas Lintas batas (PLB), sebagai pengganti pasport. Penduduk yang menetap di luar wilayah perbatasan yang sudah ditentukan tidak dapat menggunakan PLB, tetapi tetap menggunakan pasport. PLB diberikan untuk keperluan kunjungan keluarga, kegiatan sosial, keperluan keagamaan, usaha, tugas pemerintah dan keperluan lain yang sudah disetujui kedua negara, tetapi tidak dapat digunakan untuk kepentingan mencari pekerjaan atau bekerja (Setiawan dan Yogaswara, 1998: 92-93).

Wilayah perbatasan seperti ditunjukkan oleh kondisi di Kota Nunukan, juga menjadi daerah transit bagi tenaga kerja dari berbagai daerah di Indonesia (Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Selawesi Tengah) yang ingin menyebrang ke wilayah Malaysia untuk bekerja (Bandiyono, 1998: tabel 3.2). Calon tenaga kerja ini juga adayang memenfaatkan fasilitas keimigrasian di wilayah perbatasan untuk mengurus kelengkapan administrasi utnuk bekerja di luar negeri. Tetapi ada pula yang menyebrang tanpa memenuhi persyaratan admininistrasi dan menjadi tenaga kerja ilegal (*undocumented*), selain juga ada yang menggunakan pas lintas batas yang sebenarnya tidak dapat dipergunakan sebagai persyaratan untuk bekerja di Malaysia. Akibatnya, selain menjadi daerah transit, Kota Nunukan juga menjadi daerah tujuan utama pengembalian tenaga kerja Indonesia (TKI) illegal dari Malaysia yang terjaring razia pendatang haram di Malaysia.

Di Papua, secara umum, berdasarkan perjanjian lintas batas kedua negara, mobilitas penduduk di wilayah perbatasan Indonesia - Papua Nugini

(PNG) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu mobilitas tradisional dan mobilitas modern (formal). Mobilitas tradisional adalah mobilitas melintasi batas negara yang dilakukan penduduk dengan tidak menggunakan pasport. Jadi pelintas batas hanya melapor di kantor imigrasi terdekat untuk mendapatkan izin (pas) lintas batas. Ini biasanya dilakukan dan diperuntukkan bagi penduduk yang memang menetap di wilayah perbatasan. Mobilitas modern dilakukan penduduk dengan menggunakan pasport dan visa untuk melintasi batas. Selain dari kedua macam mobilitas diatas, terdapat pula mobilitas penduduk secara tidak sah (ilegal), tidak menggunakan pas lintas batas maupun pasport. Mobilitas ini terjadi baik dari Indonesia ke Papua Nugini maupun sebaliknya (Bandiyono dkk, 1996).

Adanya arus mobilitas pelintas batas dari Indonesia ke Papua Nugini dan sebaliknya disebabkan oleh bebagai faktor sosial, budaya, ekonomi dan politik. Mobilitas ini sudah dilakukan sejak lama, dikenal sebagai mobilitas tradisional,. Penduduk melintasi batas negara untuk mengunjungi keluarga atau kerabat mereka yang tinggal dinegara seberang, karena adanya ikatan etnis, hubungan kekerabatan serta karena adanya ikatan perkawinan. Karena adanya ikatan kekerabatan tersebut, pada acara-acara perayaan keagamaan atau upacara adat, mereka saling mengunjungi, baik ke wilayah Indonesia maupun ke wilayah PNG. Mobilitas penduduk di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini ini umumnya merupakan mobilitas sirkuler. Selain dari itu ada pula yang melakukan mobilitas semi permanen dan permanen karena alasan politik, terutama secara tidak sah. Alasan-alasan mobilitas ini juga berlaku bagi penduduk Papua Nugini yang berkunjung ke Indonesia (Bandiyono dkk, 1996)

Dalam interaksi sosial mereka (penduduk perbatasan), sebenarnya tidak dikenal batas wilayah negara secara formal, karena mobilitas ini sudah mereka lakukan secara turun temurun. Penetapan batas negara antara Indonesia dan PNG juga menyebabkan adanya penduduk asli yang tinggal di wilayah negara PNG, tetapi mempunyai hak ulayat di wilayah Indonesia dan sebaliknya. Mereka secara teratur mengunjungi atau juga mengolah kebunnya sehingga secara teratur juga melintasi batas kedua negara. Adanya mobilitas penduduk karena alasan sosial budaya (kunjungan keluarga), juga berakibat terhadap terjadinya hubungan dagang (ekonomi) yang pada tingkat paling sederhana terjadi dengan sistem ‘barter’, yang dilakukan bukan untuk tujuan keuntungan ekonomi tetapi hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Penduduk warga PNG di perbatasan juga banyak berkunjung ke wilayah Indonesia untuk berbelanja barang kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, penduduk PNG di wilayah perbatasan di Wutung, Nusu, Yako dan Lido di Sandaun Province banyak yang melintasi batas menuju Jayapura untuk berbelanja. Ini disebabkan beberapa faktor, antara lain (1) jarak yang lebih dekat ke pusat perbelanjaan di Jayapura di bandingkan pusat

perbelanjaan di PNG; (2) harga yang lebih murah dibandingkan dengan nilai tukar *Kina*, mata uang di PNG; (3) jenis barang yang lebih bervarias dan (4) kualitas barang di Indonesia relatif lebih baik (Bandiyono, 2004: 85-86). Keadaan ini menunjukkan bahwa penduduk PNG di wilayah perbatasan lebih berorientasi ekonomi ke Indonesia, karena jarak yang lebih dekat. Ini berlawanan dengan kondisi di perbatasan Indonesia di Kalimantan Timur, dimana penduduk di wilayah Indoensia lebih berorientasi ekonomi ke Malaysia. Untuk perbatasan Indonesia – Filipina di Sulawesi Utara dapat dikatakan hampir tidak ada dominasi orientasi ekonomi satu negara karena arus perdagangan dapat dikatakan cukup berimbang. Penduduk Indonesia berbelanja di wilayah Filipina untuk barang-barang tertentu dan begitu pula sebaliknya, banyak penduduk wilayah perbatasan Filipina yang berbelanja di wilayah Indonesia.

Mobilitas penduduk tetap di wilayah perbatasan Indonesia – PNG, di wilayah Indonesia diatur melalui Pos Imigrasi dan Pos penjagaan di wilayah pebatasan. Pos Imigrasi ini berfungsi untuk melayani kebutuhan dokumen administrasi, berupa Pas Lintas Batas (PLB), seperti juga di wilayah perbatasan Indoensia lainnya, untuk pelintas batas tradisional, sehingga mereka tidak perlu mengurus ke ibukota kabupaten. Dengan dokumen PLB ini, ada batas jarak terjauh dimana pelintas batas dapat berkunjung serta jangka waktu tinggal di negara tetangga yang dikunjungi. Diluar batas tersebut akan diperlukan dokumen berupa passport dan visa. Dalam sekali ijin kunjungan, penduduk wilayah perbatasan dapat tinggal selama 30 hari di negara tetangga. Kondisi ini juga berlaku bagi penduduk warganegara PNG yang akan berkunjung ke wilayah Indonesia.

Untuk penduduk warga Indonesia, selain mobilitas menuju PNG, juga ada arus balik penduduk Indonesia dari PNG. Umumnya mereka terdiri dari warga Indoensia yang karena alasan politik bermigrasi ke PNG dan sudah menetap disana (baik secara permanent maupun semi permanent). Tetapi, karena alas an-alasan tertentu mereka kembali lagi ke Indonesia, biasanya karena alasan berkaitan dengan hak ulayat tanah mereka di wilayah Indonesia.

Dampak Mobilitas Penduduk Internasional di Wilayah Perbatasan Indonesia

Analisis dampak mobilitas penduduk dapat dilakukan pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat di daerah asal maupun tujuan migran. Salah satu alasan mengapa seseorang untuk melakukan mobilitas adalah untuk meningkatkan taraf hidup, yang dalam pendekatan ekonomi diartikan sebagai peningkatan pendapatan. Selain dari itu, ada pula alasan-alasan lain seperti untuk meningkatkan pendidikan, menghindari kekangan sosial-budaya di daerah asalnya, karena adanya ketidak stabilan politik di daerah

asalnya yang mengancam keselamatan jiwa serta mengikuti keluarga atau teman yang sudah lebih dahulu menetap di daerah tujuan yang ingin dicapai (Oberai, 1987: 5). Alasan atau motif untuk melakukan mobilitas ini sangat berkaitan erat dengan karakteristik individu tersebut. Hanya individu-individu dengan karakteristik tertentu yang biasanya terseleksi untuk dapat melakukan mobilitas spasial ini. Selanjutnya, adanya seleksi terhadap individu dengan karakteristik tertentu (secara positif maupun negatif) dalam proses ini akan mempunyai dampak terhadap individu migran sendiri maupun masyarakat dan daerah asal maupun daerah tujuan migran. Dampak ini dapat dilihat dari sudut demografi, ekonomi dan sosial. Bagian ini akan memfokuskan pada dampak mobilitas internasional penduduk yang terjadi di Indonesia, terutama untuk mobilitas keluar dari Indonesia, baik untuk individu migran, keluarga yang ditinggalkan maupun daerah asalnya.

Dampak mobilitas terhadap individu migran terutama dilihat dari penyesuaian diri migran di daerah tujuan. Masalah penyesuaian diri terutama timbul karena perbedaan bahasa dan nilai-nilai tradisional keluarga serta kebiasaan-kebiasaan di daerah asal yang sudah mendarah daging dalam diri migran. Untuk mobilitas dalam bentuk migrasi semi permanen atau permanen ke Singapore dan Malaysia, misalnya, masalah bahasa dan budaya mungkin tidak merupakan persoalan besar bagi migran karena di kedua negara tersebut juga digunakan Bahasa Melayu dan budaya mereka juga tidak terlalu berbeda. Migran ke Arab Saudi, seperti tenaga kerja Indoensia yang bekerja disana, menghadapi masalah lebih besar dalam penyesuaian diri karena adanya masalah bahasa dan juga budaya yang sangat berbeda.

Masalah lain yang dihadapi migran dalam penyesuaian diri di negara asing adalah perlakuan diskriminasi. Kesulitan komunikasi akan meningkatkan derajat diskriminasi yang akan dialami oleh migran di negara tujuan. Migran juga akan lebih berisiko terhadap perlakuan ini jika mereka datang secara tidak sah, karena mereka menjadi sangat tergantung pada individu atau kelompok yang membantu kelancaran kedatangan mereka ke negara tujuan. Perlakuan diskriminasi terhadap pendatang misalnya dapat diilustrasikan dari kasus migran Sangir (dari Kepulauan Sangihe Talaud) yang pergi dan kemudian menetap di wilayah Filipina Selatan. Meskipun bahasa yang digunakan didaerah asal migran di Kepulauan Sangihe Talaud (Bahasa Sangir), mempunyai banyak kesamaan dengan bahasa penduduk di daerah tujuan di Filipina (Bahasa Sangil), tetapi migran tetap mendapat perlakuan berbeda dalam mendapatkan kesempatan kerja dan kesempatan mendapatkan pendidikan bagi anak-anak mereka (Raharto dkk, 1995).

Dampak sosial dari migrasi ini juga akan lebih besar terhadap migran wanita dibandingkan laki-laki, karena wanita memang lebih rawan terhadap perlakuan diskriminasi dan eksloitasi terutama jika mereka berada di

daerah yang memang masih asing untuk mereka. Ini tentunya juga merupakan dampak yang tidak saja harus dihadapi oleh wanita itu sebagai individu tetapi juga keluarganya (Asia Pacific Migration Research Network, 1996: 6).

Dampak migrasi internasional terhadap keluarga berbeda, tergantung dari siapa yang bermigrasi. Banyaknya kepala keluarga laki-laki yang melakukan mobilitas, terutama untuk jangka waktu yang panjang (migrasi non-permanen) akan meninggalkan wanita sebagai kepala keluarga dan melakukan semua kewajiban dalam rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh kepala keluarga laki-laki. Sebagai contoh, karena banyaknya laki-laki yang bermigrasi ke Malaysia dan Singapore, Pulau Bawean dikenal sebagai ‘Pulau Perempuan’ dan wanita -wanita disana bukan saja harus memikul beban ganda tetapi juga menghadapi kesulitan dalam mengatur dan mendidik anak-anak mereka sedangkan di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, banyaknya laki-laki yang bermigrasi keluar, untuk bekerja, menyebabkan rasio jenis kelamin penduduk didominasi oleh wanita dan wanita yang tinggal harus melakukan pekerjaan sebagai buruh bangunan serta pekerjaan lainnya di ladang yang biasa dilakukan oleh laki-laki (Asia-Pacific Migration Research Network, 1996: 5; Raharto 1997). Selain dari itu, untuk kasus pekerja migran wanita, terutama ke luar negeri, lamanya mereka berada di negara orang berisiko terhadap kelangsungan hidup berkeluarganya.

Secara umum, banyaknya tenaga kerja yang bermigrasi ke negara lain akan merupakan sumber devisa serta mengurangi masalah pengangguran di negara asal. Untuk negara-negara yang memang membutuhkan tenaga kerja seperti Singapore, Malaysia dan Arab Saudi, pendatang migran merupakan sumber tenaga kerja yang murah terutama jika mereka datang secara tidak sah. Kasus ini agak sedikit berbeda dengan migran Sangir yang ada di Filipina. Banyak diantara mereka yang sudah tinggal cukup lama di Filipina pada saat ekonomi negara tersebut masih dalam keadaan baik. Tetapi, sejak ekonomi negara tersebut memburuk, pemerintah setempat mulai menerapkan pembatasan-pembatasan sehubungan dengan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan. Ini disebabkan karena pemerintah setempat perlu melindungi warga negaranya dalam menghadapi persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Akibat perlakuan-perlakuan tersebut banyak diantara migran Indonesia di Filipina yang ingin kembali ke Indonesia. Banyak diantara mereka yang kembali tanpa membawa hasil apa-apa dari migrasinya meskipun ada pula yang berhasil dan dapat membawa pulang modal untuk memulai hidup di Indonesia.

Dampak lain yang sangat penting dari migrasi internasional ini menyangkut hubungan baik kedua negara. Dalam kasus migrasi tenaga kerja ke Malaysia, Pemerintah Malaysia berusaha untuk menutup migrasi tidak

sah karena adanya isu-isu bahwa migran yang datang secara tidak sah ke Malaysia banyak terlibat dalam peristiwa-peristiwa kriminal serta untuk pekerja wanita, bekerja sebagai pelacur yang berakibat terhadap penyebaran penyakit kelamin. Keadaan ini akan menurunkan martabat tenaga kerja migran Indonesia yang selanjutnya mungkin akan mempengaruhi hubungan baik antara kedua negara. Beberapa studi menunjukkan bahwa ada masalah eksploitasi tenaga kerja terutama terhadap wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Perbedaan peraturan yang berlaku di Indonesia dan di negara tetangga akan merupakan sumber masalah dalam hubungan kedua negara.

Kesimpulan

Pola mobilitas internasional penduduk di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga khususnya antara Indonesia dengan Filipina di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara; antara Indoensia dan Malaysia di Kabupaten Nunukan serta antara Indonesia dengan Papua Nugini di Kabupaten Jayapura dapat di klasifikasikan dalam:

- mobilitas harian (ulang-alik) penduduk wilayah perbatasan
- mobilitas sirkuler penduduk perbatasan juga tenaga kerja dari luar wilayah perbatasan
- mobilitas permanen penduduk Indonesia ke negara tetangga
- mobilitas kembali penduduk Indonesia dari negara tetangga (pengungsi, tenaga kerja)

Pola-pola mobilitas internasional penduduk yang terjadi di wilayah perbatasan ini sangat berkaitan dengan latar belakang sejarah penduduk maupun kondisi geografis daerah perbatasan itu sendiri. Hubungan kekerabatan yang sudah ada diantara penduduk di wilayah perbatasan Indonesia dan negara tetangga sudah ada sejak sebelum kemerdekaan kedua negara, dimana kemudian ditentukan batas kedaulatan kedua negara. Jika sebelum ditetapkannya batas negara penduduk di wilayah perbatasan dapat melakukan mobilitas dengan bebas, setelah ditentukannya batas negara, mobilitas ini harus diatur untuk menjaga kedaulatan kedua negara. Keadaanini menimbulkan arus mobilitas penduduk harian antar kedua wilayah di perbatasan tersebut. Untuk penduduk yang memang merupakan penduduk tetap wilayah perbatasan, mobilitas mereka diatur secara administratif dengan menggunakan Pas Lintas Batas (PLB). Tetapi PLB ini juga memiliki keterbatasan sebagai dokumen resmi untuk beraktifitas di negara tetangga, dan tidak dapat digunakan sebagai dokumen resmi untuk tujuan mencari pekerjaan. PLB ini hanya dapat digunakan untuk kunjungan keluarga, sosial atau aktifitas ekonom seperti perdagangan dalam skala yang

juga sudah ditetapkan. Lamanya pendatang untuk tinggal di negara tetangga dengan menggunakan PLB juga terbatas, yaitu hanya selama satu (1) bulan.

Kondisi geografis daerah perbatasan, seperti jarak dengan pusat pemerintahan, perekonomian serta pelayanan sosial lainnya di negara sendiri dan di negara tetangga juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan pola-pola mobilitas penduduk di wilayah perbatasan ini. Jarak yang dekat dengan pelayanan sosial seperti rumah sakit dan pasar, dan akses yang mudah, seperti dalam kasus di perbatasan Indonesia – Malaysia di Pulau Nunukan dan Sebatik, sebagai contoh, menyebabkan mobilitas harian (ulang-alik) penduduk perbatasan Indonesia ke wilayah Malaysia yang sangat tinggi, dibandingkan dengan mobilitas penduduk Malaysia ke wilayah Indonesia. Sebaliknya di wilayah perbatasan Indonesia – PNG di Kabupaten Jayapura, mobilitas penduduk PNG ke wilayah Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan mobilitas penduduk Indonsia ke PNG.

Mobilitas internasional penduduk di wilayah perbatasan ini mempunyaidampak baik terhadad individu dan masyarakat di wilayah perbatasan, terhadap daerah asal dan tujuan di negara tetangga dan juga terhadap hubungan kedua negara. Tetapi dampak yang paling penting untuk dicermati adalah dampak terhadap hubungan antara kedua negara. Ini disebabkan karena isu mobilitas penduduk di wilayah perbatasan dapat terkait dengan isu-isu yang rawan terhadap potensi konflik antara kedua negara seperti isu pelintas batas illegal, penyelundupan serta akhir-akhir ini terkait dengan isu terorisme. Untuk itu, pemahaman tentang dinamika mobilitas penduduk di wilayah perbatasan, pola, dampak dan implikasi sosial-budaya, ekonomi dna politiknya sangat diperlukan.

Daftar Bacaan

- Aambong, A. 1991. *Selayang Pandang dan Hari Esao Penduduk dan Wilayah Border Crossing Agreement*. Laporan Camat lintas Batas Indonesia – Filipina, BCA Unit Marore.
- Asia Pacific Migration Research Network (APMRN). 1996. *Issues Paper From Indonesia*.
- Aswatini dkk. 1994. *Mobilitas Penduduk Wilayah Perbatasan Indonesia – Filipina di Sulawesi Utara: Pola dan determinan*. Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2004. *Kawasan Perbatasan: Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Bandiyono, Suko dkk. 1996. Mobilitas Penduduk Perbatasan Irian Jaya. *Laporan Penelitian. Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan - LIPI*.
- Bandiyono, Suko. 1998. ‘Pola Mobilitas Penduduk’, dalam Aswatini raharto (ed) *Mobilitas Penduduk Wilayah Perbatasan Indonesia – Malaysia Di Kalimantan Timur*, hal 65-86. Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Bandiyono, Suko. 2004. *Mobilitas Penduduk Di Perbatasan Papua – PNG. Sebuah Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Bridge Publishing.
- Bogue, Donald J. 1969. *Principles of Demography*. New York, London, Sydney, Toronto: John Wiley and Sons, Inc.
- Brettell, Caroline B. and James Hollifield. 2000. “Migration Theory. Talking across Disciplines”, dalam Caroline B. Brettell dan James F. Hollifield (ed), *Migration Theory. Talking Across Disciplines*, hal: 1-26. New York: Routledge.
- Chiswick, Barry R. 2000. ‘Are Immigrants Favourably Self-Selected?. An Economic Analysis’, dalam Caroline B. Brettell dan James F. Hollifield (ed), *Migration Theory. Talking Across Disciplines*, hal: 61-76. New York: Routledge.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan. 1980. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1959) Daerah Sulawesi Utara*. Manado: Departemen Pendidikan dan kebudayaan.

- Diner, Hasia R 2000. 'History and the Study of Immigration', dalam Caroline B. Brettell dan James F. Hollifield (ed), *Migration Theory. Talking Across Diciplines.*, hal: 27-42. New York: Routledge.
- Djohan, E dan Herry Yogaswara. 1998. 'Kondisi Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur', dalam Aswatini Raharto (ed): *Mobilitas Penduduk Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur*, hal: 11-64. Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Hauser, Philip M. and Otis Dudley Duncan. 1966. *The Study of Population: An Inventory and Appraisal*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Heisler, Barbara Schmitter. 2000. 'The Sociology of Immigration', dalam *Migration Theory. Talking Across Diciplines.*, hal: 77-96. New York: Routledge
- Kaurow, P. E. 1990. *Siau Pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*. Skripsi. Manado: Fakultas Sastra, Universitas Sam Ratulangi.
- Keely, Charles B. 2000. 'Demography and International Migration', dalam Caroline B. Brettell dan James F. Hollifield (ed), *Migration Theory. Talking Across Diciplines.*, hal: 43-60. New York: Routledge
- Oberai, A.S. 1987. *Migration, Urbanization and Development*. Training in Population, Human resources and Development Planning. Paper No. 5. Geneva: international labour Office.
- Raharto, Aswatini. 1995. *Migrasi Kembali Orang Sangir-Talaud dari Pulau-pulau di Wilayah Filipina*. Seri Penelitian PPT-LIPI No 2/1995. Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Raharto, Aswatini. 1997. 'Going Melarat for Better Living', dalam *Penduduk dan Pembangunan Indonesia Timur (Eastern indonesia Population and Development Research Project Newsletter*, Vol. 3 No.1, March 1997. Jakarta: PPT-LIPI dan IPDP.
- Raharto, Aswatini, dkk. 1998. *Mobilitas Penduduk Wilayah Perbatasan Indonesia – Malaysia Di Kalimantan Timur*. Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

- Setiawan, Bayu dan Herry Yogaswara. 1998. ‘Proses Mobilitas Penduduk di Wilayah Perbatasan’, dalam Aswatini Raharto (ed): *Mobilitas Penduduk Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur*, hal: 87-118. Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Shryock, Henry S dan Jacob S. Siegel. 1976. *The Method and Materials of Demography*. New York: Academic Press.
- Siagian, James. 1995. ‘*Mobilitas Penduduk Lintas Perbatasan. Kasus Kalimantan Barat – Serawak*. Prisma 1, Januari 1995.
- Tan-Cullamar, E. 1989. *The Indonesian Diaspora in Southern Mindanao: Implication for Philippines – Indonesia Relations*. Unpublished Ph.D Thesis. Quezon City: Asian Center, University of the Philippines.
- Watuseke, F.S. 1990. *Aspek-aspek Kebudayaan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Di Daerah Sulawesi Utara*. Manado. Tidak diterbitkan.
- Willis, K.G. 1974. *Problems in Migration Analysis*. Westmead: Saxon House.
- Zaelany, Andy A dan Augustina. 1995. ‘Mobilitas Penduduk Kepulauan Sangihe-Talaud: Tinjauan Sejarah’, dalam Raharto, Aswatini (ed): *Migrasi Kembali Orang Sangir-Talaud dari Pulau-pulau di Wilayah Filipina*. Seri Penelitian PPT-LIPI No 2/1995, hal 17040. Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

MOBILITAS PENDUDUK SEBATIK-TAWAU: Dari Perdagangan Sampai Pengobatan

Mita Noveria

Pendahuluan

Mobilitas penduduk² dari Pulau Sebatik ke Tawau, wilayah negara bagian Sabah (Malaysia Timur) merupakan fenomena kependudukan yang telah berlangsung sejak waktu lama. Kedekatan wilayah dan ketersediaan akses transportasi yang menghubungkan kedua daerah tersebut serta biaya trasnportasi yang relatif murah memungkinkan penduduk dari Sebatik untuk melakukan mobilitas ke Tawau dengan mudah. Apalagi, dengan statusnya sebagai wilayah perbatasan dokumen perjalanan bagi penduduk Pulau Sebatik yang berupa pas linta batas (PLB) dapat diurus di Pos Imigrasi yang terdapat di salah satu desa di pulau tersebut (Desa Sungai Pancang), sehingga dengan mudah mereka dapat memiliki dokumen untuk perjalanan ke luar negeri.

Berbagai tujuan melandasi mobilitas penduduk dari Pulau Sebatik ke wilayah Tawau. Salah satu diantaranya adalah kegiatan perdagangan, yaitu penjualan berbagai komoditas pertanian produksi penduduk Sebatik, disamping juga hasil perkebunan (kakao) dan ikan hasil tangkapan nelayan. Bagi mereka yang berprofesi sebagai pedagang atau pemilik toko yang menjual barang-barang kebutuhan (pokok), mobilitas ke Tawau bertujuan untuk membeli barang-barang yang akan dijual di Sebatik. Selanjutnya, di kalangan masyarakat yang mampu secara ekonomi, perjalanan ke negara bagian Malaysia tersebut dilakukan untuk berbelanja barang-barang keperluan rumah tangga, termasuk pakaian dan barang-barang elektronik seperti lemari es, televisi dan peralatan audio. Perjalanan dengan tujuan berbelanja ini semakin meningkat frekuensinya pada Hari Raya Idul Fitri untuk membeli berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam rangka merayakan hari besar tersebut.

Selain untuk berbelanja, beberapa diantara penduduk Sebatik melakukan mobilitas ke Kota Tawau dengan tujuan untuk bekerja. Kebanyakan diantara mereka melakukannya secara *illegal* karena keberangkatannya tidak dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan sebagai

² Mobilitas penduduk mengacu pada perpindahan yang dilakukan tanpa bermaksud untuk merubah tempat tinggal. Mobilitas penduduk mencakup perpindahan yang dilakukan dalam jangka pendek seperti satu hari, satu minggu atau satu bulan.

tenaga kerja internasional, seperti visa kerja. Selain itu, sejak tahun 1993 pemerintah negara bagian Sabah telah menghentikan pemberian *job order* yang merupakan salah satu persyaratan bagi tenaga kerja dari luar negeri untuk bekerja secara legal (Raharto, dkk., 1997/1998). Implikasinya, daerah ini tidak mengizinkan lagi masuknya tenaga kerja asing untuk bekerja di sana. Pergi ke Tawau untuk mencari pengobatan atau mengunjungi keluarga/saudara yang tinggal di daerah tersebut termasuk alasan yang juga mendasari mobilitas penduduk dari pulau yang terletak di ujung utara Pulau Kalimantan itu ke Tawau. Kepergian untuk mencari pengobatan ke negara tetangga dilakukan mengingat biaya pengobatan yang lebih murah dibandingkan dengan wilayah Kalimantan Timur lainnya seperti Kota Tarakan.

Tulisan ini mendiskusikan mobilitas penduduk dari Pulau Sebatik menuju Tawau, dengan fokus pada pelaku, tujuan dan pola serta perubahannya dari waktu ke waktu. Sebelum mendiskusikan fokus bahasan tersebut, disajikan gambaran umum mengenai Pulau Sebatik untuk memberikan pemahaman terhadap kondisi wilayah dalam konteks mobilitas penduduk ke wilayah negara tetangga tersebut. Mengingat mayoritas penduduk Pulau Sebatik adalah pendatang, maka dalam tulisan ini juga disajikan diskripsi tentang kedatangan migran, meliputi proses dan tujuan kedatangan mereka.

Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI selama satu dekade terakhir. Penelitian mengenai mobilitas penduduk dan pembangunan wilayah yang dilakukan pada tahun 1997 dan 1998 serta penelitian tentang penduduk dan kemiskinan di wilayah perbatasan yang dilaksanakan pada tahun 2006 merupakan sumber utama dari data primer yang digunakan dalam tulisan ini. Selanjutnya, data sekunder mencakup berbagai literatur dan publikasi mengenai Pulau Sebatik, terutama yang terkait dengan mobilitas penduduk.

Sekilas tentang Pulau Sebatik

Sebatik, pulau yang terletak di bagian utara Propinsi Kalimantan Timur, dimiliki oleh dua negara. Sebagian dari pulau ini, mencakup areal seluas lebih kurang 299,07 kilometer persegi merupakan wilayah teritorial Indonesia, sedangkan sisanya dimiliki oleh negara Malaysia (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2004). Pulau Sebatik bagian Indonesia yang secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Sebatik³, merupakan satu dari

³ Wilayah Kecamatan Sebatik mencakup daratan Pulau Sebatik serta enam pulau kecil di sekitarnya, antara lain Pulau Tinabasan, Ahus, Bukat dan Sinogolan (Bappeda & BPS Kabupaten Nunukan, 2005; Widystuti, 2004).

tujuh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Nunukan. Bersama dengan lima kecamatan⁴ lainnya (Krayan, Krayan Selatan, Lumbis, Nunukan dan Sebuku) Kecamatan Sebatik berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Jika Krayan, Krayan Selatan dan Lumbis berbatasan darat dengan negara Malaysia, Kecamatan Sebatik dan Nunukan berbatasan dengan Malaysia di daerah darat dan laut. Karena posisi kedua kecamatan tersebut, mobilitas penduduk menuju wilayah Malaysia dilakukan melewati batas darat dan laut kedua negara.

Kecamatan Sebatik yang di sebelah utara berbatas dengan Negara Bagian Sabah (Malaysia), di sebelah selatan dan timur dengan Laut Sulawesi dan di sebelah barat dengan Kecamatan Nunukan, terdiri dari 8 desa.⁵ Sungai Nyamuk merupakan desa yang paling luas wilayahnya dan menjadi pusat perdagangan, ditandai dengan kegiatan pasar yang berlangsung setiap hari serta banyaknya toko dan super(mini)market yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Kecamatan Sebatik dapat dijangkau dari Kota Nunukan maupun Tarakan. Dari Nunukan perjalanan ditempuh melalui laut sekitar 15 menit menggunakan *speedboat* atau 30 menit menggunakan perahu dayung ke ‘pelabuhan’ Bambangan di Desa Liang Bunyu dan kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat selama hampir dua jam untuk sampai ke Desa Sungai Nyamuk, ibukota Kecamatan Sebatik. Perjalanan dari Tarakan dilakukan menggunakan *speedboat* (dengan ukuran yang lebih besar daripada yang melayani rute Nunukan-Sebatik), dengan waktu tempuh sekitar 3-3,5 jam. Transportasi umum yang melayani jalur Tarakan-Sebatik dan sebaliknya tersedia setiap hari dengan beberapa kali pemberangkatan dari pagi sampai dengan pukul 14.00-15.00 WIT. Perjalanan Tarakan-Sebatik berakhir di dermaga yang terdapat di Sungai Nyamuk, yang sekaligus juga menjadi salah satu tempat pemberangkatan dan kedatangan *speedboat* menuju dan dari Kota Tawau di Sabah.

Dibandingkan dengan Kota Tarakan dan Nunukan, Kota Tawau di Sabah lebih mudah dijangkau dari Sebatik. Perjalanan ke Tawau dapat ditempuh dalam waktu hanya sekitar 15-20 menit menggunakan *speedboat* berkapasitas 4-6 orang yang melayani jalur ini dari pagi sampai sore hari dengan biaya 10 ringgit Malaysia untuk sekali perjalanan. Selain dari pelabuhan Sungai Nyamuk, perjalanan ke Tawau juga dapat dilakukan dari beberapa tempat pemberangkatan lainnya yang terdapat di Pulau Sebatik, antara lain ‘dermaga’ perahu yang berlokasi di Desa Sungai Pancang dan Aji

⁴ Hanya satu dari seluruh kecamatan di Kabupaten Nunukan yang tidak berbatasan langsung dengan negara Malaysia, yaitu Kecamatan Sembakung.

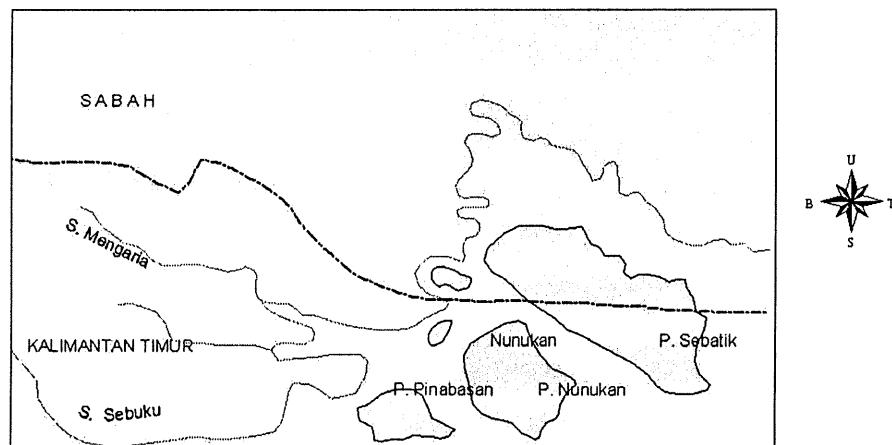
⁵ Desa-desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Sebatik adalah Liang Bunyu, Binalawan, Setabu, Tanjung Karang, Tanjung Aru, Sungai Nyamuk, Sungai Pancang dan Aji Kuning.

Kuning. Biaya perjalanan dengan perahu lebih murah daripada *speedboat*, yaitu 5 ringgit dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebagian penduduk Sebatik lebih memilih untuk melakukan aktivitas ekonomi ke Tawau dibandingkan dengan ke Tarakan atau kota-kota besar lainnya di dalam negeri, termasuk kota-kota yang terletak di wilayah Propinsi Kalimantan Timur.

Sebagian besar penduduk yang mendiami Pulau Sebatik (bagian Indonesia) adalah warga keturunan Bugis⁶, dengan proporsi sekitar 80-90 persen (wawancara dengan Camat Sebatik pada bulan Mei 2006). Mayoritas warga dengan etnis ini tinggal di pantai timur Pulau Sebatik, sementara penduduk asli Sebatik, yaitu suku Tidung pada umumnya menempati wilayah pantai barat pulau ini (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2004), seperti di Desa Liang Bunyu dan Setabu. Namun demikian, jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan warga beretnis Bugis.

⁶ Sebagian penghuni Pulau Sebatik di sekitar garis perbatasan yang termasuk wilayah Malaysia adalah penduduk keturunan etnis Bugis. Kebanyakan mereka mempunyai hubungan saudara dengan penduduk yang menghuni sekitar garis perbatasan yang termasuk wilayah Indonesia. Penduduk dari kelompok etnis ini tinggal di wilayah tersebut sebelum garis perbatasan antara negara Indonesia dan Malaysia ditetapkan pada tahun 1981 (Harijono, 2004). Penetapan garis tersebut secara administratif membagi wilayah yang mereka tempati menjadi dua bagian, sehingga terdapat bangunan rumah yang berdiri di dua negara, misalnya bagian depan berada dalam wilayah teritori Indonesia, sementara bagian belakangnya termasuk wilayah Malaysia. Terdapat pula kasus dimana setelah penetapan batas negara, rumah penduduk Indonesia seluruhnya berada di wilayah Malaysia. Meskipun demikian, mereka tetap menjadi penduduk Indonesia dan memiliki KTP (kartu tanda penduduk) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kecamatan Sebatik dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana layaknya warga negara Indonesia lainnya seperti membayar iuran RT. Sampai saat ini persoalan yang terkait dengan ‘pelanggaran’ garis batas ini belum pernah mengemuka karena masyarakat di daerah tersebut hidup dengan rukun. Ada kemungkinan hal ini terjadi karena mereka mempunyai hubungan kekeluargaan.

Peta Perbatasan Kalimantan Timur - Negara Bagian Sabah



Kegiatan ekonomi mayoritas penduduk Pulau Sebatik berada pada sektor pertanian (dalam arti luas). Usaha pertanian, perkebunan dan perikanan merupakan tumpuan mata pencaharian yang dominan. Komoditas pertanian yang diusahakan oleh penduduk pulau ini mencakup padi dan palawija, buah-buahan serta sayur-sayuran, sedangkan komoditas perkebunan yang dominan adalah kakao, diikuti oleh kelapa dalam dan kopi. Data menunjukkan bahwa dari 4.943 KK yang mendiami wilayah Kecamatan Sebatik pada tahun 2004, sebanyak 2.605 KK adalah petani tanaman kakao, 975 KK mengusahakan perkebunan kelapa dalam dan 220 KK merupakan petani kopi (BPS Kabupaten Nunukan, 2004). Pada tahun yang sama, terdapat sebanyak 1.116 KK yang mengusahakan kegiatan perikanan, terdiri dari 934 KK di sektor perikanan laut dan 182 KK di perikanan tambak. Namun demikian, tidak jarang ditemukan keluarga yang sekaligus melakukan kegiatan ekonomi di lebih dari dua sektor, seperti bertani dan nelayan. Disamping sektor pertanian, terdapat pula sebagian penduduk yang berusaha di sektor perdagangan dan jasa, termasuk guru dan PNS yang bekerja di Kantor Camat dan dua puskesmas yang ada di pulau ini.

Kedekatan dengan Malaysia ditambah dengan tingginya mobilitas penduduk antara dua daerah di dua negara yang berbeda itu menyebabkan Pulau Sebatik dibanjiri oleh barang-barang produk Malaysia. Mulai dari makanan dan minuman, termasuk susu dan minuman coklat sampai dengan barang-barang keperluan rumah tangga seperti gula, minyak goreng, gas untuk memasak dan ember berasal dari Malaysia. Tidak hanya barang-barang produksi Malaysia, mata uang negara tersebut (ringgit) pun biasa digunakan di Pulau Sebatik. Kedua mata uang (rupiah dan ringgit) dapat diterima dalam

semua transaksi. Pertanyaan “*ringgitkah rupiah?*” lazim keluar dari mulut pedagang untuk menjawab pertanyaan calon pembeli tentang harga barang-barang yang mereka jual. Bahkan tidak jarang dalam suatu transaksi yang dibayar dengan rupiah, tetapi sisa uang dikembalikan dalam mata uang ringgit.

Migrasi Masuk ke Pulau Sebatik: dimulai dari kedatangan orang Bugis

Migrasi penduduk menuju Pulau Sebatik tidak terlepas dari migrasi orang Bugis ke Propinsi Kalimantan Timur pada umumnya. Fenomena kependudukan ini mempunyai sejarah yang panjang, dimulai sejak akhir abad ke-17 oleh orang Wajo yang mlarikan diri ke wilayah kerajaan Kutai (sekarang dikenal dengan Samarinda) setelah dikalahkan oleh orang Bone pada peristiwa perselisihan antara kedua kerajaan tersebut pada tahun 1665 (Probonegoro & Siburian, 2000). Meskipun tujuan utama pendatang Bugis ke Kalimantan Timur pada saat itu adalah wilayah Samarinda, seiring dengan perjalanan waktu orang-orang Bugis juga memasuki berbagai daerah lainnya di Kalimantan Timur. Sampai dengan akhir abad ke-18 orang Bugis sudah tersebar sampai ke wilayah Pasir, Bulungan dan Gunung Tabur (Tirtosudarmo, 2000). Setelah abad ke-18 orang Bugis bahkan sudah mulai bermukim di negara bagian Sabah di Malaysia yang secara geografis mempunyai kedekatan wilayah dengan Pulau Sebatik.

Kedatangan orang Bugis di Pulau Sebatik dimulai sejak tahun 1967, setelah konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia yang terjadi pada tahun 1965 berakhir. Saat itu Sebatik dihuni oleh penduduk asli, suku Tidung, yang menempati bagian barat pulau tersebut, sedangkan bagian timur masih belum berpenghuni. Dua tahun setelah konfrontasi berakhir, pulau ini masih dijaga oleh tentara dan tidak dapat dimasuki tanpa izin mereka. Pada bulan November 1967, H. Bedu Rahim⁷ yang sebelumnya tinggal di Tarakan datang ke Pulau Sebatik dan meminta izin untuk memasuki Pulau Sebatik dan membuka lahan di sana (wawancara dengan Kepala Desa Sungai Pancang pada bulan Mei 2006).

Setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang, bersama dengan dua orang lainnya (H. Alwi dan H. Daru), H. Bedu Rahim mulai membuka lahan dan membangun perkampungan di Pulau Sebatik, tepatnya di Desa Sungai Pancang sekarang. Karena menjadi areal perperangan dengan Malaysia, masih banyak ditemukan ranjau, peluru dan peralatan perang lainnya di daerah tersebut. Setelah berhasil membuka lahan dan ketiga

⁷ H. Bedu Rahim dianggap sebagai perintis terbukanya Desa Sungai Pancang. Namanya dipakai menjadi nama jalan dan nama salah satu dusun di desa ini, yaitu jalan Bedu Rahim dan dusun Bedu Rahim. Saat penelitian berlangsung dua orang anaknya menjabat sebagai kepala desa, yaitu di Sungai Pancang dan Aji Kuning.

perintis menemukan bahwa lahan di Pulau Sebatik sangat menjanjikan serta dapat dijadikan sebagai tumpuan hidup, mereka mengajak keluarga yang tinggal di Pulau Sulawesi dan di Samarinda untuk pindah ke lokasi yang baru. Mereka yang baru datang diberi kewajiban untuk membuka lahan seluas 25 depa kali 150 depa selama 6 bulan. Jika mereka gagal melakukannya dalam waktu yang telah ditentukan, maka lahan tersebut akan diberikan kepada orang lain yang akan meneruskan pembukaannya. Selama membuka lahan, separuh biaya hidup mereka ditanggung oleh H. Bedu Rahim dengan catatan akan dikembalikan secara mencil setelah lahan yang dibuka menghasilkan. Pada tahun 1973 diangkat kepala kampung pertama, yaitu H. Muhammad Asabela.

Sesuai dengan perjalanan waktu, semakin banyak pendatang asal Sulawesi Selatan, terutama dari Bone, masuk ke Pulau Sebatik. Tidak hanya ke Desa Sungai Pancang, mereka juga memasuki wilayah Pulau Sebatik lainnya, bahkan juga daerah-daerah yang sebelumnya dihuni oleh penduduk asli. Kedatangan mereka biasanya karena ajakan saudara/kerabat yang sudah lebih dahulu tinggal di Sebatik. Pengalaman keberhasilan pendahulu dalam mengolah lahan serta mendapatkan penghasilan yang lebih baik daripada di daerah asal menjadi daya tarik ke pulau ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pendatang asal Sulawesi Selatan tersebar di hampir seluruh Pulau Sebatik, bahkan mendominasi penduduk di beberapa desa seperti Sungai Nyamuk, Sungai Pancang dan Aji Kuning. Saat ini hanya Desa Liang Bunyu yang masih didominasi oleh warga suku Tidung.

Pada awalnya, pendatang Bugis bekerja sebagai petani dan nelayan. Mereka mengusahakan tanaman pangan dan menangkap ikan menggunakan kelong (sejenis pukat). Selanjutnya, pada tahun 1975 mulai diperkenalkan usaha perkebunan coklat, oleh penduduk yang pernah tinggal di Tawau dan pada tahun 1980 Dinas Perkebunan mulai melakukan penyuluhan tentang pengembangan jenis komoditas tersebut. Setelah usaha perkebunan coklat bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar, kegiatan ini kemudian ditekuni oleh pendatang Bugis. Saat ini bahkan mereka lebih dikenal sebagai petani pekebun karena usaha inilah yang dominan dilakukan.

Sejalan dengan perkembangan daerah Sebatik, sektor ekonomi lainnya juga mulai berkembang. Keadaan ini mengundang semakin banyak pendatang untuk masuk ke pulau tersebut, bahkan tidak hanya dari Sulawesi Selatan karena penduduk dari daerah-daerah lain di Pulau Sulawesi dan juga dari Pulau Jawa datang ke Sebatik untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sebagian diantaranya berdagang dengan membuka toko kelontong, sementara yang lain membuka restoran dan warung makan. Supermarket dan tempat hiburan seperti karaoke juga dibuka oleh pendatang asal Pulau Jawa, sehingga roda perekonomian Pulau Sebatik semakin bergerak. Bagi mereka

yang datang tanpa memiliki modal, bekerja di perkebunan menjadi salah satu pilihan. Kelompok ini⁸ biasanya menggarap lahan milik orang lain, baik dengan sistem bagi hasil maupun diupah⁹. Pendatang tanpa modal yang tidak ingin bekerja sebagai petani atau pekebun biasanya bekerja sebagai penarik ojeg atau sopir angkutan umum, termasuk *speedboat* atau perahu yang melayani rute Sebatik-Tawau.

Pendatang yang masuk ke Pulau Sebatik tidak hanya mereka yang berasal dari dalam negeri, melainkan juga warga negara Indonesia yang pindah dari Tawau. Seorang narasumber yang diwawancara di Desa Aji Kuning mengemukakan bahwa rata-rata kepala keluarga di desa tersebut pernah tinggal di Tawau. Pada umumnya mereka adalah mantan TKI yang kemudian berkeinginan menetap di Indonesia tetapi tidak bersedia kembali ke daerah asal. Sebagian bahkan membangun perkampungan sendiri seperti yang dilakukan oleh mantan TKI keturunan Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang bermukim di Lordes, Desa Aji Kuning, pasca pengusiran TKI secara besar-besaran pada tahun 2002 (wawancara dengan Camat Sebatik bulan Mei 2006). Ketidaknyamanan bekerja dan hidup di negara tetangga membuat mereka kembali ke tanah air. Dengan izin pemerintah Sebatik mantan TKI asal Propinsi NTT ini membuka kebun dan bekerja sebagai petani. Sebagian eks TKI yang mempunyai uang, yang dikumpulkan dari upah selama bekerja di Tawau, membeli rumah serta lahan kebun di Pulau Sebatik. Selanjutnya mereka menetap di pulau ini dan bekerja sebagai petani pekebun. Pendatang asal Tawau yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli rumah dan lahan kebun, biasanya menyewa rumah atau tinggal menumpang di rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya merantau dan bekerja sebagai tenaga penggarap di kebun kakao. Pada beberapa kasus, mereka yang datang dari Tawau ini hanya terdiri dari istri dan anak-anak, sementara kepala keluarga tetap tinggal di Tawau untuk bekerja. Pilihan ini dilakukan karena semakin sulitnya untuk bertahan tinggal di negara tetangga tersebut.

⁸ Jika pada awalnya lahan dibagi-bagikan kepada mereka yang sanggup membukanya, sejak akhir tahun 1980-an tidak ada lagi pembagian lahan. Pendatang yang ingin membeli lahan harus membeli, misalnya pada tahun 1986 harga satu bagian (seluas 2 ha) lahan kosong adalah 750 ringgit.

⁹ Perhitungan bagi hasil yang berlaku adalah 1:1 jika pemilik lahan tidak mengeluarkan modal untuk pemeliharaan kebun dan 2:1 untuk pemilik lahan dan penggarap jika biaya perawatan dikeluarkan oleh pemilik lahan. Bagi mereka yang bekerja dengan sistem gaji, upah yang diperoleh berkisar antara 7-10 ringgi per hari (210-300 ringgit sebulan).

Toko bangunan hasil kerja buruh perkebunan kelapa sawit di Sabah.

Bapak Muin (bukan nama sebenarnya), keturunan Bugis, memiliki toko bahan bangunan yang terletak di pinggir jalan antara Sungai Nyamuk dengan Desa Sungai Pancang. Usaha ini telah dijalankannya hampir lima tahun dengan modal upahnya bekerja sebagai buruh kelapa sawit selama lebih dari 12 tahun di Sabah. Toko tersebut dimulainya dari skala kecil dan kemudian berkembang menjadi besar karena tingginya permintaan terhadap bahan bangunan. Selain punya toko, dia juga memiliki kebun coklat seluas 2 ha yang diperoleh dengan cara membeli. Semua ini memang sudah direncanakannya sejak lama, dimulai dengan kepergian ke Sabah pada umur yang sangat muda untuk mengumpulkan modal usaha. Setelah uang terkumpul Pak Muin tidak berniat kembali ke daerah asalnya, melainkan memilih Pulau Sebatik sebagai tempat tinggalnya bersama keluarga.

Pada waktu mendatang diperkirakan pendatang ke Pulau Sebatik akan semakin banyak, terutama jika kebijakan pemerintah untuk ‘menarik’ pulang warga negara Indonesia yang tinggal di Sabah berhasil diimplementasikan. Pemerintah pusat merencanakan pembangunan rumah susun di Pulau Sebatik dan juga di Nunukan yang diperuntukkan bagi TKI dan keluarganya. Melalui kebijakan ini TKI dan keluarganya yang saat ini tinggal di Malaysia dengan segala keterbatasan akses, termasuk pendidikan untuk anak-anak mereka, didorong untuk kembali ke Indonesia dan menetap di Pulau Sebatik atau Nunukan. Artinya, mereka tetap tinggal di wilayah Indonesia dan setiap hari pergi bekerja ke Malaysia. Kebijakan ini diambil karena anak-anak TKI tidak bisa bersekolah selama mereka tinggal di negara tetangga tersebut. Saat ini terdapat lebih dari 3.000 orang anak usia sekolah yang tidak dapat bersekolah karena kebijakan pemerintah Malaysia tidak mengizinkan sekolah-sekolah umum untuk menerima anak-anak TKI menjadi murid mereka (wawancara dengan narasumber dari Bappeda Kaltim, Ketua Bappeda Kabupaten Nunukan dan Camat Sebatik, Mei 2006). Tinggal di rumah susun di wilayah Indonesia memungkinkan anak-anak TKI untuk bersekolah di dalam negeri, sementara orang tua mereka juga masih bisa bekerja ke Malaysia. Dengan demikian, pendidikan anak-anak TKI tidak akan terabaikan seperti yang menjadi fenomena saat ini.

Pelaku dan Pola Mobilitas Penduduk Sebatik-Tawau

Mobilitas penduduk dari Pulau Sebatik menuju Tawau dilakukan oleh penduduk dari berbagai kalangan. Tidak hanya orang dewasa, anak-anakpun sering bepergian ke kota di negara bagian Sabah, Malaysia, itu. Penelitian mengenai penduduk dan kemiskinan di daerah perbatasan

Kalimantan Timur, khususnya Pulau Sebatik, yang dilakukan oleh PPK-LIPI pada tahun 2006 menemukan bahwa sekitar 20 persen dari 1.008 responden yang berasal dari 200 rumah tangga di Desa Pancang, Kecamatan Sebatik pernah melakukan mobilitas ke Kota Tawau. Pelaku mobilitas tersebut lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan (lihat Tabel 1). Fenomena ini tidak berbeda dengan kecenderungan migrasi penduduk pada umumnya, baik migrasi permanen maupun temporer. Studi yang dilakukan oleh PPK-LIPI pada tahun 2003 dan 2004 dengan fokus pada migran temporer menemukan bahwa jumlah laki-laki yang berstatus migran lebih banyak dibandingkan dengan perempuan (Romdiati, dkk., 2004).

Tabel 1.
Penduduk yang Pernah Melakukan Mobilitas ke Tawau,
Menurut Jenis Kelamin, Desa Pancang, Kecamatan Sebatik

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	117	59,4
Perempuan	80	40,6
Jumlah	197	100,0

Sumber: Survei Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan di Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, PPK-LIPI, 2006

Tabel 2 menyajikan data mengenai umur responden ketika pertama kali melakukan mobilitas lintas batas negara dari pulau Sebatik ke Kota Tawau. Dari tabel tersebut terlihat bahwa sekitar seperlima dari mereka melakukan mobilitas pada usia muda, yaitu di bawah 15 tahun. Anak-anak usia muda yang melakukan mobilitas ini adalah mereka yang ikut dengan orang tua mereka untuk berbagai keperluan, misalnya mengunjungi keluarga yang tinggal di Malaysia dan menjadi warga negara tersebut atau untuk berbelanja, sebagaimana dikemukakan oleh seorang narasumber yang telah melakukan kegiatan mobilitas sejak usia muda,

Orang sini banyak yang punya keluarga di seberang (*maksudnya di Tawau*). Kalau ke Tawau mengunjungi keluarga yang di sana, anak-anak juga dibawa. Kalau menjelang hari raya orang-orang sini belanja di Tawau, beli macam-macam keperluan, baju lebaran, anak-anak juga diajak ke sana belanja. Buat orang sini itu pergi ke luar negeri sudah biasa.

Meskipun mobilitas ke Tawau dilakukan oleh semua golongan umur, lebih dari separuh responden melakukan kegiatan ini pertama kali pada umur muda (15-29 tahun), sebagaimana terlihat dari data pada Tabel 2.

Kemungkinan besar kelompok ini adalah mereka yang pergi ke kota tersebut untuk mencari pekerjaan. Kesempatan kerja yang terbuka luas di negara bagian Sabah tersebut, terutama sebagai buruh di perkebunan sawit, meskipun dengan status *illegal*, menarik anak-anak muda di Pulau Sebatik untuk melakukan mobilitas ke daerah ini. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, melainkan juga oleh kelompok perempuan dengan proporsi yang lebih kecil. Tidak jarang pula diantara mereka yang bekerja dengan saudara/keluarga yang sudah menjadi warga negara Malaysia (hasil wawancara mendalam dengan narasumber yang bekerja menjadi pegawai pemerintah).

Tabel 2.
Distribusi Penduduk yang Pernah Melakukan Mobilitas ke Tawau
Menurut Umur Pertama Kali Melakukan Mobilitas dan Jenis
Kelamin, Desa Pancang, Kecamatan Sebatik (%).

Umur Pertama Kali Melakukan Mobilitas (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
≤ 15	18,8	23,8	20,8
15 – 29	62,4	53,8	58,9
30 – 39	11,1	13,7	12,2
40 – 49	5,1	7,5	6,1
≥ 50	2,6	1,2	2,0
Jumlah N	100,0 117	100,0 80	100,0 197

Sumber: Survei Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan di Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, PPK-LIPI, 2006

Mobilitas penduduk dari Sebatik menuju Tawau meliputi beberapa pola. Pola pertama dan yang paling dominan adalah mobilitas pulang pergi dalam satu hari yang sama. Data pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa pola ini mendominasi mobilitas penduduk dari Pulau Sebatik ke Kota Tawau. Pelaku mobilitas dengan pola ini pada umumnya adalah pedagang, baik pedagang pengumpul yang menjual produksi pertanian dan perkebunan Pulau Sebatik, antara lain pisang dan kakao maupun pedagang pemilik toko di Pulau Sebatik yang membeli barang-barang dagangan di Tawau. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, berbagai jenis barang dagangan yang dijual di toko-toko di Sebatik, mulai dari makanan dan minuman kaleng, barang-

barang keperluan rumah tangga lainnya sampai dengan pupuk¹⁰, dan gas adalah barang-barang produksi Malaysia. Sebagian pedagang bahkan juga membeli bahan bakar bensin di Tawau untuk dijual secara eceran di Sebatik.¹¹

Pedagang pengumpul dan pemilik toko biasanya melakukan perjalanan dari Sebatik pada pagi hari. Oleh karena itu, sejak pagi aktivitas pemuatan hasil pertanian (seperti pisang) ke perahu-perahu pengangkut sudah mulai berlangsung di dermaga (Damiyati, 2005). Sore hari mereka yang melakukan kegiatan tersebut sudah kembali lagi ke daerah asal.¹² Terkait dengan persyaratan imigrasi, mereka biasanya mengurus izin perjalanan/izin masuk ke Malaysia untuk jangka waktu satu minggu. Biasanya sore sebelum hari keberangkatan mereka sudah mengurus izin (penduduk setempat menggunakan istilah “*minta chop*”), agar besok harinya bisa langsung berangkat pada pagi hari tanpa harus menghabiskan waktu untuk mengurus izin perjalanan (wawancara dengan seorang pedagang yang juga pemilik perahu penumpang yang melayani rute Sebatik-Tawau). Mereka yang melakukan mobilitas secara rutin ini, akan memperpanjang izin masuk setiap kali masa berlaku izin mereka habis.

Selain kelompok penduduk di atas, terdapat pula kelompok lainnya yang juga melakukan mobilitas dengan pola ulang alik ini. Mereka adalah penduduk yang berbelanja barang-barang keperluan rumah tangga, seperti barang-barang elektronik di Tawau. Namun demikian, proporsinya tidak sebesar pedagang yang melakukan kegiatan ini dengan rutin. Pengemudi

¹⁰ Jika dilihat dari sisi harga, pupuk produksi Malaysia lebih mahal dibandingkan dengan pupuk produksi dalam negeri. Namun demikian, karena keterbatasan pasokannya di daerah Sebatik penduduk daerah ini terpaksa membeli pupuk Malaysia.

¹¹ Menurut informasi yang diperoleh dari beberapa narasumber, bensin produksi Malaysia lebih bagus kualitasnya daripada bensin dari Indonesia. Seorang narasumber mengatakan bahwa mesin sepeda motornya sering bermasalah jika menggunakan bensin dari Indonesia. Namun masalah tersebut tidak terjadi jika motornya diisi dengan bensin dari Malaysia. Narasumber menduga bensin Indonesia dicampur dengan bahan-bahan lain. Anggapan ini belum dapat dibuktikan kebenarannya karena belum ada penelitian mengenai hal tersebut.

¹² Kegiatan pembongkaran barang-barang dari perahu di pinggir sungai yang sekaligus berfungsi sebagai dermaga perahu jalur Sebatik-Tawau di Desa Pancang merupakan pemandangan yang lazim setiap hari. Perahu-perahu pembawa muatan barang biasanya datang sore hari, sekitar pukul empat. Dari pengamatan di lapangan terlihat bahwa barang-barang yang dibongkar sangat beragam jenisnya. Minuman kaleng, coklat bubuk, minyak goreng, sayap ayam olahan terlihat bertumpuk di pinggir sungai. Selain itu, juga ditemukan galon plastik berisi bahan bakar bensin, gas untuk memasak dan pupuk yang merupakan barang belanjaan penumpang perahu.

speedboat dan perahu penumpang jurusan Sebatik-Tawau juga termasuk dalam kelompok ini. Pekerjaan yang dilakukan menuntut mereka untuk melakukan aktivitas ini setiap hari, bahkan tidak jarang pula yang melakukannya lebih dari satu kali dalam sehari. Kelompok penduduk lainnya yang menjadi pelaku mobilitas ulang alik adalah nelayan. Mereka melakukan aktivitas ini untuk menjual hasil tangkapan kepada tauke/bos di Tawau. Ketergantungan yang sangat tinggi pada tauke di Tawau, terutama dalam penyediaan kebutuhan untuk melaut seperti mesin kapal, jaring, *cool box* dan juga es batu untuk menyimpan ikan menyebabkan nelayan harus menjual hasil tangkapan kepada tauke yang telah memenuhi kebutuhan mereka (Raharto & Djohan, 1999). Petikan wawancara dengan seorang narasumber (pegawai pemerintah) yang diwawancarai dalam survei penduduk dan kemiskinan di daerah perbatasan pada bulan Mei 2006 berikut ini memperlihatkan fenomena ketergantungan nelayan Sebatik terhadap pengusaha ikan di Tawau.

T : Selama ini nelayan kita kan tergantung tauke-tauke ...

J : Sebelah, iya. Hasil ikan di sini kan dijual ke Tawau. Jadi tergantung dengan tauke di sebelah, begitu. Harga juga tergantung di sana pak. Misalnya satu kilo berapa ringgit nggak kita tolak, kita juga sudah punya hutang ke sana.

T : Ya, nelayan itu berutang dulu mereka

J : Iya, rata-rata utang pak. Mesin kapal itu pak, rata-rata minjam semua, mahal itu. Jadi mereka cicil sama taukenya, ngambil-ngambil cicil, ikan kasih ke dia, harga tergantung pasaran di sana. Alhamdulillah kalau naik, naik, kalau ndak ya, apa boleh buat daripada nggak laku.

Pola kedua, adalah mobilitas temporer dengan periode waktu sebulan. Mereka yang bertujuan mencari pekerjaan namun tidak bersedia mengurus izin kerja resmi sebagai TKI biasanya melakukan mobilitas dengan pola ini. Keberangkatan ke Tawau dilakukan dengan menggunakan izin kunjungan selama satu bulan, namun di sana mereka kemudian bekerja secara *illegal*. Pada umumnya pekerjaan diperoleh melalui keluarga yang telah tinggal di sana. Setiap satu bulan para TKI *illegal* ini pulang ke Sebatik untuk memperpanjang izin tinggal mereka di Malaysia karena setiap kali perpanjangan mereka mendapat izin tinggal selama satu bulan. Hal ini memaksa TKI *illegal* melakukan mobilitas ulang-alik dalam waktu satu bulan.

Tabel 3
Distribusi Penduduk yang Pernah Melakukan Mobilitas ke Tawau
Menurut Lama Tinggal di Daerah Tujuan, Desa Pancang,
Kecamatan Sebatik (%)

Lama Tinggal di Daerah Tujuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Tidak pernah tinggal/pulang pergi pada hari yang sama (ulang-alik)	57,4	67,5	61,4
Beberapa hari dan berulang-ulang (sirkuler/musiman)	21,3	20,0	20,8
> 6 bulan	21,3	12,5	17,8
Jumlah	100,0 117	100,0 80	100,0 197

Sumber: Survei Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan di Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, PPK-LIPI, 2006

Mobilitas Penduduk Sebatik-Tawau: berbagai alasan yang mendasarinya

Seperti halnya kegiatan mobilitas pada umumnya, mobilitas penduduk antara dua daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia ini dilandasi oleh berbagai tujuan. Jika alasan ekonomi menjadi faktor dominan yang menyebabkan penduduk melakukan mobilitas, di daerah perbatasan beberapa faktor lainnya juga memegang peranan penting. Mengunjungi keluarga yang tinggal di negara tetangga merupakan salah satu dari alasan tersebut. Adanya hubungan kekerabatan dengan penduduk di negara tetangga menyebabkan penduduk yang tinggal di derah perbatasan melakukan mobilitas melewati batas negara (Haba, 2002). Penentuan batas teritorial negara secara politis telah memisahkan penduduk suatu etnis yang sebelumnya hidup bersama menjadi warga dua negara yang berbeda. Kenyataan ini tidak serta merta memutuskan hubungan kekerabatan diantara mereka.

Mobilitas penduduk Pulau Sebatik ke Tawau didominasi oleh tujuan berbelanja kebutuhan sehari-hari (Tabel 4). Pada kelompok perempuan, terutama, hampir separuh dari mereka melakukan mobilitas dengan tujuan berbelanja. Hal ini dilakukan karena biaya yang dibutuhkan relatif lebih murah jika dibandingkan dengan berbelanja ke Tarakan. Selain itu, adanya keyakinan bahwa barang-barang buatan Malaysia lebih baik kualitasnya daripada produksi Indonesia, menyebabkan sebagian penduduk Pulau Sebatik lebih memilih berbelanja di Tawau daripada di kota-kota dalam wilayah Kalimantan Timur. Pernyataan narasumber berikut ini memperkuat argumen tersebut,

Kalau saya lihat di sana, kebutuhannya itu pak, lebih daripada di sini. Misalnya pertama dari segi kualitas produk itu, kayak melamin itu lebih bagus di sebelah daripada di sini, termasuk hal-hal lain sebagainya. Mereka punya kualitas lebih daripada di sini, walaupun dia harga lebih mahal sedikit daripada sini, termasuk barang elektronik. Rata-rata juga elektronik dari sebelah semua, terus mereka garansinya itu betul-betul bu. Kalau misalnya kita kan *handphone* jatuh, garansi ya lepas. Kalau di sana garansi tetap garansi, ndak bayar. Kalau mungkin di Indonesia bayar itu, namanya ya garansi tapi tetap bayar itu barang-barang yang rusaknya. Itu pak kelebihan mereka. Mungkin karena di sana saingannya lebih.

Alasan keluarga juga menjadi penyebab yang dominan terjadinya mobilitas penduduk Sebatik-Tawau, meskipun bukan yang paling utama. Sebagaimana telah disebutkan di bagian sebelumnya, warga keturunan Bugis telah bertempat tinggal di Sabah sejak waktu lama. Sebagian diantara mereka mempunyai hubungan keluarga dengan warga keturunan Bugis yang tinggal di Sebatik. Seperti lazimnya orang-orang yang berhubungan keluarga, warga Sebatik keturunan Bugis sering mengunjungi keluarga mereka yang tinggal di daerah lain, termasuk juga di Sabah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika cukup banyak mobilitas penduduk yang dilakukan dengan alasan ini, karena sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang narasumber, "*hampir semua penduduk sini punya saudara yang tinggal di Tawau*".

Tabel 4
**Distribusi Penduduk yang Pernah Melakukan Mobilitas ke Tawau,
Menurut Alasan Kepergian, Desa Pancang, Kecamatan Sebatik (%)**

Alasan Kepergian	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Berdagang	8,5	5,0	7,1
Buruh (kebun, kayu, kapal, dll.)	17,1	7,5	13,2
Mencari ikan	2,6	-	1,5
Mencari pekerjaan	12,0	5,0	9,1
Sekolah	-	1,2	0,5
Berobat	7,7	7,5	7,6
Berbelanja kebutuhan sehari-hari	26,5	45,0	34,1
Alasan keluarga	15,4	26,3	19,8
Lainnya	10,2	2,5	7,1
Jumlah	100,0	100,0	100,0
N	117	80	197

Sumber: Survei Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan di Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, PPK-LIPI, 2006

Disamping dua alasan yang telah dikemukakan di atas, bekerja dan mencari pekerjaan juga menjadi tujuan sebagian penduduk Sebatik untuk melakukan mobilitas ke Tawau dan negara bagian Sabah pada umumnya. Alasan ini lebih banyak ditemukan pada kelompok laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Ketersediaan kesempatan kerja yang luas, terutama di sektor perkebunan, ditambah dengan persyaratan yang sangat longgar untuk memperolehnya, misalnya tidak diperlukan pendidikan tinggi, merupakan daya tarik bagi penduduk Sebatik untuk bekerja di negara bagian Malaysia tersebut. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, kebanyakan mereka pergi bekerja secara *illegal*, dalam arti tidak mempunyai dokumen resmi sebagai TKI. Pas lintas batas yang dimiliki digunakan sebagai dokumen untuk masuk ke wilayah Malaysia dan selanjutnya mereka bekerja di sana, sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang narasumber berikut ini,

- T : Kalau yang pergi kerja ke sebelah itu pak, banyak juga?
- J : Ada juga yang pergi ke sebelah. Kerja di sini mungkin dia ke sebelah, kerja jadi TKI *illegal*.
- T : TKI *illegal* ya.
- J : Kalau *legal* kan pakai *job order*. Ini kan mungkin mereka jalan-jalan, ada keluarganya, diajak kerja ya dia ikut. Dipikir daripada nganggur juga kan, ya ikutlah. Mungkin dia *chop* satu bulan, habis, balik lagi, *chop* lagi balik ke sana lagi, begitu.
- T : Dia pakai PLB-nya itu ya.
- J : PLB juga, paspor juga bisa.
- T : Kalau yang dari sini katanya ...
- J : PLB aja bu. Di Nunukan paspor bisa. Sebenarnya berawal dari situ. Ada keluarga, "Kau tak kerjakah?" "Belum".

Meskipun tidak terlalu besar persentasenya dibandingkan dengan alasan yang lain, mencari pengobatan menjadi salah satu tujuan mobilitas penduduk Sebatik menuju Tawau. Kegiatan ini dilakukan jika penyakit yang diderita tidak bisa disembuhkan melalui pengobatan di puskesmas-puskesmas yang ada di Pulau Sebatik. Namun demikian, bagi sebagian penduduk lainnya keyakinan bahwa pengobatan di Tawau lebih baik dibandingkan dengan di Nunukan atau Tarakan menyebabkan mereka selalu berobat ke kota tersebut.

Pengobatan dilakukan di klinik-klinik swasta, bukan di rumah sakit pemerintah karena rumah sakit ini hanya diizinkan memberikan pelayanan kesehatan kepada warga negara Malaysia. Tidak hanya pengobatan yang bersifat rawat jalan, pengobatan rawat inap pun dilakukan di klinik-klinik tersebut. Biaya yang dikenakan berjumlah sekitar 15 RM untuk sekali pengobatan rawat jalan, sedangkan untuk rawat inap berkisar antara 50-100 RM per hari (wawancara dengan narasumber, wiraswasta muda di Desa Sungai Pancang).

Selain untuk pengobatan, pelayanan kesehatan lain yang dicari di negara bagian Malaysia ini adalah pemeriksaan kehamilan serta pelayanan persalinan. Beberapa faktor menyebabkan fenomena ini. *Pertama*, biaya yang diperlukan relatif lebih murah dibandingkan dengan di Tarakan, khususnya jika proses kelahiran membutuhkan tindakan operasi. Salah seorang narasumber mengemukakan bahwa biaya yang diperlukan untuk kelahiran anaknya melalui operasi caesar di Tawau hanya sebesar 2.500 RM (sekitar Rp. 625.000,- dengan kurs 1 RM = Rp. 2.500,-), sementara pada waktu yang hampir bersamaan saudaranya melahirkan melalui proses yang sama di Tarakan dengan biaya sekitar Rp. 5.000.000,-. Disamping itu, biaya melahirkan dapat dibayar tidak secara tunai, sebagaimana dikemukakan oleh narasumber berikut,

Waktu kelahiran anak kedua saya, istri saya sakit tengah malam. Saya langsung bawa ke Tawau, karena terburu-buru saya nggak bawa uang banyak. Setelah istri saya melahirkan dan waktu mau membayar, saya katakan "saya nggak bawa uang cukup, boleh saya bayar nanti?". Petugasnya menjawab, "siapa bilang tak boleh?". Saya kaget juga, nggak ngira kan. Akhirnya saya pulang dan baru bayar setelah dua bulan karena saya baru ke sana lagi setelah dua bulan".

Kedua, anak-anak kelahiran Malaysia akan mendapat kemudahan untuk tinggal di Malaysia di kemudian hari karena mereka mempunyai surat kelahiran dari negara tersebut yang dapat digunakan untuk mengurus IC (*identity card*) sebagai penduduk Malaysia. Hal ini menyebabkan banyak orang tua termotivasi untuk melahirkan anak-anak mereka di Tawau. Oleh karena itu, alasan yang dikemukakan oleh seorang narasumber berikut, "*melahirkan di Malaysia itu yang dicari surat kelahirannya*", mudah dipahami untuk menjelaskan kuatnya keinginan untuk melahirkan di Tawau.

Dinamika Mobilitas Sebatik-Tawau

Sejalan dengan perkembangan waktu dan terjadinya perubahan di berbagai bidang, seperti ekonomi dan politik, terjadi pula dinamika dalam fenomena mobilitas penduduk dari Sebatik ke Tawau. Dinamika ini terjadi tidak hanya karena perubahan kondisi di Malaysia, akan tetapi juga akibat berbagai perkembangan di dalam negeri. Bagian ini mendiskusikan dinamika mobilitas penduduk di daerah perbatasan Sebatik dan Tawau, dengan fokus pada arus mobilitas, tujuan serta proses perjalannya.

Jika dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya, mobilitas penduduk dari Pulau Sebatik menuju Tawau akhir-akhir ini mengalami penurunan. Meskipun tidak diperoleh catatan tertulis mengenai arus

mobilitas penduduk keluar Pulau Sebatik, beberapa narasumber yang diwawancara dalam penelitian di daerah ini menyebutkan bahwa terjadi penurunan frekuensi mobilitas penduduk menuju Tawau. Namun demikian, penurunannya tidak terlalu mencolok. Penurunan yang paling dirasakan adalah pada mobilitas dengan tujuan berbelanja barang-barang keperluan sehari-hari.

Fenomena di atas muncul karena perkembangan yang terjadi di Pulau Sebatik. Dalam satu dekade terakhir terlihat perkembangan kegiatan ekonomi yang cukup pesat di wilayah Pulau Sebatik. Toko-toko besar yang menjual berbagai barang keperluan sehari-hari, termasuk barang-barang dari Malaysia mulai beroperasi setelah pembangunan kompleks pertokoan di daerah Kebalen (Desa Sungai Nyamuk). Supermarket pun telah berdiri di daerah tersebut dan menjalankan kegiatannya menyediakan kebutuhan penduduk terhadap berbagai jenis barang. Harga barang-barang yang tidak berbeda jauh dengan di Malaysia menyebabkan sebagian penduduk yang biasa berbelanja di Tawau kemudian melakukan kegiatan tersebut di pertokoan di Pulau Sebatik. Selanjutnya, sejak dibangun dan berlangsungnya kegiatan pasar di wilayah Aji Kuning, mobilitas penduduk, terutama yang tinggal di daerah ini untuk berbelanja keperluan sehari-hari ke Tawau menjadi berkurang frekuensinya. Kecuali barang-barang elektronik, berbagai keperluan rumah tangga lainnya dapat dipenuhi dengan berbelanja di pasar Aji Kuning. Jika sebelum pasar ini beroperasi masyarakat terbiasa berbelanja ke Tawau, saat ini hanya pedagang (besar) yang secara rutin melakukan kegiatan ini untuk membeli barang-barang yang akan dijual di toko mereka. Pedagang kecil (dengan skala warung di rumah) pun mulai mengurangi mobilitas ke Tawau sejak berdirinya toko-toko besar di Sungai Nyamuk serta pasar di Aji Kuning.¹³ Namun demikian, intensitas mereka yang pergi ke Tawau untuk berbelanja mengalami peningkatan menjelang hari raya Idul Fitri karena berbagai keperluan untuk merayakan hari besar itu, terutama pakaian, dibeli di wilayah negara tetangga tersebut.

Penurunan arus mobilitas ini juga dijumpai pada penduduk yang menjual hasil produksi mereka ke Tawau. Pedagang pengumpul menjadi kepanjangan tangan mereka untuk menjual barang-barang produksi ke negara tetangga ini. Jika sebelumnya hasil produksi dibawa sendiri untuk dijual di

¹³ Salah seorang narasumber, pemilik warung yang tinggal di daerah pedalaman Sungai Pancang (Dusun Lapri) mengemukakan bahwa sebelum ada pasar di Aji Kuning barang-barang yang dijual di warungnya dibeli di Tawau. Setelah pasar Aji Kuning beroperasi, barang-barang dagangan dibeli di pasar tersebut. Meskipun dengan harga beli yang sedikit lebih mahal, yang pada gilirannya mengurangi keuntungan karena harga jual yang diberlakukan sama dengan sebelumnya, narasumber lebih memilih berbelanja di pasar lokal karena lebih dekat dan menghemat waktu perjalanan.

sana, maka dengan keberadaan pedagang pengumpul kegiatan tersebut tidak perlu dilakukan sendiri. Hasil produksi yang akan dipasarkan di Tawau dijual kepada pedagang pengumpul di Sebatik.¹⁴

Perubahan yang terjadi pada fenomena mobilitas ini adalah berkurangnya kegiatan penyelundupan rokok.¹⁵ Jika sebelumnya 'pedagang' dari Sebatik dapat membawa rokok dengan relatif mudah memasuki wilayah Tawau, akhir-akhir ini kegiatan tersebut sulit dilakukan. Petugas di Malaysia melakukan pemeriksaan lebih ketat terhadap pendatang dari Sebatik. Sebagai contoh, perempuan-perempuan berbaju panjang sekarang diperiksa badannya untuk menghindari penyelundupan rokok.¹⁶

Perubahan lain dalam kegiatan/proses mobilitas penduduk Sebatik-Tawau adalah semakin ketatnya pengawasan, terutama yang terkait dengan persyaratan keimigrasian. Pemeriksaan dokumen keimigrasian oleh petugas patroli di perbatasan Malaysia semakin ketat, sejalan dengan semakin banyaknya pos-pos pemeriksaan di laut. Seorang narasumber yang diwawancara di Desa Sungai Pancang mengatakan bahwa sebelum dan sampai dengan awal tahun 1980-an tidak diperlukan surat-surat (paspor, pas lintas batas) untuk masuk ke Malaysia. Penduduk Sebatik dengan mudah dapat memasuki negara Malaysia tanpa direpotkan dengan urusan dokumen keimigrasian.¹⁷ Namun demikian, ketatnya pengawasan ini tidak menyurutkan minat penduduk Pulau Sebatik untuk melakukan mobilitas ke Malaysia dengan berbagai tujuan.

Terlepas dari berbagai dinamika yang terjadi, mobilitas penduduk dari Pulau Sebatik ke Kota Tawau tetap berlangsung sepanjang waktu.

¹⁴ Di perkampungan penduduk biasa dijumpai tumpukan pisang yang diletakkan di halaman depan rumah. Pisang-pisang tersebut akan diambil oleh pedagang pengumpul yang kemudian membawanya menyeberang ke Tawau.

¹⁵ Rokok termasuk barang yang tidak boleh masuk ke Malaysia, disamping berbagai jenis lainnya seperti batik dan furniture dengan bahan jati (wawancara dengan pejabat pemerintah di Nunukan). Namun demikian, karena bisa memberikan keuntungan dalam jumlah besar, maka banyak warga yang secara sembunyi-sembunyi membawa rokok untuk dijual di Tawau (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/12/Fokus/1614966.htm>).

¹⁶ Seorang narasumber mengatakan bahwa dulu rokok diselundupkan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan oleh perempuan adalah dengan membelitkan rokok pada badan dan kemudian menutupinya dengan pakaian panjang (biasanya baju gamis). Dengan cara ini mereka bebas membawa rokok memasuki wilayah Malaysia.

¹⁷ Sampai dengan tahun 1980-an IC (*identity card* – bukti sebagai penduduk Malaysia) bisa diperoleh dengan mudah oleh penduduk Sebatik. Karena itu, tidak mengherankan jika sebagian penduduk di Sebatik juga mempunyai IC Malaysia, disamping KTP yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Sebatik.

Ketegangan politik antara kedua negara akibat kasus Ambalat bahkan tidak mempengaruhi aktivitas mobilitas penduduk dari wilayah Indonesia ke negara bagian Malaysia itu. Mobilitas tetap dilakukan meskipun dalam pengawasan yang ketat, dengan berbagai perlengkapan perang, oleh aparat keamanan dari kedua negara, sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang narasumber berikut ini,

Kami di sini tidak terpengaruh kasus Ambalat, yang ribut-ribut kan orang-orang di Jakarta sama di tempat lain, di Sulawesi juga. Kalau mau pergi ke Tawau kami tetap pergi aja, ndak apa-apa. Itu juragan (pengemudi) *speedboat* tiap hari tetap mondar-mandir Sebatik-Tawau. Yang mau ada keperluan ke Tawau ya pergi ke sana, ndak masalah.

Penutup

Salah satu proses demografi yang menjadi fenomena keseharian penduduk Pulau Sebatik adalah mobilitas ke Kota Tawau. Bahkan jika dibandingkan dengan daerah lainnya di dalam negeri, mobilitas ke kota di negara bagian Sabah, Malaysia ini lebih sering dilakukan oleh sebagian penduduk. Kedekatan jarak dengan wilayah negara tetangga tersebut yang membawa konsekuensi singkatnya waktu tempuh, didukung oleh akses transportasi yang mudah dengan biaya yang lebih murah menyebabkan sebagian penduduk lebih sering melakukan mobilitas lintas negara dibandingkan dengan ke kota-kota lainnya di Propinsi Kalimantan Timur, seperti Tarakan dan Samarinda.

Ketergantungan yang tinggi, misalnya di bidang ekonomi, pada negara tetangga merupakan faktor dominan yang melatarbelakangi aktivitas mobilitas penduduk ini. Dengan perannya sebagai pasar potensial bagi produk-produk (pertanian, perkebunan serta perikanan) Kalimantan Timur (Achmad, 2003) dan sebaliknya, juga sebagai penyedia berbagai barang keperluan sehari-hari, Kota Tawau menjadi tujuan mobilitas penduduk Pulau Sebatik untuk menjual barang-barang produksi dan berbelanja barang-barang keperluan rumah tangga. Selain itu, ketersediaan kesempatan kerja, meskipun melalui prosedur *illegal*, merupakan daya tarik bagi angkatan kerja dari Pulau Sebatik.

Tidak hanya didorong oleh kepentingan ekonomi, mobilitas penduduk juga terjadi karena tujuan yang lain. Salah satu yang menonjol adalah untuk mengunjungi famili/saudara yang tinggal di Tawau. Migrasi orang Bugis yang telah berlangsung sejak lama ke berbagai daerah dan bahkan sampai ke luar negeri, mengantarkan sebagian dari mereka untuk menjadi warga negara Malaysia. Penduduk Pulau Sebatik yang mempunyai hubungan famili/saudara dengan mereka biasa berkunjung ke Tawau untuk

bersilaturahmi. Meskipun tidak besar frekuensinya, terdapat fenomena mobilitas penduduk ke Tawau atas dorongan untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Kenyataan ini dilandasi oleh beberapa penyebab. Salah satu diantaranya adalah anggapan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas medis di negara tetangga tersebut lebih 'baik' daripada yang didapatkan di Indonesia. Selain itu, untuk beberapa jenis pelayanan tertentu, misalnya persalinan (dengan tenaga medis), biaya yang dibutuhkan relatif lebih murah jika dibandingkan dengan pelayanan yang sama di Tarakan.

Besarnya arus mobilitas penduduk ke Kota Tawau membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di daerah Sebatik. Penggunaan mata uang ringgit Malaysia dalam transaksi jual beli, untuk menyebut salah satu diantaranya, menjadi pemandangan sehari-hari. Harga sebagian barang bahkan ditetapkan dalam mata uang ringgit. Jika pembeli akan membayarnya dengan rupiah, maka barulah nilai tersebut dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs yang berlaku saat itu. Selanjutnya, membanjirnya barang-barang produksi Malaysia di pasar lokal menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan akibat tingginya frekuensi mobilitas penduduk ke negara bagian Malaysia. Mulai dari bahan makanan dan minuman sampai dengan berbagai barang keperluan rumah tangga serta barang-barang elektronika yang digunakan penduduk Sebatik adalah produksi Malaysia. Meskipun dengan harga yang relatif lebih mahal (jika dikonversi ke mata uang rupiah), penghasilan sebagian penduduk (misalnya petani, dan pekebun) yang pada umumnya dalam bentuk ringgit memungkinkan mereka membeli barang-barang dari Malaysia tersebut.

Disadari bahwa mobilitas penduduk Sebatik menuju Tawau tidak mungkin dibendung dan kemungkinan akan berlangsung sepanjang waktu. Selama kota di negara tetangga ini mempunyai keunggulan, misalnya sebagai pasar terdekat untuk menjual barang-barang produksi penduduk, daerah tersebut mempunyai daya tarik yang besar pula bagi masyarakat Pulau Sebatik. Bertolak dari kenyataan tersebut, beberapa upaya perlu dilakukan agar manfaat yang diperoleh dari kegiatan mobilitas penduduk dapat lebih ditingkatkan. *Pertama*, perlu penyediaan teknologi sederhana agar hasil-hasil pertanian dan perkebunan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Untuk komoditas coklat, umpamanya, sangat diperlukan mesin pengering dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat karena selama ini coklat yang dijual ke Tawau dikeringkan menggunakan sinar matahari. Dalam perdagangan coklat, produk yang proses pengeringannya dengan sinar matahari lebih murah harga jualnya daripada coklat yang dikeringkan menggunakan mesin pengering. Hal yang sama juga berlaku pada produk pertanian lainnya seperti pisang yang selama ini dijual dalam bentuk mentah (1 tandan pisang dijual kepada pedagang pengumpul di Tawau dengan harga 3.5 ringgit Malaysia). Agar penduduk Sebatik dapat memperoleh nilai tambah dari penjualannya,

pisang dapat diolah menjadi makanan jadi seperti kripik atau sale pisang, yang dapat dijual dengan harga lebih mahal. *Kedua*, perlu diupayakan bantuan kepada nelayan agar mereka tidak hanya menjual ikan hasil tangkapannya kepada tauke Malaysia yang menentukan harga beli secara sepihak. Ketergantungan nelayan Sebatik kepada tauke di Tawau karena mereka menyediakan semua kebutuhan nelayan serta tidak tersedianya pelabuhan perikanan memaksa mereka untuk menjual hasil tangkapan kepada tauke. Pembangunan pelabuhan perikanan di Sebatik atau di Nunukan, disertai dengan penyediaan bantuan alat-alat produksi, termasuk pengadaan pabrik es, memberikan pilihan pada nelayan untuk menjual ikan hasil tangkapan mereka. Dengan demikian, mereka dapat menjual hasil produksinya pada pihak lain dengan persaingan harga yang lebih sehat.

Daftar Pustaka

- Achmad, Abdul Hafid. 2003. "Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur" dalam Yuyu Suryasari Poerba. *Prosiding Workshop Pembangunan Daerah Perbatasan Republik Indonesia*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Bappeda & BPS Kabupaten Nunukan. 2005. *Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2004*. Bappeda & BPS Kabupaten Nunukan
- BPS Kabupaten Nunukan. 2004. *Kecamatan Sebatik Dalam Angka 2004*. BPS Kabupaten Nunukan.
- Damiyati, Ninik. 2005. *Ringgit pun Runtuhkan Sekat Negara*. Suara Merdeka, Jumat, 18 Maret 2005. <http://www.suaramerdeka.com/harian/0503/18/nas06ham>.
- Dinas Kelautan dan Perikanan. 2004. *Info Pulau-Pulau Kecil: Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan*. <http://www.dkp.go.id/content.php?c=1252>.
- Haba, John, 2000. "Pendahuluan" dalam John Haba, dkk. *Dinamika Sosial Budaya di Daerah Perbatasan Kalimantan, Sarawak dan Sabah*. Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI).
- Harijono, Try. 2004. *Sebatik, Satu Rumah di Dua Negara*. Kompas, Rabu, 3 November 2004. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0411/03/utama/1364367.htm>
- <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/12/Fokus/1614966.htm>. 2006. *Jika Mereka Tergoda untuk Menyeberang* KOMPAS, Sabtu, 12 Maret 2005.
- Probonegoro, Ninuk Kleden & Siburian, Robert. 2000. "Pendahuluan" dalam Abdul Rahman Patji, dkk. *Sarung Samarinda dalam Dinamika Kebudayaan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Raharto, Aswatini (penyunting). 1997/1998. *Mobilitas Penduduk Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur*. Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Raharto, Aswatini & Djohan, Eniarti. 1999. *Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Daerah Perbatasan Kalimantan Timur: Konsep dan Strategi Alternatif Pembangunan*. Seri Penelitian PPT-LIPI No. 36/1999.

- Romdiati, Haning, dkk. 2004. *Migrasi dan Permukiman Kumuh di Kota Surabaya*. Pusat Penelitian Kependudukan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Tirtosudarmo, Riwanto. 2000. “Mobilitas Etnik: Migrasi Sebagai Ekspresi Budaya Orang Bugis-Samarinda” dalam Abdul Rahman Patji, dkk. *Sarung Samarinda dalam Dinamika Kebudayaan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Widyastuti, Ratna Sri. 2004. “Kabupaten Nunukan” dalam Tim Litbang Kompas. *Profil Daerah Kabupaten dan Kota Jilid 4*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

MOBILITAS PENDUDUK SANGIHE

Suko Bandiyono

Pendahuluan

Chapman and Prothero (1984) menulis bahwa manusia secara alamiah selalu melakukan mobilitas yang konstan dalam dimensi waktu dan tempat. Mobilitas yang mereka lakukan menimbulkan arus, baik sifatnya migrasi maupun mobilitas sirkulasi antara daerah asal dan daerah tujuan. Mobilitas penduduk yang terjadi melibatkan kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat maupun perorangan. Berbeda dengan pengertian migrasi yang ditandai dengan perpindahan secara permanen, mobilitas sirkulasi didefinisikan oleh Zelinsky (1971) sebagai "*a great variety of movement, usually short-term, repetitive or cyclic in nature, but all having in common the lack of any declared intention of a permanent or long-lasting change in residence.*" Dengan demikian, mobilitas penduduk adalah gerak geografis penduduk (*population movement*) yang melintasi wilayah tertentu dalam tempo tertentu pula.

Penduduk melakukan mobilitas horizontal secara umum sebagai respons terhadap adanya segugus perbedaan antar daerah di mana mereka tinggal dengan daerah lain yang menjadi tujuan mobilitas. Dalam pandangan tradisional mereka yang melakukan mobilitas karena ter dorong keluar akibat kurangnya kesempatan di tempat mereka tinggal, disamping adanya daya tarik oleh adanya berbagai keuntungan, terutama aspek ekonomi, bila melakukan mobilitas ke daerah tujuan (Lee, 1966). Dalam pendekatan sosiologi, migrasi sangat berhubungan dengan aspek geografis yang menekankan pentingnya faktor jarak serta aspek ekonomi dalam menentukan pentingnya faktor ekonomi sebagai salah satu determinan migrasi (Oberai, 1987: 35-36). Dengan demikian, keinginan untuk memperbaiki kehidupan umumnya telah melatarbelakangi terjadinya mobilitas. Oleh karena penduduk yang melakukan mobilitas mempunyai sifat yang selektif, maka kegiatan mobilitas dengan sendirinya dapat mempengaruhi struktur penduduk dan proses pembangunan. Sebaliknya, kondisi lingkungan daerah asal maupun kondisi daerah tujuan dapat mempengaruhi mobilitas penduduk.

Thesis tersebut di atas masih relevan dalam konteks mobilitas penduduk saat ini, termasuk di daerah perbatasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Daerah tersebut merupakan satu dari dua kabupaten yang berbatasan (*borderland*) dengan negara Filipina, yang secara geografis merupakan wilayah kepulauan. Daerah ini kendati terisolir, namun

telah berfungsi sebagai tempat pertukaran karena merupakan pintu keluar masuk mobilitas, baik orang, barang, maupun ideologi. Daerah ini merupakan “zona rawan” karena berbagai konflik kepentingan seperti keamanan, sosial-kebudayaan, ekonomi dan kependudukan.

Isu tentang mobilitas penduduk daerah perbatasan. telah diikuti munculnya masalah sosial ekonomi yang sifatnya ilegal, tidak hanya terjadi secara internal tetapi juga mobilitas lintas batas negara. Akhir-akhir ini daerah tersebut pernah menjadi lintasan teroris dan perdagangan senjata dari Filipina Selatan. Pada tahun 2001 di perairan laut Tabukan Utara telah ditangkap perahu motor yang membawa puluhan pucuk senjata dan amunisi yang akan diselundupkan ke daerah Galela, Halmahera Utara. Pada saat itu di Halmahera sedang terjadi konflik sosial sehingga kelompok yang bertikai bermaksud mendatangkan senjata dari Filipina Selatan. Di daerah Tabukan Utara aparat keamanan juga menangkap seorang teroris yang bernama Ali Adrian yang merupakan aktor dalam satu peristiwa pengeboman di Palu, Sulawesi Tengah.

Mobilitas penduduk yang sifatnya permanen dari wilayah Sangihe ke daerah Filipina Selatan telah terjadi sejak awal abad ke-20, dan hingga saat ini terus berlangsung mobilitas sirkuler. Demikian pula mobilitas internal telah lama terjadi terutama ke daerah Manado, Bitung, Minahasa dan Maluku Utara. Mobilitas tersebut telah diikuti munculnya masalah sosial ekonomi yang sifatnya ilegal. Meskipun demikian, mobilitas penduduk dapat dilihat sebagai kesempatan untuk pembangunan daerah tersebut. Tulisan ini mencoba melihat pola dan determinan mobilitas penduduk berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh tim peneliti Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI¹⁸ maupun dari data sekunder. Untuk menjelaskan mobilitas penduduk di daerah tersebut dalam artikel ini lebih dahulu dijelaskan latar belakang kondisi lingkungan dan sejarah migrasi dengan menekankan pada data kualitatif daripada data kuantitatif yang terbatas.

Sumber Data dan Metode

Tulisan ini menggunakan dua sumber data yaitu hasil penelitian tim peneliti Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI pada tahun 2006 dan tahun 1994 dan hasil Sensus Penduduk tahun 2000. Meskipun dua penelitian tersebut mempunyai tujuan yang tidak sama namun dari hasil pengumpulan data dan analisis yang dilakukan dapat diperoleh informasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan pola dan determinan mobilitas penduduk

¹⁸ Tulisan ini dibuat atas dasar penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti PPK-LIPI yang terdiri dari Aswatini, SukoBandiyono, Widayatun, Bayu Setiawan, Mujianai, Agustina, Andy Ahmad Zaelani, Ade Latifa, Haning Romdiati dan Fitranita

di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil sensus penduduk juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui pola mobilitas permanen, baik yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun yang keluar. Selain itu, studi ini juga didukung dari catatan hasil observasi di daerah Sangihe dan memanfaatkan pula hasil publikasi yang relevan. Tulisan ini kemudian mendeskripsikan data dan informasi yang terkumpul sesuai dengan maksudnya, yaitu memperoleh gambaran tentang pola dan determinan mobilitas penduduk. Oleh karena itu dalam studi ini mobilitas penduduk juga dikaitkan dengan kondisi lingkungan dan latar belakang sejarah mobilitas penduduk.

Kondisi Lingkungan

Kabupaten Kepulauan Sangihe, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan wilayah perbatasan terdepan Indonesia dengan negara jiran Filipina. Lebih spesifik daerah perbatasan di wilayah kepulauan Sangihe berada dalam lingkungan administrasi Kecamatan Tabukan Utara, termasuk daerah Nusa Tabukan. Dalam Kecamatan Tabukan Utara, desa yang paling dekat dengan Filipina adalah Marore, sebagai pulau kecil yang menjadi “*Check Point Border Crossing*”.

Sebelum tahun 2002, wilayah ini masih menjadi satu sebagai Kabupaten Kepulauan Sangihe-Talaud. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2002 Kepulauan Sangihe terpisah dari Kabupaten Sangihe Talaud dan berdiri sendiri menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kabupaten ini mempunyai satu pulau besar dan 111 pulau kecil. Dari sejumlah pulau tersebut, hanya 30 pulau yang mempunyai permukiman penduduk. Wilayah ini mempunyai luas daratan 1.013 km² dan luas lautan 25,000 km². Dengan kata lain wilayah tersebut merupakan wilayah maritim karena 96 persen luas wilayahnya adalah lautan (BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud, 2005).

Ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe berada di Tahuna, suatu tempat di dataran rendah sempit di P. Sangir Besar. Penduduk setempat sering menyebut Taruna sebagai pengganti nama Tahuna. Jarak antara Tahuna ke Manado sekitar 142 mil laut. Untuk mencapai kota tersebut dari Kota Manado dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui laut atau melalui udara. Pada saat ini ada dua transportasi laut yang secara teratur menghubungkan Tahuna dengan daerah Manado dan Bitung. Dua kapal perintis KM Daya Sakti dan KM Surya menghubungkan Tahuna dengan Kota Bitung. Adapun dua kapal lainnya, yaitu KM Mekar Teratai dan KM Eva Santa menghubungkan ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe ini dengan Kota Manado.

Dua kapal tersebut melayani transportasi rute Manado-Tahuna dan sebaliknya setiap hari secara bergantian. Satu kapal berangkat dari Manado

menuju Tahuna, sementara satu kapal lainnya berangkat dari pelabuhan Tahuna menuju Manado pada hari yang sama. Dua kapal (KM Mekar Teratai dan KM Eva Santa) yang melayani jalur Manado-Tahuna tersebut mampu mengangkut 400 penumpang. Setiap hari kedua kapal tersebut berangkat pukul 20.00 malam, baik dari Manado maupun dari Tahuna, dan tiba pukul 4.30 pagi di daerah tujuan masing-masing. Selain itu, juga ada kapal penumpang yang menghubungkan Manado-Tagulandang dan Siau. Adapun kapal perintis masuk ke pelabuhan Tahuna maupun pelabuhan lain seperti Marore, Beo dan Bitung setiap 14 hari sekali. Dua kapal perintis tersebut masing-masing mengambil jalur pelayaran yang berlawanan, satu kapal berlayar searah jarum jam dari Bitung-Tahuna-Kawaluso, Marore-Miangas-Beo-Lirung-Tahuna-Bitung, dan kapal yang satu lagi mengambil jalur berlawanan arah jarum jam, dan menyinggahi pelabuhan yang sama. Kalau kapal dari Manado-Tahuna PP. khusus mengangkut penumpang, kapal perintis selain membawa penumpang juga mengangkut barang.

Transportasi udara hanya memberikan pelayanan dua kali seminggu menggunakan satu pesawat untuk penerbangan perintis antara Bandara Sam Ratulangi, Manado dengan Bandara Naha. Selanjutnya, perjalanan dari Bandara Naha menuju Kota Tahuna yang berjarak sekitar 20 Km ditempuh dengan jalan darat. Dari deskripsi tersebut nampak bahwa moda transportasi yang menghubungkan 30 pulau-pulau berpenghuni di wilayah kepulauan Sangihe masih belum mencukupi. Meskipun demikian, adanya sarana transportasi tersebut telah menjadi variabel antara yang mempengaruhi mobilitas penduduk sesuai dengan jalur transportasi yang disinggahnya.

Dari 30 pulau yang mempunyai permukiman penduduk, pulau paling dekat dengan negara Filipina yaitu Marore. Pulau ini adalah salah satu pulau dalam gugusan Kawio. Pada malam hari manakala keadaan cuaca bagus dari atas menara suar di P. Marore dapat terlihat sinar Kota Davao yang ada di Filipina. Jarak antara P. Marore ke Batuganding di daratan Mindanau hanya sekitar 40 mil laut. Jarak tersebut lebih dekat daripada ke Tahuna yang berjarak 66 mil laut. Sarana transportasi yang biasa digunakan penduduk Sangihe untuk mencapai Filipina bagian selatan, biasanya ke P. Balut atau P. Sarangani, adalah motor laut yang lazim disebut foso, *pump-boat* dan pamo. Bilamana kondisi cuaca dianggap baik (bulan Mei), hanya dengan motor laut jenis fuso, penduduk dapat melintas ke Filipina hanya dalam tempo 3 jam. Waktu tempuh dapat lebih lama bilamana perjalanan dilakukan menggunakan motor laut jenis ketinting *pump-boat*, karena mempunyai mesin berkapasitas kecil (5-7,5 PK) yang ada di dalam (*in board*). Sampai saat ini tidak ada transportasi umum yang menghubungkan P. Marore dengan daerah Filipina bagian selatan. Motor laut yang kadangkala singgah di P. Marore umumnya membawa penduduk Sangihe, baik yang tinggal di

Filipina yang sedang mengunjungi keluarganya di wilayah Sangihe atau sebaliknya.

Adapun perhubungan darat hanya terdapat di P. Sangir Besar. Di pulau ini pusat transportasi darat berupa mobil angkutan, baik bus, mikrolet, bentor dan ojek berpusat di Kota Tahuna. Perhubungan perdesaan antar kecamatan umumnya hanya dengan taksi minibus karena jalannya relatif sempit, banyak belokan dan naik-turun, meskipun jalan yang ada telah beraspal. Jalan di daerah tersebut terjaga dengan baik karena ketersediaan material batu gunung dan pasir. Untuk perhubungan di pulau-pulau kecil di luar P. Sangir Besar, bahkan antar dusun dalam satu pulau, banyak memanfaatkan transportasi laut yaitu sampan-sampan dan perahu motor ketinting milik penduduk.

Prasarana penting lain yang mempengaruhi mobilitas adalah makin meningkatnya komunikasi di daerah tersebut, terutama di P. Sangir Besar. Setelah beroperasinya perusahaan telepon seluler yang mendirikan beberapa menara pemancar, maka penduduk dengan mudah mengakses telepon genggam. Dengan meningkatnya keberadaan alat telepon genggam, di samping keberadaan alat telepon biasa, mereka dapat berkomunikasi ke luar daerah dengan lancar. Pada saat ini, sejalan dengan makin meluasnya akses sarana listrik, rumah tangga yang memiliki parabola dapat menangkap siaran televisi dari Jakarta. Kondisi tersebut tentunya telah memperlancar akses informasi tentang kehidupan di luar daerah yang menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan untuk melakukan mobilitas.

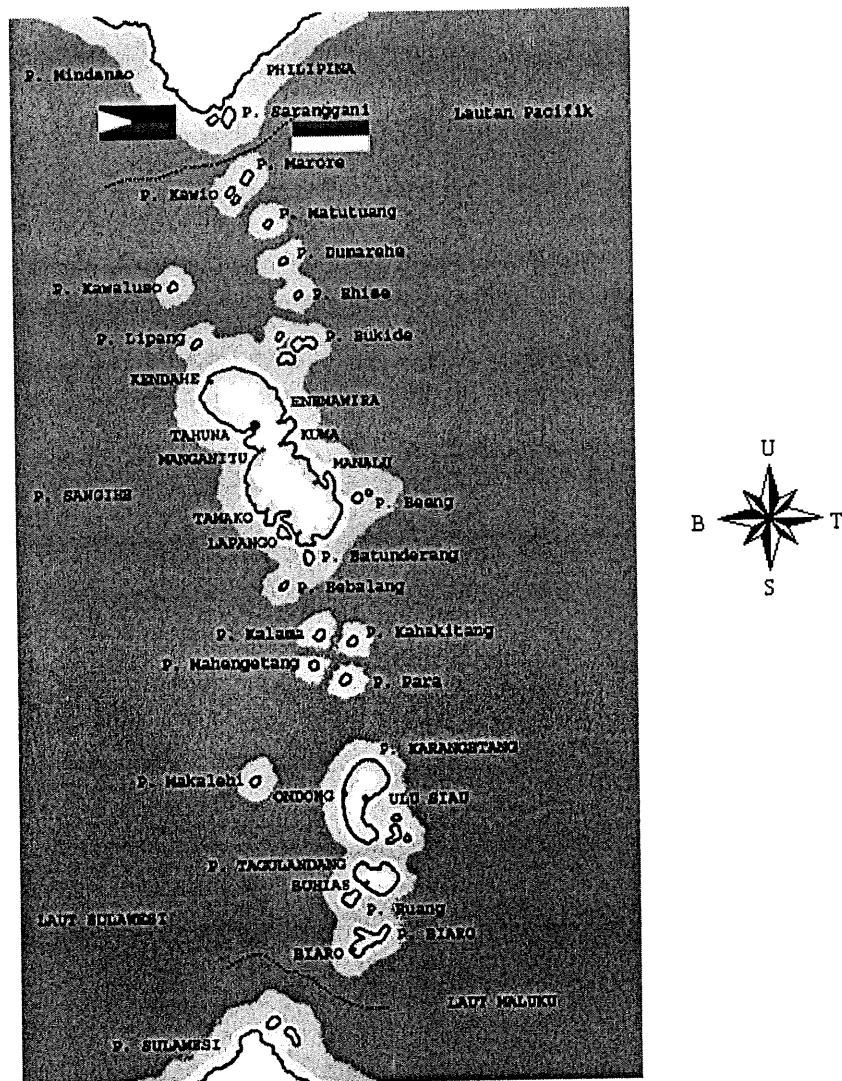
Secara geografis wilayah kepulauan Sangihe mempunyai topografi yang kasar yaitu berbukit-bukit terjal, sehingga hanya sebagian kecil wilayah merupakan dataran rendah di pesisir. Dataran rendah tersebut umumnya menjadi lokasi permukiman penduduk, antara lain karena punya akses laut dan ketersediaan air tanah. Laut telah menjadi sumber kehidupan dan sekaligus menjadi media perhubungan. Jumlah penduduk yang terus bertambah, sementara luas lahan yang cocok untuk permukiman sangat terbatas memaksa banyak penduduk mendirikan rumah di daerah perbukitan. Permukiman penduduk menjadi padat. Kesulitan memperoleh areal permukiman, bencana alam dan kemiskinan yang mereka alami telah ikut mendorong mereka untuk melakukan mobilitas ke luar daerah baik secara sirkulasi maupun secara permanen.

Dari peta wilayah Kepulauan Sangihe nampak bahwa lokasinya berada pada lintasan antara P. Sulawesi dengan negara tetangga Filipina dan lebih jauh ke arah Asia Timur. Secara kemaritiman wilayah kepulauan Sangihe berada pada pengaruh Samudera Pasifik. Kondisi geografis yang demikian menyebabkan wilayah kepulauan Sangihe mempunyai angin muson barat yang bertiup antara bulan September-Februari. Pada saat muson

barat bertiup selain menimbulkan gelombang laut yang tinggi, juga diikuti dengan curah hujan yang tinggi pula. Adapun pada bulan Juli-September di daerah tersebut bertiup angin muson timur yang mengakibatkan gelombang laut yang tinggi pula. Kondisi laut yang dianggap tenang hanya terjadi pada saat musim peralihan yang jatuh pada bulan Maret-Mei dan Oktober-November. Kondisi laut yang demikian sangat mempengaruhi kehidupan nelayan. Bagi nelayan, bulan-bulan yang kondusif untuk berlayar hanya terjadi pada musim peralihan. Kondisi lingkungan yang dipengaruhi oleh siklus musim membuat penduduk harus melakukan adaptasi. Karena nelayan masih mengusai teknologi kemaritiman yang terbatas, maka mereka belum mampu menguasai sepenuhnya kendala ombak yang tinggi sehingga kegiatan di laut juga berfluktuasi sesuai dengan kondisi laut.

Nelayan tradisional di daerah tersebut masih menggunakan sampan dayung, sampan bermotor jenis ketinting *pump-boat* yang bercadik, dan sedikit sampan jenis *longboat*. Di wilayah Sangihe, nelayan belum memiliki tradisi memanfaatkan energi angin untuk berlayar. Oleh karena itu di wilayah tersebut tidak dijumpai sampan yang menggunakan layar, sehingga nelayan sangat tergantung pada energi minyak. Jenis alat transportasi tersebut yang umumnya dimiliki sebagian nelayan, mempunyai kemampuan jelajah yang terbatas, walaupun pada saat cuaca sedang bersahabat. Meskipun demikian, ada pula beberapa nelayan yang berlayar sampai Halmahera bahkan ke Filipina. Karena kegiatan nelayan sangat tergantung pada bahan bakar minyak, terutama untuk berlayar mencari ikan, maka kenaikan harga minyak saat ini telah memukul kehidupan nelayan dalam melakukan mobilitas. Dalam kondisi iklim yang tidak bersahabat pada musim muson barat maupun muson timur, mobilitas nelayan dalam menangkap ikan terbatas di seputar pinggir pantai atau di balik pulau yang terlindung dari kencangnya tiupan angin untuk menghindari gelombang laut.

Peta Perbatasan Sulawesi Utara - Filipina



Sejarah Mobilitas

Fenomena mobilitas penduduk pada dasarnya setua umur manusia, karena penduduk yang mendiami suatu tempat selalu melakukan mobilitas baik jarak pendek maupun jarak jauh. Bandiyono, dkk. (1997) mengemukakan bahwa sampai saat ini belum diketahui secara persis tentang asal-usul orang Sangir yang melakukan mobilitas sirkuler, kendati ada perkiraan bahwa mereka berasal dari daratan Mindanau dan sebagian berasal dari arah selatan yaitu berasal dari daerah Minahasa dan sekitar P. Ternate. Perkiraan tersebut didasarkan adanya pengaruh kerajaan baik yang ada di Ternate maupun yang ada di Mindanau Selatan, di mana daerah Sangihe merupakan daerah lintasan dari interaksi sosial dari pusat kerajaan tersebut. Apabila asumsi ini benar maka penduduk yang mendiami kepulauan Sangihe jauh sebelum kejayaan Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore pada abad 16. Selain itu, bukti adanya hubungan dengan daerah luar, yaitu Mindanau dan daerah lain, adalah berdirinya kerajaan Siau dimana raja pertamanya, Longkongbanua (1510-1545), berasal dari Mindanau. Putri raja Siau tersebut yaitu Dolongsesoso kemudian kawin dengan Pontoralaga asal Tahuna dan melahirkan raja pertama Tahuna bernama Tatehwoba atau Ansawuwe (1580-1625). Demikian pula raja pertama Kerajaan Tagulandang yang bernama Putri Lohonaung berasal dari Manado (Adrian, *Mimeograph*: 3-15).

Dari uraian tersebut dapat dipastikan bahwa interaksi daerah tersebut baik dengan Filipina maupun dengan daratan Sulawesi telah berlangsung lama. Interaksi yang terjadi tidak selalu positif namun juga menimbulkan konflik. Orang Mindanau sering menyerang P. Nusa, tepatnya di Desa Tinakareng. Nama Tinakareng berarti daerah yang dipagari karena menahan serangan perompak dari Filipina. Bahkan pada tahun 1590-1591 Raja Siau yang bernama Pontowuisang yang kemudian dilanjutkan dengan anaknya Raja Winsulangi pernah berperang dengan orang-orang asal Mindanau (Dep. P dan K, 1979: 83). Pada waktu penelitian di Dusun Bukide tahun 1994, masih dapat disaksikan adanya peninggalan perangkat pakaian dan dokumen ajaran agama bertuliskan huruf Arab gundul yang disimpan dalam peti yang dikatakan sebagai peninggalan tokoh agama Islam yang menyebarkan aliran Islam Tua di daerah tersebut.

Adapun interaksi dengan orang Eropah terjadi setelah misionaris Porto tinggal di daerah Siau, yang kemudian mendirikan benteng Gurita di Ondong dan Sumpini di Lilento Ulu. Atas pengaruh ajaran agama Katholik, Raja Winsulangi dan keluarga dibaptis di Manado pada tahun 1614. Selain bangsa Porto, bangsa Spanyol juga masuk ke daerah tersebut dan terjadi perebutan kekuasaan dengan VOC-Belanda. Pada saat itu untuk melawan kekuasaan Spanyol, tiga kekuatan bergabung yaitu VOC-Belanda, kerajaan Siau yang dipimpin oleh Don Marvius Fransiscus Bawangi dan bantuan dari

kerajaan Ternate berupa armada angkatan laut. Pada waktu itu kerajaan Ternate terlebih dahulu sudah dikuasai VOC-Belanda. Kekuasaan Spanyol dapat terusir, namun kemudian justru VOC-Belanda menguasai kerajaan Siau tahun 1677. Dengan dikuasainya Siau oleh Belanda kemudian secara bertahap pengaruhnya meluas ke kerajaan-kerajaan kecil daerah Sangir Besar. Pada abad ke-17 inilah dimulainya sejarah pendidikan ala barat di kepulauan Sangihe.

Sejalan dengan masuknya Belanda ke daerah Minahasa dan Sangihe, telah terjadi arus mobilitas penduduk menuju daerah Minahasa. Pada waktu itu pemerintah Belanda mengembangkan perkebunan kelapa di daerah Tonsea yang memerlukan buruh murah. Hampir semua perkebunan di Minahasa telah mempekerjakan orang-orang Sangir. Pedagang China pun saat itu juga mulai memanfaatkan orang Sangir untuk bekerja sebagai buruh di toko-toko dan sebagai pembantu rumah tangga (Parengkuhan, 1984:126). Daerah Sangihe dengan kekayaan perkebunan pala, kopra dan cengklik ternyata juga mengundang pedagang-pedagang asal Jepang yang masuk ke daerah tersebut pada tahun sejak 1919. Mulai saat itu pedagang asal Jepang bersama pedagang asal China telah menguasai perdagangan kopra, fuli, pala, sirip ikan dan berbagai hasil pertanian.

Secara umum wilayah Sangir berada pada jalur gunung berapi yang masih aktif, yaitu G. Ruang, G. Awu, dan G. Karangetang. Gunung-gunung tersebut disamping membawa berkah berupa kesuburan tanah karena abu volkanis, pada suatu saat menjadi sumber bencana akibat erupsi, sehingga menimbulkan korban jiwa dan harta penduduk. Disamping gunung api tersebut masih ada satu gunung berapi di bawah laut yaitu G. Mahangetang. Erupsi gunung-gunung berapi tersebut telah mendorong penduduk sekitarnya untuk melakukan migrasi ke daerah yang dianggap aman. Perpindahan orang Sangir secara besar-besaran dimulai pada tahun 1892 pada saat G. Karangetang di P. Siau meletus dan menimbulkan banyak korban serta kerusakan. Pemerintah Hindia Belanda memindahkan mereka yang terkena musibah ke daerah Bolaang Mongondow. Tahun 1929 didatangkan lagi orang Sangir ke daerah tersebut, kemudian disusul tahun 1937 yang ditempatkan di lokasi transmigrasi Ayong. Ketika bencana erupsi terjadi lagi akibat meletusnya G. Awu di Tabukan Utara pada tanggal 12 Agustus tahun 1966, pemerintah juga memindahkan orang Sangir ke Bolaang Mongondow. Bahkan akibat letusan G. Ruang tahun 2002, daerah tersebut tertutup bagi permukiman penduduk. Kemudian, ketika G. Karangetang meletus tahun 1974 dan 1976, penduduk secara spontan banyak yang pindah ke P. Halmahera, Maluku Utara (Paringkuhan 1984: 81).

Jumlah orang Sangir di Halmahera menjadi lebih banyak ketika terjadi arus balik orang Sangir di Filipina ke Indonesia, terutama yang terjadi

pada kurun waktu 1980-1999. Konflik sosial yang melanda Maluku Utara tahun 1999-2001, telah menimbulkan gelombang pengungsian orang-orang Sangir di Maluku Utara ke Bitung, Minahasa, Manado dan ke Sangir Besar. Migrasi terpaksa akibat bencana alam dan konflik sosial tersebut telah membuat orang Sangir menyebar di banyak tempat di daratan Sulawesi dan Maluku Utara. Sebagian dari mereka juga menempati lokasi yang diperuntukkan bagi korban konflik sosial yaitu permukiman Pandu di Kota Manado dan permukiman Serai di Minahasa.

Pengungsi orang Sangir dari Maluku Utara juga masih banyak tinggal di Bitung. Mereka yang menjadi pengungsi tersebut sebagian adalah migran orang Sangir asal Filipina Selatan yang kembali ke Indonesia dan kemudian bermukim di P. Halmahera dan Kota Ternate. Di Halmahera mereka bermukim antara lain di daerah Togasa dan Saekona. Dalam proses mobilitas orang Sangir yang telah berlangsung lama, mereka banyak bermukim secara spontan di pulau-pulau kecil di lingkungan Bunaken. Adapun di Kota Manado, migran Sangir dan keturunannya tersegregasi di bagian utara kota, terutama di Kecamatan Molase.

Mobilitas Internal

Mobilitas penduduk internal penduduk kepulauan Sangihe adalah gerak penduduk baik yang keluar dari daerah tersebut maupun yang masuk, namun masih terjadi masih dalam koridor batas negara, dalam hal ini Indonesia. Sebagai fenomena sosial, mobilitas terus berlangsung sebagai respons atas dinamika perubahan dalam tatanan masyarakat atau sebaliknya. Hal ini telah menimbulkan mobilitas penduduk yang sifatnya permanen. Uraian tentang mobilitas permanen atau migrasi dalam studi ini dibatasi hanya untuk Provinsi Sulawesi Utara, karena adanya kecenderungan bahwa arus migrasi di daerah tersebut umumnya berlangsung dalam jarak dekat.

Untuk mengetahui mobilitas penduduk tersebut, data dapat diperoleh dari Sensus Penduduk Tahun 2000, yang pelaksanaan pengumpulan data dilakukan pada bulan Oktober 2000. Untuk maksud kajian ini migrasi penduduk dilihat atas dasar konsep migrasi seumur hidup (*lifetime migration*). Dalam konsep tersebut seseorang dapat dikatakan sebagai migran apabila tempat lahirnya berbeda dengan tempat tinggalnya pada saat ini. Data yang disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2 masih menggambarkan migrasi untuk abupaten Sangihe-Talaud, karena pada saat diadakan Sensus Penduduk, Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menjadi satu dengan Kabupaten Talaud. Dengan demikian, data yang disajikan berikut ini masih merupakan gabungan. Meskipun demikian, pola migrasi dari dan ke kabupaten/kota di Sulawesi Utara masih relevan untuk menggambarkan pola migrasi dan selektifitas migran bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam hal ini dapat diperkirakan bahwa pola migrasi, baik yang masuk maupun

yang keluar, sebagian besar berasal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe daripada Kabupaten Talaud, karena daerah Sangihe mempunyai akses transportasi yang lebih baik dan jarak yang lebih dekat dengan Manado. Gambaran tentang pola dan arus migrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Pola Migrasi Seumur Hidup Sangihe-Talaud dari dan ke
Kota/Kabupaten Lain di Provinsi Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota	Migran Masuk dari	Migran Keluar ke	Migrasi netto
Bolaang Mongondow	687	5.655	- 4.972
Minahasa	2.867	8.979	- 6.112
Kota Manado	1.799	24. 958	- 23.159
Kota Bitung	468	18.058	- 17.590
Jumlah	5.817	57.650	- 51.833

Sumber : Diolah dari data SP.2000. BPS. Jakarta Seri L.2.2.23

Tabel 2.
Tingkat Migrasi Seumur Hidup di Kabupaten Sangihe-Talaud
Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar	Migrasi Netto
Laki-laki	1,95	9,28	- 7,33
Perempuan	1,79	9,33	- 7,54
Jumlah	3,75 (5.917)	18,61 (57.650)	-14,86 (51.833)

Sumber : Diolah dari data SP.2000. BPS. Jakarta Seri L.2.2.23

Atas dasar data hasil sensus penduduk tahun 2000 tersebut nampak jelas bahwa:

- Migrasi keluar dari Sangihe-Talaud jauh lebih besar daripada migrasi masuk. Dengan kata lain, telah terjadi migrasi netto negatif yang sangat signifikan. Migrasi netto negatif tersebut juga terjadi pada kurun waktu 1995-2000, yaitu sebesar - 2.953 jiwa.
- Selama ini di Kabupaten Sangihe-Talaud sebanyak 18,6 persen dari jumlah penduduknya telah meninggalkan daerah tersebut dan menetap di kota atau di kabupaten lain di Sulawesi Utara.
- Sebanyak 43 persen penduduk Sangihe-Talaud yang melakukan migrasi keluar menuju ke Kota Manado. Kota Manado sebagai kota

terbesar di Sulawesi Utara telah menjadi daerah tujuan utama migrasi keluar dari sebagian penduduk perdesaan di Sangihe-Talaud. Dengan kata lain telah terjadi kecenderungan pola migrasi desa-kota.

- Daerah Sengihe-Talaud bukan daerah tujuan migrasi bagi daerah lain di Provinsi Sulawesi Utara dimana hanya ada 5,8 ribu jiwa yang tinggal di daerah Sangihe-Talaud.
- Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan sedikit lebih banyak melakukan migrasi keluar dari daerah Sangihe-Talaud, namun kondisi sebaliknya terjadi untuk migrasi masuk ke daerah tersebut.

Hasil sensus penduduk tersebut ternyata relevan dengan hasil penelitian tim PPK-LIPI di Desa Tinakareng, Kecamatan Nusa Tabukan. Hasil penelitian tersebut kendati tidak dapat mewakili populasi pada tingkat kabupaten, namun cukup menggambarkan pola mobilitas sirkuler di daerah tersebut. Dalam penelitian tersebut antara lain ditanyakan tentang ke mana anggota keluarga melakukan mobilitas atau bepergian terakhir kali. Dari 933 orang responden, sebanyak 208 orang yang melakukan mobilitas terakhir kali, 91 persen melakukan mobilitas ke Provinsi Sulawesi Utara, terutama ke kota Manado (78 persen). Mobilitas keluar yang sifatnya internal tersebut sebagian besar masih di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Hanya sebagian kecil yang bepergian ke provinsi lain maupun yang ke luar negeri. Dalam penelitian tersebut hanya ada 7 persen warga Desa Tinakareng yang melakukan mobilitas ke provinsi lain, antara lain Maluku Utara, Papua dan DKI-Jakarta. Dalam lima tahun terakhir sebagian penduduk Sangihe melakukan mobilitas ke Papua, terutama ke daerah Nabire, untuk bekerja sebagai buruh tambang emas.

Kalau data migrasi permanent memperlihatkan bahwa perempuan sedikit lebih banyak daripada laki-laki, dalam mobilitas non-permanen atau sirkulasi, laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Warga Desa Tinakareng yang melakukan sirkulasi tersebut 60 persen dengan maksud mencari pekerjaan, mencari ikan dan bekerja sebagai buruh. Dalam melakukan sirkulasi tersebut alasan ekonomi sangat dominan, meskipun ada alasan lain, yaitu mengunjungi keluarga (27 persen), sekolah (4 persen), dan berobat (3 persen). Hasil wawancara mendalam memperlihatkan bahwa laki-laki yang melakukan sirkulasi untuk waktu lebih dari enam bulan, umumnya adalah buruh konstruksi yang banyak bekerja sebagai tukang kayu dan tukang bangunan di Kota Manado, antara lain yang bekerja di daerah Malalayang.

Adapun kelompok perempuan banyak yang bekerja di Manado, terutama sebagai pembantu rumah tangga dan sebagian kecil bekerja sebagai

pedagang kecil dan sebagai buruh di perusahaan kecil dan menengah. Adapun migran laki-laki yang mempunyai kegiatan sebagai *blue collar workers* antara lain sebagai buruh bangunan, nelayan dan sopir. Orang Sangir yang terdidik bekerja sebagai guru, pengacara, pengusaha dan tokoh agama. Penduduk Desa Tinakareng yang melakukan mobilitas sirkulasi ke luar kabupaten tersebut lebih dominan pada segmen umur kerja yang potensial yaitu antara 15-30 tahun. Mobilitas sirkuler yang banyak dilakukan penduduk Sangir, umumnya melalui proses berantai. Seseorang yang sedang pulang kampung, kemudian mengajak kawan atau saudaranya untuk ikut bekerja di daerah tujuan, terutama Manado. Meskipun orang Sangir bersifat eksogami, namun ikatan dengan daerah asal sangat kuat, bahkan telah membentuk organisasi paguyuban yaitu Badan Musyawarah Kekeluargaan Indonesia Sangir Talaud (BAMUKIS). Organisasi paguyuban ini didirikan pada tahun 1981, yang dirancang sebagai sarana untuk bermusyawarah (Zaenuddin. ed: 117).

Para migran sirkuler tersebut sebelum memperoleh pekerjaan, umumnya tinggal bersama, namun setelah bekerja bertempat tinggal secara pisah. Mereka yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga kemudian pindah ke rumah majikan. Pada saat menjelang lebaran umumnya mereka mudik ke desa asalnya guna melepaskan rindu kepada keluarga dan kawan-kawan di desanya. Setelah itu mereka kembali pergi merantau.

Mobilitas Internasional

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa penduduk Sangir yang melakukan mobilitas internasional hampir seluruhnya menuju Filipina bagian selatan dan telah berlangsung lama. Sebagian dari mereka yang telah bermigrasi di Filipina berkunjung ke daerah asalnya dan banyak pula yang kembali ke Indonesia secara permanen. Ada dua cara seseorang yang tinggal di perbatasan untuk pergi ke Filipina maupun yang berkunjung ke Indonesia. Pertama dilakukan secara legal melalui pos *Border Crossing Agreement (BCA)* Unit Marore. Kedua dilakukan secara ilegal yaitu pergi tanpa mematuhi aturan yang ada. Penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan (Marore, Kawio, Kawaluso, Bukide dan Tinakareng) dapat melakukan mobilitas hanya dengan menunjukkan kartu pas lintas batas.

Proses migrasi ke Filipina berlangsung jauh sebelum ada pembentukan wilayah BCA pada 14 September 1965. Sebanyak 88 persen orang Sangir melakukan migrasi ke Filipina sebelum tahun 1973 dan 82 persen belum mengetahui keadaan Filipina sebelum pergi.¹⁹ Diperkirakan jumlah penduduk etnis Sangir yang tinggal di Filipina sekitar 20 ribu jiwa

¹⁹ Hasil penelitian Migrasi Kembali Penduduk Kepulauan Sangihe Talaud dari Pulau-pulau di Wilayah Filipina, PPT-LIPI. 1993: 73-75

(Aambong.1993:3). Sebagian besar dari mereka bermukim di dua pula kecil yaitu Balut dan Saranggani. Determinan mobilitas permanen penduduk Sangir tersebut terkait erat dengan kondisi di daerah asalnya, terutama di pulau-pulau kecil yaitu Marore, Kawio, Kawaluso yang letaknya relatif dekat dengan Filipina.

Meskipun tidak ada determinan tunggal yang menyebabkan terjadinya migrasi, namun alasan ekonomi tetap menjadi penyebab utama. Daerah asal mereka relatif sempit, terpencil, sumber daya alam terbatas pada hasil kopra dan hasil tangkapan ikan dan sedikit akses pemasaran. Pulau Marore, misalnya, dengan luas yang tidak lebih dari 200 hektar, hanya seperempatnya merupakan dataran pantai dan selebihnya merupakan bukit. Dusun Marore mempunyai jumlah penduduk 509 jiwa pada tahun 1993 dan menjadi 646 jiwa pada tahun 2001. Jarak P. Marore dengan ibu kota Provinsi, Kota Manado sekitar 205 mil laut. Untuk pergi ke Tahuna dan Kota Bitung penduduk hanya punya akses transportasi kapal perintis.

Jumlah penduduk yang terus bertambah telah menyebabkan tekanan ekonomi dan daya dukung lingkungan, sehingga untuk mengatasi persoalan tersebut mereka terpaksa mencari tempat yang memungkinkan untuk hidup. Berdasarkan wawancara dengan orang Sangir yang kembali ke Indonesia diketahui bahwa pada waktu orang Sangir datang ke P. Balut dan P. Saranggani, pulau tersebut dalam kondisi kosong, tak ada penghuni.²⁰ Proses selanjutnya dalam migrasi ke Filipina tersebut dilakukan secara berantai. Pada saat berkunjung ke daerah asalnya, mereka mengajak saudara atau tetangganya. Hal ini dapat terjadi karena pada waktu itu baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Filipina belum terbentuk, sehingga belum ada aturan yang mengikat. Sesudah Negara Filipina merdeka dan aturan tapal batas dengan Indonesia ditetapkan, maka orang Sangir yang tinggal di Filipina tersebut dianggap pendatang yang tidak sah. Predikat ini tetap melekat meskipun mereka lahir di Filipina, kecuali mereka yang mau menjadi warga Negara Filipina termasuk yang kawin dengan orang warga Filipina.

Selain adanya mobilitas internasional yang sifatnya permanen seperti disebutkan di atas, hasil penelitian PPk-LIPI di Marore pada tahun 1994 menunjukkan adanya mobilitas sirkuler yang menuju Filipina.²¹ Mobilitas sirkuler juga dilakukan penduduk yang tinggal di wilayah BCA yaitu Kawio, P. Kawaluso, P. Nusa (Tinakareng) dan P. Bukide. Mereka yang melakukan sirkulasi ke Filipina sebagian besar menyatakan menjenguk keluarga, meskipun ada yang beralasan untuk berdagang, bahkan ingin berobat. Hal ini

²⁰ Pulau Balut, Pulau Saranggani dan Kota Mati adalah daerah BCA di Filipina.

²¹ Tim peneliti terdiri dari Aswatini, Suko Bandiyono, Widayatun, Mujiani dan Bayu Setiawan.

menunjukkan bahwa ikatan kekeluargaan orang Sangir cukup kuat disamping berani mengambil peluang ekonomi.

Perdagangan legal penduduk perbatasan (*border area*) di daerah kepulauan Kawio dan kepulauan Bukide dengan penduduk perbatasan di Filipina yaitu Balut dan Saranggani dimungkinkan sesuai dengan Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (*Border Trade Agreement*) yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1974. Mereka yang melakukan perdagangan daerah perbatasan tersebut hanya dimungkinkan paling lama 30 hari. Komoditi pabrikan yang dijual ke Filipina antara lain sabun cuci, rokok (Bentul), pakaian dan obat gosok. Dari Filipina mereka membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti cangkir, pancing, cat, triplek tahan air dan minuman ringan (coca-cola). Barang-barang tersebut dapat masuk ke Indonesia maupun ke Filipina setelah terlebih dahulu melalui pemeriksaan di Kantor Imigrasi dan harus membayar pajak di Kantor Bea Cukai baik di Marore maupun di Batuganding (Filipina). Dilihat dari jumlah maupun jenis komoditi yang diperdagangkan, komoditi asal Filipina lebih banyak yang masuk ke Sangir (Raharjo, dkk.2002).

Dalam kurun waktu 1989-1994 penduduk di P. Marore yang melakukan sirkulasi sebanyak 33 orang meskipun mereka berkali-kali pergi ke Filipina. Seperti halnya penduduk Sangir yang lain, mereka yang melakukan sirkulasi ke Filipina tersebut hampir seluruhnya berpendidikan sekolah dasar dengan umur antara 25-54 tahun (Aswatini dkk. 1994: 61).

Selain mobilitas sirkuler yang dilakukan secara legal maupun yang belum terkena aturan lintas batas, ada pula mobilitas sirkuler yang dilakukan secara ilegal. Mereka yang melakukan kegiatan sirkulasi secara ilegal umumnya adalah penduduk Sangihe yang pergi ke Filipina untuk tujuan berdagang. Mereka melakukan mobilitas sirkuler secara ilegal karena ingin memaksimalkan pendapatan sehingga tidak mau direpotkan untuk urusan administrasi dan harus memperoleh izin di pos BCA Marore. Seandainya tidak melapor waktu tempuh akan lebih cepat dan tidak terhambat oleh aturan yang menetapkan bahwa jumlah maksimum barang yang dibawa senilai US \$ 250. Orang Tinakareng atau orang Bukide yang bebergian ke Filipina arah berlayarnya lurus ke utara melewati selat antara P. Matutuang dengan P. Memanu sehingga perjalanan dapat ditempuh selama satu setengah hari. Apabila harus melapor ke Pos BCA di Marore, waktu tempuh paling tidak harus menambah dua hari.

Sebagai gambaran tentang mobilitas sirkuler yang ilegal, berikut ini kutipan wawancara pada bulan Mei 2006 dengan seorang responden yang tinggal di Dusun Tinakareng,

“ kalau kita ke sana (Filipina) kita pasti dapat untung. Hanya kalau ke sana harus perhitungkan waktunya angin teduh. Tempat

belanja di Filipina biasa Davao, Gen-San, tempat yang paling biasa orang berbelanja. Kalau pakai *pump-boat* 16 PK ke Gen-San cuma satu setengah hari tanpa berhenti. Barang-barang yang dibeli seperti tikar, coca-cola, rokok. Saya juga pernah pergi ke Tawao untuk berdagang. Sebenarnya dari dusun sini banyak yang pergi untuk berdagang ke Filipina tapi takut untuk kasih tahu. Terakhir pergi ke Gen-San sekitar 5 bulan yang lalu. Saya punya maitua (mertua) masih ada di Gen-San... jadi warga Negara Filipina, jadi saya di sana bisa sampai satu bulan. Kalau ke Filipina juga membawa barang, seperti rokok, kebanyakan rinso, sabun. Kalau berbelanja modal yang dibawa untuk sekali pergi ada 5 juta, 7 juta tapi selisih untung antara 2-3 juta. Kalau saya pergi ada pula tetangga yang titip uang. Kalau tertangkap patroli Filipina barang dikasih daripada diproses. Kecenderungan sekarang orang-orang Tinakareng yang pergi menurun karena orang Cina di Petta sudah cari sendiri barang ke Davao. Gara-gara orang Cina berdagang kita sulit.”

Uraian dari seorang responde tersebut menggambarkan bahwa mobilitas ilegal ke Filipina atau sebaliknya telah lama dilakukan sebagian penduduk Tabukan Utara, tentunya setelah ada aturan BCA tahun 1965. Mereka melakukan mobilitas internasional yang sifatnya ilegal terutama dalam keperluan perdagangan meskipun ada pula untuk keperluan keluarga. Harga barang-barang keperluan rumah tangga tertentu memang lebih murah di Davao daripada di Sangihe sehingga adanya selisih harga tersebut merupakan peluang terjadinya perdagangan.

Informasi tentang daerah Filipina Selatan bagi mereka tidak masalah karena telah terjadi proses berantai antar generasi, bahkan banyak sanak saudara yang tinggal di Filipina. Mereka juga sering melakukan perjalanan ke Filipina. Pada waktu penelitian di daerah Tinakareng, Bukide dan Marore pada tahun 1993-1994 banyak dijumpai warga setempat yang melakukan perdagangan ilegal baik yang berangkat sendiri ke Filipina maupun pedagang asal Filipina yang masuk ke daerah tersebut. Pada waktu itu barang-barang yang masuk dari Filipina antara lain minuman keras, coca-cola, cangkir, tikar, jala, cat perahu, paku perahu tahan karat dan triplek tahan air. Jenis barang yang diselundupkan ke daerah perbatasan secara ilegal tersebut tidak berbeda dengan jenis komoditi yang dilakukan secara legal. Hasil wawancara dengan responden di Tinakareng dan Marore, yang pernah melakukan perdagangan, baik legal maupun ilegal, memperlihatkan bahwa kegiatan perdagangan yang mereka lakukan bermanfaat bagi kehidupan ekonomi keluarga. Daril observasi yang dilakukan terlihat bahwa masuknya minuman keras dari Filipina yang beralkohol tinggi telah menyebabkan kebiasaan mabuk, sehingga mengganggu kegiatan dan lingkungan.

Proses perdagangan ilegal tersebut, terutama untuk daerah Tinakareng dan Bukide berhenti pada awal tahun 2003. Mulai saat itu barang dagangan hasil selundupan mulai tidak laku dijual ke Petta karena telah tersaingi oleh komoditi import. Pedagang asal Petta mengimpor langsung berbagai jenis barang rumah tangga dalam jumlah banyak dan menjual dengan harga yang relatif rendah. Sebagian jenis barang yang diimport adalah sama dengan jenis barang yang biasa diselundupkan. Mereka mengimport barang-barang dari Davao, lewat BCA Unit Miangas dengan memanfaatkan tiga kapal yang dimilikinya. Komoditi asal Filipina tersebut telah dipasarkan tidak hanya di Petta, tetapi juga di Tuhuna bahkan di Manado. Hal ini secara otomatis telah mematikan perdagangan ilegal yang dulunya dilakukan penduduk wilayah BCA.

Bandiyono, dkk. (1997) telah menerangkan mobilitas kembali orang Sangir asal Filipina ke Indonesia. Arus mobilitas kembali penduduk Sangir tersebut sebagian besar menuju daerah Halmahera, walaupun ada yang tinggal di Minahasa, Bolaang Mongondow dan Beo. Di Halmahera antara lain bermukim di Desa Togasa, Desa Akelamo dan Desa Saikona. Pada waktu itu mobilitas kembali orang Sangir asal Filipina dilatarbelakangi oleh kondisi di Filipina yang tidak menjamin kelangsungan kehidupan mereka. Lahan kebun kelapa sering dirampas, fasilitas sangat kurang dan keadaan ekonomi Filipina terpuruk.

Pada kurun waktu 1963-1965 jumlah orang Sangir yang kembali sebanyak 3.216 orang. Pada waktu itu kepulangan ke Indonesia disponsori oleh pemerintah Indonesia. Kemudian kepulangan kembali ke Indonesia marak terjadi sesudah tahun 70-an dan pada kurun waktu 1983-1991 kepulangan mereka sebanyak 1.234 orang. Gelombang migrasi tersebut dilakukan secara spontan atau biaya sendiri. (Raharjo, dkk. 2002). Daerah Halmahera dijadikan tujuan kepulangan mereka terutama diarahkan oleh Pendeta Kaumbur. Pada waktu di daerah Halmahera masih tersedia tanah kosong dan penduduknya masih sedikit. Mereka kemudian mendirikan desa baru yang letaknya tidak jauh dari desa penduduk Halmahera.

Konflik sosial yang melanda Maluku Utara tahun 1999-2003 membuat mereka menjadi pengungsi. Mereka banyak tinggal di Bitung, Minahasa dan Manado. Kemudian sesudah itu sebagian dari mereka kembali ke Maluku Utara, dan sisanya masih bermukim di Sulawesi Utara.

Kesimpulan

Mobilitas penduduk meskipun terjadi di mana saja dan kapan saja dapat dianggap sebagai refleksi atau sebagai respons terhadap ketimpangan ekonomi, perubahan sosial dan kenyamanan antar wilayah. Oleh karena itu ada hubungan timbal balik yang kompleks antara mobilitas penduduk dengan

kondisi lingkungan serta proses perubahan di suatu daerah. Keterbatasan daya tampung lingkungan karena kondisi geografis yang tidak menguntungkan mengkondisikan daerah Sangihe sebagai daerah terisolir, miskin dan rawan bencana. Akibatnya sebagian penduduk mengambil keputusan untuk melakukan mobilitas keluar (*push out*) dengan cara sirkulasi dan mobilitas permanen. Arus keluar yang ditimbulkan oleh mobilitas keluar juga diikuti arus balik (*counter stream*).

Mereka yang pindah ke daerah lain di luar Sangihe maupun sebaliknya, atau yang melakukan sirkulasi, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya, meskipun harus mengatasi berbagai rintangan antara. Meskipun demikian, daerah Sangihe juga mempunyai nilai positif yang memungkinkan penduduk untuk tetap tinggal dan beradaptasi. Dilihat dari dampak yang ditimbulkannya, mobilitas penduduk terkait dengan terjadinya pemeratan penduduk dan pendapatan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini karena penduduk yang melakukan mobilitas adalah mereka yang sudah terseleksi sehingga mampu melakukan adaptasi dalam dimensi ekonomi. Dengan demikian, mereka dapat membawa uang, barang, ide-ide, pengetahuan dan kegiatan baik yang bermanfaat atau sebaliknya merugikan dilihat dari kepentingan daerah asal maupun tujuan.

Daftar Pustaka

- Aambong, A. 1991. *Selayang Pandang dan Hari Esok Penduduk dan Wilayah Border Crossing Agreement*. Laporan Camat Lintas Batas Indonesia-Filipina, BCA Unit Marore.
- Adrian D.B. "Renungan Kisah Kepulauan Sangihe Talaud". *Mimeograph*. Jilid III.
- Aswatini, Suko Bandiyono, Widayatun dan Bayu Setiawan. *Pemanfaatan Potensi dan Pembangunan Wilayah Perbatasan Sulawesi Utara*. 1996. Jakarta: PPT-LIPI.
- Bandiyono, Suko. Bayu Setiawan dan Aswatini. 1997. "Mobilitas Penduduk Perbatasan Indonesia-Filipina di Sulawesi Utara". dalam *Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Daerah Perbatasan* (Aswatini dkk). Jakarta: PPT-LIPI.
- BAPPEDA. 1993. *Data Pokok Pembangunan Daerah Tahun 1992*. Tahuna : Bappeda.
- BPS. Jakarta-Indonesia. *Penduduk Sulawesi Utara Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000*. Seri 12.2.23.
- BPS. Kabupaten Kepulauan Sangihe-Talaud. 1992. *Sangihe-Talaud Dalam Angka 1990*. Tahuna: BPS
- , 2005. *Sangihe Dalam Angka 2004/2005*. Tahuna: BPS.
- Chapman Murray dan Prothero R.Mansell. 1984. "Themes on Circulation in the Third World". *International Migration Review, Volume No.4*: 594-632.
- Departemen pendidikan dan Kebudayaan. 1978. *Sejarah Daerah Sulawesi Utara*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Proyek penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Kosinski Leszek A and Prothero R. Mansell (eds). 1975. *People on the Move Studies on Internal Migration*. London: Methuen & Co Ltd.
- Lee,E.S. 1966. "A Theory of Migration" dalam *Demography*. Vol 3,No.1, hal : 47-57.
- Oberai, A.S. 1987. *Migration, Urbanization and Development*. World Employment Programme. Backgound Papers for Training in Population, Human Resource and Development Planning. Paper No. 5. Geneve: International Labour Office.

- Parengkuan, F.E.W. 1984. *Sejarah dan Kebudayaan Lima Suku Bangsa Asli di Sulawesi Utara*. Manado: Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi.
- Raharjo Sri, Nasrun Sandiah dan Prisiwanto. 2002. *Marore Suatu Kampung di Wilayah Perbatasan*. Manado: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado.
- Zaenuddin, Dundin (ed). 2005. *Modal Sosial dalam Pengembangan Budaya Sipil Komunitas Etnik*. Jakarta: LIPI Press.

DINAMIKA MOBILITAS PENDUDUK DI WILAYAH PERBATASAN NTT KE PERAIRAN AUSTRALIA

Alvini Pranoto

Pendahuluan

Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan atau *archipelagic state* dengan 17,508 pulau yang dihuni serta letak geografinya membentang dari 95 ° sampai dengan 141° BT dan antara 60 ° LU dan 110 ° LS. Dengan panjang garis pantainya mencapai 81.000 km, sedangkan luas Wilayah Perairan lautnya mencapai lebih 7.9 juta Km² (termasuk Zona Ekonomi Eksklusifnya). Berdasarkan data pada UNCLOS (UN Convention on Law of The Sea) 1982 luas kawasan laut Indonesia mencapai 3.1 juta Km² (Pramono, 2005).

Sebagai negara dan bangsa Bahari, Indonesia telah dikenal sejak kerajaan Sriwijaya (Tahun 683 – 1030) mempunyai pelaut ulung yang mampu menjelajah lautan di bumi nusantara, bahkan sampai di luar batas Nusantara. (Pramono, 2005). Hingga kini diantara suku-suku di Indonesia yang terkenal berorientasi ke laut dan masih mempertahankan warisan bahari nenek moyang mereka, termasuk suku-suku di Sulawesi seperti suku Mandar, Makasar, Bugis, Bajo laut atau Bajau, Buton serta suku Madura dari pulau Madura. (Alimuddin, 2005). Warisan bahari orang Sulawesi yang terkenal adalah Ekspedisi armada teripang Makassan (sekitar tahun 1669) yang telah mengantarkan orang-orang Sulawesi tersebut menjakkan kaki mereka di benua Australia sebelum bangsa Eropa datang. (Campbell&Wilson, 1993)

Sama halnya dengan nelayan/ pelaut Sulawesi, Nelayan Madura dikenal sebagai nelayan yang biasa melakukan andun atau migrasi. Dalam hal ini pola migrasi mereka adalah pindah (permanen) atau merantau (pindah sementara) (Kusnadi, 2005:71). Perpindahan orang tersebut baik karena alasan sosial maupun geografis kejadiannya disebut sebagai mobilitas (Pressat, 1985:148 dalam Aswatini 1996). Sebagai Nelayan tradisional yang melakukan mobilitas internal dan internasional, nelayan – nelayan yang berasal dari suku atau etnis tersebut di atas menggunakan pulau-pulau di Nusa Tenggara Timur (terutama Pulau Rote dan Timor) sebagai tempat transit mereka maupun sebagai tempat tinggal secara permanen. Ini sebagai konsekuensi mendekati sumber daya yang menjadi andalan kehidupan mereka. Sumberdaya Laut andalan mereka tersebut adalah: teripang, Lola

dan jenis hewan *sedentary* lainnya serta sirip ikan hiu dari perairan sekitar Flores dan Arafura sampai keperairan pulau Pasir atau Ashmore reef (yang kini masuk wilayah Australia) untuk pasar ekspor.

Dinamika mobilitas penduduk dari suatu lokasi atau daerah ke lokasi tertentu lainnya terjadi karena adanya dorongan kebutuhan baik untuk mendapatkan sumberdaya ekonomi yang diperlukan bagi kelangsungan kehidupan maupun alasan lain yang juga bisa saling terkait (seperti alasan sosial, politik atau geografis). Kegiatan mobilitas nelayan tradisional diperairan pulau Pasir masih dilakukan dengan berdasarkan perjanjian kesepahaman atau MOU (*Memorandum Of Understanding*) 1974. Di dalam MOU box ini para nelayan diberikan hak ulayat untuk mengambil teripang, namun hanya pada lokasi di sekitar pulau Pasir dan boleh singgah di dua titik tertentu di pulau Pasir tersebut. Dalam perkembangannya, pulau Pasir ini kemudian dijadikan daerah konservasi. Di wilayah konservasi ini berlaku berbagai ketentuan yang melindungi tumbuhan atau hewan tertentu yang berada di dalamnya. Walaupun telah ditetapkan sebagai wilayah konservasi, motif nelayan tradisional untuk memanfaatkan SDL yang berada di Pulau Pasir dan sekitarnya tetap tinggi. Sehingga insiden penangkapan oleh otoritas berwenang setempat tidak bisa dihindari. Umumnya mereka yang ditangkap adalah para nelayan tradisional yang menggunakan pelabuhan di Pulau Rote Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai titik awal pelayaran.

Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah provinsi yang mempunyai banyak pulau kecil yang perairannya berbatasan dengan perairan negara lain. Di antara Pulau-pulau ini terdapat pulau terluar yang sangat strategis sebagai penentu batas luar negara. Upaya pengelolaan dan perhatian pemerintah pusat maupun lokal terhadap pulau terluar ini perlu dilakukan agar pulau-pulau tersebut tetap menjadi milik Negara kesatuan Republik Indonesia dan dapat memberikan nilai tambah bagi penduduk sekitar.

Tulisan yang merupakan hasil kajian pustaka ini, tidak bermaksud untuk mengupas konflik yang terjadi sebagai tarik menarik kepentingan bilateral antara Australia dan Indonesia, melainkan ingin melihat proses dinamika mobilitas nelayan tradisional di wilayah perbatasan laut, beserta perilaku dan intensitas perubahannya dari waktu kewaktu. Diharapkan tulisan ini dapat melengkapi beberapa tulisan lainnya yang merupakan satu bunga rampai mengenai dinamika mobilitas penduduk di perbatasan. Tulisan ini bersumber dari beberapa laporan penelitian, buku, klipping, makalah seminar serta artikel lainnya dari internet dengan subjek terkait.

Tujuan

Menguraikan motif, sejarah mobilitas nelayan tradisional teripang dan dinamika mobilitas di wilayah perbatasan laut di NTT (perairan Timor) serta

melihat peran dan kebijakan pemerintah di wilayah perbatasan laut dan pulau terluar

Tinjauan Umum

Kondisi Geografis dan Demografis Nusa Tenggara Timur (NTT)

Provinsi Nusa Tenggara Timur letaknya berbatasan dengan negara Timor Leste (batas darat dan Laut) dan negara Australia. Menurut Draft final Rencana induk pengelolaan batas negara Bapenas, provinsi ini merupakan wilayah perbatasan baru setelah Timor Timur tidak lagi menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbatasan antar negara di NTT terletak di 5 (lima) wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Belu, Kupang, Timor Leste Utara (TLU), Alor, dan Kabupaten Rote Ndao. Kabupaten dan Kecamatan berbatasan tersebut sebagai berikut :

Tabel 1
Kabupaten dan Kecamatan yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia di Laut

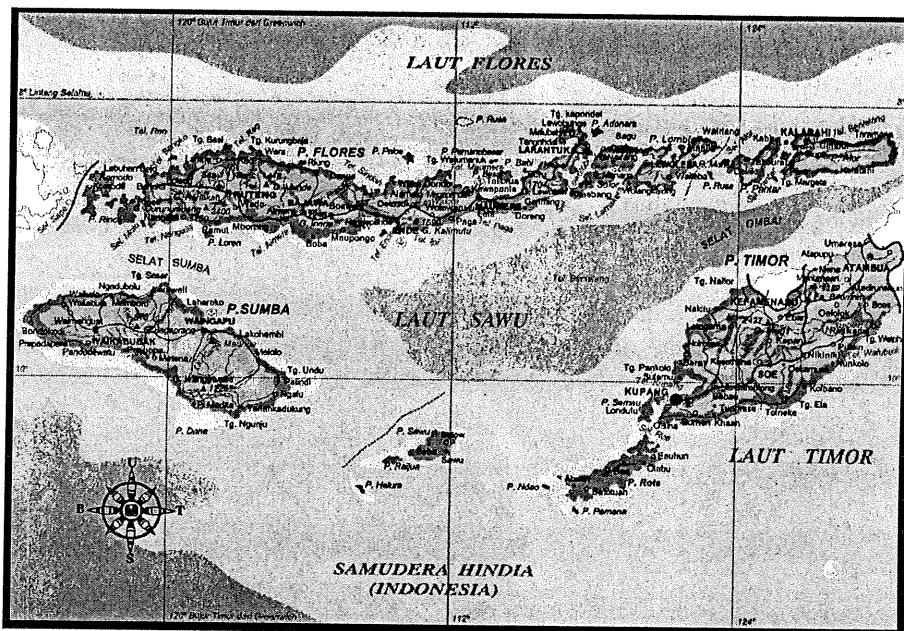
No	Kabupaten	Ibukota	Kecamatan
1	Kupang	Kupang	Amfoang Utara
2	TLU	Kafamenana	Insana Utama
3	Belu	Atambua	Tasifero Barat Kobalima
4	Alor	Kalabuhi	Alor Barat Daya
5	Rote Ndao	Rote	Rote Barat Daya

Sumber: BKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2002

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mempunyai 16 Kabupaten/ kota, secara geografis terletak pada 8° - 12° LS dan 118° - 125° BT. Terdiri dari beberapa pulau besar dan pulau kecil dengan luas wilayah mencapai $47.349,90 \text{ km}^2$. Jumlah pulau sebanyak 566 pulau (42 buah Pulau di huni). Luas perairan laut propinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 199.529 km^2 belum temasuk Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). Propinsi ini memiliki garis pantai sepanjang 5.700 km. Di bagian utara wilayah provinsi ini berbatasan dengan Laut Flores; di bagian timur berbatasan langsung dengan negara Timor Leste; Sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan

Laut Timor dan Samudera Hindia; serta di bagian barat berbatasan dengan propinsi Nusa Tenggara Barat (lihat Gambar 1 dan Tabel 2)

Gambar 1. Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur



Sumber: www.pemda-ntt.go.id, website pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 2
Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kabupaten/ Kota	Ibu kota	Luas Wilayah Km ²
1	Sumba Barat	Waikakbubak	4.015,92
2	Sumba Timur	Waingapu	7.000,50
3	Kupang	Sulamu	5.898,26
4	Timor Tengah Selatan	Soe	3.947,00
5	Timor Tengah Utara	Kefamenanu	2.669,66
6	Belu	Atambua	2.445,57
7	Alor	Kalabahi	2.864,60
8	Flores Timur	Larantuka	1.812,85
9	Sikka	Maumere	1.731,92
10	Ende	Ende	2.046,62
11	Ngada	Bajawa	3.037,88
12	Manggarai	Ruteng	4.188,90
13	Kota Kupang	Kupang	160,34
14	Lembata	Lewoleba	1.266,38
15	Rote Ndao	Ba'a	1.280,00
16	Manggarai Barat	Labuan bajo	2.947,50
Jumlah Keseluruhan Wilayah			47.349,90

Sumber: BPS NTT Tahun 2004 dalam www.pemda-ntt.go.id, website pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah penduduk provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 1999 mencapai 3.706.536 jiwa, naik 1,3 persen dibandingkan tahun 1998. Namun pada tahun 2002 penduduknya menjadi 3.924.871 Jiwa, yaitu naik 1,28 persen dari tahun 2001 yang berjumlah 3.875.187 jiwa. Propinsi NTT terdiri dari 2543 desa, 639 desa diantaranya adalah desa pantai. Jumlah penduduk desa pantai tersebut 29,33 persen dari sekitar 1.136.429 Jiwa dengan 0,8 persen diantaranya bergerak dibidang perikanan, termasuk nelayan 101.522

Jiwa dan 9.996 jiwa berprofesi sebagai pembudidaya ikan. (DKP Provinsi NTT, 2002 dalam Indrawasih, 2005).

Sumberdaya Perikanan di NTT

NTT mempunyai berbagai sumberdaya perikanan diantaranya adalah Teripang. Teripang merupakan salah satu sumberdaya perikanan penting di Nusa Tenggara Timur. Nilai ekspor hasil laut ini mencapai Rp. 390 Juta pertahun, yang merupakan 16 % total nilai ekspor hasil-hasil perikanan NTT. Pemerintah daerah mengenakan *export fee* untuk setiap teripang yang dikirim keluar daerah (Seminar Nasional Perikanan Indonesia 2005). Data potensi Sumberdaya perikanan dan pemanfaatan Sumberdaya perikanan laut NTT lainnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Pembangunan Wilayah perbatasan laut dan Pulau Terluar

Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis yang mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Karakteristik kegiatan yang berlangsung di wilayah perbatasan ini, baik darat maupun laut akan mempunyai dampak penting bagi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wilayah perbatasan merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di sekitar perbatasan, memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan NKRI. Hal penting lainnya adalah bahwa wilayah perbatasan ini mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional. (Bappenas, Draft final Rencana induk pengelolaan batas negara).

Keluarnya peraturan pemerintah (PP) No. 78 tahun 2005, yang merupakan kebijakan publik yang mengatur wilayah perbatasan, khususnya pulau terluar, Diharapkan PP ini dapat menjawab isu kesenjangan pembangunan, penegakan hukum dan batas maritim pulau terluar. Pulau terluar merupakan wilayah penting penentu batas wilayah suatu negara. Oleh sebab itu Pulau terluar merupakan wilayah yang sangat penting dan strategis untuk dipertahankan dan dikelola dengan baik. Dari sisi masyarakat tantangan yang merupakan ciri masyarakat di wilayah Pulau terluar adalah adanya kesenjangan pembangunan, yaitu bahwa biasanya masyarakat di pulau terluar miskin, mutu pendidikan rendah, beberapa golongan masyarakat lebih banyak berada dinegara tetangga terdekat, rawan pangan, prevalensi terhadap berbagai penyakit tinggi, terisolasi dari pusat pertumbuhan ekonomi dan mempunyai angka pengangguran yang tinggi. (Retraubun dalam Kompas 2006: 6). Secara fisik pulau terluar jelas berperan penting guna menetapkan *base point* (titik dasar) untuk menentukan perhitungan batas negara. Di Nusa Tenggara Timur, Pulau Rote dan Pulau Timor termasuk ke dalam pulau terluar yang menjadi tempat

transit dari para nelayan tradisional dari luar NTT sejak ratusan tahun yang lalu

Dampak positif mobilitas nelayan pelintas batas bagi pembangunan daerah salah satunya adalah meningkatnya potensi kegiatan perdagangan di wilayah ini. Kegiatan Perdagangan tersebut dapat meningkatkan kualitas penduduk dan pembangunan wilayah secara nyata (Aswatini, 1996). Kegiatan perdagangan atau usaha terkait perikanan di NTT meliputi bidang usaha pengumpulan teripang, penangkapan ikan dasar laut, budidaya kerang mutiara dan rumput laut dll. (lihat situs pemda <http://www.pemda-ntt.go.id/index.php?hal=mikan>).

Mobilitas Nelayan Tradisional dan Isu *Transborder Fishing* di NTT

Motif dan Sejarah Mobilitas Nelayan Tradisional Teripang

Manusia dalam sejarahnya melakukan perpindahan (migrasi) melintasi benua guna mencari makan, tempat berteduh dan keselamatan serta kenyamanan dari buasnya iklim dan kini ditambah dengan alasan baru yaitu alasan relokasi pekerjaan dan adanya kelebihan penduduk (*overpopulation*) (<http://www.nationalgeographic.com/eye/overpopulation/overpopulation.html>). Mobilitas sendiri didefini-sikan "sebagai kejadian perpindahan orang dengan alasan geografis maupun sosial" (Awatini 1996:148). Uraian berikut adalah tentang mobilitas sirkuler Armada teripang Makassan (Makasar-Bugis-Bajo laut) ke daratan Australia dan mobilitas nelayan tradisional di sekitar perairan Timor sampai dengan pulau Pasir.

Motif Mobilitas nelayan tradisional teripang dapat dikaitkan dengan sejarah pelayaran armada teripang orang Sulawesi Selatan ke selatan Indonesia (NTT) menuju daratan Australia. Mobilitas Sirkuler ini dilakukan guna mengumpulkan barang dagangan berupa teripang, kulit mutiara atau trochus yang akan dijual kepada pedagang Cina. Beberapa ahli sejarah di Australia telah berupaya untuk menemukan bukti tentang tahun pertama kali orang Makasan tersebut sampai di Australia.. Ian Crawford dari museum *Western Australia* berasumsi bahwa kontak orang Makassan dengan daratan Australia terkait erat dengan kehadiran para pedagang teripang Cina di Indonesia. Dari catatan Belanda ia menemukan adanya indikasi bahwa pada tahun 1637 kapal jukung Cina telah mengangkut teripang dari pelabuhan di Batavia (kini Jakarta) ke negaranya. Sehingga diasumsikan bahwa sekitar tahun itulah orang Makasan telah mengunjungi Australia guna mengumpulkan dan memeroses teripang dan menjualnya di Jakarta kepada pedagang Cina. Ketika Makasar jatuh ke tangan belanda tahun 1669,

perdagangan teripang di Jakarta dipindahkan ke Makasar. (Cambell & Wilson, 1993 :8-9).

Mac Knight dalam Cambell dan Wilson (1993) menyebutkan tahun 1720-an sebagai kemungkinan tahun yang lebih tepat untuk menentukan perjalanan ekspedisi tripang pertama kali. Baik MacKnight maupun Crawford menyebutkan bahwa tujuan perjalanan mereka adalah guna mengumpulkan dan memereses tripang dengan tujuan komersial (tidak untuk dikonsumsi sendiri). Selain itu mereka juga mengambil kayu dalam berbagai ukuran. Sehingga motivasi perjalanan tersebut adalah mencari produk yang laku dijual terutama tripang, juga kulit mutiara, kulit penyu dan kayu. (Cambell & Wilson, 1993:10). Orang Aborijin mempunyai pendapat lain mengenai kapan Orang Makassan sampai di daratan Australia.

Dari sejarah lisan orang aborijin di daratan Arnhem Australia Utara, menyebutkan adanya kunjungan orang Baijini atau orang Bugis-Makasar yang melakukan perjalanan mengumpulkan teripang dan singgah di daratan Arnhem pada abad 16. Tujuan mereka adalah mencari area yang cocok untuk melakukan eksplorasi yang intensif dari kulit mutiara (*Trochus niloticus*) dan teripang. Setelah menemukan tempat yang cocok mereka mendirikan rumah yang sama dengan tempat asli mereka di Indonesia, membangun dapur dan sumur umum, membuat tempat untuk mendidihkan teripang dan rak-rak untuk menjemurnya. Kemudian disepanjang pantai mereka menanam pohon asam dan pohon kelapa. Orang Makassan biasanya bermukim di daratan Arnhem selama 2-3 bulan dan menjalin hubungan harmonis dengan suku lokal serta saling bertukar pengetahuan

. Perahu yang mereka gunakan disebut perahu Panduwakang (cikal bakal perahu Pinisi) yang secara rutin berlayar menuju tanah Arnhem. Dalam perjalanan menuju tanah Arnhem tersebut, Perahu ini singgah di Pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Timor untuk menambah bekal makanan. Perahu Paduwakang ini mengambil teripang dan trochus di sekitar perairan teluk Carpenteria (yang mereka sebut sebagai Marege) dan terumbu karang disekitar pantai Kimberley (dikenal mereka sebagai Kayu Jawa). (Pramono, 2003: 138) (Cambell & Wilson, 1993). Bobot perahu Paduwakang diperkirakan sekitar 20 – 70 ton dengan berawakan 30 - 50 orang. Perahu ini meninggalkan Makasar bulan Januari berlayar ke arah timur dengan 3 pilihan rute, yaitu: 1) Ke Aru dan menuju Selatan sampai ke daratan Arnhem; 2) Ke utara Pulau Timor arah tenggara menuju daratan Arnhem atau arah selatan menuju Kimberley; 3) Ke Selatan Pulau Timor arah tenggara menuju Kimberley. Dalam pelayarannya armada ini dikomandoi oleh Raja yang kapalnya dilengkapi dengan kompas dan meriam untuk menghalau bajak laut. Sesampainya di Pantai temapt tujuan, mereka akan berpencar dan mencari buruannya dibeberapa bagian yang berbeda disepanjang pantai.

Kemudian pada akhir bulan April mereka akan bergabung kembali dan memulai perjalanan pulang. (Cambell & Wilson, 1993)

Diperkirakan sampai tahun 1906 setidaknya ada 8000 orang Makassan yang setiap tahunnya berkunjung ke daratan tersebut. Tahun tersebut juga disebutkan sebagai tahun terakhir kunjungan armada teripang ke Utara Australia selama dua abad (tahun 1669 - tahun 1906), yang ditandai dengan kunjungan sebuah perahu ke daratan Arnhem. Sesungguhnya kegiatan tersebut telah mulai menurun sejak 1880 yang disebabkan karena adanya kewajiban membayar pajak dan ongkos lisensi yang diberlakukan oleh pemerintahan Australia Selatan (kemudian diteruskan oleh pemerintahan *Northern Territory*-tahun 1882). Kondisi ini menjadi faktor disinsentif yang utama bagi kegiatan usaha teripang Indonesia di Australia, selain adanya kompetisi dari para pengusaha Tripang Australia. Keadaan tersebut pada akhirnya telah memmarginilasi kegiatan orang Indonesia dalam usaha teripang di Australia. (Cambell & Wilson, 1993:11). Bahkan si tahun 1906, nelayan Indonesia di larang melakukan kunjungan ke perairan Northern Territory (Macknight 1976: 100-126 dalam Dwyer, 2001 :33)

Penelusuran aktifitas nelayan Indonesia di Pulau Pasir yang dilakukan oleh Flinder di Kupang tahun 1803, guna menggali informasi dari nelayan setempat. Hasil penelusurannya menyebutkan bahwa 20 tahun sebelumnya ada perahu nelayan yang hanyut (karena angin barat) sehingga terdampar di pantai Australia. Nelayan tersebut menemukan banyak teripang disana, akhirnya orang Makassan tersebut sering berkunjung kesana. Sumber Informasi lain menyebutkan bahwa daerah Dry Shoal (Australia) yang berada di sebelah selatan Pulau Rote, merupakan rekaman awal dari kegiatan nelayan NTT di area Pulau Pasir. Menurut *Cerita Rakyat Rote dan laporan kolonial, Indonesia telah menggunakan Pulau Pasir dan mengoleksi teripang di area ini sejak 1728.*

Pulau Ashmore Reef atau oleh nelayan Indonesia disebut sebagai pulau Pasir adalah salah satu pulau terbesar dari sejumlah pulau-pulau karang kecil lainnya yang tersebar di barat laut landas continental Australia. dilingkari oleh sejumlah laguna dan tiga pulau pasir kecil tak berpenduduk. Terumbu ini berada ditepi celah Timor, 80 mil laut (*nautical miles*) atau kurang dari 150 Km dari Pulau Rote di Indonesia dan sekitar 840 km Barat Darwin atau 610 kilometer utara Broome. (Lihat Gambar 2). Asmore Reef diambil dari nama seorang kapten Inggris bernama Ashmore yang pernah berkunjung ke pulau Pasir yang ketika itu namanya belum terdaftar. Kemudian ia mendaftarkan nama pulau ini di tahun 1811 dengan menggunakan namanya. Karena tidak bernilai ekonomi pulau ini diabaikan hingga tahun 1878, yaitu tahun yang sama ketika orang Amerika mulai

meng-klaimnya sebagai bagian Amerika guna mengeksplorasi deposit guano/ pupuk dari kotoran hewan yang telah mereka lakukan sejak tahun 1850-an. Friksi antara keduanya terjadi, akibatnya Inggris menganeksasi Asmore reef tahun 1878 dan Pulau Cartier tahun 1909. (Campbell & Wilson, 1993)

Saat Australia jadi negara federal di tahun 1901 tidak semua pulau yang berada di perairan Timor menjadi bagiannya. Tahun 1931 Pulau Cartier dekat Asmore Reef ditempatkan di bawah otoritas pemerintah Australia, namun semenjak tahun 1938 secara administratif pulau ini berada dibawah hukum *Northern Territory* sampai tahun 1978. Saat Northern Territory memperoleh hak untuk memerintah sendiri/ self government (1978) dan memperoleh teritorial eksternal, maka teritorial Asmore Reef dan pulau Cartier mulai tercipta. Teritorial baru ini sejak itu dikontrol secara langsung oleh pemerintah Federal. Diyakini bahwa salah satu faktor dari keputusan pemerintah Commonwealth guna mendapatkan kontrol langsung dari Asmore Reef dan Pulau Cartier adalah bahwa secara signifikan pulau-pulau ini merupakan penentu Jurisdiksi Maritim Australia (sebagai penentu luas wilayah jurisdiksi). (Campbell & Wilson 1993:119).

Tahun 1968 secara unilateral Australia mengumumkan 12 mil laut sebagai zona perikanan di perairan sekitar teritori Australia (*Australian Fishing Zone-AFZ*), perpanjangan dari 3 mil laut yang semula ditetapkan. Tahun 1974 dicapai kesepakatan melalui Nota kesepahaman (Memorial of Understanding-MoU) tentang *fishing right* nelayan tradisional Indonesia, yaitu bahwa nelayan Indonesia diberikan akses untuk mengambil sumberdaya laut di lima titik di AFZ, yaitu di *Asmore Reef, Pulau Cartier, Scoot Reef, Seringapatam Reef* dan pulau Browse. (Lihat gambar 2) Sumberdaya yang boleh diambil di lima titik ini adalah Trochus, Teripang, Abalone, Kerang-kerangan dan sponge. Nelayan Tradisional Indonesia boleh berhenti di dua titik untuk mengambil air. Tahun 1979 Australia mendeklarasikan AFZ sampai 200 mil laut. Tahun 1986 MOU 1974 direvisi, guna mengklarifikasi pengertian mengenai definisi tradisional (dari peralatan dan perahu yang digunakan) dan pembatasan level operasi nelayan tradisional yang diperbolehkan yaitu pada level subsisten, bukan yang berorientasi ke bisnis/ usaha. (Adhuri, 2005: 63-64).

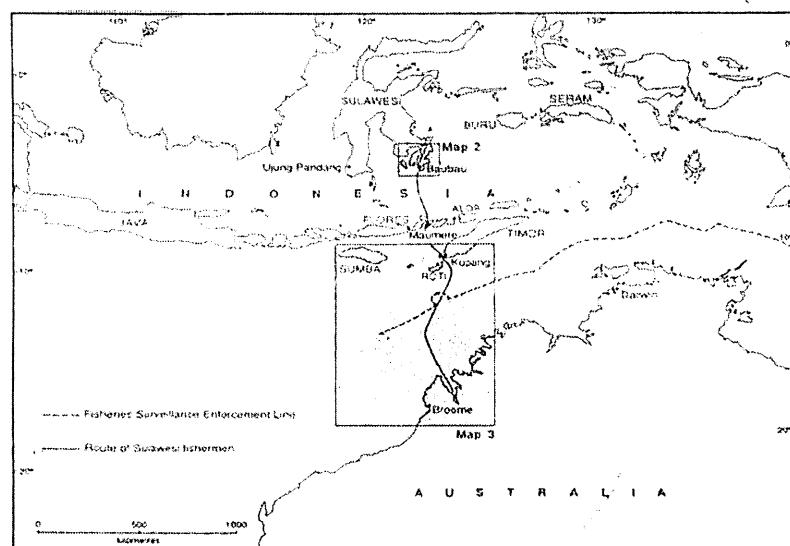
Pada tanggal 28 Juli 1983 Asmore Reef ditetapkan sebagai *National Nature Reserve* dibawah Undang-undang Konservasi taman Nasional dan konservasi Alam (*wildlife*) 1975. Ketentuan ini telah memberikan akibat yang signifikan bagi kegiatan nelayan Indonesia di AFZ (daerah perikanan Australia). Daerah reservasi tersebut dimaksudkan selain guna melindungi jenis burung migrasi dan burung laut serta penyu, yang masuk dalam perjanjian perlindungan internasional, juga sebagai usaha untuk

mengkontrol eksplorasi sumberdaya laut yang berlebihan. Daerah Reservasi ini meliputi 583 Km² dan terdiri dari tiga pulau, terumbu karang dan perairan sekitarnya. (Dwyer, 2001)

Penangkapan terhadap nelayan tradisional di Pulau Asmore Reef dan sekitarnya mulai terjadi tahun 1985, yang diawali terhadap lima orang nelayan Bajo yang memancing hiu. Mulai saat itu penangkapan demi penangkapan bagi nelayan illegal lebih sering terjadi. Dwyer (2001) menyebutkan hal ini sebagai akibat dari deklarasi Ashmore Reef yang ditetapkan sebagai daerah konservasi di tahun 1983 dan sebagai sikap kepatuhan Australia pada perjanjian Internasional termasuk perjanjian CITES (konvensi Internasional tentang perdagangan hewan langka yang dilindungi). Kedua alasan tersebut telah memberikan *power* yang cukup guna menetapkan larangan operasi nelayan Tradisional di Asmore Reef. Disisi lain regulasi yang mengabaikan *fishing ground* yang telah lama menjadi andalan nelayan tradisional Indonesia, bagaimanapun juga akan meningkatkan marginalisasi sosial ekonomi para Nelayan tersebut.(Dwyer, 2001)

Penangkapan terhadap nelayan tradisional di Pulau Ashmor Reef dan sekitarnya mulai terjadi tahun 1985, yang diawali terhadap lima orang nelayan Bajo yang memancing hiu. Mulai saat itu penangkapan demi penangkapan bagi nelayan illegal lebih sering terjadi.

Gambar 2. Peta Indonesia Timur dan Australia Bagian Utara (Reid, 1992:10)



Sumber: Reid, 1992., *Indonesian Fishermen Detained in Broome: A Report on the Social and Economic Background*, Centre for Southeast Asian Studies Northern Territory University, p. 10

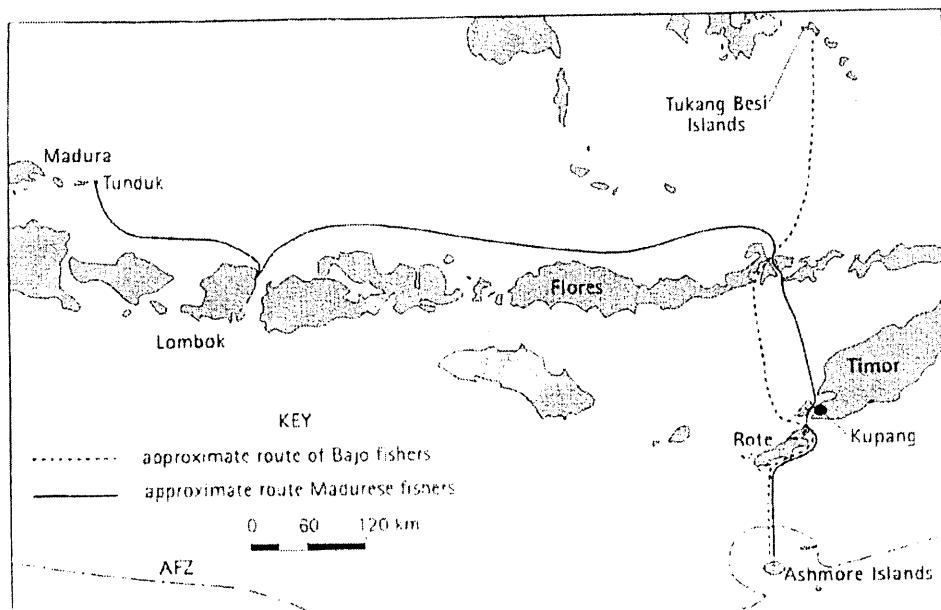
Dinamika Mobilitas Nelayan Tradisional Indonesia di wilayah Perbatasan Laut di Perairan Timor

Dinamika mobilitas nelayan tradisional Indonesia di wilayah perbatasan laut di laut Timor akan memberi pengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Mobilitas, pola perilaku/ kebiasaan yang sesuai dengan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, dipengaruhi oleh cukupnya ketersedian sumberdaya di wilayah ini dan menjadi andalan para nelayan. Berbeda dengan zaman nenek moyang mereka terdahulu, mobilitas mereka ke Pulau Ashmore Reef misalnya, kini semakin dibatasi, walaupun ada MOU tentang hak ulayat. Di sisi lain karena desakan kondisi sosial ekonomi seringkali Nelayan Tradisional terpaksa melakukan kegiatan yang ternyata melanggar ketentuan yang ada dalam MOU 1974. Diantara pelanggaran tersebut puncaknya adalah penyelundupan orang asing (pengungsi atau *refugee*) dari NTT (yang akhirnya mereka sadari sebagai tindakan yang merugikan mereka sendiri). Bagaimanapun juga perairan Australia mempunyai sumberdaya yang lebih melimpah yang telah menjadi daya tarik nelayan NTT bahkan juga dari luar NTT, seperti dari kawasan barat Indonesia. Di kawasan barat jumlah penduduk yang padat menyebabkan eksloitasi sumberdaya menjadi berlebihan. (Dwyer, 2001).

Di NTT terdapat berbagai suku atau etnik nelayan baik dari Sulawesi maupun dari wilayah Indonesia lainnya. Berikut adalah pola pelayaran nelayan tersebut dari Pelabuhan di Pulau Rote (pelabuhan Oelaba dan Pepela) serta kekhususan mobilitas dari masing-masing kelompok nelayan tersebut. Mobilitas nelayan tersebut di mulai baik dari pelabuhan ikan Oelaba (di Utara Rote) dan atau dari Pepela (tenggara Pulau Rote). Pelabuhan Pepela tersebut banyak berubah setelah perang dunia berakhir menjadi pelabuhan yang berkembang dengan pesat. Umumnya pendatang di Pepela adalah orang Buton demikian juga dengan suku lainnya, sehingga populasi di Pepela terdiri dari orang-orang keturunan Buton, Rote, komunitas Bajo (sebagian menetap), Sumatra, Jawa dan Flores serta pulau-pulau disebelah timurnya termasuk juga orang-orang keturunan Arab.

Orang Bajo di Pepela mempunyai hubungan yang kuat dengan asal mereka di pulau tukang besi (lihat gambar 3). Spesialisasi mereka adalah menangkap ikan Hiu dengan perahu Kanu. Kapalnya hanya bermuatan 4-8 awak. Pelabuhan Oelaba yang terletak di pantai Pulau Rote bagian utara, 20 km dari kota Baa merupakan pangkalan mereka. Orang-orang di pelabuhan ini juga mempunyai hubungan yang juga kuat dengan orang Buton. Di Pelabuhan ini ada dua armada besar yang dikuasai oleh muslim dan Kristen. Setiap tahun sekitar bulan Agustus mereka berlayar bersama guna mengambil dan mencari teripang dan trochus dengan perahu lambo. Daerah tujuan mereka adalah *Area Scoot Reef*.

Gambar 3. Rute Nelayan Teripang Tradisional Madura dan Bajo Laut Melintas Batas menuju Pulau Pasir (Dwyer, 2001: 44)



Sumber: Dwyer, D. 2001, *Fisher of People: from Reef Fishing to Refugees, the Changing Role of Indonesian Sailors and Their Perahu at Ashmore Reef, North Australia*. In Fredericksen, C. & I. Walters (eds) *Altered States: Material Culture and Transformations in the Arafura region*. NTU Centre for Southeast Asian Studies. pp 31-53, Darwin:NTU

Terakhir adalah orang-orang Madura yang berangkat dari daerah Pulau Tunduk di Madura. Mereka berlayar dari pulau tersebut dengan Perahunya yang khas "Perahu Madura" atau Perahu Lete yang dilengkapi motor menuju Ashmore Reef, namun sesampainya di Kupang motornya di lepas dan disimpan. Hal ini dimaksud guna mematuhi aturan dalam MOU 1974 sesampainya mereka di perairan Ashmore Reef. Target Utama mereka adalah teripang. (Dwyer, 2001: 42-45).

Mengkaji perkembangan yang ada di wilayah perbatasan laut dalam kaitannya dengan kebiasaan nenek moyang, serta dengan semakin ketatnya aturan dari pemerintah negara tetangga, maka mereka perlu melakukan adaptasi tingkah laku dan kebiasaan dalam menyingkapi keterbatasan mobilitas tersebut.

Penutup

Mobilitas Suku bahari laut sejak dahulu adalah bertujuan untuk kegiatan komersil. Bermula dari Armada teripang suku Makassar-Bugis-Bajo) yang berlayar untuk mengumpulkan hasil laut jenis Teripang dan Kerang Mutiara, telah membawa suku bahari dari Sulawesi ini menginjakan kakinya di Australia sebelum Orang-orang Eropa menguasainya.

Kegiatan Perdagangan ini berlangsung selama dua abad dan berakhir tahun 1906, ketika Eropa mengusai Daratan Australia. Semula para pedagang Makassan yang melakukan mobilitas rutin ini di wajibkan untuk membayar pajak dan lisensi sampai akhirnya diberlakukan sama sekali larangan kunjungan ke Wilayah Daratan Australia barat sampai dengan utara oleh otoritas setempat. Mereka juga menghadapi persaingan perdagangan dengan pedagang teripang Eropa.

Di lokasi lain di Kepulauan Ashmore Reef yang sebelumnya belum di klaim orang Eropa, mobilitas rutin untuk mengambil teripang juga dilakukan oleh orang-orang dari Rote. Namun pola rutinitas ini juga terganggu sejalan dengan pengakuan Eropa akan wilayah kepulauan ini sebagai bagian dari wilayahnya dengan dasar hukum yang ditetapkan pemerintah Inggris dan kemudian dialihkan ke pemerintahan Australia.

Walaupun mobilitas ini masih bisa dilakukan oleh nelayan tradisional NTT, karena adanya Nota kesepahaman (MOU) antara Indonesia dan Australia tahun 1974, namun seiring dengan waktu maka daerah perikanan tradisionalpun semakin menyempit. Terlebih dengan ditetapkan sebagai daerah reservasi dan taman nasional pada tahun 1983. Sehingga diperlukan adaptasi tingkah laku dan kebiasaan menyikapi keterbatasan mobilitas tersebut.

Dari uraian dalam tulisan ini dapat disimpulkan bahwa amat penting untuk berupaya secara hukum untuk mempertahankan kedaulatan negara bahkan pada pulau yang tidak berpenghuni. Pulau terluar amat menentukan jurisdikasi suatu negara. Selain itu pembangunan kapasitas sumberdaya nelayan atau penduduk di pulau terluar perlu diperhatikan agar mereka dapat melakukan alih usaha guna kelangsungan kehidupan mereka.

Lampiran 1

Tabel Potensi Sumber Daya Perikanan NTT dan Pemanfaatannya

No	Jenis Komoditi	Lokasi/Daerah Penyebaran	Perkiraan	Pemanfaatan/		Keterangan
			Potensi	Produksi	Sarana dan Prasana	
			(Ton,Ha)	(Ton, Ha)		
1.	Ikan Pelagis Besar				Sarana Penangkapan :	
	Tuna / Cakalang	Laut Sawu dan Laut Timor	15.000 Ton	6.800 Ton	Line, Purse seine, Prasarana PPI, TPI, Fabrik Es	Long Line, Pole and Line (Perusahaan), Purse Seine (perorangan)
	Tongkol		10.000 Ton	5.000 Ton		PPI, TPI (dikelola oleh Propinsi / Kota).
	Tenggiri		5.000 Ton	1.750 Ton		Tersedia kawasan industri Bolok untuk investor
						Tersedia Pelabuhan Perikanan Tipe C di Tenau Bandar Udara ,Pelabuhan Laut Ekspor, Hotel Bank Telepon, Kantor Pos
2.	Ikan Pelagis Kecil Laut/ Pantai Kab. Tembang	Seluruh Perairan Kupang	25.000 Ton	7.500 Ton	Purse Seine, Gillnet, Jala Lompo , Bagan	Telah ada master Plan Pangkalan Pendaratan Ikan di Tablolong Kec. Kupang Barat
	Layang					Tersedia kawasan industri Bolok untuk investor
	Selar Kembung Dll					Tersedia Pelabuhan Perikanan Tipe C di Tenau
3	Ikan domersal Kerapu Kakap Bawai Dll	Seluruh Perairan Laut / Pantai Kab. Kupang	10000 Ton	2.750 Ton	Rawai Dasar, Pancing Tunggal, Bubu	Diusahakan secara perorangan Perusahaan Penangkapan dan pengumpulan ikan yang melakukan perdagangan antar pulau : 1. PT timur Sarana Pembangunan Nekemese 2. Primkopa Lana 3. CV. Christ 4. CV. Indra Jaya Pernai 5. PD. Kelautan Kab. Kupang
4.	Non Ikan Lobster	Perairan pantai Amarasi Barat, Amarasi Selatan, Amarasi,	15 Ton	2,5 Ton	Trammel Nel, Diusahakan secara Selam/Panah	Perorangan

Amfoang Utara, Fatuleu						
Udang Putih	Peraliran pantai Amarasi, Amarasi Selatan, Amarasi, Sulamu, Kupang Timur	60 Ton	40 Ton	Trammeeet Net, Sero	Diusahakan secara Perorangan	
Cumi - cumi	Peraliran pantai pulau Semau	150 Ton	90 Ton	Jala Lompo	Dlusahakan secara peerorangan	
Sirip Hiu	Seluruh peraliran laut/ pantai Kab. Kupang	25 Ton	7,5 Ton	Rawai	Dusahakan secara perorangan	
5. Budidaya Perikanan a. Laut						
- Teripang	Semau, Sulamu, Kupang Timur, Amarasi Timur	50 Ha	-	Kurungan (Pagar)	Belum diusahakan	
- Mutiara	Kupang Barat (Bolok, Batu Bao Semau (Huitelot, Ultao Onansila)	400 Ha	60 Ha	Rakit	(PT. Timor Otsuki Mutiara)	
- Rumphut Laut	seluruh perairan pantai Kab Kupang (kecuali peraliran pantai Kupang tengah, Kupang Timur)	13.857 Ha	1.500 Ha	Lepas Dasar dan Long Line	Diusahan secara perorangan	
- Kerapu	Perairan pantai Pulau Semau, Kupang Barat, Sulamu.	150 Ha	-	Kerambaa Jaring Apung (KJA), Tambak	KJA taraf uji coba di Kupang Barat dan Semau	
b. Payau						
- Tambak	Kupang Timur (Nunkurus, Babau, Merdeka), Sulamu, Bipolo, Pariti, Oeteta), Kupang Tengah	1.750 Ha	113 Ha	Tambak	Diusahakan secara perorangan telah tersedia masteer plan pertambakan di Teluk Kupang.	

	(Oebelo, Noelbaki), Amarasi Timur (Oemoro)				
c. Air Tawar	Kupang Timur (Nunkurus, Laut Sawu dan Laut Timor	127, 50 Ha 15.000 Ton	14 Ha 6.800 Ton	Kolam Line, Purse seine,	Diusahakan secara perorangan (Perusahaan), Purse Seine (perorangan)
Tuna / Cakalang				Prasarana PPI, TPI,	PPI, TPI (dikelola oleh Propinsi / Kota).
Tongkol		10.000.Ton	5.000 Ton	Pabrik Es	
Tenggiri		5.000 Ton	1.750 Ton		
6	Budidaya Tambak Bandeng	1. Kupang Timur (Nunkurus, Babau, Merdeka 2. Sulamu (Pariti, Oeleta, Bipolo 3.Kupang Tengah (Oebelo, Noelbaki Tarus) 4. Amarasi Timur (Oemoro)	1.750 Ha	100 Ha	

Sumber: <http://www.pu.go.id/humas/media%20massa/maret/kp3003011.htm>

Daftar Pustaka

- Dedi S. Adhuri (ed), 2005., *Fishing in, Fishing out, Memahami konflik-konflik Kekayaan di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur*, LIPI Press Jakarta
- Aswatini, 1996, *Mobilitas penduduk dan pembangunan di wilayah perbatasan*. Dalam Suko Bandiyono (et al), 1996, *Mobilitas Penduduk Perbatasan di Irian Jaya*, PPT LIPI
- Alimuddin, 2005, *Orang Mandar Orang Laut* dalam Hermawan (ed), KPG, Jakarta
- Bandiono, Suko (ed), *Mobilitas Penduduk di Perbatasan Papua-PNG, Sebuah Peluang dan Tantangan*, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Jakarta
- Bappenas, *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara di Provinsi NTT*, Draft Final, [kawasan.bappenas.go.id /k_perbatasan/data_batas /bukurnci_ntt.pdf](http://kawasan.bappenas.go.id/k_perbatasan/data_batas/bukurnci_ntt.pdf)
- Cambell & Wilson, 1993, *The Politics of Exclusion, Indonesian Fishing in The Australian Fishing Zone*, Indian Ocean Centre for Peace Studies No. 5, Western Australia
- Dwyer, Dan., *Fishers of People: from Reef Fishing to Refugees, the Changing Role of Indonesian Sailors and Their Perahu at Ashmore Reef, North Australia*. In Fredericksen , C & I. Walters (eds) *Altered States: Material Culture and Transformation in the Arafura Region*. NTU Centre for Southeast Asian Studies. Pp. 31-54. Darwin: NTU
- Fox, J.J. 2000. *Maritim communities in the Timor and Arafura: some historical and anthropological perspectives*. Mod. Quart. Re.S.E. Asia. (16):337-356.
- [http://www.antara.co.id.](http://www.antara.co.id/), *Pencurian Ikan oleh Nelayan Indonesia di Australia makin marak*, di akses 26 Nov. 2006
- http://en.wikipedia.org/wiki/population_mobility, *Population Mobility*, di akses 30 November 2006
- <http://www.pu.go.id/humas/media%20massa/maret/kp3003011.htm>, *Potensi Sumber Daya Perikanan dan Pemanfaatannya*

- Indrawasih, R., *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Di Nusa Tenggara Timur.* Dalam Dedi S. Adhuri (ed), 2005., *Fishing in, Fishing out, Memahami konflik-konflik Kenekayanan di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur*, LIPI Press Jakarta
- Kusnadi, 2002, *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Alam*, LKIS, Cetakan ke 2, Jogjakarta
- Pressat, 1985;148 dalam Aswatini 1996, *Mobilitas penduduk dan pembangunan di wilayah perbatasan*. Dalam Suko Bandiyono (et al), 1996, *Mobilitas Penduduk Perbatasan di Irian Jaya*, PPT LIPI
- Retraubun, Alex., 2006, *Mengapa Pulau Terluar, bukan terdepan*, Kompas 21 September 2006: 6
- Pramono, Djoko., 2005, *Budaya Bahari*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Reid, 1992., *Indonesian Fishermen Detained in Broome: A Report on the Social and Economic Background*, Centre for Southeast Asian Studies NTU,Australia
- Stacey, N. 2001. *Crossing borders: implications of the memorandum of Understanding on Bajo foshing activity in northern Australian Waters.* Draft paper presented at "the Symposium Understanding the Cultural and Natural Heritage values and Management challenges of the Ashmore Region: April 2001, Darwin
- Seminar Nasional Perikanan Indonesia 2005, Status perikanan teripang di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, Seminar Nasional Perikanan Indonesia, 21 -22 September, 2005
- www.pemda-ntt.go.id, website pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

DINAMIKA MOBILITAS SOSIAL – BUDAYA MASYARAKAT SKOU DI PERBATASAN PAPUA UTARA

Eniarti B. Djohan

Pendahuluan

Provinsi Papua Barat dikenal dengan keragaman suku, yang satu dengan lainnya menganggap berbeda bahasa/dialek maupun budaya. Keragaman suku ini juga dijumpai di wilayah perbatasan antara Papua Barat dengan Papua New Guinea (PNG). Misalnya di kawasan Papua daratan bagian utara dijumpai berbagai suku yang didominasi orang Skou, Wembi dan Arso. Di antara kelompok masyarakat ini umumnya mempunyai batas wilayah lokal yang terjadi secara almaiah dan antara lain terjadi karena adanya bahasa/dialek, tanah milik kelompok dan mitologi yang sama, yang disebut batas alam (*natural boundaries*). Namun ada juga batas daerah yang dibuat manusia berdasarkan perjanjian antara negara atau daerah, yang umumnya disebut sebagai batas buatan (*artificial boundaries*). Kedua konsep batas daerah ini sering membuat rancu masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan dalam menjalankan kehidupannya. Di satu sisi mereka hanya mengetahui batas-batas lokasi berdasarkan yang telah dibuat atau ceritan dari nenek-moyangnya, namun di sisi lain mereka harus patuh terhadap batas yang dibuat antar negara. Kemudian, terbitnya batas negara antara PNG dan NKRI berdampak terhadap dinamika kehidupan masyarakat lokal yang berdiam di wilayah perbatasan. Terutama pada kelompok masyarakat yang mempunyai budaya yang sama dan ikatan kekerabatan dengan masyarakat yang berdiam di wilayah PNG. Misalnya antara penduduk Kampung Sota (Merauke) mempunyai hubungan sosial dengan penduduk Weam (PNG), penduduk Kampung Wembi dengan penduduk Bewani (PNG) dan Penduduk Kampung Skou dengan Wutung/Vanimo West Coast (PNG).

Mengacu kepada gambaran kehidupan masyarakat perbatasan Papua dan PNG saat ini, tulisan ini bertujuan untuk ‘mendeskripsi dan mengkaji dinamika mobilitas penduduk yang berdiam di perbatasan Papua dalam perspektif sosial-budaya. Dalam hal ini, dinamika perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat karena dipengaruhi oleh aspek social-budaya yang ada dalam masyarakat tersebut. Menurut Yuliati dan Poernomo (2003:236) ada dua pola mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu (1) mobilitas yang terjadi karena adanya perubahan dalam struktur atau lapisan masyarakat (mobilitas vertical), dan (2) mobilitas yang terjadi karena adanya

perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain (mobilitas horizontal). Kedua pola mobilitas tersebut dimungkinkan dapat saling mempengaruhi. Contoh: adanya perpindahan penduduk (mobilitas vertikal) kemungkinan akan merubah nilai-nilai atau tatanan yang ada di masyarakat (mobilitas horizontal).

Papua dikenal dengan banyak kelompok masyarakat atau suku, termasuk kawasan perbatasan. Tulisan ini mengambil satu kelompok masyarakat yang ada di perbatasan bagian utara, yaitu kelompok masyarakat Skou. Kelompok ini mempunyai ciri-ciri penuturan bahasa sama yang berlokasi di kampung-kampung perbatasan Negara PNG dan NKRI yang disebut bahasa Skou. Sebagai masyarakat yang berlokasi di daerah perbatasan, maka di antara mereka mempunyai ikatan kekerabatan dan sejarah yang sama dengan masyarakat di kampung-kampung yang ada di wilayah PNG. Pilihan terhadap suku ini karena Puslit Kependudukan pernah melakukan penelitian di perbatasan Papua (Irian Jaya) bagian utara di mana orang Skou berdiam. Di antara penduduk kedua kampung ini mempunyai hubungan sosial budaya yang telah terjalin lama, sehingga menarik untuk dikaji tentang dinamika kehidupan mereka setelah adanya batas Negara. Selain itu, pada umumnya beberapa kajian tentang orang Skou berkaitan dengan kajian bahasa (linguistik) Skou (Jakarimilena, 2001; Donohue,2003).

Kajian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian di daerah perbatasan Papua²² dan studi pustaka dalam bentuk tertulis maupun media elektronik (internet). Dalam pengumpulan data primer digunakan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara dan pengamatan di lokasi penelitian. Informasi diperoleh selain dari penduduk setempat, juga kalangan akademisi dan penduduk bukan orang Skou. Tulisan ini diawali dengan deskripsi tentang sejarah dan gambaran daerah perbatasan sebelum membahas dinamika mobilitas sosial-budaya penduduk Kampung Skou. Ahir tulisan merupakan suatu kesimpulan dari kajian ini.

Gambaran Daerah Perbatasan Papua Utara: Sejarah dan Etnis

Perbatasan Indonesia bagian timur terletak di Propinsi Papua yang berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea (PNG), yakni memanjang dari utara hingga selatan yang membagi dua pulau tersebut sepanjang sekitar 800 km. Adanya batas Negara yang telah terjadi sejak jaman Belanda masih sulit untuk dipahami oleh sebagian penduduk Papua

²² Penelitian ini dilakukan pada tahun 1995 dan 1996 tentang mobilitas penduduk di daerah perbatasan Papua (waktu penelitian bernama Irian Jaya) di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Merauke. Tim peneliti adalah Dr. Ir. Aswatini R., Drs. Suko Bandiyono, M.Sc., Widayatun, SH. MA., Drs. Sri Hargiyono, Dra. Eniarti Djohan, MA.

yang masih menganggap satu ‘bangsa’ dengan masyarakat yang berdiam di wilayah PNG. Situasi ini yang menimbulkan permasalahan tidak ada hentinya di Papua yang berdampak tidak kondusifnya situasi di provinsi ini, terutama di kawasan perbatasan. Kelompok yang tidak setuju menjadi bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sering melakukan mobilitas illegal dari dan ke PNG. Oleh karena itu, sebelum mengkaji dinamika mobilitas sosial-budaya penduduk perbatasan (orang Skou) tampaknya perlu diketahui sejarah asal muasal Papua masuk NKRI.

Sebagaimana telah diuraikan oleh Bachtiar dalam tulisannya tentang ‘*Sejarah Irian Jaya*’, batas wilayah antara Papua dan PNG dibuat oleh Belanda sebagai wilayah jajahannya dengan mengikuti batas-batas kekuasaan Sultan Tidore, terutama daerah di Papua yang mengakui kedaulatan Sultan Tidore. Pada awalnya batas wilayah tersebut tidak tetap dan Belanda yang hanya mengakui batas wilayah kekuasaan Sultan Tidore agar tidak terbebani dalam menjaga pengamanan laut sekitarnya dari bajak laut. Penetapan batas-batas wilayah jajahan Balanda di Papua baru dapat diupayakan pada tahun 1846, yaitu ketika A.L.. Weddik ditugaskan oleh Gubernur Jendral Belanda di Batavia untuk menetapkan batas-batas wilayah Maluku dan Papua agar tidak diindahkan oleh Negara Eropa lainnya. Namun pada waktu itu batas yang diumumkan hanya pada bagian pantai, yakni mulai Semenanjung Bonpland pada garis 140°47' BT di pantai utara hingga sudut Semenanjung Goede Hoop, Teluk Wandamen dan seterusnya ke arah barat, barat daya dan tenggara hingga perbatasan garis batas 141° di pantai selatan. Dalam perkembangannya, pada tanggal 16 Mei 1895 baru ada batas seperti sekarang ini yaitu dengan adanya kesepakatan antara pemerintah Belanda dan pemerintah Inggris tentang batas antara wilayah kekuasaan mereka masing-masing di New Guinea. Batas timur Papua/Irian dimulai dari pantai selatan pada pertengahan muara Aungai Bensbach (sekitar 141°1'47" BT), kemudian ke utara sampai bertemu Sungai Fly sampai pada garis 141° BT dan mengikuti garis tersebut hingga pantai utara. Batas antara Irian Jaya/Papua dan Irian Timur (PNG) dinyatakan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, 1895, No. 220 dan 221 (Bachtiar, 1994:49-52).

Setelah Indonesia merdeka, Papua belum menjadi wilayah NKRI dan masih dipertahankan oleh Belanda. Berbagai perundingan dilakukan, hingga akhirnya pada tahun 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk membebaskan Papua dari Belanda, yang dikenal dengan Tri komando Rakyat (TRIKORA). Satu tahun kemudian Pemerintah Belanda terpaksa mengakui, bahwa Papua (Irian Jaya) sebagai bagian dari wilayah NKRI. Kemudian, Belanda menyerahkan Papua kepada Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan membentuk pemerintahan sementara yang dinamakan UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority*). Satu tahun kemudian, yakni 1 Mei 1963 PBB menyerahkan Papua kepada Pemerintah Indonesia dan resmi

menjadi bagian dari NKRI (Bachtiar, 1994:87-88). Namun sejak itu permasalahan yang muncul di Papua tidak pernah berhenti, terutama berkaitan dengan sebagian masyarakat yang tidak menginginkan menjadi wilayah bagian NKRI. Kondisi ini sangat berpengaruh pada penduduk yang berdiam di wilayah perbatasan, sehingga sulit untuk mencapai ketenangan karena selalu ada konflik yang muncul. Hubungan sosial-budaya yang ada antara penduduk di perbatasan Papua (Indonesia) dengan penduduk perbatasan di bagian PNG sering membuka peluang bagi penduduk Papua untuk melakukan mobilitas ke PNG bila tidak setuju dengan Indonesia. Hal ini karena mereka umumnya mengabaikan ‘batas negara’ dan menganggap tanah yang ada di wilayah PNG merupakan ada juga hak ulayat tanah keluarga yang diakui kedua belah pihak. Begitupula sebaliknya, masyarakat PNG juga ada yang merasa punya hak tanah di wilayah Indonesia.

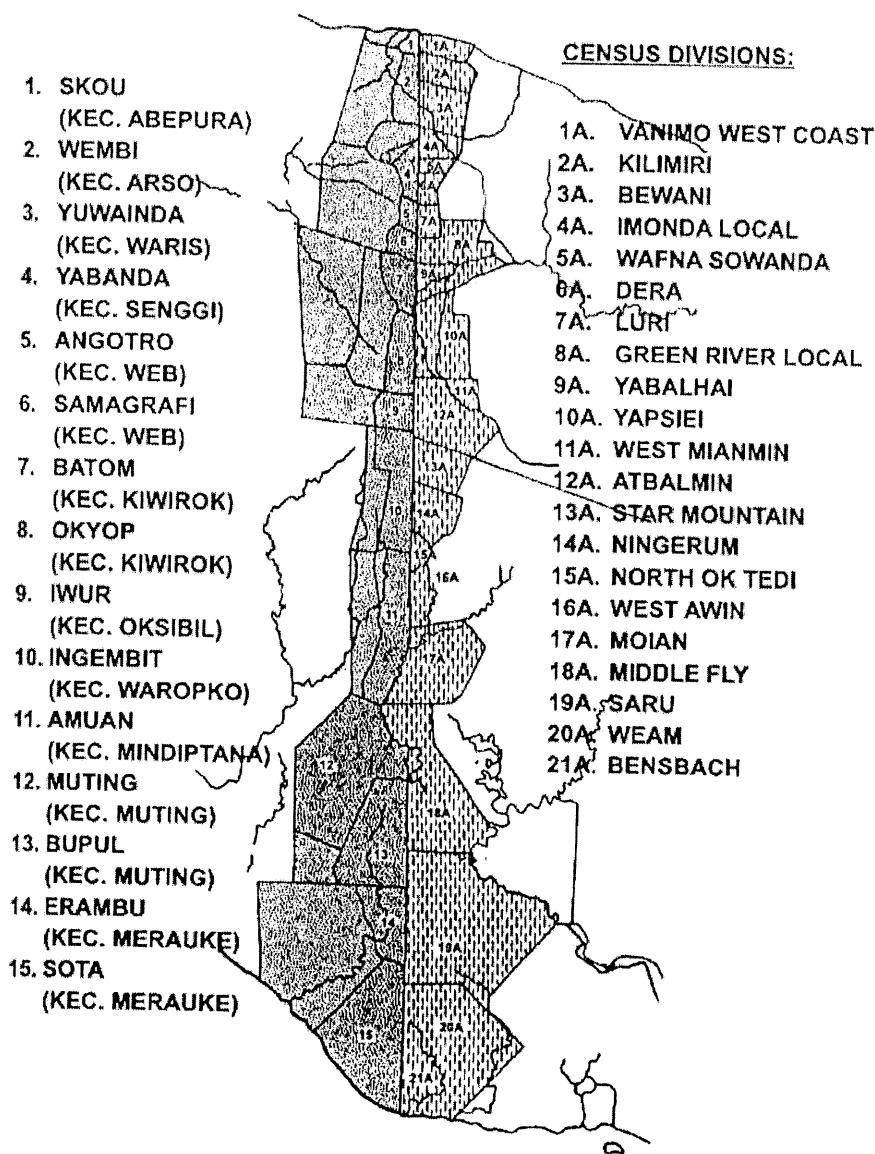
Pada saat ini, kawasan perbatasan wilayah NKRI dan PNG terbagi atas lima wilayah kabupaten/kota yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Jayapura. Dari lima kabupaten/kota tersebut terdapat 23 distrik dengan jumlah kampung sebanyak 266. Banyaknya kampung tersebut diperkirakan menggambarkan jumlah kelompok masyarakat atau suku yang ada di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, gerakan mobilitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di kawasan perbatasan masih terbatas pada mereka yang mempunyai ikatan kekerabatan dengan melakukan kunjungan kekeluargaan, wisata dan kegiatan perdagangan skala kecil. Namun untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas penduduk di kawasan perbatasan Papua yang sampai saat ini masih rawan konflik, tampaknya perhatian terhadap kelayakan sebuah pintu perbatasan dibutuhkan. Apalagi di kawasan ini sering terjadi transaksi dagang, bahkan di pintu perbatasan Tami telah berdiri pasar sehingga diperlukan pintu batas yang memadai.

Mobilitas sosial-budaya yang terjadi antara masyarakat Papua dan PNG pada umumnya terbatas antar suku yang sudah terjalin ikatan kekerabatan. Di wilayah perbatasan bagian daratan Indonesia, yaitu dari utara hingga selatan berdiam berbagai suku yang mempunyai hubungan sosial-budaya dengan masyarakat di wilayah PNG. Suku-suku yang dominan berdiam di wilayah perbatasan Papua dengan PNG adalah *Suku Retto*, *Suku Nali* dan *Suku Lomo* (Kecamatan Abepura), *Suku Manem* (Kecamatan Arso), *Suku Tabu* (Kecamatan Waris), *Suku Ngalam* (Kecamatan Kiwirok, Kecamatan Okbibab dan Kecamatan Oksibil), *Suku Muyu* (Kecamatan Mindiptama dan Kecamatan Mutting), *Suku Kanum* (Kampung Sota, Yanggandur dan Rawabiru di Kecamatan Merauke), *Suku Marind* dan *Suku Kanum* (Kampung Okaba di Kecamatan Merauke), dan *Suku Yay* (Kampung Waropko). Sifat ikatan kekerabatan di antara suku-suku tersebut dengan penduduk di PNG terbatas di mana antar kelompok suku mempunyai suatu

ikatan sosial yang telah dipahami. Mereka tidak akan melakukan hubungan sosial-budaya bila dengan suku tersebut pernah terjadi ‘perang suku’ seperti perebutan wilayah (tanah).

Berdasarkan struktur administrasi pemerintahan, kelompok suku di Indonesia pada umumnya akan melakukan hubungan sosial dengan kelompok etnis di PNG yang juga berada pada kampung berdekatan dengan kampung Indonesia. Interaksi sosial ini terjadi sangat terkait dengan suku mana mereka mempunyai hubungan sosial-budaya. Contoh dari hubungan sosial-budaya yang ada di wilayah perbatasan adalah antara *Suku Retto* (Kampung Skou Sae) dengan *Suku Temaa* (Census Division Wutung) dan *Suku Kanum* (Kampung Sota) dengan *Suku Kurkari* (Census Division Weam). Dalam hal ini, satu kesatuan bahasa (linguistik) sangat berperan menyatukan kelompok-kelompok etnik si Papua di samping hak ulayat tanah. Pada bagian selanjutnya akan dideskripsikan kehidupan salah satu kelompok masyarakat perbatasan, yakni orang Skou. Lihat Peta 1: Peta korespondensi wilayah kecamatan dan desa perbatasan RI dengan wilayah kampung perbatasan PNG (Census Divisions).

Peta 1: Korespondensi Wilayah Kecamatan dan Desa Perbatasan RI dengan Wilayah Kampung Perbatasan PNG berdasarkan Census Divisions.



ORANG SKOU²³ DI PERBATASAN

Masyarakat Skou berdiam di kampung-kampung di sepanjang pantai sebelah barat garis batas Indonesia dengan PNG, yaitu: dari Sungai Tami di bagian Timur hingga Teluk Holtekang di bagian Barat, Kampung Arso di bagian Selatan hingga Lautan Pasific di bagian Utara. Berdasarkan klasifikasi linguistik menurut Cowan dalam tulisan Mansoben, orang Skou termasuk dalam kelompok Tami sama seperti orang Sangke, orang Arso, orang Nyao Wembi, orang Skofro, orang Ampas dan orang Waris. Kekhususan dari bahasa ini adalah penutur bahasa tipikal non Melanesia atau bahasa Papua. Namun dalam beberapa peristilahan mempunyai banyak perbedaan dari suku-suku yang merupakan satu rumpun penutur bahasa tersebut di atas. Misalnya: orang Skou menyebut pemimpinnya adalah *Barite (Ondoafi)* dan pemimpin besarnya adalah *Bari Magite*, sedangkan orang Arso menyebutnya *Yuskwanto* (Mansoben, 1995:180)²⁴.

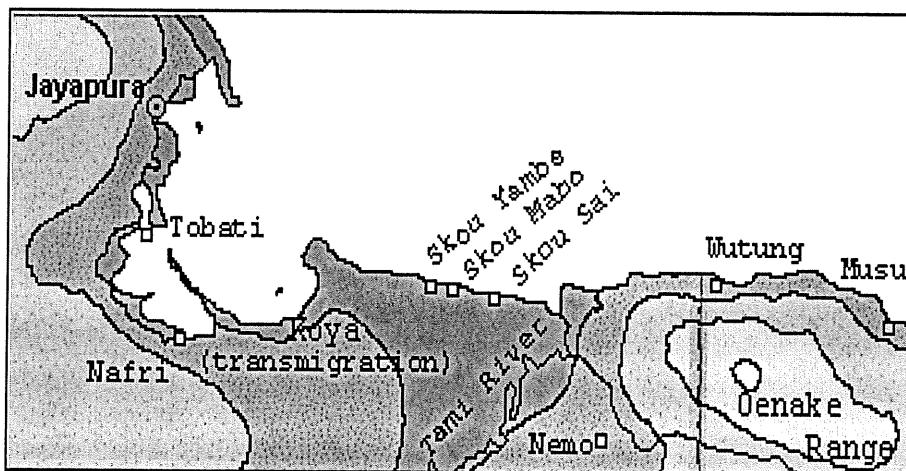
Di antara kelompok masyarakat Skou ini walaupun merupakan satu keluarga bahasa, yakni Bahasa Skou, dan yang membedakan adalah dialek sehingga antara satu kampung mempunyai ‘karakter’ berbeda (Donohue, 2003:8). Sedangkan dengan desa tetangga tidak hanya dialeg yang berbeda, namun juga bahasa. Akan tetapi saat ini di antara desa tersebut telah terjadi ikatan perkawinan dengan penutur kelompok keluarga bahasa Austronesia lain yang berasal dari Tobati, Enggros dan Ormu. Mungkin ini disebabkan masyarakat Skou telah terbuka dan melakukan mobilitas ke luar kampungnya, terutama penduduk dari Kampung Skou Mabo dan Skou Yambe. Mereka ini ada yang pergi dan menetap di Tobati, Enggros, Hamadi dan Jayapura dengan alasan kawin atau bekerja di pasar dan buruh. Namun khusus kelompok masyarakat Skou Sae umumnya melakukan mobilitas ke PNG, terutama ke Kampung Wutung, di mana masyarakatnya juga menggunakan bahasa Skou sebagai bahasa kedua (Donohue, 2003:10).

²³ Dalam deskripsi bahasa, kata Skou ditulis dengan Sko, S'kou, Skou dan Tumawo (Donohue, 2003:1).

²⁴ Kepemimpinan orang Skou berdasarkan ke-*ondoafi-an*, yaitu kekuasaan politik yang bersifat pewarisan. ini terdapat pada suku-suku bangsa yang berdiam di wilayah Timur Laut Papua, yaitu sebelah Barat garis perbatasan antara NKRI dan PNG. Bentuk kepemimpinan ini juga terdapat pada masyarakat PNG wilayah pantai Utara sebelah Timur, yaitu Wutung hingga Wewak sebelah Timur, Pulau Wogeo dan Kepulauan Schouten. Hal ini menunjukkan, bahwa adanya beberapa persamaan kepentingan politik tradisional yang dikembangkan di antara masyarakat perbatasan (Mansoben, 1995).

Secara administrasi, lokasi perkampungan masyarakat Skou masuk dalam pemerintahan Kotamadya Dati II Jayapura yang letaknya pun tidak jauh dari Kota Jayapura, yaitu dekat lokasi perbatasan bagian utara (Lihat Peta 2: daerah geografi masyarakat Skou). Kelompok masyarakat ini terbagi pada tiga kampung sesuai dengan tiga kategori kelompok masyarakat Skou, yakni Skou Mabo, Skou Sae dan Skou Yambe. Di setiap kampung terdapat seorang pemimpin tradisional (*ondoafi*) yang berpengaruh, yakni Yulius Lomo (Skou Sae), Yans Malo (Skou Mabo) dan Herman Rolo (Skou Yambe). Pemimpin besar (*bari magite*) adalah Herman Rolo yang dianggap sebagai ‘ondoafi umum’ yang dipilih berdasarkan usia tertua. Pada saat perang di masa lampau terjadi hubungan sosial saling membantu di antara masyarakat Skou untuk melawan musuhnya seperti orang Waromo di PNG.

Peta 2: Kampung Skou Di Perbatasan RI – PNG



Sumber: Mark Donohue, *An Introduction to the Skou Language of New Guinea*, hal. 12.

Kedekatan lokasi tempat tinggal kelompok masyarakat Skou dengan Kampung Wutung tergambaran dengan adanya keterikatan sosial-budaya yang terbangun karena ikatan kekerabatan (asal-usul sama), perkawinan, kerjasama ekonomi, dan upacara-upacara adat seperti keagamaan. Orang Skou mempunyai orientasi hubungan sosial yang dekat dengan orang Wutung, orang Yako, dan orang Vanimo (Lido). Beberapa *keret*²⁵ yang ada di wilayah Skou seperti *keret nyalo*, *kere tamboto*, *keret awe* dan *keret palora* juga ada di Wutung, Lido dan Waromo. Kasus perkawinan yang

²⁵ *Keret* adalah kesatuan kekerabatan setingkat *klen* kecil yang didalamnya terdapat aspek hubungan perkawinan dan kepemilikan harta tradisional seperti tanah dan mas kawin.

akhir-akhir ini banyak terjadi di mana perempuan berasal dari Skou, terutama penduduk Skou Sae, sehingga pada akhirnya perempuan tersebut menjadi warganegara PNG.

Hubungan sosial-budaya tersebut memperlihatkan, bahwa tingkat mobilitas antar Negara (*international mobility*) umumnya banyak dilakukan oleh masyarakat Skou Sae yang lokasinya paling dekat dengan daerah perbatasan NKRI dan PNG. Kelompok masyarakat Skou Sae didominasi oleh Suku Retto yang mempunyai mata pencaharian berladang, manangkap ikan, meramu sagu dan berburu. Kegiatan penangkapan ikan terutama dilakukan oleh penduduk yang berdiam di daerah pantai, sedangkan berburu hanyalah sebagai pekerjaan sambilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Mirino, 1994:36-37). Kegiatan berladang dan mencari ikan dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim Barat dan musim Timur. Pada musim Barat (Bulan September ~ Bulan Februari) mereka melakukan kegiatan pengolahan kebun, sedangkan pada musim Timur (Bulan Maret ~ Bulan Agustus) kegiatan melaut. Kebun ditanami jenis tanaman pangan diantaranya adalah kacang panjang, kacang tanah dan sagu. Produksi pohon sagu adalah tepung sagu yang merupakan bahan makanan pokok masyarakat Papua, sedangkan daunnya untuk atap rumah. Kedua jenis produksi ini selain untuk digunakan sendiri juga dijual ke Pasar Abepura dan Kampung Wutung (PNG). Pada saat penelitian (tahun 1996) harga jual di Desa Wutung untuk 300 ikat atap sagu (*bengkawan*) adalah 100 kina atau Rp. 150.000,-, dan tepung sagu seberat 25 kilogram (1 keranjang) dapat ditukar dengan manik-manik yang merupakan harta adat sebesar kelerang.

Klen Retto di Skou Sae sebagai kelompok masyarakat yang berdiam di bagian utara Papua dan berlokasi paling dekat dengan PNG, pada dasarnya tidak mau tahu adanya batas negara antara PNG dan NKRI dan hanya mengacu kepada batas adat yang diterima dari leluhur. Gambaran ini juga berlaku pada Suku Temaa yang berdiam di Kampung Wutung, di mana mereka tetap melakukan kegiatan pengelolaan lahan di atas tanah yang dianggap sebagai miliknya walaupun ada di wilayah Indonesia. Batas tanah yang dikelola penduduk Wutung bisa sampai Sungai Tami yang secara hukum merupakan wilayah NKRI. Namun bagi penduduk Skou Sae (Klen Retto) aktivitas yang dilakukan orang-orang Wutung tersebut tidak menjadi persoalan, karena mereka menyadari bahwa secara adat tanah tersebut adalah milik orang Wutung. Sebaliknya, orang Skou Sae juga diperbolehkan mengolah/menggunakan tanah di wilayah Wutung yang secara adat mereka berhak mengolahnya. Kegiatan ini diketahui oleh para *ondoafi* dari kedua belah pihak. Misalnya, pada waktu akan mendirikan tugu perbatasan *ondoafi* besar (*bari magite*) Skou Sae berunding dengan masyarakat Wutung dan Pemerintah Indonesia. Kemudian, *ondoafi* dari Kampung Wutung membuat surat kuasa dalam kaitannya dengan tanah yang akan dijual untuk

pembangunan tugu tersebut. Pada waktu itu nilai penjualan tanah sekitar 15 juta rupiah yang dibagi dua antara penduduk Kampung Skou Sae dan penduduk Kampung Wutung. Kemudian bagian yang diterima penduduk Skou Sae dibagi kepada suku yang memiliki tanah tersebut, yakni Klen Retto, Klen Nali, Klen Motan dan Klen Lamo. Pembagian terakhir dari hasil penggantian tanah tersebut adalah di dalam suku itu sendiri yang dilakukan oleh setiap kepala suku.

Mobilitas Sosial-Budaya Lintas Negara dan Lintas Daerah

Setelah Papua (Irian Jaya) masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terjadi perubahan sosial-budaya dalam kehidupan masyarakat di Papua, ternasuk kawasan perbatasan, sebagai dampak dari pembangunan yang dikembangkan. Pada masyarakat Skou, perubahan tersebut ada yang positif namun ada pula negatif. Dari *sisi positif*, adanya pembangunan jalan memudahkan masyarakat untuk melakukan hubungan sosial dengan masyarakat lain yang berbeda bahasa dan melakukan perjalanan untuk kunjungan kekerabatan di Kampung Wutung (PNG) seperti upacara perkawinan dan berdagang. Sebagai masyarakat pekebun/peladang keberadaan sarana dan prasarana transportasi akan memudahkan untuk membawa hasil kebun ke pasar di kota Jayapura, Abepura bahkan ke wilayah PNG.

Dari *sisi negatif*, yaitu dengan adanya perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan PNG yang menghasilkan aturan lintas batas membuat mereka tidak dapat seenaknya untuk melakukan gerakan mobilitas ke wilayah PNG. Untuk melewati batas Negara (lintas Negara) mereka harus menunjukkan pas jalan pada pos penjagaan yang ada di perbatasan. Apabila dilihat dari sisi budaya, adanya gerakan mobilitas penduduk dari dan ke perkampungan Skou berdampak terhadap penggunaan bahasa lokal (bahasa Skou)²⁶. Kelompok penduduk muda mulai jarang yang menggunakan bahasa Skou dan lebih sering menggunakan bahasa Indonesia (Melayu). Kondisi ini disebabkan karena mereka yang sekolah umumnya menggunakan bahasa Indonesia, begitupula ketika berkomunikasi dengan masyarakat lain di kota. Ketika berinteraksi dengan dengan penduduk Kampung Wutung menggunakan bahasa Skou atau bahasa Inggris (PNG). Sedangkan kelompok penduduk tua yang sehari-hari bertutur bahasa Skou akan sulit berkomunikasi dengan masyarakat luar seperti berbelanja di Pasar Jayapura (Donohue, 2003:7-8).

²⁶ Penutur bahasa Skou tidak hanya pada masyarakat Skou namun juga di beberapa kampung (sub-distrik) yang ada di wilayah PNG, yaitu: Wutung, Dumo, Sangke, Dusur dan Leitre (Donohue, 2004:14).

Dinamika kehidupan penduduk yang terjadi di masyarakat Skou saat ini berdampak terhadap mobilitas sosial-budaya secara vertical maupun horizontal. Sebagaimana yang diutarakan oleh Yuliati dan Poernomo (2003:236-237), mobilitas sosial yang terjadi di pedesaan sangat dipengaruhi oleh sosial dan tata nilai (budaya) yang ada di dalam masyarakat tersebut. Hal ini akan terjadi bila didukung dengan sifat keterbukaan masyarakat terhadap ‘dunia luar’ dalam menerima perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Pada masyarakat Skou yang telah terbuka dengan masyarakat luar memperlihatkan dinamika mobilitas sosial-budaya dalam kehidupannya. Gerakan ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah faktor sejarah, ekonomi, politik, infrastruktur, pendidikan, urbanisasi dan sebagainya. Dampaknya terlihat antara lain pada mata pencarian, kekerabatan dan kepemilikan hak ulayat. Selanjutnya akan diuraikan ketiga sistem tersebut yang dikaitkan dengan dinamika mobilitas sosial-budaya yang terjadi pada kelompok masyarakat Skou sebagai dampak dari perubahan yang terjadi di daerah tersebut.

Sistem Mata Pencarian

Pada dasarnya masyarakat Skou termasuk dalam kelompok masyarakat agraris yang mempunyai mata pencarian dan sumber pendapatan dari pertanian di perladangan. Teknik pengolahan pertanian sangat sederhana sebagaimana umumnya masyarakat Papua lainnya. Pembukaan ladang dilakukan dengan dibakar, dibersihkan dan dipagar untuk menghindari babi hutan. Pada umumnya setiap keluarga akan membuka lahan antara dua hingga tiga kali dalam satu tahun dengan luas rata-rata sekitar $\frac{1}{4}$ hingga $\frac{1}{2}$ hektar. Kegiatan terakhir adalah tahap penanaman dengan berbagai jenis tanaman yang mereka butuhkan seperti pisang, ubi kayu, talas, jagung dan umbi-umbian. Setelah panen dan lahan tersebut sudah dianggap tidak subur, mereka akan mencari tanah lain untuk dijadikan lahan baru dan meninggalkan lahan lama untuk beberapa waktu hingga diperkirakan tanah tersebut siap tanam atau subur kembali. tanam ini biasa dikenal dengan *shifting cultivation* (Mirino, 1994:37 dan Bandiyono dkk.,2004:98).

Masuknya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian di wilayah Skou mengakibatkan perubahan terhadap beberapa jenis tanaman yang ditanam, yakni kepada jenis tanaman pangan seperti padi, kacang, sayuran dan buah. Begitupula dengan tanam yang tadinya dilakukan secara tradisional ladang berpindah, berubah ke pertanian menetap dengan menggunakan pengairan. Pada mulanya system pertanian ini hanya terdapat di daerah perkampungan transmigran, namun walaupun masih terbatas yang melakukannya mulai terlihat mempengaruhi system pertanian masyarakat Skou. Keberhasilan para transmigran dalam pengolahan lahan sawah, yang kemudian ditiru oleh masyarakat Skou maka dapat dikatakan telah terjadi suatu dinamika

mobilitas sosial-budaya di kelompok masyarakat Skou pada bidang pertanian.

Kegiatan pertanian lainnya adalah berkebun tanaman keras yang juga dikelola secara tradisional. Dalam arti teknik tanam tidak dilakukan secara sistimatis atau layaknya suatu kebun, namun berupa tanaman yang tumbuh dengan sendirinya di tanah hak ulayat atau keluarga mereka. Beberapa jenis tanaman yang ada di tanah tersebut antara lain adalah tanaman sagu, pinang dan kelapa. Jenis tanaman tersebut umumnya adalah tanaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Skou atau masyarakat Papua umumnya. Namun sangat disayangkan dengan adanya pembangunan konversi lahan produktif untuk berbagai kegiatan di luar pengembangan dusun sagu berdampak terhadap makin sempitnya wilayah dusun sagu. Misalnya pembangunan perkebunan dan permukiman transmigrasi di sekitar perkampungan masyarakat Skou (daerah Koya) atau hak konversi hutan pada perusahaan tertentu mengakibatkan sempitnya kawasan tanah hak ulayat mereka, sehingga berdampak terhadap berkurangnya tanaman keras yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Skou (Mirino, 1994:38).

Geografis wilayah Skou bagian utara merupakan wilayah pantai, di mana penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Pada umumnya kegiatan kenelayanan ini dianggap sebagai pekerjaan sampingan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akhir-akhir ini, dari hasil tangkap tersebut ada yang dijual kepada masyarakat sekitarnya atau pasar-pasar dekat perkampungan Skou. Kegiatan penangkapan ikan ini tidak dilakukan sepanjang tahun, namun hanya pada masa angin timur (bulan Maret hingga bulan Agustus) ketika gelombang laut tenang. Teknik penangkapan ikan masih secara tradisional dengan menggunakan alat tangkap seperti pancing, jaring, tombak, kalawai dan panah.

Selain pola mata pencaharian di atas, masyarakat Skou juga melakukan kegiatan berburu burung kasuari, babi hutan, rusa, dan jenis hewan hutan lainnya. Alat tangkap yang digunakan masih sederhana seperti tali jerat, tombak dan panah (Mirino, 1994:38). Kegiatan ini mempunyai dua fungsi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan adat. Wilayah perburuan (*hunting area*) terbatas pada tanah hak ulayat keluarga. Walaupun aturan ini tidak tertulis, namun setiap anggota kelompok masyarakat di Papua paham dan mengetahui tentang batas wilayah perburuan dan tidak akan memasuki wilayah perburuan kelompok lain. Masa lalu sering terjadi perang suku bila aturan tersebut dilanggar, atau ketika mencari wilayah perburuan lain yang tanpa diketahui bahwa wilayah itu adalah milik kelompok lain. Biasanya bila terjadi penurunan hasil buruan, mereka akan mencari lahan baru. Namun dengan adanya pembangunan dan hak konversi hutan dari pemerintah pencarian lahan baru sulit dilakukan.

Dinamika pembangunan kawasan perbatasan seperti infrastruktur jalan yang menghubungi Pos Perbatasan Tami dengan Kota Abepura dan Kota Jayapura berdampak terhadap perubahan tatanan kehidupan masyarakat Skou dalam bidang pekerjaan. Kemudahan akses sarana dan prasarana yang ada saat ini membuka peluang-peluang pekerjaan yang diperkirakan dapat lebih meningkatkan ekonomi rumah tangga mereka. Faktor lain yang mempengaruhi perubahan mata pencaharian mereka adalah keluar-masuknya mobilitas penduduk di perkampungan Skou, baik penduduk lokal maupun pendatang yang membuka usaha atau ditugaskan di daerah ini. Tentu saja pendidikan juga mempunyai peran dalam membangun dinamika mata pencaharian sesuai dengan tingkat pendidikannya, terutama pada kelompok masyarakat muda.

Seperti yang terjadi pada masyarakat desa lainnya di Indonesia, tampaknya telah terjadi dinamika mobilitas sosial-budaya pada lapangan pekerjaan yang bergerak dari sektor pertanian ke sektor jasa dan sektor-sektor lainnya. Di antara masyarakat Skou ada yang mengembangkan pekerjaan di bidang perdagangan antara lain di pasar-pasar kota Abepura, Jayapura dan sekitarnya, pasar yang dibangun di perbatasan Tami, serta membuka warung di dalam kampung. Kemudian, pada saat ini telah terjadi pula transaksi dagang dengan masyarakat di wilayah PNG (Kampung Wutung) dengan perhitungan secara ekonomi atau barang dagangan diperhitungkan dalam bentuk rupiah yang dikonversi ke uang *kina*. Padahal dulu bentuk perdagangan antara etnis atau kelompok masyarakat Papua menggunakan sistem *barter*.

Apabila dilihat dari jenis barang dagangan yang dibawa ke Kampung Wutung umumnya adalah barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan acara adat seperti tepung sagu, atap terbuat dari pokok sagu dan manik-manik. Namun akhir-akhir ini terjadi dinamika peredaran barang yang dibawa ke Kampung Wutung, yaitu barang yang dijual tidak hanya berupa barang-barang kebutuhan yang biasa digunakan tersebut di atas tapi juga kebutuhan hidup lainnya seperti super mie, minuman botol, pakaian dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Mahalnya harga beberapa barang kebutuhan hidup di Kampung Wutung bila dibandingkan dengan harga di Indonesia setelah dikonversi ke *kina* membuat masyarakat Kampung Wutung lebih suka membeli barang-barang tersebut di Kota Jayapura, Kota Abepura atau dengan orang Skou yang datang ke Wutung. Kondisi ini akhirnya menciptakan bangunan pasar di dekat Pos Tami sekitar dua tahun yang lalu. Keberadaan pasar ini lebih meningkatkan dinamika mobilitas penduduk di perbatasan, yang akhirnya turut berdampak terhadap mobilitas sosial-budaya antar penduduk Skou dengan penduduk Wutung.

Sistem Kekerabatan

Pada dasarnya ikatan kekerabatan masyarakat Skou mengikuti prinsip patrilineal (garis keturunan laki-laki/bapak), namun untuk kegiatan tertentu merupakan tanggung jawab ibu. Misalnya penurunan nama marga dan hak ulayat tanah keluarga mengikuti prinsip patrilineal, sedangkan penurunan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan upacara adat merupakan tanggung jawab ibu. Menurut Mirino (1994:40) yang mengutip tulisan Koentjaraningrat dan Harsya W. Bachtiar dalam bukunya Penduduk Irian Jaya (1963:204), prinsip keturunan ini disebut prinsip bilineal. Dalam arti ada beberapa hak dan kewajiban tertentu ada yang diperhitungkan menurut garis keturunan laki-laki, namun beberapa hak dan kewajiban lain mengikuti prinsip garis keturunan perempuan/ibu (matrilineal). Sedangkan pola menetap setelah menikah pengantian akan menetap di dalam kelompok kerabat suami yang disebut dengan prinsip virilokal.

Sistem perkawinan yang berlaku pada masyarakat Skou di masa lalu adalah perkawinan melalui ‘jalan tungku’ (*kopong luo*), namun saat ini telah mengalami perubahan. Prinsip dari sistem ini adalah agar ikatan kekerabatan antara dua keluarga tetap terjalin. Selain itu mengingat bahwa seorang perempuan (nenek) yang dikawinkan terlebih dahulu telah memenuhi syarat pembayaran mas kawin yang telah ditetapkan dan telah dibayar lunas sehingga hak dan fungsinya dalam keluarga tetap ada sampai kapan pun. Seperti contoh adalah yang dikemukakan oleh Mirino (1994:44) pada kelompok masyarakat Skou Sae. Perempuan dari klen Nally dikawinkan dengan laki-laki dari klen Retto. Apabila perempuan tersebut telah berusia lanjut dan meninggal, maka untuk mejaga kelangsungan ‘tungku’ agar tidak putus maka fungsi dan kedudukannya tersebut boleh digantikan oleh cucunya. Oleh karena itu, dalam menentukan pilihan seorang isteri ditentukan atau dipilih dari kelompok keturunan (klen) tertentu yang diatur oleh adat agar tidak terjadi perkawinan sumbang (*incest*).

Seiring dengan perubah-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Skou, tampaknya juga terjadi pada pola perkawinannya. Dinamika mobilitas penduduk dan pengetahuan masyarakat berdampak terhadap pola perkawinan yang berdasarkan perjodohan yang diatur berdasarkan adat kepada pola perkawinan atas dasar saling menyukai. Begitupula dengan mas kawin yang dulunya sangat ketat menurut perhitungan jumlah mas kawin yang pernah diterima ibunya dulu dalam bentuk manik-manik dan barang adat lainnya, sekarang selain manik-manik ditambah dengan barang-barang lain yang digunakan saat ini, bahkan pembayaran dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Apabila terjadi perkawinan antara perempuan Skou dengan laki-laki dari luar daerah Skou,

kalau dulu jumlah mas kawin disamakan dengan bentuk perkawinan sesama masyarakat Skou saat ini tidak lagi sama (Mirino, 1994:46).

Ikatan perkawinan antara masyarakat Skou dan luar desa juga terjadi dengan masyarakat Wutung di PNG. Pada umumnya perkawinan tersebut terjadi antara perempuan dari kelompok masyarakat Skou dan laki-laki dari Wutung. Mengacu kepada pola menetap sesudah nikah adalah *virilokal*, maka setelah menikah si perempuan akan menetap di Kampung Wutung pada kelompok keluarga suami. Dengan adanya ikatan perkawinan ini berdampak terhadap ‘ikatan adat’ antara masyarakat Skou dengan masyarakat Wutung, di mana pada ketika pelaksanaan upacara adat seperti perkawinan, kematian dan daur hidup akan saling mengunjungi. Bahkan akan berdampak pula terhadap interaksi sosial lain seperti perdagangan dan politik. Di bawah ini dapat dilihat kasus Bapak YM yang sering pergi ke Wutung untuk melakukan kegiatan adat dan perdagangan.

Kasus Bapak YM (*ego*):

Kakek YM (*ondoafi* Skou Mabo) dari klen Mallo kawin dengan orang Skou Sae (nenek YM). Kemudian, saudara perempuan nenek YM ada yang kawin dengan orang Kampung Wutung. Sejak saat itu, YM dan keturunannya merasa sebagai kerabat dengan kerabat nenek di Wutung sehingga sering berkunjung, terutama bila ada ‘acara adat’. Selain itu, YM juga mempunyai melakukan interaksi sosial dengan SA (orang Wutung) di mana ibunya (BR) adalah berasal dari Kampung Skou Sae (klen Retto) dan bapaknya orang Wutung. Antara klen Retto dan klen Mallo pernah terjadi ‘ikatan adat’, sehingga di antara mereka merasa satu kerabat. Bila ke Kampung Wutung, YM akan mengunjungi *tante* BR sehingga berkenalan dengan SA.

(Sumber: Djohan & Yogaswara, 1998:8)

Berdasarkan contoh kasus di atas menggambarkan, bahwa ada dua pola ‘ikatan adat’ antara orang Skou (Papua) dengan orang Wutung (PNG) yaitu interaksi sosial yang terjadi secara langsung dan tidak langsung. Interaksi langsung bila *ego* yang melakukan ikatan perkawinan, sehingga terjadi interaksi sosial dengan orang Wutung. Interaksi langsung dapat terjadi melalui generasi kedua, ketiga, satu nenek-moyang, atau pernah terjadi perkawinan antara ego dengan klen/suku yang mempunyai ikatan dengan orang Wutung. Adanya ‘ikatan adat’ yang didukung dengan mitologi-mitologi masyarakat setempat membuat lebih kuatnya perasaan untuk saling membantu dan saling memiliki di antara mereka. Contoh, pada

acara perkawinan kerabat laki-laki akan saling membantu untuk mengumpulkan mas kawin atau perlengkapan pesta dan akan datang. Bila tidak dapat hadir karena jauh atau alasan lain akan mengirim wakil, biasanya orang yang paling tua atau dituakan dalam kelompok (klen). Aktifitas-aktifitas adat ini lah yang lebih memperkuat terjadinya dinamika mobilitas sosial-budaya antara masyarakat PNG dan NKRI.

Sistem Kepemilikan Tanah Ulayat

Pada dasarnya yang dimaksud tanah ulayat adalah tanah tertentu yang dikuasai oleh suatu masyarakat adat, dan menurut hukum adat setempat merupakan milik masyarakat secara bersama dalam ‘kerajaan-kerajaan kecil’ (Harahap dkk.,2005:4). Sistem kepemilikan tanah ulayat ini hampir dimungkinkan ada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Setiap suku atau klen di Papua menganggap mempunyai hak ulayat atas tanah yang diturunkan dari nenek moyang mereka atau perolehan dari suku lain yang kalah perang. Oleh karena itu, kepemilikan tanah secara adat di Papua harus dipahami dalam konteks sejarah terbentuknya suku-suku yang ada di daerah tersebut sebagai peristiwa yang dapat memperkuat atau melemahkan kepemilikan tanah komunal seperti ‘perang suku’. Hal lain yang perlu diketahui adalah pemahaman tentang sistem kekerabatan dan kepemimpinan tradisional karena berkaitan dengan kewajian, hak dan pengaturan penggunaan tanah yang dianggap status quo atau lahan kosong tanpa pemilik. Setiap klen atau suku mempunyai batas-batas alam yang jelas, bahkan batas tersebut mempunyai legitimasi tertentu sehingga diakui klen atau suku lain (Djohan dan Yogaswara, 1998:6).

Gambaran pemahaman tentang tanah tersebut juga terdapat pada masyarakat Skou, di mana tanah mempunyai arti penting mengingat sumber mata pencaharian utama adalah berkebun, berburu dan meramu sagu. Pengaturan tanah dilakukan oleh *ondoafi* yang biasanya berasal dari klen perintis atau klen yang punya jasa pada kejadian tertentu seperti perang suku. Contoh kasus ini terjadi di Kampung Skou Yambe, di mana *ondoafi* berasal dari klen Rollo. Seharusnya klen Patipeme sebagai klen perintis yang pertama kali datang ke daerah ini. Namun karena jasa klen Rollo ketika perang suku, maka Pattipeme memberi mandat *ondoafi* kepada klen Rollo.

Berbicara mengenai tanah adat kelompok masyarakat Skou, diperoleh informasi bahwa luasnya mencakup daerah-daerah Holtekamp hingga Muara Tami. Batas tanah adat dan hak kepemilikan dari masing-masing klen tidak diketahui secara jelas dan pasti karena hanya berdasarkan cerita-cerita lisan yang diwariskan oleh nenek-moyang mereka. Cerita-cerita tersebut masih hidup dalam masyarakat Skou, sehingga mereka dapat mengetahui dan mengingat batas tanah adat yang berdasarkan batas alam seperti gunung, sungai, pohon dan sebagainya (Mirino, 1994:54). Beberapa

daerah yang pernah diidentifikasi kepemilikan tradisionalnya adalah daerah Koya Timur milik klen Palora (Skou Mabo), daerah Koya Barat milik klen Ramela (Skou Yambe), sedangkan daerah Skou Sae sekarang milik klen Lomo, Nali, Retto dan Mutan. Pembagian di dalam klen tersebut dilakukan oleh *ondoafi* yang memimpin daerah tersebut. Tanah adat kelompok masyarakat Skou Sae yang berada di perbatasan langsung dengan Kampung Wutung (PNG) adalah dari batas tradisional Skou Mabo hingga Kali Tami, dan dari Kali Tami kearah perbatasan dan seterusnya merupakan tanah adat kelompok masyarakat Kampung Wutung (Bandiyono dkk., 2004:121-122).

Dalam perkembangannya sebagai dampak dinamika sosial-budaya yang terjadi di masyarakat Skou telah terjadi perubahan yang berkaitan dengan luas wilayah tanah ulayat mereka. Perubahan kepemilikan hak ulayat tanah tersebut, tampaknya sangat berkaitan dengan pembangunan yang berkembang sejak masa kolonial (contoh: gereja dan sekolah) hingga Papua masuk ke dalam NKRI (contoh: jalan, transmigrasi, perkebunan kelapa sawit, sarana & prasarana sosial, hukum pertanahan dan konversi hutan dengan sistem HPH). Perubahan dari penggunaan tanah adat ini, bagi kehidupan masyarakat Skou ada yang berdampak negatif namun ada pula yang positif. Gambaran positif lebih banyak terlihat di ‘permukaan’, di mana tanah adat yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan kegiatan sosial lain yang makin berkembangnya akan memudahkan mereka untuk lebih terbuka dan berinteraksi atau berkomunikasi dengan kelompok masyarakat lain. Adanya sarana pendidikan dan kesehatan akan memudahkan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan tanpa harus ke kota, kecuali untuk kelanjutan pendidikan atau penanganan kesehatan lebih lanjut yang tidak di tingkat kecamatan.

Sedangkan dampak negatif terlihat dengan munculnya berbagai konflik yang berkaitan dengan permasalahan tanah. Beberapa permasalahan spesifik yang muncul di daerah Skou, yaitu berkaitan dengan kepemilikan tanah secara tradisional dengan berbagai perubahan dalam pemanfaatannya. Di antara konflik-konflik yang muncul ada yang bersifat internal (dalam kelompok masyarakat Skou) dan eksternal (pengaruh luar seperti transmigrasi, HPH dan pengaturan garis batas). Dilihat dari sejarahnya, pada masa lalu konflik internal yang berkaitan dengan tanah terjadi dalam usaha memperebutkan hak tanah untuk kebutuhan hidup seperti berkebun dan berburu. Tidak adanya batas yang jelas dari kepemilikan tanah kelompok, mungkin digunakan kelompok masyarakat lain yang berusaha di kawasan tersebut, dan ketika pembuka pertama kembali telah ada kelompok lain. Pada waktu itu, bila di antara kelompok masyarakat suku tersebut mempunyai ikatan kekerabatan mungkin tidak terjadi perang suku sehingga permasalahan bisa dibicarakan antar kepala suku. Namun bila tidak terjadi kesepakatan, kemungkinan akan memicu terjadinya perang suku. Bagi kelompok yang

kalah akan mobile ke daerah lain di mana tanahnya diperkirakan tidak ada pemiliknya.

Pembangunan di wilayah perbatasan berdampak terhadap banyaknya permintaan tanah, termasuk di Skou. Pemanfaatan tanah/hutan oleh pihak luar diawali (sekitar tahun 1974) dengan munculnya perusahan kayu yang mengeksplorasi kayu hutan dan operasinya hingga daerah Muara Tami. Hal ini diperparah dengan masuknya perusahaan perkayuan Hanurata yang menggunakan sistem HPH (Hak Pengusahaan Hutan), di mana hutan yang dibuka sebagian besar adalah tanah adat salah satu klen dari Skou. Hal ini menyebabkan akses masyarakat Skou untuk pemanfaatan hutan kebutuhan rumah tangga dan hasil hutan non kayu (*non wood timber product*) seperti dammar, rotan, madu, sarang burung dan hasil buruan semakin sempit; bahkan dapat dikatakan hilang sama sekali. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang penduduk Skou Mabo:

".....sekarang sulit ambil kayu di hutan untuk bangun rumah, selalu diawasi, padahal kami ambil hanya sedikit dan di tanah adat kami".

Begitu pula dengan masuknya transmigrasi (mobilitas penduduk) dilihat dari sisi sumberdaya lokal menimbulkan dinamika mobilitas sosial-budaya pada masyarakat Skou. Di antaranya dinamika sosial tersebut adalah: (1) hilangnya lahan produktif seperti hutan sagu, (2) kurangnya lahan berburu (*hunting area*) sebagai pemenuhan gizi dan kepentingan ritual, (3) kemungkinan ke depan makin banyak terjadi pemindahan tanah adat karena semakin tertariknya pendatang untuk memiliki tanah dengan harga murah, dan (4) munculnya konflik social yang berawal dari kecemburuan terhadap pendatang atau transmigran dalam memperoleh sertifikat. Keinginan penduduk dari luar Skou untuk memiliki tanah yang sebagian besar adalah tanah adat masyarakat Skou mengingat daerah ini sangat strategis dengan berkembangnya daerah transmigran, perkebunan kelapa sawit dan rencana untuk dijadikan *border town* karena posisi yang berhadapan langsung dengan Kampung Wutung (Bandiyono, 2004:125-127).

Semaraknya keinginan pendatang terhadap tanah menimbulkan konflik internal baru di antara masyarakat Skou, terutama dalam penjualan tanah yang tidak sesuai dengan prosedur. Situasi ini bisa berdampak tumpang-tindih penjualan, karena setelah dijual kemudian muncul penjual baru yang menganggap tanah tersebut masih milik klen mereka. Tampaknya ada dua pola ekstrim yang menimbulkan konflik dari penjualan tanah di masyarakat Skou, yakni (1) *ondoafi* (kepala klen) menjual tanah tanpa persetujuan anggota masyarakatnya, (2) masyarakat menjual tanah tanpa bermusyawarah dengan *ondoafi*.

Permasalahan tanah yang perlu diantisipasi selain gambaran di atas adalah dua kasus status tanah di Kawasan Skou yang persis ada di perbatasan. Kasus tersebut adalah tanah adat orang Wutung yang ada di wilayah NKRI dan tanah adat orang Nyauw yang ditinggalkan oleh penduduk karena exodus ke PNG²⁷. Pada umumnya tanah-tanah tersebut kurang dimanfaatkan sehingga sulit untuk dipertahankan ketika ada orang atau pendatang yang ingin memilikinya.

Dalam kaitannya dengan Negara PNG tampaknya permasalahan tanah di daerah perbatasan berkaitan dengan hukum formal tentang hak milik yang belum diatur oleh kedua Negara. Hal ini berdampak terhadap mobilitas penduduk PNG (Kampung Wutung) yang tetap melakukan kegiatan berkebun di wilayah NKRI karena tanah tersebut merupakan tanah adat mereka. Contoh: batas tanah adat orang Wutung ternyata sejauh 4 kilometer dari batas negara, sehingga di wilayah tersebut banyak dijumpai orang Wutung melakukan kegiatan berkebun atau mencari hasil hutan. Aktifitas tersebut terjadi karena: (1) orang Skou yang pernah melakukan lintas batas dan berdiam di wilayah PNG diakui sebagai warga klen dan diberi hak garapan untuk luas tertentu di tanah yang termasuk wilayah NKRI, dan (2) adanya konsep ‘kebun komunal’ yang dikerjakan secara bersama untuk keperluan ritual, maka bila tanah tersebut di wilayah PNG sewaktu-waktu akan ke PNG untuk digarap (Djohan & Yogaswara, 1998:6).

Gambaran permasalahan kepemilikan hak ulayat tanah umumnya ditimbulkan karena adanya mobilitas penduduk keluar maupun masuk yang berdampak terhadap mobilitas sosial-budaya di kelompok masyarakat Skou. Mobilitas tersebut ada yang terjadi antar wilayah NKRI, khususnya transmigrasi yang mengakibatkan makin sempitnya tanah ulayat yang digunakan untuk kelangsungan kehidupan masyarakat Skou. Untuk masyarakat Skou yang berdiam persis di perbatasan Negara umumnya melakukan migrasi internasional ke Kampung Wutung, begitupula dengan orang Wutung akan ke wilayah NKRI untuk aktifitas berkebun di tanah ulayat orang Wutung. Mereka selain mengerjakan tanah kelompok masyarakat masing, namun adapula tanah komunal atau tanah bersama dari kedua masyarakat tersebut. Adanya pembangunan sarana jalan dan bangunan lain di kawasan tersebut mengakibatkan terjadinya dinamika mobilitas sosial-budaya di bidang pertanahan, yaitu berkurangnya tanah hak ulayat klen maupun komunal karena telah dijual.

²⁷ Orang Nyauw tahun 1974 melarikan diri ke PNG karena kampung dan gereja mereka dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sampai saat penelitian dilakukan belum semua yang kembali karena memerlukan prosedur antara Negara, namun masih terus diusahakan oleh Domingus Fao sebagai ondoafi suku tersebut Rumbiak, 1990:6-8).

Penutup

Pada awal tulisan diutarakan, bahwa kajian berfokus pada dinamika mobilitas penduduk di perbatasan Papua dan PNG dalam perspektif sosial-budaya. Banyak suku atau kelompok masyarakat di Papua yang salah satu cirinya adalah perbedaan bahasa, maka tulisan ini hanya mengkaji kehidupan mobilitas sosial-budaya yang terjadi di kelompok masyarakat Skou di perbatasan Papua bagian utara. Melalui perjalanan sejarah yang panjang sejak zaman kolonial hingga NKRI di Papua menunjukkan, bahwa telah terjadi mobilitas penduduk yang berdampak terhadap mobilitas sosial-budaya. Pada masyarakat Skou yang dulunya tertutup terlihat membuka diri terhadap perubah-perubahan tersebut yang terlihat dari perubahan struktur dan nilai-nilai yang mereka anut.

Kelompok masyarakat Skou yang terdiri dari Skou Yambe, Skou Mabo dan Skou Sae mempunyai ciri-ciri penutur bahasa yang sama (bahasa Skou) dan berlokasi di daerah yang berbatasan langsung dengan Negara PNG. Kondisi geografi dan budaya yang sama membuat mereka ikatan kekerabatan dan sejarah yang sama dengan masyarakat di kampung-kampung di wilayah PNG, sehingga terjadi mobilitas penduduk di antara mereka. Untuk melihat perubahan dinamika mobilitas sosial-budaya yang terjadi di masyarakat Skou, ada tiga sistem sosial-budaya yang dikaji yakni sistem mata pencaharian hidup, sistem kekerabatan dan sistem kepemilikan tanah ulayat.

Terbukanya daerah Skou karena adanya pembangunan sarana-prasarana transportasi, teknologi pertanian dan program transmigrasi turut berdampak terhadap sistem mata pencaharian penduduk di Kampung-kampung Skou dari sektor pertanian ke sektor jasa dan sektor-sektor lainnya. Adanya intensifikasi pertanian terjadi dinamika dalam teknologi bertanam masyarakat, yaitu dari sistem ladang berpindah mulai bergeser ke sistem kebun atau menetap. Sarana transportasi, pendidik dan masuknya pendatang mengubah pengetahuan masyarakat Skou untuk mencari peluang pekerjaan di luar pertanian, baik yang ada di sekitar kampung maupun kota; terutama pada kelompok muda. Sedangkan hubungan pekerjaan yang berkaitan dengan mobilitas sosial-budaya antar masyarakat Kampung Wutung (PNG) dengan masyarakat Skou adalah berkaitan dengan transaksi perdagangan yang telah dilakukan sejak lama. Perubahan yang terjadi adalah dalam jenis barang yang tidak lagi terbatas pada barang-barang kebutuhan tradisional, namun juga kebutuhan hidup sandang dan pangan yang digunakan saat ini. Begitupula dengan sistem pembayaran tidak lagi menganut sistem barter namun nilai rupiah dikonversi ke *kina* (uang PNG). Tingginya tingkat mobilitas di daerah perbatasan dengan alasan berdagang menjadi alasan berdirinya pasar di dekat Pos Tami sekitar dua tahun yang lalu. Hal ini lebih

meningkatkan mobilitas penduduk antar Negara maupun antara daerah di Papua, terutama Papua bagian utara, yang akhirnya terjadi dinamika mobilitas sosial-budaya di Kawasan Skou.

Adanya gerakan mobilitas penduduk keluar maupun masuk di masyarakat Skou turut berdampak terhadap perubahan sistem kekerabatan masyarakat tersebut. Pola perkawinan tidak lagi di dalam kelompok Skou namun sudah keluar kampung, bahkan luar Papua. Begitupula dengan mas kawin sudah ada perubahan dari jumlah maupun jenisnya. Kemudian, dengan berlangsungnya perkawinan antara orang Skou dengan orang Wutung mengakibatkan terjadinya ‘ikatan adat’ yang berdampak terhadap mobilitas sosial-budaya di antara mereka. Antara lain dalam bentuk upacara adat, perdagangan, politik dan hubungan sosial lain.

Mobilitas sosial-budaya di bidang pertanahan yang terjadi di Masyarakat Skou umumnya berkaitan dengan penyempitan tanah adat atau komunal dan naiknya nilai tanah. Hal ini terjadi terutama setelah adanya transmigrasi dan pembangunan sarana transportasi dan pasar di Pos Tami yang berdampak terhadap tingginya mobilitas penduduk di daerah tersebut. Penyempitan lahan perkebunan milik masyarakat Skou tersebut disebabkan karena tingginya migrasi pendatang dari luar daerah Skou maupun Papua yang membeli tanah di daerah Skou, terutama setelah dibangunnya sarana jalan dan pasar di lokasi Pos Tami. Kondisi ini bila dilihat dari sisi rupiah berdampak terhadap naiknya nilai tanah, namun dilihat dari hak masyarakat Skou membuat lahan yang menjadi tumpuan mata pencaharian hidup mereka berkurang. Dalam kaitannya dengan hubungan antar negara, tampaknya perlu diatur hukum formal antara Negara PNG dan NKRI karena masih luasnya tanah adat atau komunal milik masyarakat Wutung di wilayah NKRI (4 kilometer dari batas Negara).

Adanya dinamika mobilitas sosial-budaya yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat Skou saat ini, maka dalam membangun kawasan tersebut perlu dilakukan dengan menggunakan dimensi manusia pendukung kawasan tersebut. Dalam hal ini, pembangunan fisik harus diikuti dengan pembangunan manusia dengan memperhitungkan keberadaan manusia di daerah perbatasan (a.l. Skou, Wutung dan Nyauw) yang memiliki cirri-ciri sejarah, budaya dan lingkungannya. Jalinan ikatan kekerabatan dan kepemilikan harta adat merupakan kenyataan yang perlu dipahami lebih lanjut. Terutama yang berkaitan dengan hak ulayat tanah, termasuk hutan dan lahan perkebunan, perlu menjadi perhatian karena terkait dengan adanya benturan pemahaman antara aturan hukum nasional dan kepentingan adat. Isu pertanahan akan semakin kuat ketika nilai ekonominya makin tinggi sehingga memperkecil solidaritas kekerabatan.

Daftar Pustaka

- Bachtiar, H.W., 1994. "Sejarah Irian Jaya". Dalam: *Irian Jaya: membangun masyarakat majemuk.* Koentjaraningrat (ed). Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Bandiyono, Suko dkk., 2004. *Mobilitas Penduduk Di Perbatasan Papua – PNG: Sebuah Peluang dan Tantangan.* Jogyakarta: Bridge.
- Donohue, Mark, 2003. *An Introduction to the Skou Language of New Guinea.* (draft laporan).
- Djohan, Eniarti & Herry Yogaswara, 1998. *Hubungan Sosial Budaya Penduduk Perbatasan Indonesia dan PNG: kekerabatan, ekonomi dan mobilitas.* Paper Semiloka Nasional Membangun Manusia Berkualitas Di Kawasan Timur Indonesia: Menghadapi Era Globalisasi, Manado 18 – 19 Februari 1998.
- Harahap, Bazar dkk., 2005. *Tanah Ulayat dalam Sistem Pertanahan Nasional.* Jakarta: Yayasan Peduli Pengembangan Daerah (SANDIPEDA).
- Jakarimilena, Nico, 2001. *Struktur Bahasa Skou.*
- Koentjaraningrat dkk., 1994. *Irian Jaya: membangun masyarakat majemuk.* Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Mirino, Thomas, 1994. Pengaruh Pola Pemukiman Tradisional Terhadap Pemukiman Baru Pada Masyarakat Skou Sae, Kecamatan Abepura. Skripsi Sarjana Antropologi FISIP – UNCEN, Jayapura.
- Mansoben, Johszua Robert, 1995. *Sistem Politik Tradisional Irian Jaya.* Jakarta: LIPI.
- Program Studi Bahasa Indonesia Angkatan Tahun 1992 Uncen, 1994. *Peribahasa & Ungkapan Bahasa Skou.* (Laporan KKL di Desa Skou Mabo).
- Rumbiak, John, 1990. "Dominggus Foa: petani kelapa di Tapal Batas". Dalam *Kabar dari Kampung No. 44/Th. VIII, Oktober 1990.* Jayapura: YPMD.
- Yuliati, Yayuk & Mangku Poernomo, 2003. *Sosiologi Pedesaan.* Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

FEMINISASI MIGRASI: Studi Kasus di Wilayah Perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara

Ade Latifa

Latar Belakang

Dalam tiga dekade terakhir, jumlah perempuan yang melakukan migrasi untuk kepentingan bekerja meningkat secara tajam. ILO mengestimasi bahwa proporsi perempuan migran yang berperan sebagai tenaga kerja meningkat dari sekitar 15 % ditahun 70'an menjadi lebih dari 50 % pada tahun 1996. Berbagai hasil studi seperti dari Singhanetra-Renard (1981, 1987) di Thailand, kajian POEA (1999) di Filipina menunjukkan kecenderungan yang tinggi di kalangan wanita untuk melakukan migrasi (<http://www.iom.int/chinaconference>; Piper, 2002). Demikian pula hasil studi di beberapa negara maju seperti di Eropa, negara Amerika bagian utara termasuk Canada juga menunjukkan tingginya proporsi perempuan yang melakukan migrasi. Menurut Zlotnik (2003), sejak tahun 1960 sudah terjadi migrasi internasional yang dilakukan perempuan. Jumlah perempuan yang bermigrasi saat itu juga cukup signifikan, yaitu sekitar 47 dari 100 migran. Mulai tahun 1980-an, proporsi perempuan yang melakukan migrasi ke luar negeri senantiasa menunjukkan peningkatan sehingga hampir mendekati 50 %. Bahkan di tahun 2000 jumlah antara migran laki-laki dan perempuan perbedaannya tidak terlalu signifikan yaitu 85 juta migran perempuan dibandingkan dengan 90 juta migran laki-laki. (<http://www.migrationinformation.org/>).

Di Indonesia juga menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu migrasi perempuan lebih tinggi daripada migrasi laki-laki. Selama kurun waktu 4 tahun, yaitu dari 1994-1998 tercatat satu juta perempuan yang melakukan migrasi ke luar untuk tujuan mencari kerja. Bahkan data menunjukkan bahwa sejak tahun 1985, jumlah pekerja perempuan yang bermigrasi keluar dua kali lipat lebih besar dari jumlah tenaga kerja laki-laki (Yuarsi, 2002:122). Data dari OECD (Organization for Economic Co-operation) menunjukkan rasio migran perempuan berbanding laki-laki terus menerus meningkat dari 0,7 pada tahun 1983 menjadi 3,4 pada tahun 1989 (seperti yang dikutip Yuarsi, 2002:122 dari OECD, 1996).

Hasil studi longitudinal yang di lakukan di desa-desa di Jawa dalam kurun waktu 1967-1991 (Collier dkk, 1993) pada dasarnya sudah menunjukkan adanya fenomena peningkatan migrasi perempuan yang berasal

dari keluarga yang tidak memiliki lahan/tanah. Kondisi kemiskinan menyebabkan sekurang-kurangnya ada satu anggota keluarga yang mencari pekerjaan keluar desa di pabrik-pabrik atau pada sektor jasa. Data tahun 1990-an menunjukkan perempuan yang melakukan migrasi antar provinsi mencapai 98,2 %²⁸. Mobilitas penduduk semakin lama semakin menjauh jaraknya dan dalam dekade terakhir sudah melampaui batas antar negara, bahkan Indonesia saat ini termasuk sebagai daerah asal migran internasional yang terbesar (<http://www.ilo.org/public>).

Tidak semua migrasi yang dilakukan perempuan untuk tujuan mencari nafkah, namun ada juga yang bermigrasi karena alasan keluarga seperti ikut suami. Namun dalam perkembangannya, migrasi perempuan tanpa disertai suami/anggota keluarga lainnya untuk kepentingan mencari nafkah secara kuantitatif semakin meningkat. Fenomena ini dikenal dengan sebutan “*autonomous female migration*”. Upaya yang dilakukan para migran perempuan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu bentuk *survival strategy* untuk membantu keluarganya keluar dari kondisi kekurangan/kemiskinan. Peningkatan migrasi di kalangan perempuan ini terjadi karena adanya permintaan yang tinggi terhadap tenaga kerja perempuan khususnya di sektor jasa dan industri. Selain itu, adanya pengakuan/penerimaan sosial atas kegiatan ekonomi yang dilakukan perempuan secara independen di luar rumah tangga, juga merupakan salah satu faktor yang mendorong meningkatnya migrasi dikalangan perempuan. Dapat dikatakan fenomena feminisasi migrasi (*the feminization of migration*) ini mencerminkan adanya dinamika pergerakan penduduk yang terjadi pada masa sekarang (<http://www.iom.int/chinaconference>).

Berdasarkan latar belakang ini, tulisan ini bermaksud untuk mengkaji fenomena feminisasi migrasi khususnya yang terjadi di wilayah perbatasan. Sebagian besar tulisan maupun penelitian lebih banyak mencermati fenomena mobilitas penduduk secara umum dari desa-kota, antar provinsi atau antar negara. Dapat dikatakan belum banyak tulisan yang memfokuskan fenomena mobilitas penduduk, khususnya yang berkaitan dengan migrasi perempuan, yang terjadi di wilayah perbatasan. Sampai akhir tahun 70-an kebanyakan tulisan mengenai migrasi internasional cenderung memfokuskan pada migran laki-laki sebagai tenaga kerja. Secara implisit hal ini merefleksikan adanya anggapan umum bahwa kebanyakan pelaku mobilitas penduduk adalah laki-laki. Dampaknya adalah teori maupun kebijakan yang

²⁸ Perempuan yang bermigrasi ke kota pada umumnya memiliki tingkat pendidikan rendah dan bekerja di sektor informal atau sebagai pembantu rumah tangga, sementara perempuan yang memiliki tingkat pendidikan sekunder, pada umumnya bekerja di formal sektor seperti di pabrik-pabrik yang banyak tersebar di wilayah Botabek (Bogor, Tanggerang, Bekasi) (<http://www.ilo.org/public>).

diambil cenderung menggunakan pengalaman migran laki-laki sebagai sebuah norma²⁹ (Piper, 2002). Keterlibatan perempuan dalam ketenagakerjaan migrasi internasional seringkali terabaikan.

Pemilihan lokasi di wilayah perbatasan atas dasar pemahaman mengenai terjadinya peningkatan pergerakan penduduk di daerah tersebut (<http://www.iom.int/chinaconference>). Seperti yang ditunjukkan dalam hasil penelitian PPK-LIPI di daerah perbatasan Sangir-Talaud (1997) bahwa sekitar tahun 80-an telah terjadi peningkatan arus mobilitas penduduk dari wilayah perbatasan Sangir-Talaud ke Filipina. Semakin kondisifnya situasi politik dan keamanan di Filipina, dan juga jarak yang relatif dekat, menjadi alasan bagi penduduk wilayah perbatasan untuk melakukan migrasi. Berangkat dari fenomena ini, tulisan ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh gambaran mengenai dinamika mobilitas penduduk di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Melakukan kajian mengenai fenomena feminisasi migrasi yang terjadi di wilayah perbatasan Kepulauan Sangihe dalam kurun waktu 10 tahun terakhir
3. Mengkaji dampak dari adanya migrasi terhadap perempuan.

Data/informasi yang dipergunakan untuk kepentingan kajian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim PPK-LIPI di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe³⁰, yang sudah dilakukan sejak tahun 1995 selama kurun waktu 4 tahun dan dilanjutkan lagi pada tahun 2006 untuk jangka waktu dua tahun. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai fenomena feminisasi migrasi, tulisan ini juga menggunakan berbagai data sekunder lainnya seperti hasil penelitian dari negara-negara lain yang sejalan dengan topik penulisan ini.

²⁹ Salah satu sebab mendasar yang mengakibatkan hal ini terjadi adalah karena data yang tersedia menyangkut migrasi internasional tidak dibedakan menurut jenis kelamin. Bahkan sampai saat ini, suatu kajian berdasarkan atas perkiraan global yang komprehensif mengenai migrasi perempuan, tidak tersedia (<http://www.migrationinformation.org/>).

³⁰ Saat itu masih bergabung dengan Talaud, sehingga nama kabupatennya adalah Kabupaten Sangir-Talaud. Berpisah dari Talaud dan membentuk kabupaten sendiri pada tahun 2002.

Kabupaten Kepulauan Sangihe³¹ merupakan bagian integral dari Propinsi Sulawesi Utara, beribukota Tahuna yang jaraknya dari ibukota Propinsi Sulawesi Utara yaitu Manado, sekitar 142 mil laut. Dengan luas daratan 1.012.93 km² daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, terbagi dalam 2 gugusan kepulauan, yaitu: gugusan kepulauan Siau Tagulandang dan Sangir Besar. Dalam peta teritorial Negara RI, Kabupaten Kepulauan Sangihe menempati posisi paling utara dan berbatasan langsung dengan Negara Filipina dan Samudra Pasifik.

Hasil penelitian tim PPK-LIPI tersebut memperlihatkan bahwa migrasi yang dilakukan oleh penduduk perempuan di wilayah perbatasan Sangir-Talaud menuju Filipina untuk bekerja atau mencari kerja sudah berlangsung sejak lama. Sebelum membahas mengenai dinamika mobilitas penduduk di daerah perbatasan, terlebih dulu dipaparkan mengenai konsep feminisasi migrasi dan latar belakang meningkatnya mobilitas/migrasi di kalangan perempuan ditinjau dari perspektif gender dan sosial demografi.

Feminisasi migrasi

Apa feminisasi migrasi ?

Menurut laporan ILO, diperkirakan terdapat 81 juta pekerja migran di seluruh dunia dimana 22 juta diantaranya berada di Asia. Selama beberapa dekade separuh dari pekerja migran tersebut adalah wanita. Dapat dikatakan di akhir tahun 70-an (beberapa tulisan menyebutkan sekitar tahun 80-an), mulai terjadi peningkatan pesat migrasi pekerja wanita terutama dari negara Asia. Diperkirakan 800.000 pekerja wanita dari negara-negara di Asia bermigrasi setiap tahunnya dan jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya (<http://hrw.org/reports/2004>). Marcella Ballara dari REPEM mengatakan, perusahaan-perusahaan besar lebih menyukai menggunakan tenaga kerja perempuan daripada laki-laki karena perempuan dianggap lebih fleksibel, mampu bekerja lama, upah yang diterima rendah dan mereka jarang yang tinggal menetap di negara tujuan (<http://www.penelopes.org/Anglais/>).

³¹ Dengan terbentuknya kabupaten Kepulauan Talaud sebagai kabupaten hasil pemekaran berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2002 membawa konsekuensi pada perubahan nama kabupaten induk dari Kabupaten Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Keterlibatan migran perempuan dalam transformasi ekonomi global yang berdampak pada peningkatan migran perempuan yang dalam struktur tenaga kerja dikenal dengan sebutan feminisasi migrasi. Dalam proses ini, kelompok baru dari migran perempuan mulai bermunculan, baik yang mencakup kelompok wanita yang belum menikah maupun kelompok wanita yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Fenomena feminisasi migrasi ini memunculkan analisa yang sangat beragam, mulai dari latar belakang bermigrasinya perempuan sampai dengan pengaruh dari perbedaan karakteristik demografi tenaga kerja migran perempuan terhadap jenis pekerjaan yang ditawarkan.

Hal menarik yang dapat diamati dari keterlibatan perempuan dalam ketenagakerjaan adalah meskipun pasar kerja untuk perempuan semakin terbuka luas, namun jenis pekerjaan yang ditawarkan kepada mereka relatif sama. Menurut Hugo (dalam Piper, 2000) secara kuantitatif tenaga kerja migran perempuan paling besar ditemukan dalam sektor jasa sebagai pekerja seks dan di bidang domestik sebagai pembantu rumah tangga. Contohnya kasus migran perempuan Vietnam yang bekerja di Taiwan atau migran perempuan Kamboja yang bekerja di Malaysia, kebanyakan hanya memperoleh pekerjaan di sektor domestik atau sebagai pembantu rumah tangga (Piper, 2002). Sebagai konsekuensi dari jenis pekerjaan tersebut, perempuan lebih rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, eksplotasi dan pelecehan seksual. Di beberapa negara, kecuali di Singapura, pekerjaan di sektor domestik tidak termasuk yang dilindungi dalam undang-undang tenaga kerja nasional karena lingkungan rumah tidak didefinisikan sebagai tempat kerja. Seperti yang diamati oleh Robinson, di negara-negara di Timur Tengah, pembantu rumah tangga asing, seringkali dianggap sebagai '*other*' dan tidak terlindungi³² (Piper, 2002). Hal ini mengindikasikan pengalaman yang dialami oleh migran perempuan berbeda dengan migran laki-laki. Migran perempuan lebih rentan terhadap berbagai hal yang disebabkan karena adanya konstruksi gender mengenai maskulinitas dan femininitas yang sangat bias.

Migrasi di satu pihak dapat menimbulkan perubahan pada hubungan kekuasaan-gender sehingga perempuan memiliki peran dan status yang berbeda. Namun dilain pihak, norma-norma sosial dan stereotipi gender,

³² Fenomena ini menunjukkan kuatnya tradisi dan kelembagaan patriarki yang telah menempatkan perempuan dalam urutan yang terendah di lingkup domestik maupun publik (Tyner dalam Piper, 2002).

telah menyebabkan perempuan tidak mendapatkan perlakuan yang setara dengan laki-laki. Misalnya dalam hal upah, perempuan seringkali tidak memperoleh upah yang sesuai meskipun tugas yang dipikul relatif sama beratnya dengan yang dilakukan oleh pekerja laki-laki. Di samping itu, kebanyakan migran perempuan seringkali diarahkan pada sektor-sektor pekerjaan yang hanya membutuhkan sedikit ketrampilan dan umumnya memiliki kontrak kerja dengan waktu singkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kerja bukan merupakan suatu konsep yang netral tetapi sangat dipengaruhi oleh perspektif gender yang dalam banyak hal lebih menguntungkan laki-laki.

Di beberapa negara di Asia, seperti di Indonesia, Filipina dan Sri Langka, fenomena feminisasi migrasi lebih menonjol karena kebanyakan pekerja yang melakukan migrasi ke luar negeri adalah wanita. Pada tahun 2002, Depnakertrans mencatat bahwa 76 % tenaga kerja legal yang berstatus sebagai migran adalah perempuan (<http://hrw.org/reports/2004>). Migran perempuan cenderung terkonsentrasi dalam pasar kerja yang sangat spesifik gender, seperti berkecimpung dalam pekerjaan yang memberi upah rendah dan sangat '*time-consuming*' serta terlibat dalam beragam sektor pekerjaan yang tidak memiliki perlindungan seperti menjadi pembantu rumah tangga (<http://www.un-instraw.org/>). Demikian pula dengan kasus di Indonesia, sebagian besar perempuan yang bermigrasi keluar memperoleh pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Menurut Firdausy (2001) pada tahun 1999, Indonesia telah mengirimkan sekitar 185.000 orang untuk bekerja di sektor jasa domestik. Di Singapura, sebagian besar pekerja domestik berasal dari negara Indonesia, Filipina dan Srilangka.

Fenomena perempuan yang bermigrasi tanpa disertai suami/keluarga semakin meningkat jumlahnya. Hal ini dimungkinkan karena tingginya permintaan akan tenaga kerja perempuan untuk sektor jasa dan industri, selain itu juga semakin diakuinya peran/kiprah perempuan dalam kegiatan ekonomi. Di Cina, meskipun migran laki-laki relatif masih lebih tinggi dibandingkan migran perempuan, namun terlihat peningkatan tenaga kerja perempuan yang bermigrasi ke daerah industri seperti di Guangdong. Demikian pula halnya dengan yang terjadi di negara Bangladesh dan Sri Lanka, ada peningkatan migrasi perempuan yang bekerja di industri garmen.

Peningkatan migrasi di kalangan perempuan ini didorong oleh kemudahan untuk keluar-masuk dalam pekerjaan di sektor informal yang banyak tersedia di perkotaan, juga kemudahan transportasi dalam melakukan mobilitas sirkuler antara desa-kota, serta adanya perubahan peran gender perempuan (<http://www.ilo.org/public>). Perempuan tidak lagi diposisikan dalam ranah domestik dan berperan sebagai ibu rumah tangga, tapi perempuan memiliki kebebasan untuk bekerja, bahkan sampai keluar negeri

sekalipun. Alasan lain yang diduga kuat juga menjadi penyebab meningkatnya migrasi perempuan adalah sulitnya mempertahankan kehidupan di pedesaan.

Feminisasi migrasi dalam kaitannya dengan kondisi sosial-demografi

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan mobilitas penduduk tidak dapat dilepaskan dari adanya pengaruh faktor sosial, ekonomi dan budaya. Adanya perbedaan pembangunan antar daerah dapat memicu terjadinya mobilitas penduduk dari daerah yang terbelakang/miskin sumber daya menuju daerah yang dianggap lebih maju pembangunannya. Namun tidak semua penduduk dapat melakukan mobilitas, hal itu sangat tergantung pada berbagai faktor seperti ikatan keluarga, informasi tentang daerah tujuan, ketersediaan biaya dan pemahaman gender³³ dalam keluarga maupun masyarakat.

Tidak sedikit kajian yang menggunakan perspektif sosial-demografi untuk menganalisa kemunculan dari fenomena feminisasi migrasi tersebut. Ciri-ciri demografi seperti status perkawinan, pendidikan perempuan dan jumlah anak ditengarai telah memainkan peranan penting dalam proses pengambilan keputusan untuk perempuan terlibat dalam kegiatan ekonomi di luar lingkup domestik bahkan sampai ke luar negeri. Hasil studi di Mexico menunjukkan bahwa partisipasi tenaga kerja wanita meningkat dari 13 % pada tahun 1950 menjadi 35 % di tahun 1996. Faktor yang diduga kuat mempengaruhi peningkatan persentase tersebut adalah adanya peningkatan pendidikan wanita dan rendahnya tingkat perkawinan dan fertilitas. Fenomena yang serupa juga ditemukan di Sweden dan Norway, bahwa ada hubungan yang kuat antara penundaan perkawinan dan kehamilan dengan peningkatan tenaga kerja wanita. Ada kecenderungan tingginya permintaan akan tenaga kerja wanita (terutama untuk sektor jasa) diikuti dengan rendahnya persentase perkawinan dan kehamilan. Status perkawinan dalam kajian ini menjadi faktor determinan utama yang mempengaruhi keterlibatan seorang wanita dalam kegiatan ekonomi, dibandingkan ciri demografi lainnya seperti pendidikan, jumlah anak. Diasumsikan seorang wanita yang tidak bersuami (janda atau belum menikah) memiliki otonomi yang lebih

³³ Menurut pemahaman gender yang tradisional mengenai pembagian kerja menurut jenis kelamin, perempuan dianggap paling sesuai/cocok untuk bekerja di rumah tangga dan berhubungan dengan pekerjaan yang sifatnya melayani. Pembagian kerja ini lebih menekankan pada norma-norma sosial dan praktik budaya daripada pertimbangan karakteristik struktural dari pasar kerja dan sistem ekonomi (<http://www.ilo.org/public>).

besar untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dibandingkan dengan para wanita yang masih memiliki suami.

Demikian pula hanya yang ditemukan dari pengalaman di Bangladesh yang menunjukkan bahwa pada umumnya tenaga kerja wanita di sektor garmen cenderung menunda perkawinan mereka, karena adanya keinginan kuat untuk menabung penghasilannya sebelum memutuskan menikah. Fenomena yang sama juga ditemukan di daerah penelitian tim PPK-LIPI (2006) di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Ada kecenderungan perempuan yang mencari kerja ke luar desa adalah mereka yang masih berstatus gadis (belum menikah). Keinginan untuk dapat menabung dan merasakan hidup bebas sebagai lajang, merupakan alasan yang mendasari kepergian mereka mencari nafkah di luar desa. Setelah menikah, kebanyakan dari perempuan tersebut memilih tinggal di desa mengurus keluarganya. Gambaran lebih lanjut mengenai migrasi perempuan dari Sangihe akan dipaparkan dalam bagian berikut ini namun sebelumnya, bahasan diawali dengan sejarah mobilitas penduduk secara umum dari Sangihe menuju Filipina yang menurut catatan sejarah sudah sejak lama dijalankan.

Mobilitas Penduduk dari Kabupaten Kepulauan Sangihe

Sejarah migrasi

Menurut latar belakang sejarahnya, mobilitas penduduk dari Kabupaten Kepulauan Sangihe ke pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Republik Filipina, sudah berlangsung sejak sebelum abad ke-19. Keadaan ini berlangsung terus dan bahkan arus mobilitas penduduk semakin meningkat memasuki abad ke-20. Keterbatasan sumber daya alam sebagai sumber mata pencaharian dan tekanan ekonomi lainnya merupakan faktor pendorong penduduk Sangir³⁴ untuk melakukan mobilitas. Berdasarkan hasil studi PPK-LIPI pada tahun 1995 menunjukkan bahwa penduduk yang keluar dari Sangihe-Talaud lebih besar daripada penduduk yang masuk ke daerah tersebut. Para migran tersebut menurut catatan PPK-LIPI, paling besar berasal dari Pulau Sangir Besar terutama dari Kecamatan Tabukan Utara³⁵ yang termasuk dalam wilayah perbatasan BCA (*Border Crossing Area*)

³⁴ Masyarakat umumnya menyebut penduduk dari Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai orang Sangir, sehingga dalam tulisan ini juga akan memakai istilah itu untuk menyebutkan penduduk yang berasal dari wilayah tersebut.

³⁵ Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kecamatan Tabukan Utara mengalami pemekaran yang membawa konsekuensi terbentuknya Kecamatan Nusa Tabukan yang wilayahnya mencakup sebagian wilayah Kecamatan Tabukan Utara sebelum pemekaran.

Marore. Diperkirakan jumlah migran yang menetap di Filipina Selatan sekitar 3.000 kepala keluarga atau sekitar 15.000 jiwa (Aswatini dkk, 1997:14).

Beberapa daerah Kepulauan Sangihe-Talaud termasuk sebagai daerah yang kurang baik untuk dijadikan lahan pertanian. Bahkan ada beberapa pulau yang tidak dapat dihuni karena tidak adanya sumber mata air tawar. Berbeda keadaanya dengan pulau-pulau di Filipina yang termasuk sebagai daerah yang cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Sebelum tahun 1980-an, kesempatan kerja di Filipina terbuka luas. Kebanyakan para migran tersebut bekerja di sektor perkebunan kelapa. Ada kecenderungan orang-orang Filipina lebih senang mempekerjakan orang-orang Indonesia sebagai buruhnya karena dianggap lebih rajin, jujur dan yang terpenting mau dibayar dengan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan buruh orang Filipina sendiri (Raharto, 1995:65-66).

Dalam perkembangannya, penduduk dari Sangihe yang pergi ke Filipina Selatan, khususnya di daerah Mindanao, tidak hanya untuk keperluan bercocok tanam, tetapi juga untuk berdagang. Perbedaan harga kopra dan barang-barang kebutuhan pokok antara Sangihe dengan Filipina yang mendorong para petani dari Sangir-Talaud untuk melakukan perdagangan³⁶. Sistem penjualan saat itu yang terjadi antar pedagang Indonesia dengan Filipina adalah dengan cara barter untuk mengatasi perbedaan nilai mata uang. Melalui hubungan dagang ini kemudian masuklah informasi tentang pasar kerja yang tersedia di Filipina Selatan sehingga mendorong arus migrasi yang lebih besar dari penduduk Sangir-Talaud masuk ke daerah di Filipina tersebut. Tidak sedikit di antara mereka yang kemudian memutuskan untuk menetap di Filipina dan melakukan kawin campuran dengan penduduk setempat.

Menurut informasi yang disampaikan oleh narasumber pada saat penelitian berlangsung tahun 2006, bahwa hubungan perdagangan antara Filipina dengan Sangir diawali dengan adanya proses kunjung-mengunjungi antar kerabat yang menetap di Filipina³⁷. Lambat laun muncul bentuk

³⁶ Pada tahun 1960-an, harga sembilan bahan pokok di desa Tinakareng dan Bukide, sangat mahal dibandingkan dengan harga di Filipina. Di samping itu, barang-barang tersebut juga sukar diperoleh di kedua desa tersebut sehingga untuk mendapatkan sembilan bahan pokok tersebut, penduduk pergi ke Filipina dengan membawa kopra untuk dijual di sana. Harga kopra di Filipina relatif lebih mahal bila dibandingkan dengan harga di desa di Sangir. Faktor inilah yang kemudian mendorong penduduk Sangir untuk berdagang ke Filipina (Raharto, 1995:67).

³⁷ Menurut catatan penelitian PPK-LIPI (1995) di awal tahun 70-an diperkirakan masih ada sekitar 10 ribuan orang Sangir yang tinggal di Filipina Selatan,

perdagangan yang sampai saat ini masih berlangsung meskipun menurut narasumber tersebut, komoditas perdagangan berlangsung dalam skala kecil. Keterbatasan modal dan transportasi pengangkutan menjadi kendala utama untuk mengembangkan sektor perdagangan. Berikut kutipan wawancara mendalam dengan narasumber di Kecamatan Nusa Tabukan, Sulawesi Utara:

”.....banyak (penduduk) dari Tinakareng yang tinggal di Filipina. Langkah pertama hanya saling kunjung-mengunjungi keluarga yang (kemudian) berlanjut dengan mereka bawa barang dari sini (Tinakareng), bawa barang dari sana (Filipina). Karena kalau datang ke sana (Filipina) lebih mahal harganya, begitu juga barang dari sini. Kalau dilihat barang-barangnya tidak jauh beda, ... Ya kalau dari sini bawa sabun, rins, di sana juga ada, korek api yang batang, kalau dari sana korek yang pakai gas tapi masih banyak yang cinta produk luar negri. Kalau yang dari Tinakareng ke Filipina biasanya cuma perdagangan kecil-kecilan, yang besar justru dari Petta dan pakai kapal kalau ke Filipina, kalau yang dari Tinakareng cuma pump-boat.”.

Kepindahan penduduk ke luar Sangihe dapat dikatakan sebagai salah satu strategi dalam mengatasi kemiskinan yang melingkupi kebanyakan masyarakat yang hidup di daerah perbatasan tersebut. Strategi semacam ini dapat dikatakan sudah merupakan tradisi yang dilakukan sejak dulu oleh penduduk untuk keluar dari jerat kemiskinan. Dengan melakukan migrasi diharapkan persoalan ekonomi rumah tangga dapat teratasi karena adanya kesempatan kerja yang lebih luas di daerah tujuan. Pilihan mengadu nasib ke negara tetangga dipengaruhi oleh faktor jarak yang lebih dekat. Seperti halnya dengan orang-orang dari Kepulauan Sangihe yang mencari pekerjaan ke Filipina bagian selatan, jarak tempuh ke daerah tersebut lebih dekat bila dibandingkan pergi ke Manado yang memakan waktu hampir 10 jam dengan menggunakan kapal besar. Sedangkan ke pulau-pulau di wilayah Filipina tersebut hanya membutuhkan waktu sekitar 6-8 jam dengan menggunakan perahu bermotor kecil.

Apabila dilihat dari rangkaian pergerakan penduduk Sangir dapat diamati bahwa daerah tujuan mereka tidak hanya terbatas ke Filipina saja tetapi daerah cakupan pergerakan penduduk Sangir relatif luas. Sebagian penduduk Sangir ada yang menuju ke rangkaian kepulauan yang terletak di

diantaranya di pulau Balut dan Saranggane. Meskipun tidak ada dokumentasi resmi mengenai jumlah orang Sangir yang saat ini bermukim di Filipina kemungkinan jumlahnya sudah jauh berkurang. Hal ini diindikasikan dari banyaknya penduduk Indonesia yang saat itu berkeinginan kembali/pulang ke Indonesia, namun masih terbentur soal biaya kepulangan.

lepas pantai Minahasa, bahkan ada yang menjelajah sampai ke wilayah Papua. Dengan menggunakan transportasi laut jenis *pump-boat* bermesin 16 PK penduduk Sangir mampu mencapai daerah tujuan yang relatif jauh dari Sangihe. Keterbatasan sarana transportasi tidak menghalangi penduduk Sangir menjelajahi daerah-daerah berjarak ribuan mil untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Selain mencari nafkah, sebagian dari mereka yang bermigrasi adalah untuk melanjutkan pendidikan, misalnya ke Manado atau ke Tahuna. Menurut hasil penelitian PPK-LIPI (1997), orang-orang Sangir yang melanjutkan sekolah ke luar daerah ada kecenderungan tidak kembali ke daerah asal. Kecenderungan ini ternyata masih berlanjut 10 tahun kemudian. Saat PPK-LIPI melakukan penelitian di tahun 2006, diperoleh informasi bahwa penduduk yang berpendidikan tinggi umumnya mencari kerja di luar desa, sedangkan yang tersisa di desa kebanyakan berpendidikan rendah (SD ke bawah)³⁸. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut belum mampu menciptakan lapangan kerja untuk angkatan kerja terdidik.

Dinamika mobilitas penduduk

Arus migrasi penduduk dari Sangir-Talaud menunjukkan pergeseran dari pola permanen menjadi musiman atau sering juga disebut dengan non permanen. Hasil survei PPK-LIPI (1995) menunjukkan bahwa kondisi keamanan yang memburuk sekitar tahun 1980-an di Filipina sedikit-banyak mempengaruhi arus mobilitas penduduk dari Sangir ke Filipina. Maraknya perampokan dan meningkatnya kasus pembunuhan telah mengurangi minat penduduk Sangir-Talaud untuk menetap Filipina. Demikian pula situasi di Filipina sudah tidak kondusif untuk mencari kerja maupun membuka lahan perkebunan. Rawannya kondisi keamanan dan memburuknya perekonomian di Filipina telah mendorong sebagian besar penduduk Sangir menjual kebun/ladang mereka untuk kemudian kembali ke Sangihe atau ke beberapa daerah lainnya di Indonesia.

Setelah tahun 80'an, pergerakan penduduk Sangir ke Filipina bukan lagi untuk tujuan menetap tapi kebanyakan hanya bersifat sementara untuk tujuan dagang. Seperti yang dikemukakan oleh seorang migran perempuan berusia 45 tahun, bahwa ia tidak pernah tinggal menetap di Filipina tetapi lebih sering menyertai suaminya ke Filipina untuk berdagang. Menurutnya di pasar di Tahuna sulit untuk mendapatkan beras, susu dan minyak tanah

³⁸ Hasil survei PPK-LIPI (2006) terhadap 192 rumah tangga di Desa Nanedakele menunjukkan bahwa lebih dari tigaperempat ART usia 13-18 tahun, pendidikan terakhir yang ditamatkan SD ke bawah, sisanya memiliki jenjang pendidikan terakhir SLTP dan hanya sebagian kecil yang dapat menyelesaikan pendidikan SLTA. Data ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jenjang pendidikan, maka proporsi ART semakin mengecil.

sehingga penduduk Sangir terpaksa harus pergi ke Filipina untuk mencari barang-barang kebutuhan pokok tersebut yang harganya pun relatif lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran Sangir (Raharto, 1995:67). Sebagian penduduk ada yang masuk ke Filipina untuk mengunjungi sanak keluarganya yang masih menetap di sana sekaligus mengelola perkebunan bagi yang masih memiliki kebun/lahan³⁹. Dengan menggunakan izin kunjungan keluarga, mereka masuk ke Filipina untuk mengurus perkebunan kelapa dan tanah perladangan yang masih ada di Pulau Balut dan Saranggane dan beberapa tempat lainnya di daratan Mindanao (Raharto, 1995: 38).

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan narasumber pada saat penelitian dilakukan tahun 2006, pola migrasi non-permanen ke Filipina kenyataannya masih dijalankan oleh sebagian penduduk Sangir, khususnya mereka yang berprofesi sebagai pedagang. Umumnya di Filipina mereka menetap selama 2-3 hari dan kemudian kembali membawa barang-barang dagangan dari Filipina untuk di jual ke Petta. Sementara penduduk Sangir yang masih mempunyai keluarga di Filipina, umumnya mereka menetap selama satu bulan sebelum kembali ke Sangir. Bagi penduduk yang menekuni bisnis perdagangan, dalam setahun sekurang-kurangnya tiga kali pergi ke Filipina. Semakin besar modal yang dimiliki, semakin sering mereka melakukan mobilitas.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa penduduk yang melakukan mobilitas untuk tujuan berdagang, tidak ada yang menetap lebih dari enam bulan. Sekitar 6 persen penduduk Desa Nanedakele yang memiliki aktivitas berdagang, menetap selama beberapa hari di daerah tujuan dan frekuensinya berulang-ulang (lihat Tabel 1.). Sebagian besar melakukan mobilitas secara ulang-alik atau pergi dan pulang pada hari yang sama. Kemungkinan besar yang melakukan mobilitas ulang-alik, lokasi perdagangannya bukan di Filipina, namun di Petta (masih termasuk wilayah Kepulauan Sangihe). Karena untuk sampai di Filipina membutuhkan waktu sekurang-kurangnya 8 jam sehingga tidak memungkinkan untuk dilaju dalam waktu sehari. Sementara dari desa ke Petta, hanya membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam, sehingga memungkinkan untuk dilaju dalam sehari.

Meskipun demikian, tidak semua penduduk melakukan mobilitas non-permanen. Seperti yang dapat dilihat dari hasil survei di tahun 2006 (lihat Tabel 1.) bahwa lebih dari separuh pencari kerja umumnya menetap lebih dari enam bulan. Menurut konsep migrasi, lama tinggal lebih dari enam bulan dapat dikategorikan sebagai permanen. Kemungkinan besar daerah

³⁹ Menurut perkiraan Ambong, ada sekitar 35 persen penduduk yang masih memiliki tanah perladangan dan kebun kelapa di Pulau Saranggane, Pulau Balut dan di beberapa tempat di daratan Mindanao (Raharto, 1995:38).

tujuan para pencari kerja yang bermigrasi tersebut adalah daerah-daerah dalam kawasan Indonesia, oleh karena hanya terdata 2,4 persen yang menyatakan pernah bermigrasi ke luar negeri. Berdasarkan hasil wawancara mendalam diperoleh keterangan bahwa dalam kurun waktu dua tahun belakangan, ada kecenderungan pergeseran penduduk dari non-permanen menjadi permanen. Hal ini diindikasikan dengan adanya kepindahan sekitar 10 rumah tangga dari dusun III dan IV untuk kemudian menetap di Manado. Dari penghasilan merantau di Manado, migran berhasil meningkatkan kesejahteraannya sehingga mampu membeli tanah dan membangun rumah. Selanjutnya, mereka mengajak keluarga dari desa untuk pindah ke Manado, seperti yang diceritakan oleh narasumber berikut ini:

Ada tidak buruh bangunan yang sudah berhasil di Manado kemudian mengajak keluarganya yang ada di sini untuk pindah ke Manado ?

”....banyak juga, terutama di dusun III dan IV”.

Kenapa dari situ yang banyak ?

”....karena banyak yang berhasil mereka”.

Biasanya berapa lama mereka di Manado baru bisa mengajak keluarga ?

”....tergantung dari pendapatannya, biasanya lebih dari 6 bulan. Ada yang sampai 5 tahun di Manado”.

Tabel 1.
Distribusi Migran menurut Alasan Utama Kepergian dan Lama Tinggal, Desa Nanedakele, Kabupaten Kepulauan Sangihe (%)

Alasan utama kepergian yang terakhir	Lama tinggal di daerah tujuan (%)			Total
	Pergi-pulang pada hari yang sama	Beberapa hari dan berulang-ulang	Lebih dari enam bulan	
1. Berdagang	9,1	5,8	-	2,9
2. Buruh (kebun, kayu, kapal)	9,1	8,1	10,8	9,6
3. Mencari ikan	9,1	7,0	3,6	5,3
4. Mencari pekerjaan	-	29,1	62,2	45,2
5. Sekolah	-	1,2	7,2	4,3
6. Berobat	-	2,3	2,7	2,4
7. Alasan keluarga	63,6	40,7	12,6	26,9
8. Lainnya	9,1	5,8	0,9	3,4
Total	100,0 (11)	100,0 (86)	100,0 (111)	100,0 (208)

Sumber: Penelitian Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan di Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, PPK-LIPI, 2006.

Dinamika mobilitas penduduk tidak hanya terlihat dari adanya perubahan dalam lama tinggal tetapi juga dalam hal kuantitas penduduk yang melakukan mobilitas. Apabila dari hasil penelitian PPK-LIPI di Marore tahun 1997 menunjukkan sekitar 46 persen penduduk yang pergi ke Filipina untuk mencari kerja, maka hasil penelitian tahun 2006 memperlihatkan adanya penurunan jumlah mobilitas penduduk ke luar negeri yang cukup signifikan. Hasil survei yang dilakukan terhadap 192 rumah tangga di Desa Nanedakele menemukan bahwa hanya sekitar 2,4 persen saja (lihat Tabel 2.) penduduk yang pernah melakukan migrasi ke luar negeri (ke Malaysia dan Filipina). Menurut hasil wawancara mendalam diperoleh keterangan bahwa penduduk Sangir yang sampai saat ini masih melakukan mobilitas ke Filipina, hanya terbatas penduduk dari Desa Tinakareng saja. Untuk memperoleh kejelasan dari fenomena tersebut, berikut petikan hasil wawancara mendalam dengan narasumber di Kecamatan Nusa Tabukan:

Penduduk di sini masih banyak yang pergi ke Filipina ?
".... kalau di sini, untuk Nipa, sudah tidak ada, tinggal di Tinakareng yang sering bolak-balik".

Kenapa yang paling banyak ke Filipina dari Tinakareng ?
"...karena yang paling banyak mempunyai keluarga tinggal di Filipina dari Tinakareng".

Kalau yang dari Bukide Timur ke Davao masih ada ?
"....memang (dulu) orang ada yang dari sana ke Davao, tetapi sekarang kurang sekali, boleh dikatakan juga tidak ada".

Ada beberapa faktor yang ditengarai menjadi penyebab berkurangnya mobilitas penduduk ke Filipina. Salah satu faktor berkaitan dengan ketatnya pengawasan yang dilakukan, baik oleh pemerintah Indonesia maupun Filipina, dalam memantau pergerakan orang termasuk barang dagangan yang umumnya dibawa oleh penduduk yang bepergian ke atau dari Filipina. Seperti yang dikemukakan oleh seorang narasumber, sejak dulu sudah dibuat peraturan⁴⁰ yang mewajibkan orang yang bermaksud ke Filipina harus 'melapor' terlebih dulu ke Marore. Tanpa melalui jalur resmi yang ditetapkan tersebut, kemungkinan orang dapat ditangkap dan diproses di pengadilan. Dengan maraknya isu terorisme penjagaan di perbatasan semakin diperketat. Besarnya resiko yang harus dihadapi apabila menggunakan jalur tidak resmi (tanpa dilengkapi surat-surat), telah mengurungkan niat sebagian penduduk Sangir untuk pergi ke Filipina. Berkurangnya animo masyarakat Sangir ke Filipina juga disebabkan karena adanya pergeseran daerah tujuan migrasi. Penelitian PPK-LIPI 2006 menemukan bahwa hanya sebagian kecil saja penduduk Desa Nanedakale yang menyatakan pernah bermigrasi untuk mencari kerja atau berdagang ke Filipina. Hasil survei (lihat Tabel 2.) menunjukkan sebagian besar penduduk Desa Nanedakale daerah tujuan migrasinya berada dalam kawasan negara Indonesia, sedangkan hanya 2,4 persen saja yang pernah bermigrasi ke luar negeri (Malaysia dan Filipina). Temuan ini juga diperkuat dengan informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan beberapa narasumber, antara lainnya mereka mengemukakan sebagai berikut:

⁴⁰ Untuk menjaga keamanan kedua Negara, Pemerintah Indonesia dan Filipina membuat kesepakatan kerjasama lintas batas yang dimulai pada tahun 1956. Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan ditetapkannya enam unit daerah perbatasan Border Crossing Area (BCA), masing-masing tiga unit untuk wilayah Indonesia dan Filipina. Namun yang beroperasi hanya 2, yaitu unita BCA Marore (Indonesia) dan BCA Batuganding (Filipina) (Raharto, 1995:37).

Kalau orang yang pada keluar cari kerja kemana perginya ?
"....ke Manado, kalau perempuan paling banyak jadi PRT
(kebanyakan yang masih nona yang pergi menjadi PRT),
kalau laki-laki jadi buruh bangunan. Paling banyak jadi
buruh bangunan, di samping kuli angkut (bagasi)".

Apakah sekarang masih banyak penduduk yang pergi ke
Filipina untuk berdagang?

"....kalau sekarang karena pengaruh persaingan terlalu besar
terutama masalah modal, karena adanya di Petta, sehingga
masyarakat di sini mengalah. Sehingga sampai sekarang so
tidak ada orang dari sini yang ke Filipina, sudah jarang
sekarang. Orang-orang yang berdagang biasanya mereka
belanja di Manado (seperti pakaian, alat-alat dapur) baru di
jual di sini (Nanedakele)".

Dari dusun IV (termasuk dalam Desa Nanedakele) ini ada
tidak yang pergi ke Filipina?

"Tidak ada. Kalau dulu yang berpanggayung masih ada,
kalau sekarang sudah tidak ada".

Kondisi perekonomian di salah satu negara merupakan faktor yang
dapat mempengaruhi pergerakan penduduk untuk masuk atau keluar negara
tersebut. Demikian pula halnya dengan situasi di Filipina yang saat itu tidak
lebih baik daripada kondisi di Indonesia, merupakan faktor yang
mempengaruhi penduduk Sangir untuk beralih mencari kerja di lingkup
wilayah Indonesia. Setelah tahun 70'an kondisi perekonomian di Indonesia
mulai membaik sehingga banyak penduduk Sangir yang memutuskan
kembali ke Indonesia, sebagian ada yang menuju Sangir, sebagian lainnya
menuju Pulau Halmahera (Aswatini dkk, 1997:36).

Migrasi perempuan dari wilayah perbatasan Kepulauan Sangir

Bagian ini memaparkan lebih dalam mengenai fenomena migrasi
khususnya yang terjadi di kalangan perempuan. Data yang dipergunakan
untuk menjelaskan pola migrasi penduduk perempuan bersumber dari hasil
survey PPK-LIPI tahun 2006 di Desa Nanedakale, Kabupaten Kepulauan
Sangihe. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, bahwa ada
kecenderungan peningkatan mobilitas penduduk perempuan, baik lintas desa-
kota, provinsi maupun lintas negara. Tingginya mobilitas perempuan juga
ditemukan di Desa Nanedakele, salah satu desa yang termasuk dalam
cakupan BCA Marore. Berdasarkan hasil survei tahun 2006, persentase
penduduk perempuan yang bermigrasi hampir separuh (48,1 persen) dari
jumlah total responden yang pernah/sedang bermigrasi. Persentase ini tidak
berbeda jauh dengan persentase laki-laki (51,9 persen) yang pernah/sedang

melakukan migrasi. Istilah lokal bagi yang bermigrasi ke luar desa untuk mencari kerja/bekerja adalah "memberasing" yang artinya merantau.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa terjadi pergeseran daerah tujuan migrasi. Kecenderungannya pada masa sekarang daerah tujuan migrasi penduduk Sangir tidak lagi ke Filipina. Demikian pula halnya dengan penduduk Desa Nanedakale bahwa, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sebagian besar area migrasi penduduk Nanedakale berada dalam kawasan Indonesia (sebagian besar masih berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara). Hanya 2,4 persen saja penduduk yang pernah bermigrasi ke luar negeri (Malaysia dan Filipina). Dari hasil survey juga dapat dilihat bahwa kebanyakan migran perempuan memilih Manado sebagai daerah tujuan. Hanya tercatat satu persen saja perempuan yang pernah bermigrasi ke luar negeri. Sementara migran laki-laki, selain ke Manado, sebagian menuju Bitung. Seperti yang diketahui di Bitung banyak terdapat industri dan juga terdapat pelabuhan laut yang banyak memperkerjakan tenaga kerja dari Sangir sebagai buruh bongkar/angkut barang. Penduduk Sangir yang bermigrasi ke luar desa untuk mencari kerja umumnya saat musim angin Barat dimana saat itu para nelayan tidak dapat melaut karena derasnya arus laut dan tingginya ombak. Berkurangnya pendapatan dari hasil perikanan, mendorong sebagian penduduk untuk mencari tambahan penghasilan di luar desa.

Tabel 2.
**Distribusi Migran menurut Daerah Tujuan dan Jenis Kelamin,
 Desa Nanedakale, Kabupaten Kepulauan Sangihe (%)**

Daerah Tujuan	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Total
Sangihe Talaud	5,6	4,0	4,8
Manado	74,1	82,0	77,9
Bitung	10,2	5,0	7,7
Gorontalo	1,9	2,0	1,9
Luar negri (Malaysia, Filipina)	3,7	1,0	2,4
Lainnya	4,6	6,0	5,3
Total	100,0 (108)	100,0 (100)	100,0 (208)

Sumber: Penelitian Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan di Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, PPK-LIPI, 2006.

Mencari pekerjaan dan alasan keluarga merupakan dua hal yang paling sering dikemukakan para migran perihal kepergiannya ke luar desa. Namun apabila dilihat menurut jenis kelamin, terlihat adanya perbedaan yang

cukup signifikan antara migran laki-laki dan perempuan. Hal ini diindikasikan dari relatif banyaknya penduduk perempuan yang bermigrasi untuk tujuan sekolah dibandingkan dengan laki-laki. Situasi ini secara tidak langsung menggambarkan adanya akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang terbuka luas. Fenomena ini berbeda dengan yang biasanya ditemukan di beberapa negara berkembang seperti di India, Bangladesh, dimana kecenderungannya perempuan relatif tertinggal dalam hal pendidikan daripada laki-laki. Adanya gender bias menyebabkan laki-laki lebih diprioritaskan untuk memperoleh pendidikan daripada perempuan. Sebaliknya untuk kegiatan memburuh dan mencari ikan, merupakan alasan kepergian lainnya yang lebih banyak dikemukakan oleh migran laki-laki daripada migran perempuan.

Tabel 3.

Distribusi Migran menurut Alasan Utama Kepergian yang Terakhir dan Jenis Kelamin, Desa Nanedakele, Kabupaten Kepulauan Sangihe (%)

Alasan utama kepergian yang terakhir	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Total
1. Berdagang	4,6	1,0	2,9
2. Buruh (kebun, kayu, kapal)	15,7	3,0	9,6
3. Mencari ikan	10,2	-	5,3
4. Mencari pekerjaan	48,1	42,0	45,2
5. Sekolah	1,9	7,0	4,3
6. Berobat	2,8	2,0	2,4
7. Alasan keluarga	15,7	39,0	26,9
8. Lainnya	0,9	6,0	3,4
Total	100,0 (108)	100,0 (100)	100,0 (208)

Sumber: Penelitian Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan di Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, PPK-LIPI, 2006.

Pada umumnya perempuan mencari kerja atau bekerja di sektor domestik sebagai pembantu rumah tangga, tukang cuci atau sebagai penjaga toko, sedangkan laki-laki banyak yang menjadi buruh di perkebunan maupun buruh angkut barang/bagasi di perkapanan yang banyak ditemukan di Manado, Bitung. Tingkat pendidikan yang rendah menjadi penyebab utama mengapa kebanyakan migran hanya dapat terserap pada sektor dan jenis

pekerjaan yang tidak membutuhkan ketrampilan seperti di sektor perkebunan, pertanian dan menjadi buruh/PRT.

Khususnya perempuan yang bermigrasi untuk mencari kerja, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, umumnya dilakukan oleh mereka yang masih berstatus lajang (gadis). Kebanyakan setelah menikah mereka tidak lagi pergi ke luar desa untuk bekerja/mencari kerja. Sementara hal semacam ini tidak berlaku pada penduduk laki-laki. Meskipun sudah berstatus menikah, masih banyak diantara mereka yang melakukan migrasi ke beberapa daerah untuk bekerja/mencari kerja. Seperti yang diceritakan oleh seorang narasumber yang memiliki pengalaman bekerja di Manado sebagai pembantu rumah tangga semasa gadis, sebagai berikut:

Ibu pernah kerja di Manado ?

”....kalau kerja masih cewe, waktu itu pernah kerja menjadi PRT di Manado”.

Kalau di sini yang cewe-cewe masih banyak yang kerja di Manado ?

”....masih banyak, ada yang kerja di Manado, ada yang Cuma di Taruna. Di sini juga ada yang pernah dibawa ke Jakarta sebagai PRT”.

Ada tidak cewek di sini yang sekarang kerja di Malaysia atau Filipina ?

”...tidak ada”.

Apabila dilihat dari sejarah mobilitas penduduk Sangir, pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga untuk perempuan dan menjadi buruh untuk laki-laki, ternyata sudah sejak dulu dijalani oleh penduduk Sangir yang saat itu masih banyak yang bermigrasi ke Filipina. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Lor, saat kepergiannya ke Filipina tahun 1968, ia belum menikah dan masih berusia 20 tahun. Ia tinggal menetap di Filipina di daerah Basiawang selama satu tahun untuk bekerja *bebaso* (istilah untuk pembantu rumah tangga). Menurutnya banyak perempuan Indonesia yang bekerja *bebaso* sementara yang laki-laki bekerja di kebun. Ibu Lor kembali ke Sangihe karena akan menikah dengan orang asal Bukide dan tidak kembali lagi ke Filipina (Raharto, 1995:65).

Hal menarik yang dapat diamati dari fenomena migrasi perempuan ke Filipina saat itu adalah, kebanyakan perempuan melakukan migrasi bersama dengan suami atau anggota rumah tangga yang lainnya dengan pertimbangan mencari pengalaman dan informasi terlebih dulu. Setelah memperoleh informasi mengenai situasi dan keadaan di daerah tujuan, baru kemudian mereka mengajak serta anggota keluarga lainnya untuk ikut bermigrasi. Perbedaannya dengan kondisi sekarang adalah, umumnya para perempuan yang mencari kerja ke Manado, statusnya belum menikah

sehingga tidak jarang mereka melakukan migrasi secara sendiri atau ikut dengan teman yang sudah pernah ke Manado. Hal ini sejalan dengan umur saat bepergian pertama kali, yaitu hampir dua pertiganya migran perempuan berada dalam kelompok usia 15-29 tahun. Bahkan 21 persen tercatat perempuan melakukan migrasi pertama kali di bawah usia 15 tahun. Semakin bertambah usia, kecenderungannya semakin mengecil persentase perempuan yang bermigrasi. Fenomena yang sama juga ditemukan pada kelompok migran laki-laki. Menurut informasi dari seorang narasumber, merupakan hal yang biasa untuk seorang anak berusia 14 tahun pergi ke luar desa untuk mencari kerja. Umumnya setelah menyelesaikan pendidikan dasar 6 tahun, mereka tidak lagi melanjutkan pendidikannya, namun sebagian besar masuk dalam pasar kerja.

Tabel 4.
Distribusi Migran menurut Umur Bepergian Pertama Kali dan Jenis Kelamin, Desa Nanedakele, Kabupaten Kepulauan Sangihe (%)

Umur bepergian pertama kali	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Total
< 15 Tahun	3,7	21,0	12,0
15 – 29 Tahun	69,4	64,0	66,8
30 – 39 Tahun	11,1	7,0	9,1
40 – 49 Tahun	11,1	5,0	8,2
≥50 Tahun	4,6	3,0	3,8
Total	100,0 (108)	100,0 (100)	100,0 (208)

Sumber: Penelitian Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan di Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, PPK-LIPI, 2006.

Umumnya para migran dari Sangir yang menuju Manado, mereka tinggal di dalam pondokan yang disewa secara bersamaan dengan para migran lainnya di daerah Malalayang (Menado bagian Utara). Sebagian ada yang menetap untuk sementara waktu dengan kerabat yang sudah lebih awal tinggal di Manado. Untuk para migran perempuan yang memiliki kerjaan di sektor domestik sebagai pembantu rumah tangga, kebanyakan mereka tinggal dengan pemilik rumah. Penduduk yang merantau ke Manado, pada umumnya mereka sudah memiliki informasi tentang peluang kerja dari teman atau kerabat yang ada di Manado. Relatif jauhnya tempat kerja dengan desa tempat tinggal, menyebabkan kebanyakan migran pulang ke desa hanya

setahun sekali dan biasanya saat hari raya (lebaran). Setelah beberapa hari di desa (paling lama seminggu), mereka umumnya kembali lagi bekerja.

Biasanya cewe-cewe mulai kerja di Manado umur berapa ?
"...15 tahun ke atas".

Waktu ke Manado dengan kawan atau sendiri ? "...dengan kawan, ...waktu di Manado tinggal dengan saudara, baru cari kerjaan".

Menunggu dapat kerjaan lama tidak ? "....ada kalanya satu minggu baru dapat kerjaan".

Berapa lama baru pulang ? "...kalau cewe satu tahun baru pulang (lebaran pulang). Biasanya satu minggu di rumah, balik lagi ke Manado".

Kalau yang ibu-ibu tidak ada yang kerja di Manado ?
"...tidak ada, hanya suaminya saja yang kerja ke Manado".

Membicarakan mengenai tenaga kerja migran tidak dapat terlepas dari pembahasan mengenai remitan⁴¹ yang merupakan definisi dari penghasilan yang dikirimkan oleh para migran kepada keluargannya di daerah asal. Kebanyakan penghasilan dikirimkan oleh para migran kepada keluarganya melalui teman/kerabat yang pulang ke daerah asal. Penghasilan tersebut umumnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan subsisten dari keluarga migran yang tinggal di daerah asal dan merupakan sumber pendapatan bagi rumah tangga tersebut. Penghasilan dari migran tersebut dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dari migran yang bersangkutan dan merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam membantu rumah tangga keluar dari jerat kemiskinan.

Dari berbagai tulisan/laporan penelitian dapat dipahami bahwa sumbangan remitan terhadap peningkatan perekonomian di tingkat keluarga, masyarakat dan daerah relatif signifikan. Dalam laporan bank dunia dipaparkan bahwa pada tahun 2001, remitan yang dikirimkan oleh para migran yang berasal dari negara-negara berkembang mencapai jumlah sekitar U.S.\$ 72 miliar dan hal ini merupakan sumber devisa negara terbesar kedua setelah investasi langsung dari luar negri. Untuk Indonesia sendiri, tercatat U.S.\$ 5.49 miliar remitan yang dikirimkan setiap tahunnya. Sehingga tidaklah mengherankan apabila untuk negara-negara 'pengekspor' tenaga kerja, seperti Indonesia, Filipina, Sri Lanka, India, Bangladesh, Pakistan, Vietnam dan Thailand, eksport tenaga kerja ke luar negri telah menjadi salah satu strategi untuk menekan tingkat pengangguran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

⁴¹ Meskipun penghasilan tersebut dapat dikirimkan dalam bentuk barang, namun pengertian remitan ini merujuk pada pengiriman dalam bentuk uang saja

Dampak migrasi bagi perempuan dan rumah tangga

Secara umum, kegiatan mobilitas penduduk membawa dampak baik terhadap kehidupan migran dan keluarga maupun masyarakat disekitarnya. Pada skala mikro hal ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Peranan remitan dalam hal ini sangat besar karena dapat menimbulkan perubahan status sosial ekonomi keluarga migran, yang diindikasikan antara lain dari bangunan rumah yang bagus dan kepemilikan barang-barang berharga lainnya yang mudah dilihat. Pada skala yang lebih luas, mobilitas penduduk dapat menimbulkan perubahan perilaku masyarakat yang ditandai dengan perubahan perilaku konsumsi dan berkembangnya kehidupan ekonomi di sekitar daerah migran (Kasto, 2002:273)⁴².

Ada kecenderungan melihat peranan tenaga kerja migran perempuan dalam kegiatan ekonomi, hanya berdampak kecil/tidak signifikan terhadap peningkatan ekonomi, karena umumnya tenaga kerja migran perempuan mendapatkan pekerjaan yang berupah rendah. Namun, pengalaman dari beberapa negara membuktikan remitan yang dikirimkan perempuan jauh lebih besar bila dibandingkan dengan migran laki-laki, karena umumnya perempuan lebih rajin menabung dibandingkan laki-laki. Hasil studi Osaki (1999) terhadap migran Thai misalnya, menunjukkan bahwa migran perempuan mengirimkan upahnya dalam jumlah lebih besar kepada keluarganya dibandingkan dengan migran laki-laki, karena adanya komitmen yang lebih besar terhadap keluarga yang ditinggal di daerah asal. Tidak berbeda jauh situasinya dengan yang ditemukan di Desa Nanedakele, Sulawesi Utara, yaitu selain untuk memenuhi kebutuhan dirinya, penghasilan yang diperoleh tenaga kerja perempuan yang bermigrasi ke luar desa, sebagian besar dikirimkan ke desa untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan keluarga antara lainnya untuk pemenuhan kebutuhan makan, pembiayaan sekolah dan kesehatan.

Hasil studi di Equador, menunjukkan bahwa remitan yang dikirimkan oleh migran kepada keluarganya, tidak hanya dapat meningkatkan taraf ekonomi rumah tangga, namun di sisi lain juga mampu

⁴² Migran selain membawa pulang uang hasil bekerja, mereka juga membawa keahlian, informasi mengenai pasar, teknologi baru dan nilai-nilai baru saat kembali ke daerah asalnya. Hasil studi dari Zhao di Cina (2001) menunjukkan bahwa migran yang kembali lebih mampu untuk berinvestasi di pertanian yang menggunakan mesin terutama untuk keperluan panen, pembajakan dan perontokkan. Migrasi dapat dikatakan sebagai proses sosial dimana migran yang terlibat berperan sebagai potensial agen dalam hal perubahan ekonomi, politik maupun teknologi.

memberdayakan perempuan untuk mengambil keputusan maupun mengelola keuangan rumah tangga. (<http://www.un-instraw.org/>). Seperti yang ditemui dalam kehidupan rumah tangga seorang narasumber perempuan di Desa Nanedakele, Sulawesi Utara, bahwa dirinya menjadi pengendali keuangan rumah tangga semenjak suaminya bermigrasi ke Manado. Bersama anak dan orangtuanya, mereka menjalani kehidupan di desa dengan penghasilan dari suaminya yang dikirim secara berkala melalui teman yang pulang ke desa. Perempuan tersebut menuturkan dari penghasilan yang diberikan suaminya, ia dapat melakukan perbaikan rumah dan membuka warung di samping rumahnya.

Perubahan lainnya yang dapat diamati dalam kehidupan rumah tangga khususnya dengan terjadinya migrasi perempuan adalah terjadinya peralihan pekerjaan-pekerjaan domestik yang biasanya menjadi domain perempuan, menjadi tanggung jawab pihak keluarga (suami atau orang tua migran), misalnya dalam hal pengasuhan anak. Umumnya pengalihan tanggung jawab ini tidak menimbulkan persoalan serius karena pihak keluarga secara sukarela membantu mengurus keluarga yang ditinggalkan.

Penutup

Pengalaman perempuan dalam migrasi penting untuk dikemukakan karena seperti yang dikemukakan Hugo (dalam Piper, 2002), migrasi dapat berdampak positif maupun negatif terhadap kehidupan perempuan. Dampak positif dari feminisasi migrasi yang utama adalah dengan penghasilan yang diperoleh dari bekerja dapat lebih memberdayakan perempuan, tidak hanya dalam hal materi namun juga dalam kehidupan sosial lainnya. Namun demikian tidak dapat dipungkiri adanya kecenderungan untuk mengkekalkan stereotipi dalam pasar/dunia kerja dengan menempatkan perempuan dalam dunia kerja yang beresiko/ sangat rentan dengan tindakan eksplorasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka hal mendasar yang perlu dilakukan adalah menyusun suatu kebijakan yang memberikan atau menjamin migran perempuan untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dengan migran laki-laki dalam hal akses ke pasar kerja. Sedapat mungkin kebijakan maupun program yang berkaitan dengan migrasi diarahkan untuk memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh migran perempuan dan memperkecil resiko yang ada.

Hal menarik lainnya yang perlu ditelaah lebih lanjut adalah mengenai 'sosial remitan' yang merujuk pada ide, pemahaman, modal sosial yang mengalir dari daerah tujuan menuju daerah asal migran. Kemungkinan sosial remitan ini juga dapat mempengaruhi hubungan dalam keluarga, peran gender dan juga berdampak terhadap kehidupan politik dan ekonomi. Adanya kajian mendalam mengenai aliran remitan (termasuk sosial remitan) dalam kaitannya dengan migrasi sebagai proses sosial, diharapkan dapat

membantu para pengambil kebijakan untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang mendukung strategi kehidupan, baik yang dijalankan oleh perempuan maupun laki-laki. Perlu dipikirkan kebijakan penggunaan remitan yang tidak selalu ke aspek konsumtif, tetapi ke arah pengembangan ekonomi produktif sekalipun dimulai dengan skala usaha kecil. Diharapkan dari yang kecil ini dapat berkembang sehingga terjadi penambahan kesempatan kerja yang muaranya pada peningkatan kesejahteraan.

Daftar Pustaka

- Aswatini dkk. 1997. *Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Daerah Perbatasan (Kasus Kabupaten Sangihe Talaud, Daerah Perbatasan Indonesia-Filipina)*. Jakarta: PPT-LIPI.
- Kasto. 2002. "Mobilitas Penduduk dan Dampaknya terhadap Pembangunan Daerah" dalam buku *Mobilitas Penduduk Indonesia (Tinjauan Lintas Disiplin)*, editor: Tukiran dkk. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Piper, Nicola. 2002. "*Gender and Migration Policies in Southeast Asia-Preliminary Observations from the Mekong region*", paper for presentation the IUSSP Conference "Southeast Asia's Population in a Changing Asian Context, Siam City Hotel, Bangkok, Thailand, 10-13 Jun 2002.
- Raharto, Aswatini (penyunting). 1995. *Migrasi Kembali Orang Sangir-Talaud dari Pulau-pulau di Wilayah Filipina*. Jakarta: PPT-LIPI.
- United Nations Economic and Social Council. 2002. "*Migration, Urbanization and Poverty: International Migration and Development: Opportunities and Challenges for Poverty Reduction*" paper for presentation Fifth Asian and Pacific Population Conference, Senior Officials Segment, 11-14 December 2002, Bangkok.

PERDAGANGAN LINTAS BATAS BELU-TIMOR LESTE DAN KEBERADAAN PASAR PERBATASAN

Bayu Setiawan

1. Pendahuluan

Wilayah perbatasan NTT-Timor Leste sebagai suatu wilayah perbatasan yang relatif baru tidak lepas dari masalah sebagaimana dialami oleh wilayah perbatasan antar negara lainnya. Wilayah perbatasan NTT-Timor Leste merupakan daerah yang penting sebagai tempat lalu lintas baik barang maupun orang yang dapat dilakukan secara legal maupun illegal. Oleh karena itu wilayah ini dapat dianggap sebagai wilayah yang rawan dipandang dari berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan politik.

Wilayah perbatasan, sebagai pintu gerbang di daerah perbatasan, erat kaitannya dengan masalah lintas batas atau mobilitas penduduk maupun barang antar kedua wilayah perbatasan tersebut. Mobilitas penduduk dan perdagangan di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste sudah dilakukan sejak lama. Hingga saat ini, kegiatan lintas batas penduduk antar kedua negara tersebut masih dilakukan. Kegiatan mobilitas penduduk pada umumnya berupa kunjungan keluarga dan aktivitas perdagangan. Hal ini dilakukan karena secara genealogis mereka masih merupakan satu rumpun kekerabatan (Bandiyono, 1995). Hubungan ini sudah terjalin sejak lama sebelum mereka terpisahkan oleh adanya batas kedaulatan negara. Oleh karena itu hubungan ini tidak dapat dihentikan, keinginan untuk bertemu dan saling mengunjungi, serta mempererat tali persaudaraan masih menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan kegiatan lintas batas antara kedua Negara ini. Setelah adanya pengakuan akan kedaulatan negara, dengan sendirinya aktivitas mobilitas penduduk penduduk antara Indonesia (NTT) dengan Timor Leste (yang dahulu masih wilayah Provinsi Timor Timur) perlu diatur secara formal. Pelintas batas yang sebelumnya tidak perlu melengkapi diri dengan surat dan dokumen, sekarang ini harus memiliki persyaratan lintas batas antar negara seperti paspor dan visa atau surat pas lintas batas antar Negara.

Selama ini mobilitas penduduk sirkuler antara kedua daerah ini sering terjadi, tidak hanya untuk tujuan kekeluargaan melainkan juga mempunyai tujuan ekonomi terutama untuk perdagangan. Hubungan dagang Timor Leste dengan negara lain relatif lebih sulit dibandingkan dengan

Indonesia, hal ini mengakibatkan perekonomian wilayah perbatasan di Timor Leste sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi di NTT.

Dilihat dari kepentingan Indonesia, kegiatan perdagangan di kawasan perbatasan ini dianggap sangat menguntungkan. Telah dibangun beberapa pasar resmi untuk berdagang namun kemudian tidak berfungsi. Hal ini karena belum adanya kesepakatan oleh kedua Negara mengenai masalah lintas batas. Implikasinya, kegiatan mobilitas penduduk secara ilegal untuk menjual hasil perdagangan ke wilayah Timor Leste ditengarai masih sering terjadi. Hubungan dagang yang terjadi walaupun dapat dikatakan bukan merupakan perdagangan besar, namun sangat memberikan arti penting bagi kehidupan masyarakat di sekitar wilayah perbatasan khususnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Perdagangan dalam skala kecil umumnya berupa kebutuhan sehari-hari serta hasil pertanian dan perkebunan merupakan potensi bagi pengembangan ekonomi masyarakat apabila dapat terus ditingkatkan.

Pengembangan wilayah perbatasan sangat diperlukan. Bukan saja untuk kepentingan keamanan yang selama ini dilakukan tetapi untuk lebih memberdayakan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini masyarakat agar mampu mengambil manfaat dari keberadaan Negara Timor Leste (Dyah dan Yuniati, 2005). Hal ini harus dilakukan dengan rencana yang baik agar penduduk wilayah perbatasan tidak berpaling ke negara tetangga (Tirtosudarmo, 2002). Sebagai daerah yang mempunyai ciri-ciri khusus wilayah perbatasan memerlukan perencanaan pembangunan yang khusus (Aswatini dan Eniarti, 1999). Upaya memecahkan masalah kemiskinan dan keterbelakangan penduduk perbatasan merupakan upaya yang mendasar harus dilakukan oleh pemerintah. Tanpa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk ini akan mempunyai dampak pada kegiatan yang menjurus kepada perbuatan ilegal. Potensi-potensi yang dimiliki wilayah perbatasan ini perlu dikembangkan agar dimasa mendatang tidak terjadi kasus seperti kondisi perbatasan Indonesia-Malaysia. Indonesia harus bisa mengambil manfaat dari berdirinya negara Timor Leste untuk mengembangkan wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste, agar dapat berkembang menjadi wilayah penyangga yang aman, serta sejahtera penduduknya, sehingga kerawanan-kerawanan yang mungkin timbul di wilayah perbatasan ini dapat dihindari. Perdagangan merupakan alih satu potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perbatasan. Dalam hal ini masyarakat perbatasan harus dapat memanfaatkan peluang yang ada di bidang perdagangan lintas batas karena kehidupan ekonomi khususnya dalam hal perdagangan masyarakat Timor Leste sangat tergantung pada barang-barang yang diproduksi dan didatangkan dari Indonesia.

Tulisan ini mengkaji mobilitas perdagangan lintas batas NTT- dan Timor Leste serta manfaatnya bagi masyarakat di sekitar perbatasan, namun aktivitas ini tidak terlepas dari mobilitas penduduk itu sendiri. Oleh karena itu, dalam tulisan di bawah ini terlebih dahulu akan menjelaskan mobilitas penduduk di wilayah perbatasan NTT-TL. Selanjutnya, tulisan ini akan membahas permasalahan perdagangan lintas batas dengan terlebih dahulu melihat sejarah perdagangan yang ada, keberadaan pasar perbatasan dan prospek perdagangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Dalam tulisan ini dijelaskan pula mengenai peranan dan pengaruh Indonesia di Timor Leste terkait dengan masih tergantungnya kehidupan masyarakat Timor Leste terhadap masyarakat Belu. Data dan informasi yang digunakan dalam tulisan ini bersumber pada data kualitatif dari hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2005 dan 2006 di wilayah perbatasan NTT-TL, khususnya di wilayah Kabupaten Belu⁴³. Selain itu data dan informasi berasal dari data skunder serta berbagai literatur yang terkait dengan permasalahan tulisan ini.

2. Wilayah Perbatasan Belu-Timor Leste

Negara baru Timor Leste di Pulau Timor berbatasan langsung dengan sebagian wilayah Provinsi NTT. Di bagian Pulau Timor, Negara Timor Leste meliputi dua wilayah. Pertama, wilayah di ujung timur pulau tersebut, yang bagian baratnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Belu. Wilayah Timor Leste lainnya adalah daerah enclave Oekusi, sebelah utara Kabupaten Timor Tengah Utara/TTU. Wilayah Oekusi terletak dalam kepungan tiga kabupaten Provinsi NTT, yaitu Timor Tengah Utara (TTU) Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kabupaten Kupang. Kawasan perbatasan laut terdapat di empat kabupaten, Kabupaten Kupang (Kecamatan Amfoang Utara), Kabupaten Belu (Kecamatan Tasifeto barat dan Kobalima), Kabupaten Timor Tengah Utara (Kecamatan Insana Utara), dan Kabupaten Alor (Kecamatan Alor barat Daya) (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2004).

Wilayah Kabupaten Belu merupakan salah satu pintu masuk utama ke wilayah Indonesia yang mempunyai peranan penting dalam lalu lintas orang maupun barang. Wilayah Belu pada tahun 2005 dimekarkan menjadi 17 kecamatan dari sebelumnya hanya 12 kecamatan pada tahun 2004. Jumlah

⁴³ Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kompetitif sub bidang perbatasan NTT yang telah dilakukan pada tahun 2005 dan 2006. Konsentrasi penelitian dilakukan di tiga kecamatan wilayah perbatasan dan di sekitar pintu masuk perbatasan yaitu di Kecamatan Tasifeto Timur (Motaain, Desa Silawan dan Dafala), Kecamatan Raihat (Turis Kain, Desa Maumutin), dan Kecamatan Kobalima (Motamasin/Metamauk, desa Alas selatan). Tim peneliti terdiri dari Bayu Setiawan, Suko Bandiyono, M Sukarni dan Haning Romdiati

penduduk Kabupaten Belu tergolong rendah, yaitu hanya berjumlah 343.777 jiwa pada tahun 2004 dengan kepadatan yang rendah pula, yaitu 140,57 jiwa/km² (Pemda dan BPS Kabupaten Belu, 2004). Pada tahun 2005 jumlah penduduk Belu bertambah menjadi 354.681 jiwa, dengan kepadatan penduduk 145 jiwa/km² (Pemda dan BPS kabupaten Belu, 2006). Jumlah dan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Atambua suatu kondisi yang mudah dipahami karena kecamatan ini adalah ibukota kabupaten, dimana tersedia peluang kerja/usaha serta berbagai jenis sarana-prasarana ekonomi dan sosial yang merupakan faktor pendukung untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Tidak semua wilayah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste. Di wilayah perbatasan Kabupaten Belu terdapat 45 desa yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, yang tersebar di enam (6) kecamatan, yaitu Kecamatan Lamaknen, Tasifeto Timur, Tasifeto Barat, Raihat, Kobalima dan Malaka Timur. Kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan wilayah Kovalima dan Maliana di wilayah Timor Leste. Penentuan kecamatan-kecamatan atau wilayah-wilayah yang berbatasan langsung antara kedua Negara ini sangat penting terkait dengan pelintas batas tradisional. Pada dasarnya pelintas batas tradisional lebih mendapatkan kemudahan untuk saling mengunjungi atau melakukan lintas batas wilayah negara. Apabila nantinya kebijakan ini berlaku, hanya dengan menggunakan Pas Lintas Batas- tanpa paspor-pelintas batas tradisional ini sudah dapat melakukan kunjungan antar negara, namun tentunya dengan batas-batas wilayah yang telah ditentukan. Oleh karena itu di tiap wilayah nantinya juga perlu dibangun pos lintas batas. Selain itu, hal ini erat kaitannya dengan masalah perdagangan lintas batas yang dilakukan oleh masyarakat perbatasan itu sendiri.

Tapal batas darat antara Indonesia dan Timor Leste membentang sepanjang 150 km meliputi Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan tiga distrik: Maliana, Kovalima, dan Oecusse. Di wilayah Timor Leste, yakni distrik Oecusse, menjadi daerah enclave yang terjepit antara Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara di Indonesia (Kimpraswil, 2002). Apabila garis batas dihitung berdasarkan pada tiga batas kabupaten, yaitu Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara dan Belu, panjang garis batas tersebut adalah 254,4 Km (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2004). Melihat panjangnya kawasan perbatasan, dari sisi pengamanan dan pengawasan akan sangat menyulitkan, oleh sebab itu perlintasan orang maupun barang secara illegal sangat sering terjadi⁴⁴.

⁴⁴ Informasi dari beberapa nara sumber yang diwawancara di desa Dafala dan Silawan serta di Desa Maumutin mengatakan bahwa kegiatan perdagangan illegal

Di sepanjang garis perbatasan terdapat 55 pos pengawasan. Jumlah pos pengawasan/pos perbatasan ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan pos pengawasan di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan bagian utara yang panjangnya mencapai 2.004 kilometer. Hal ini dilakukan mengingat masalah keamanan yang belum begitu kondusif. Perkembangan politik dalam negeri Timor Leste yang masih labil, pemberontakan tentara-tentara sebagai contoh masih rawannya situasi negara yang baru merdeka ini. Tentunya akan sangat berpengaruh terhadap situasi di wilayah Indonesia khususnya Kabupaten Belu. Ketika situasi di Timor Leste kurang aman penduduk cenderung akan menyelamatkan diri dengan pergi ke wilayah Belu. Masalah pengungsi juga masih menjadi ancaman keamanan bagi pemerintah Indonesia maupun Timor Leste, seperti diketahui sejak diberlakukannya referendum dan Timor Leste menjadi suatu negara yang merdeka banyak sekali penduduk yang mengungsi ke wilayah Kabupaten Belu.

Walaupun ada banyak desa yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, telah dibuka sembilan pintu masuk dan keluar barang dan orang di wilayah perbatasan antar kedua negara ini. Kesembilan pintu keluar dan masuk tersebut empat terdapat di Kabupaten Belu (Mota'ain, Matemauk, Haekesak, dan Haumusu), Sementara itu di Kabupaten TTU juga terdapat empat pintu keluar masuk (Napan, Wini, Laktutut, dan Haumenimau) dan satu di Kabupaten Kupang (Oepoli)⁴⁵. Namun demikian hingga tahun 2006 ini di wilayah Belu hanya terdapat dua pintu resmi untuk keluar dan masuk orang maupun barang, selain sebagai tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) yaitu di Motaain dan Motamasin. Namun demikian, diluar pintu perbatasan resmi tersebut, masyarakat masih memanfaatkan beberapa pintu tidak resmi (illegal) di desa-desa lain yang biasanya dihubungkan melalui jalan tikus walaupun jumlahnya cenderung menurun karena ketatnya penjagaan keamanan.

Timor Leste sebagai daerah yang baru merdeka dengan kondisi ekonomi yang relatif terbelakang dibandingkan dengan Indonesia masih memerlukan barang-barang dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Ketergantungan akan pasar dan produk-produk Indonesia sangat tinggi. Hal ini tentu merupakan potensi yang menjanjikan bagi

masih banyak dijumpai lewat jalan-jalan tikus, kebetulan kedua wilayah ini langsung berbatasan dengan Timor Leste. Berbagai keperluan sehari-hari utamanya minya yang menjadi komoditi yang sering diperdagangkan karena keuntungannya cukup besar. Namun, ketika penelitian ini dilakukan kegiatan illegal agak berkurang karena situasi wilayah yang kurang aman, jadi penjagaan agak diperketat, sering terdapat patroli naik oleh petugas keamanan Indonesia maupun Timor Leste.

⁴⁵ <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=4651>

penduduk daerah perbatasan untuk mengembangkan perdagangan antar negara. Selama ini untuk menampung aktivitas perdagangan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk di sekitar perbatasan telah dibangun beberapa pasar secara resmi.

Kegiatan perdagangan di kawasan perbatasan ini dianggap sangat menguntungkan. Walaupun sudah terdapat pasar-pasar resmi untuk berdagang namun kegiatan mobilitas penduduk secara ilegal untuk menjual hasil perdagangan ke wilayah Timor Leste ditengarai masih sering terjadi. Fenomena perdagangan ilegal semakin marak dan sulit dicegah begitu pula dengan aksi penyelundupan dari wilayah Indonesia ke Timor Leste dan sebaliknya. Upaya perdagangan ilegal dilakukan lewat hutan, jalan setapak, dan lokasi-lokasi tersembunyi disepanjang tapal batas antara kedua negara. Mengingat pengawasan yang sulit karena panjangnya perbatasan dan terbatasnya aparat keamanan, perdagangan informal lumrah terjadi dan hal ini sudah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu. Kegiatan ini merupakan kegiatan perdagangan yang dilarang, namun pada tahun akhir tahun 2000 terdapat perdagangan tak resmi yang sangat ekstensif di perbatasan Timor Lorosae dan Timor Barat (Hill, 2006:107-108). Pada tahun ini mulai berkembang pasar-pasar di perbatasan yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk di sekitar perbatasan, bahkan beberapa pedagang berasal dari luar wilayah perbatasan. Pembeli dari seberang sangat banyak, dan sangat diuntungkan dengan adanya pasar ini. Kebutuhan sehari-hari mereka dengan mudah dapat terpenuhi di pasar perbatasan ini.

3. Mobilitas Lintas Batas Belu-Timor Leste

Mobilitas penduduk yang terjadi dikarenakan oleh berbagai alasan. Alasan yang sering menjadi pertimbangan adalah alasan sosial ekonomi. Penduduk berupaya untuk melakukan berpindah tempat karena ingin mendapatkan atau meningkatkan kehidupan sosial ekonominya menjadi lebih baik. Namun demikian, alasan adanya tekanan politik seringkali juga menyebabkan penduduk melakukan perpindahan. Studi tentang migrasi atau mobilitas penduduk pada umumnya terfokus pada perubahan atau perpindahan tempat tinggal dengan melewati batas-batas suatu unit administratif atau politik seperti desa, kota, provinsi, dan negara atau batas internasional (Keely, 2000, 47). Oleh karena itu, mobilitas penduduk dapat dibedakan menjadi dua yaitu mobilitas internal dan mobilitas internasional (Shryock dan Siegel, 1976). Mobilitas internal merupakan perpindahan penduduk yang sudah melewati batas geografis namun masih dalam wilayah suatu negara. Mobilitas internal yang dimaksud dalam hal ini adalah gerakan perpindahan penduduk yang terjadi pada suatu wilayah di dalam negeri, dalam hal ini dalam wilayah Indonesia. Perpindahan ini biasanya melewati batas administratif atau batas bagian dalam suatu negara, dapat berupa batas

provinsi, kabupaten, kecamatan atau kesatuan administratif lainnya (Munir, 1981: 115-116). Sementara itu, mobilitas internasional adalah perpindahan penduduk yang sudah melampaui batas wilayah suatu negara (Shryock dan Siegel, 1976). Selanjutnya menurut Hugo (1982) terdapat dua kategori mobilitas penduduk yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non permanen. Hal ini tergantung pada tujuan seseorang berpindah tempat. Mobilitas yang dilakukan dengan tujuan untuk tinggal secara tetap digolongkan sebagai mobilitas permanen. Sementara itu, apabila tidak memiliki tujuan untuk menetap atau tidak berkeinginan untuk pindah tempat tinggal dikategorikan sebagai mobilitas non permanen, misalnya saja mobilitas sirkuler atau ulang alik.

Ditinjau dari latar belakang sejarahnya, mobilitas penduduk di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste sudah berlangsung sejak lama. Hal ini terkait dengan hubungan kekerabatan yang terjalin antara penduduk di wilayah Timor Barat dan Timor Timur. Dengan demikian, hubungan kekerabatan ini yang menyebabkan penduduk sering berhubungan. Hubungan kawin mawin antara penduduk dari satu desa dengan desa lainnya yang bersebelahan menjadikan mereka masih dalam satu ikatan tali persaudaraan. Kunjungan keluarga sering mereka lakukan untuk tetap menjaga eksistensi hubungan kekerabatan diantara penduduk di kedua wilayah perbatasan. Dari wawancara dengan beberapa nara sumber dijelaskan bahwa penduduk desa di wilayah Belu dengan penduduk desa wilayah Timor Leste masih satu keturunan yaitu merupakan satu suku Tetun atau Tetum, selain itu juga di penduduk di kedua wilayah tersebut dikenal pula sebagai orang Kemak dan orang Marae.⁴⁶

Adanya suatu perubahan dan perkembangan masalah sosial dan politik dalam suatu wilayah negara menyebabkan wilayah dan penduduk yang pada awalnya merupakan satu kesatuan menjadi terpisahkan. Kedaulatan suatu bangsa dan negara sudah selayaknya perlu dihormati oleh masing-masing negara yang akhirnya menjadi bertetangga itu. Pemisahan ini terjadi semenjak datangnya kaum penjajah Eropa ke wilayah perbatasan ini. Seperti diketahui bahwa wilayah Timor Leste pada awalnya merupakan

⁴⁶ Hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat dan tokoh masyarakat desa di desa-desa wilayah perbatasan di Motaain, Motamasin,dan Turis Kain. Pada umumnya mereka mengakui merupakan satu rumpun suku Tetun dan Kemak. Mereka dulu dibawah kekuasaan raja yang berasal dari Timor Leste. Wilayah mereka diakui dulu sampai ke wilayah Timor Leste sekarang. Namun karena adanya pemisahan ini sempat menjadi masalah karena pengakuan terhadap tanah ini masih belum tuntas, dan di beberapa tempat mereka masih mempermasalahkan batas wilayah yang ada sekarang ini. Walaupun menurut pemerintah kedua negara masalah batas wilayah sudah hampir selesai, namun diantara nara sumber yang ditemui masih banyak yang mempermasalahkan batas wilayah tersebut.

daerah jajahan Portugis sedangkan wilayah Timor Barat sebagai wilayah jajahan Belanda.

Bila ditelusuri kebelakang, kegiatan mobilitas penduduk melewati batas negara ini sudah terjadi sejak jaman penjajahan Belanda di kawasan Indonesia dan penjajahan Portugal di wilayah Timor Leste. Kalau dirinci ada tiga fase terkait dengan kedaulatan pemerintahan masing-masing negara. Pertama, Negara Indonesia dibawah penjajahan Belanda dengan Timor Timur dibawah penjajahan Portugis. Kedua, Negara Indonesia dengan Timor Timur dibawah penjajahan Portugis. Ketiga, negara Indonesia dengan Negara Timor Leste. Pada masa-masa tersebut hubungan antar penduduk di kedua wilayah mulai dibatasi, karena adanya kedaulatan masing-masing negara sehingga terdapat berbagai ketentuan yang mengatur mobilitas penduduk di wilayah perbatasan tersebut hingga saat ini. Masa ketika Timor Timur menjadi salah satu bagian dari Indonesia dianggap sebagai masa ketika sebelum datangnya kaum penjajah. Namun demikian, saat sekarang ini ketika Timor Timur berdiri menjadi suatu negara sendiri keterbatasan untuk berhubungan dan berkomunikasi kembali dirasakan oleh penduduk di kedua wilayah negara ini. Bahkan dari hasil wawancara menerangkan bahwa saat sekarang ini lebih sulit untuk berhubungan dengan penduduk dibandingkan pada waktu jaman penjajahan dulu. Dulu kunjungan penduduk terutama untuk menghadiri suatu acara adat dengan mudah akan mendapatkan ijin. Demikian pula untuk mengunjungi lahan mereka di wilayah Timor Timur atau sebaliknya selalu akan mendapatkan kemudahan⁴⁷. Dengan demikian, mobilitas penduduk waktu itu masih lebih tinggi dibandingkan sekarang ini karena ketentuan atau aturan yang lebih ketat dan tampaknya dirasakan menjadi beban bagi penduduk di perbatasan.

Hubungan kekerabatan yang dijalin erat diantara penduduk di sekitar perbatasan menyebabkan mereka masih sering berhubungan. Namun demikian, untuk tetap menjaga hubungan dengan saling mengunjungi memiliki keterbatasan. Berbagai cara dilakukan baik dengan cara yang legal yaitu dengan meminta ijin kepada pihak yang berwenang maupun dengan cara ilegal yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi pergi berkunjung baik ke wilayah Indonesia, maupun ke wilayah Timor Leste. Hal ini dilakukan melalui jalan-jalan tikus. Fenomena ini tidak hanya berlaku saat ini

⁴⁷ Seperti yang dikemukakan oleh nara sumber di Desa Davala, dulu penduduk desa ini secara adat memiliki tanah di wilayah Timor Timur, demikian pula sebaliknya penduduk di wilayah Timor Timur ada yang memiliki tanah di wilayah Davala. Dalam hal ini mereka mendapatkan kemudahan untuk mengunjungi lahan kebun mereka ini, walaupun harus melewati batas negara. Jadi menurut pengakuannya waktu Jaman Porto dan jaman Belanda orang lebih bebas untuk keluar masuk wilayah perbatasan, cukup dengan menggunakan surat ijin

melainkan sudah dilakukan masyarakat perbatasan sejak dulu. Hal ini dijelaskan oleh seorang tokoh masyarakat di Desa Silawan sebagai berikut.

...dalam kegiatan adat istiadat dan adat seni dan budaya itu disana membuat bagaimana itu tetap dikomunikasikan ke famili Timor Barat, kalau dulu walaupun dua pemerintahan waktu itu melarang tetapi mereka tetap berkomunikasi....Ya caranya dulu masih Timor Portugis dan Belanda mereka membuat apa-apa disana biasanya mereka datang jalan tikus datang memberikan informasi, bahwa di tempat Suku Kamoasa ada hajatan kaya gini, itu habis kembali lagi lewat jalan tikus.

Mobilitas penduduk di sekitar wilayah perbatasan tidak dapat dihindari lagi. Pertalian keluarga dan adat mendorong mereka tetap ingin bertemu walaupun dengan jalan yang sebenarnya dilarang dan melanggar peraturan. Namun peraturan yang telah disepakati oleh kedua pemerintahan ini dalam kenyataannya masih memberi kelonggaran terutama diberikan kepada masyarakat di sekitar perbatasan yang mendesak untuk melakukan perjalanan lintas batas dengan alasan kepentingan adat terutama apabila terdapat sanak keluarga yang meninggal dunia. Dalam keterangannya seorang tokoh masyarakat dan perangkat di desa membenarkan hal ini. Kebijakan dari pasukan pengamanan perbatasan serta imigrasi dapat memberikan kemudahan bagi mereka untuk mengunjungi keluarga yang meninggal dunia atau upacara adat kematian. Demikian juga sebaliknya dari Timor Leste ke Belu, pihak keamanan dan imigrasi juga memberikan ijinn khusus bagi penduduk untuk melakukan kunjungan dengan alasan upacara adat kematian.

- T. Bagaimana cara komunikasi misalnya bapak dengan keluarga yang disana, jadi seperti ada kematian disana
- J. disana juga kirim sinyal dengan sembunyi-sembunyi oh disana ada kematian, ya jadi disini juga, ya sekarang sudah ada kemudahan dari Pamtas (pasukan pengamanan perbatasan) begitu, jadi kita informasi pamtas dengan Bea Cukai, Imigrasi mereka, jadi semacam pas jalan ijin dari desa ke sana.
- T. Oh ada pas jalan ya
- J. Ada pas jalan, tetapi pembicaraannya agal alot begitu kita harus waspada
- T. Pada waktu kemarennya memang tidak boleh ya
- J. Ya tidak boleh
- T. Tapi secara itu kan lebih bagus

- J. Ya kenyataannya bisa pak, kemudahan diberikan itu manusia saja, itu tadi kekeluargaan
- T. Disana juga suka kesini pak
- J. Ya disana juga kalau ini, tergantung dengan negoisasi dengan imigrasi dan pamtas, kalau saya disini lagi mempertimbangkan dengan kehadiran mereka tidak membahayakan negara, tidak mengancam begitu ya silahkan

Pemberian ijin ini diakui pula oleh pihak keamanan dan imigrasi, namun hal ini dilakukan benar-benar sangat selektif dengan mempertimbangkan kebenaran informasi yang diberikan. Hal ini dilakukan karena alasan kemanusiaan saja. Saat ini telah diperlakukan penggunaan paspor dan visa bagi penduduk yang melakukan lintas batas. Namun pada umumnya penduduk perbatasan tidak mampu untuk membayar visa dan melakukan perjalanan lewat pintu perbatasan di Motaain dan Motamasin. Fenomena semacam ini tidak akan terjadi apabila telah diperlakukannya penggunaan pas lintas batas antara penduduk di kedua wilayah perbatasan ini. Gagasan pemberlakuan pas lintas batas sudah sejak lama dicetuskan oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste. Pas lintas batas ini akan memberikan kemudahan bagi pelintas batas tradisional, yaitu para pelintas batas yang terdapat di sepanjang wilayah perbatasan dengan batas-batas yang telah ditentukan. Seperti di wilayah Belu terdapat 6 kecamatan dengan sekitar 45 desa perbatasan yang akan mendapatkan kemudahan ini. Akan tetapi hingga saat penelitian ini dilakukan penggunaan pas lintas batas belum diberlakukan. Menurut informasi dari pihak imigrasi di Belu, pihak pemerintah Timor Leste belum siap untuk memberlakukan pas lintas batas dengan berbagai alasan.

Diberlakukannya paspor dan visa dan hanya dapat melalui dua pintu tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) membuat mobilitas penduduk terbatas. Ketika selesai referendum, Timor Timur menjadi suatu negara yang merdeka dan berdiri sendiri. Pada saat ini yang terjadi adalah mobilitas penduduk karena terpaksa, banyak pengungsi yang memasuki wilayah Belu. Pada waktu sehabis jajak pendapat yang dilakukan oleh pihak PBB di Timor Timur, arus penduduk yang pindah ke wilayah Indonesia semakin banyak, penduduk yang tidak mempunyai sanak saudara di wilayah Belu ditampung di tempat-tempat pengungsian. Penduduk Timor Leste yang pindah secara terpaksa karena adanya tekanan politik atau ‘perang saudara’ pada waktu itu dapat dikategorikan sebagai pengungsi (*refugees*). Sebagian dari penduduk Timor Timur adalah mereka yang dikelompokkan sebagai ‘pro-integrasi’, namun sebagian dari mereka hanyalah pengikut saja yang tidak ikut langsung dalam kemelut politik masyarakat Timor-Timur pada waktu itu. Mereka

pada dasarnya hanya ingin mencari perlindungan untuk sementara waktu, terhindar dari pertikaian yang pada waktu itu sedang memuncak.

Sejak saat itu (1999) mobilitas penduduk yang melintasi batas pada umumnya karena terpaksa untuk mencari perlindungan keamanan. Karena situasi keamanan yang belum kondusif, tidak memungkinkan penduduk untuk melakukan mobilitas dari dan ke Timor Leste maupun ke Belu. Namun, pada tahun 2000 terlihat sudah mulai banyak orang yang melakukan lintas batas ke TL dari Belu. Mobilitas penduduk pada waktu itu sudah menggunakan paspor namun belum diberlakukan visa atau bebas visa kunjungan. Akan tetapi semenjak diberlakukan paspor dan visa pada tahun 2003 akhir mobilitas penduduk jadi semakin berkurang. Alasan penduduk tidak melakukan kunjungan ke seberang karena harus membayar visa yang dirasakan cukup memberatkan. Hal ini dikemukakan oleh seorang penduduk perbatasan di Silawan yang pernah bepergian ke Timor Leste.

- J. Itu sudah paspor, ya kalau menurut saya 1999 itu setelah mereka lari kesini itu tidak ada yang keluar masuk, masih rawan sekali pak, setelah tahun 2000 itu baru mereka mulai pake paspor, seandainya mereka yang masuk kesini dan kesana itu ada yang kontrol...Nah setelah itu hanya pake paspor tapi tidak perlu Visa itu rame sekali
- T. Kalau ngurus paspor dimana ini
- J. Di Imigrasi Atambua
- T. Itu diberlakukannya apa Visa itu bayar 30 dolar itu sejak kapan itu
- J. 2003 itu atau 2004 itu sudah mulai, jadi sejak itu. Sejak diberlakukan visanya. Ya, sejak itu dari sana tidak mau masuk kesini dan dari sini tidak masuk kesana, kecuali yang jauh-jauh punya kepentingan keluarga disana ada kematian

Selama ini telah terjadi pula mobilitas penduduk sirkuler yang biasanya erat kaitannya dengan perdagangan. Para pedagang dari Belu sebagian ada yang melakukan perdagangan secara langsung ke wilayah Timor Leste. Namun biasanya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya sekedar untuk megantar barang dagangan saja yang kemudian kembali lagi ke Atambua. Jarak antara Dili dan Atambua tidak terlampau jauh dan ini bisa ditempuh dalam beberapa jam saja sehingga bisa ditempuh pulang pergi. Namun demikian, ada pula sebagian pedagang memanfaatkan waktu yang agak lama untuk mengurus kegiatan berdagangnya di Timor Leste. Para pedagang dari Atambua, khususnya pedagang besar, pada umumnya mempunyai tempat usaha di Timor Leste tepatnya di kota Dili.

Untuk itu mereka terkadang cukup lama tinggal di Dili, tinggal sementara waktu namun tidak untuk menetap. Sementara itu, terdapat pula pedagang yang menjajakan dagangannya dengan berkeliling di sekitar wilayah Timor Leste. Pedagang ini yang memasok beberapa kebutuhan sehari-hari masyarakat di Timor Leste, hal ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang jauh dari kota-kota besar.

4. Perdagangan Lintas Batas Belu-Timor Leste

Keberadaan pasar di daerah jajahan Portugis: Sejarah perdagangan

Perdagangan merupakan aktivitas kegiatan manusia yang telah dilakukan sejak dahulu kala yang pada awalnya sebelum dikenal uang dilakukan dengan cara pertukaran atau barter. Terjadinya perdagangan dikarenakan manusia membutuhkan berbagai komoditi atau barang untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang pada umumnya tidak dapat dihasilkan sendiri. Karena adanya permintaan komoditi tertentu tersebut terjadilah arus perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain. Aktivitas perdagangan yang pada umumnya akan mendapatkan atau mencari suatu keuntungan, tentu sangat menarik minat banyak orang. Dengan sendirinya aktivitas perdagangan ini juga akan mengakibatkan banyaknya arus mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat lainnya dengan kepentingan berdagang. Namun demikian, sebaliknya mobilitas penduduk sudah dilakukan masyarakat perbatasan sejak dulu untuk kepentingan berdagang.

Masyarakat di wilayah perbatasan Belu pada mulanya ketika jaman penjajahan Belanda belum memiliki pasar baik untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari maupun untuk menjual hasil pertanian maupun ternaknya. Dulu ketika jaman penjajahan Portugis dan Belanda pasar hanya terdapat di wilayah Timor Portugis, sehingga masyarakat di wilayah perbatasan Belu harus pergi ke Timor Portugis bila hendak membeli kebutuhan sehari-hari atau menjual hasil pertanian. Dalam hal ini telah terjadi mobilitas penduduk dari Timor Barat (masih dalam penjajahan Belanda) ke Timor Portugis dalam rangka perdagangan.

- T Itu biasanya mereka beli apa saja orang-orang ini ?
- J Kalau beli kesana, itu sepertinya pakaian, emas-emas itu tukarnya kesana
- T Emas-emas maksudnya beli disana ?
- J Iya belinya disana iya beli disana, jadi itu... itu beli disana. Kita bukan pake uang saja, karena mas disana tidak berlaku, kita harus bawa hasil... bawa kesana kita bawa minuman.
- T Minuman apa ?

- J Sofi itu saja bawa hewan seperti babi, kambing, ayam kita jual kesana.
- T Jadi dari sini bawa minuman, ternak. Jadi dulu disini belum ada pasar ?
- J Belum ada, orang sini kalau ke pasar dulu kesana

Pasar yang terdekat terdapat di Maliana di wilayah Timor Portugis, selain itu di Balibo dan Aidikur. Sehingga banyak penduduk perbatasan di Belu pergi ke pasar tersebut. Pada waktu itu diantara kedua negara sudah mempunyai kesepakatan untuk menggunakan paspor apabila hendak melintasi batas wilayah kedua negara. Namun demikian, banyak penduduk yang melanggar dan menggunakan jalur-jalur yang tidak resmi. Berbagai "jalan tikus" ke arah pasar Maliana telah dibuat oleh penduduk untuk dapat pergi berdagang.

- T Waktu jaman Portu dulu ?
- J Sering
- T Dalam rangka apa pak ?
- J Itu kan pasar saja.
- T Waktu itu bapak biasanya bawa apa pak ?
- J Kalau saya kan, babi dan ayam
- T Tahun berapa Pak itu kira-kira ?
- J Itu sekitar tahun 67, 68 sampai dengan 71, 72.
- T Terus kalau dari sana beli apa Bapak dari sana ? kalau sudah dapat uang gitu.
- J Beli kain, kita beli kain dari situ ini kainnya.
- T Kalau biasanya dulu ke Maliana berangkat jam berapa dari sini
- J Kita jam 4 pagi sudah masuk dan kesana.
- T Jam 4 subuh dari sini jam berapa ?
- J Tidak kita kan malam tidur langsung di perbatasan sehingga begitu jam 4 sudah kita dari sini kita juga lewat jalan tikus, kecuali sudah sampai di sana kan semua orang sudah tahu sampai tempat untuk kesitu, lalu kita masuk dari jurusan mana saja, lalu menuju tempat disitu
- T Sebelumnya kalau melanggar disini enggak boleh ya lewat jalan tikus.
- J Tidak. Dulu kan disini sudah pake paspor yang kemudian orang pangkat sampai dengan ratusan orang, tapi biar dia ditangkap polisi dimana engga maumungkin sampai dengan ratusan orang , tapi biasa dia ditangkap polisi di sana nggak mau bagaimana ini orang lari, tapi sudah gampang lewat jam 6 kita datang kita masuk lagi, jadi

uang masih di kejar polisi karena waktunya sudah tidak mengijinkan itu mereka pulang kembali

Dengan demikian lintas batas ilegal sudah sejak lama dipraktekkan oleh penduduk perbatasan ini. Menurut pengakuan seorang yang pernah melakukan lintas batas ilegal ini, tidak mengalami kesulitan bila sudah sampai di wilayah Timor Portugis. Untuk membedakan penduduk dari Timor Barat dengan Timor Timur sangat sulit, dari fisik tubuh dan wajah serta bahasa yang digunakan hampir sama. Namun demikian pada waktu itu juga sudah terdapat kebijaksanaan untuk memberi kemudahan bagi para pelintas batas untuk pergi ke pasar di wilayah Timor Portugis, walaupun jumlah orang yang hendak berbelanja dibatasi dan hanya dapat lewat pintu masuk di daerah tertentu saja. Hal ini seperti pengakuan salah seorang warga Desa Silawan sebagai berikut.

- T. Mereka berdagang kesana
- J. Dagang kesana, disana dibelikan minyak-minyak wangi itu kaya Marlen, sabun Kastel apa itu, Kastela, ada sabun cuci pak tapi kaya balok. Aktifitasnya lancar pak jaman itu, masyarakatnya disini juga di seberang, jadi dalam 1 minggu itu mungkin polisi kasih batas 200 atau 300 warga Indnesia yang menyeberang kesana, tetapi lewat 1 tempat itu pak, kan banyak tempat. Ada disebelah itu ada dua tiga tempat
- T. Jadi sebenarnya dulu masyarakat saling pergi kesana karena berdagang atau karena kunjungan keluarga
- J. Kebanyakan mereka dagang pak disamping itu ketemu keluarga kalau ada urusan keluarga ya mereka sekalian, tetapi lebih dominan mereka menjual barang-barang . Dikarenakan alasan dagang tapi lebih dekat kesana kesananya, ah pasarnya sudah ada. Pasarnya sudah ada
- T. Kalau disini
- J. Disini tidak ada, waktu itu tidak ada,

Pada umumnya semua kebutuhan penduduk di wilayah perbatasan hampir sama, demikian juga potensi komoditi perdagangan yang dijual ke wilayah Timor Portugis. Minyak marlen dan sabun kastela merupakan barang yang tampaknya harus dibeli. Hal ini juga diungkapkan oleh salah seorang penduduk di Desa Maumutin, yang waktu dulu juga pernah pergi belanja ke seberang.

Kemarin-kemarin itu pake marlen itu, marlen itu minyak wanginya dipakai satu kali pake bisa sampai 1 minggu itu

nggak hilang baunya. Sabun, minyak wangi, sabun batangan, sabun mandi juga. Ada ini to selain mereka kesana kan beli alat-alat pertanian. Disini dulu tidak ada disana malah lebih bagus itu pak. Disini kan seperti bawa menyan kesana, ternak seperti ayam, babi terus ada lagi garang, ada lagi ular. Semua jual di sana. Dulu sudah banyak ternak disini sudah dari dulu, memang disini artinya masih sampingan karena lahan peternakan kita lihat di daerah ini tidak memungkinkan untuk peternak besar-besaran itu tidak bisa pengolahannya, juga kembala itu tidak ada, jarang sementara ini

Barang-barang dagangan yang diperjualbelikan dari penduduk di wilayah perbatasan Belu pada umumnya adalah hasil ternak berupa babi dan ayam yang harganya cukup mahal, selain itu juga minuman sofi yang merupakan minuman tradisional masyarakat Timor. Kegunaan sofi ini sangat banyak sekali terutama untuk upacara adat dan untuk menjamu tamu. Oleh karena itu permintaan sofi ini sangat banyak dan selalu laku dijual di pasar. Hasil dari penjualan ini dibelikan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti minyak marlen, sabun kastela, kain selimut/kain panas atau kain-kain halus lainnya, pakaian, dan alat-alat pertanian. Produk-produk Portugis ini sangat terkenal dikalangan warga masyarakat perbatasan ketika itu. Sebagian penduduk terutama yang mempunyai pengalaman ke seberang pasti selalu ingat produk tersebut. Seperti pengalaman seorang tokoh adat di Maumutin yang pernah mengalami jaman penjajahan Portugis sampai saat ini dengan Timor Leste.

... mungkin kami bisa ada gambaran sedikit itu Portugal dengan NKRI tahun 40 an keatas sampai tahun 75, itu perdagangan yang diceritakan ya pak ini ceritakan dari sananya ada yang namanya Sabun Kastela ada minyak wangi yang namanya Marlene termasuk piring batu ini, dari Timor Portugis waktu itu, kemudian yang dari kita ini dendeng, karena kondisi perekonomian tahun 50-60 an itu kan tidak seperti sekarang, nah kemudian yang berikut antara Timor Timur dan NTT itu katakan nggak ada soal kan karena dalam satu negara dan satu pemerintahan, kemudian yang terakhir antara Timor Leste dengan NKRI sekarang ini tahun 99 yang terjadi itu membaik 9 bahan pokok rata-rata dari sini, termasuk BBM, ya kelihatannya kita pasok dari sini yang lewat ilegal, akhir-akhir ini kalau dirasakan karena ketatnya pengamanan perbatasan yang sudah mulai agak ditekan, tetapi apa dengan penekanan ini tidak terjadi ilegal itu yang sulit kita komentari, karena ukurannya agak susah, tapi rata-

rata mereka setelah satu negara dengan sekarang itu 9 bahan pokok ini rata-rata dari Indonesia, sekarang masih.

Saat ini barang-barang yang diperdagangkan di perbatasan sudah sangat bermacam-macam jenisnya, mengingat hampir semua kebutuhan sehari-hari warga Timor Leste harus dipasok dari Indonesia. Berbagai barang kebutuhan yang diperbolehkan maupun yang dilarang serta dengan berbagai cara juga dilakukan baik melalui perdagangan resmi maupun perdagangan ilegal.

Keberadaan pasar perbatasan: manfaat bagi masyarakat perbatasan

Ketika jaman penjajahan Portugis, penduduk di wilayah Belu yang merupakan jajahan Belanda masih sangat tergantung pada pasar di Timor Portugis. Dari semua informasi yang diwawancara pada umumnya mengungkapkan bahwa jaman Portugis mereka pergi berbelanja ke wilayah Timor Portugis dengan membawa hasil ternak untuk ditukarkan dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Namun seiring dengan perkembangan waktu, telah terjadi pula perubahan-perubahan ekonomi, sosial dan politik di wilayah perbatasan ini. Kenyataannya, ketika Timor Leste menjadi suatu negara yang berdaulat, keadaan ekonomi masyarakat masih belum stabil. Ketergantungan akan produk-produk dari Indonesia sangat tinggi, walaupun produk dari Australia mulai masuk ke pasaran di Timor Leste.

Sejak tahun 2000 hingga sebelum pertengahan tahun 2003 masyarakat Timor Leste banyak memanfaatkan keberadaan pasar di Indonesia. Pada saat itu telah muncul beberapa pasar di perbatasan yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti di wilayah Motaain, Turis Kain, dan Motamasin. Tempat ini relatif mudah dijangkau dari Timor Leste. Pada hari-hari pasar, selalu ramai dikunjungi oleh penduduk Timor Leste dari berbagai daerah. Kemudahan-kemudahan yang diberikan, tanpa prosedur yang berbelit-belit, barang-barang yang diperdagangkan sangat beraneka ragam dari sayur mayur, kebutuhan sehari-hari sampai barang elektronik dan dengan harga yang relatif murah membuat pasar ramai dikunjungi pembeli.

Pada waktu itu diantara kedua negara telah diberlakukan paspor bagi penduduk yang ingin melintasi batas wilayah negara. Namun demikian, bagi penduduk yang akan mengunjungi pasar walaupun sudah melintasi batas wilayah tidak perlu menggunakan paspor. Ini merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat dan pihak keamanan perbatasan untuk memberi kemudahan bagi saudara-saudara di seberang. Penduduk Timor Leste di wilayah perbatasan sangat membutuhkan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Sementara untuk pergi berbelanja di wilayah Timor Leste sendiri dirasakan cukup jauh. Adanya pasar di perbatasan ini sangat membantu penduduk perbatasan Timor Leste. Sementara itu bagi penduduk di wilayah

perbatasan Indonesia, hal ini merupakan peluang yang sangat menguntungkan.

Untuk berbelanja di pasar perbatasan pada waktu itu cukup dengan mendaftar dan dengan menyerahkan tanda identitas diri yang dimiliki semacam kartu tanda penduduk. Setelah didaftar oleh petugas keamanan dan pemerintah desa setempat mereka diberi cap, atau diberi kartu identitas sehingga mereka dapat leluasa berbelanja. Kartu atau tanda cap yang diberikan tersebut hanya berlaku di lingkungan pasar perbatasan saja, sedangkan untuk keluar pasar tidak diperbolehkan.

Ah, kalau restribusi dari Timor Leste kesini itu dikenakan 1 orang 1000 rupiah itu yang recehan dolar 1 sent, waktu datang mereka bayar tiket itu jadi prosesnya pak mereka datang dengan kartu kayak KTP kita punya itu, dan mereka menyerahkan di Pos, di sini ada pos gabungan dari Desa dari Pamtas dari Koramil ya mereka menyerahkan itu, jadi mereka menyerahkan kartu identitas itu mereka menyodorkan 1 sent itu jadi begitu mereka keluar dari pasar mengambil kembali kartu itu. kartu. disimpan di Pos setelah keluar dari pasar diambil lagi

Pasar di perbatasan mempunyai daya tarik bagi penduduk Timor Leste. Selain dapat memenuhi berbagai kebutuhan penduduk, proses untuk mengunjungi pasar sangat mudah. Walaupun sudah melintasi batas negara, paspor tidak merupakan satu syarat yang penting. Jadi tidak diperlukan paspor yang biayanya cukup besar. Proses ini tidak membutuhkan waktu yang lama, seperti layaknya kalau hendak berbelanja ke pasar biasa, hanya saja harus mempunyai kartu identitas penduduk yang jelas. Harga yang ditawarkan relatif lebih murah dibandingkan dengan bila berbelanja ke Dili atau kota-kota lainnya di wilayah Timor Leste. Hampir semua barang-barang yang dibutuhkan oleh penduduk tersedia di pasar ini. Oleh sebab itu walaupun keadaan pasar yang boleh dikatakan darurat selalu ramai dikunjungi pembeli.

Di sekitar pasar tersebut yang dulunya hanya berupa tenda-tenda sudah diberi pagar keliling yang merupakan batas. Pada waktu itu masyarakat seberang yang berkunjung ke pasar perbatasan cukup banyak. Wawancara dengan seorang anggota keamanan perbatasan di Motamasin yang merupakan daerah perbatasan menuju ke Kota Suai, Timor Leste menjelaskan sebagai berikut.

- T Orang bisa keluar masuk pakai apa
- J Cap saja, cap tangan. Masukan di pagar semua cap tangan belanja dia pakai kartu itu di kalungkan kembali lepas.

- T Tapi dulu yang dagang orang-orang kita aja ya?
- J Orang kita aja mereka beli aja .
- T Bisa sampai berapa banyak orang itu waktu ada pasar tu
- J Ya mungkin sekitar 700 orang bisa 1000 orang
- T Banyak sekali dong
- J Banyak apa lagi pas pertama kali di buka itu masih bebas visa, di sini visa baru berapa bulan masuk tahun 2005 dulu ya lumayan lah agak rame
- T Waktu dulu ada pasar mereka jalan kaki apa ?
- J Kan kita seminggu sekali ke sana jadi mereka sewa mobil.

Ramainya pasar perbatasan sangat menarik para pedagang untuk berjualan. Para pedagang berdatangan memanfaatkan kehadiran pasar perbatasan, walaupun dengan sarana pasar yang serba terbatas, karena pada waktu itu belum terdapat bangunan pasar yang permanen. Di daerah Turis Kain bahkan tempat berjualannya terdapat di tengah sungai Malibaka yang kebetulan sedang kering, yang juga merupakan batas antar kedua negara. Sementara itu di Desa Silawan, pasar terdapat di seberang jembatan yang merupakan batas negara, demikian pula di Motamasin pasar terletak di wilayah Indonesia. Pasar perbatasan tidak setiap hari ada, pasar buka pada hari-hari tertentu yang masing-masing berbeda. Perbedaan hari pasar ini banyak dimanfaatkan oleh para pedagang yang pada umumnya datang dari kota Atambua. Pada umumnya, para pedagang tersebut berjualan keliling dari pasar ke pasar lainnya. Selain pedagang dari luar wilayah perbatasan tersebut, penduduk lokal juga banyak memanfaatkan pasar untuk berjualan.

Pasar yang terdapat di Desa Silawan keadaannya lebih ramai. Kegiatan Pasar perbatasan Motaain dilakukan sebanyak tiga hari dalam satu minggu. Letak Motaain sangat strategis dan tepat untuk kegiatan perdagangan. Daerah Motaain ini dibandingkan dengan daerah perbatasan lainnya seperti Turis Kain dan Motamasin jauh lebih ramai. Wilayah ini merupakan pintu masuk perbatasan yang utama, sarana jalan dari Timor Leste menuju ke daerah ini sudah bagus, jalan ini sudah dibangun sejak lama dan merupakan jalan lintas utama Kupang-Dilli. Di sekitar wilayah perbatasan ini banyak permukiman atau desa-desa sepanjang jalur utara. Letaknya dari ibukota kabupaten juga relatif dekat, sehingga banyak pedagang yang pada umumnya berasal dari Atambua berjualan di tempat ini.

...Hari Kamis, Hari Rabu, Hari Selasa.. Habis itu kita rombak, Rabu, Kamis, Sabtu. Itu juga tetap rame, setelah itu pemerintah mulai bangun. Yang datang banyak, ada yang sampai 2000, 2000 lebih. Kami masyarakat tidak bisa hitung, tetapi kami mendapat kartu yang dia gantung disini, nomor urut, nomor

urut itu sampai dengan 2.400, 2.300 lebih. Berarti banyak begitu, jadi biasanya hari pertama, hari pertama, hari kedua kalau yang ketiga sudah kurang itu pembelinya datang dari sana. Wah jauh-jauh, sana dari ujung selatan..... belanja disini, memang rame betul, memang mereka datang membeli disini, tetapi beli minum bisa ratus bos satu orang bisa memiliki 50 bos. Jadi minimum yang kita parkir disitu itu habis. Habis. Pakaian juga begitu, mereka beli bukan cuman mau beli satu atau 2 potong tapi beli ... banyak sehingga memang waktu itu rame. Rokok, jadi sepertinya rokok ini satu juta... empat juta Memang disini tempatnya banyak juga

Bila melihat transaksi penjualan dan ramainya para pembeli yang datang, tentunya para pedagang juga memerlukan modal yang cukup banyak untuk memenuhi tuntutan para konsumen tersebut. Seperti pedagang rokok, minuman kaleng, atau minuman ringan lainnya merupakan barang-barang yang sangat banyak peminatnya. Modal untuk berdagang barang-barang ini juga cukup besar. Demikian juga untuk pakaian banyak pula pembelinya dan dalam jumlah yang banyak. Selain para pembeli membeli barang-barang tersebut untuk dipergunakan sendiri, sebagian pembeli hendak menjual kembali barang-barang dagangan tersebut.

Pedagang dengan modal cukup besar tersebut bukan orang setempat melainkan para pendatang dari Sulawesi Selatan, Jawa, dan Sumatera Barat yang sudah menetap lama di Atambua atau di Kupang. Mereka biasanya berjualan pakaian, alat-alat dapur, elektronik, dan kebutuhan sehari-hari. Seperti juga kalau kita pergi ke pasar di Kota Atambua, pedagang dari luar (pendatang) lebih dominan dengan jenis dagangan seperti pakaian, sembako, peralatan pertanian, elektronika, dan lain-lain. Penduduk lokal, sebagai pedagang pada umumnya berjualan hasil-hasil pertanian atau hasil kebun. Hal seperti ini juga terjadi di pasar perbatasan. Seperti dituturkan oleh seorang penduduk Desa Silawan sebagai berikut.

- J. Disini kalau soal-soal seperti jualan pakaian-pakaian begitu tentu pedagang- pedagang lebih beragam ada yang dari Jawa, Sulawesi, tetapi yang mereka kebanyakan dari Atambua, tetapi langsung yang dari Jawa tidak ada.
- T. Ya maksudnya mereka tinggal disini, tapi orang-orang dari Atambua kan, kalau orang-orang yang dari desa sini ya banyak juga
- J. Ya banyak yang berdagang disana, jadi katakanlah mereka ada di sebelah pesan minuman begitu kan, jadi kalau yang jelas orang disana dengan yang disini kan

masih satu budaya kan jadi negoisasinya kan mudah, jadi kayak orang disini kan langsung ngambilnya seperti kaya dipasar itu kalau tidak ada di pasar mereka langsung ngambil disini.

Seperti halnya di pasar perbatasan Motaain, Desa Silawan, di Desa Maumutin atau di pasar perbatasan Turis Kain para pedagang berasal dari luar walaupun penduduk lokal sebagian kecil ikut berdagang. Penduduk setempat biasanya juga menjual hasil pertanian, sayur mayur, sirih pinang, sofi, dan lain-lain. Semua barang-barang kebutuhan sehari-hari banyak dijual di pasar perbatasan ini kecuali barang-barang yang dilarang seperti minyak tanah, bensin, dan solar.

- J Mereka-mereka itu belanjanya hanya pakaian, alat-alat dapur pokoknya alat dapur, minuman,-minuman seperti minuman ringan, cocacola, sprite, hanya minyak tanah, bahan baku, itu yang tidak dijual, tapi selain itu dijual. Biasanya yang jualan disitu itu orang dari Jawa, Sulawesi, dari Flores, pokoknya dari penjuru mana saja.
- T Datangnya kesini jualan, termasuk orang sini ikut jualan?
- J Termasuk orang sini, tapi kita disini hanya jual hasil pertanian. Tapi seperti barang-barang seperti kain, alat-alat dapur, alat-alat elektronik itu kan dari sana Jadi kebanyakan itu dari Sulawesi dengan orang Jawa, orang Bugis.

Pedagang yang merupakan penduduk setempat belum memiliki banyak pengalaman berdagang, mereka kalah bersaing dengan penduduk pendatang yang sudah punya latar belakang perdagangan. Pada dasarnya, penduduk setempat lekat dengan budaya petani kebun. Untuk menjadi pedagang tentunya harus merubah pola pikir dan perilaku petani kebun, hal ini memerlukan waktu yang cukup lama. Keberanian untuk berusaha dan bersaing dan tidak takut rugi serta liku-liku berdagang harus mereka miliki. Namun, potensi ini walaupun masih dalam skala yang kecil dapat dimanfaatkan dengan belajar dari pengalaman orang-orang dari luar. Dorongan dan bimbingan sangat diperlukan serta modal untuk berusaha untuk menjadikan penduduk lokal sebagai pedagang yang dapat bersaing dengan para pedagang pendatang.

Keberadaan pasar perbatasan banyak memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat perbatasan, tidak saja masyarakat Timor Leste tetapi juga masyarakat Belu. Keuntungan bagi para pedagang sudah pasti, karena mereka berdagang dalam rangka mencari keuntungan. Sementara itu, bagi para pembeli terutama masyarakat Timor Leste mendapatkan

keuntungan karena dengan mudah mendapatkan barang-barang atau keperluan hidup sehari-hari. Namun demikian, dalam kenyataannya mereka yang terlibat dalam aktivitas pasar perbatasan menemukan manfaat lainnya yaitu dapat saling bertemu dengan keluarga yang terpisahkan oleh batas wilayah negara.

Masyarakat perbatasan Belu dan Timor Leste masih banyak yang memiliki hubungan kekerabatan. Keadaan politik Timor Leste (pada waktu itu Timor Timur) yang memecah belah keutuhan keluarga menyebabkan mereka yang mempunyai hubungan keluarga dapat berpisah, pro referendum atau merdeka dan pro integrasi. Situasi politik ini akhirnya memberikan pilihan bagi keluarga untuk tetap tinggal di bumi Lorosae atau mengungsi dan pindah menetap di wilayah Indonesia. Akhirnya banyak keluarga yang menjadi berpisah (atau mungkin terpaksa berpisah). Namun demikian, pada dasarnya mereka masih tetap menjalin hubungan keluarga, walaupun sudah tidak bebas bertemu seperti dulu. Bila ingin bertemu berarti mereka harus melintasi batas wilayah negara dan harus menggunakan paspor karena sudah menjadi ketentuan bersama. Penggunaan Pas Lintas Batas, yang pada dasarnya merupakan salah satu cara yang mudah belum diberlakukan hingga saat ini. Pada saat itu, salah satu cara untuk bertemu keluarga adalah dengan menggunakan sarana pasar perbatasan.

Semenjak dibukanya pasar perbatasan banyak dimanfaatkan penduduk dari kedua negara ini untuk saling bertemu. Para pengungsi yang sudah menjadi warga negara Indonesia, atau mereka dikenal dengan sebutan "warga baru", banyak tinggal di desa-desa di sekitar perbatasan. Sebagian dari warga baru masih memiliki keluarga yang masih tinggal di Timor Leste. Selain warga baru, penduduk setempat yang berada di desa-desa sepanjang perbatasan juga masih memiliki kerabat yang berada di negara Timor Leste. Namun demikian gerak mobilitas penduduk lintas batas antar dua negara ini sangat terbatas. Hanya dengan adanya pasar perbatasan tersebut mereka memiliki kesempatan untuk saling bertemu. Akan tetapi semenjak peristiwa penembakan di sungai Malibaka di perbatasan Turis Kain yang terjadi pada tahun 2003 untuk sementara waktu kegiatan pasar perbatasan dihentikan. Hal ini membuat penduduk di perbatasan menjadi kecewa, karena kesempatan untuk bertemu keluarga menjadi sangat terbatas. Dengan demikian, frekuensi bertemu keluarga menjadi semakin berkurang, bahkan semenjak ditutupnya pasar perbatasan beberapa penduduk setempat tidak pernah lagi bertemu keluarganya di seberang. Kesempatan bertemu keluarga dengan melanggar peraturan kemungkinan dapat mereka lakukan, namun ada perasaan takut karena penjagaan yang cukup ketat. Dalam kesempatan wawancara dengan seorang warga baru menuturkan tentang tidak dapatnya mereka bertemu pasca penutupan pasar perbatasan, dan perasaan takut untuk menyeberang.

- T. Sekarang bapak kan masih punya anak di seberang ya
- J. Di Tim-tim
- T. Ya di Tim-Tim, pernah ketemu pak?
- J. Sejak mereka pergi tidak pernah, dulu waktu pasar itu mereka sering kesini
- T. Sekarang belum pernah ketemu lagi ya
- J. Sekarang tidak lagi, mereka terpaut disana dan kita mau kesana terpaut disini kan, kalau terpaksa ya lewat jalan-jalan tadi, kalau hal-hal khusus ada kalau kematian begitu, tetapi kalau urusan dagang saya tidak berani.
- T. Tapi selama ini bapak sering ketemu dengan anak atau saudara di Tim-tim
- J. Tidak pernah, masalahnya mereka dari sana juga takut
- T. Oh begitu, takutnya kena apa pak
- J. Ya kalau kena tangkap pak, kalau dideportasikan pak. Tingkat keamanannya di sana juga meningkat begitu pak tindakan terus oleh Sipol disana, lebih-lebih dengan pasukan yang ada disana, komunikasinya sudah tidak lagi, mau bagaimana pak, jadi kita hanya menanti saja.

Keberadaan pasar perbatasan sangat dinantikan oleh sebagian besar penduduk yang bermukim di sepanjang perbatasan. Dibangunnya pasar perbatasan memberikan harapan bagi penduduk perbatasan akan memberikan banyak keuntungan dan manfaat. Namun, kenyataannya bangunan pasar perbatasan yang baru tersebut belum pernah dimanfaatkan. Apabila pasar perbatasan ini masih berfungsi pihak pemerintah desa juga akan merasakan keuntungan. Setiap ada kegiatan pasar perbatasan pihak pemerintah desa mengutip uang 1 sen atau Rp 1000,- dari para pengunjung dari Timor Leste. Dari hasil uang yang dikumpulkan selama kegiatan pasar yang sudah berlangsung sejak tahun 2000 tersebut, pihak pemerintah desa dapat merenovasi bangunan kantor desa dan membiayai kegiatan administrasi desa. Kepala Desa Silawan menjelaskan bahwa hasil yang didapatkan dalam satu minggu bisa mencapai sekitar Rp 1 juta.

Desa dapat dari itu pasar retribusi, retribusi pengunjung Jadi kami hitung punya hitung pemasukan dalam seminggu 3 kali pasar paling kurang 1 juta. Kebutuhan membiayai administrasi waktu itu kita tidak mengharapakan dari Pemda waktu itu. ...ya, memang kita ada koordinasi atau kekompakan antara para pelaksana disitu satu desa, Camat sendiri, Babinsa dan Pos Polisi memang ada pembagian prosentasi pembagian yaitu setiap bulannya selesai kita prosentasenya

Berhentinya kegiatan pasar perbatasan menyebabkan untuk sementara waktu aktivitas perdagangan lintas batas khususnya di sekitar wilayah perbatasan menjadi terhenti. Penduduk di perbatasan Timor Leste yang kebutuhan hidup sehari-harinya sangat tergantung kepada barang-barang dari Belu tentu sangat mengharapkan pasar perbatasan segera dibuka kembali. Demikian pula, para pedagang penduduk setempat maupun pedagang mengharapkan supaya pasar perbatasan segera dibuka kembali. Akan tetapi mereka hanya bisa berharap, semuanya tergantung kesepakatan kedua negara yang sebenarnya sudah dituangkan dalam perjanjian lintas batas. Belum diberlakukannya pas lintas batas hingga saat ini mengganggu mobilitas penduduk dan barang di wilayah perbatasan. Penduduk perbatasan yang melakukan kegiatan lintas batas ilegal baik untuk mengunjungi keluarga maupun untuk berdagang cenderung semakin banyak. Namun demikian, penjagaan keamanan yang semakin meningkat banyak menyurutkan warga untuk melakukan lintas batas ilegal.

Hubungan antara Timor Leste dan Timor Barat sangat penting bagi pembangunan dan penduduk Timor Lorosae. Perdagangan di perbatasan merupakan suatu kebutuhan terutama bagi penduduk Timor Lorosae. Oleh karena itu adanya berbagai hambatan di perbatasan cenderung akan memunculkan penyelundupan yang pada akhirnya akan menimbulkan persoalan dalam perdagangan itu sendiri. Perdagangan antar kedua Negara ini dikenakan pajak impor 5 persen yang tidak ada pengaruhnya kepada dua negara ini, akan tetapi kenaikan harga di Timor Lorosae akan sangat tinggi dan hal ini juga akan mendorong penyelundupan (Susastro, 2006:138-139). Seperti sudah dijelaskan di atas, perdagangan illegal bukan hanya terjadi pada saat ini saja melainkan sudah berlangsung sejak lama. Perdagangan illegal ini merupakan permasalahan yang selalu ada di wilayah perbatasan. Namun demikian, di wilayah perbatasan Belu-Timor Leste keberadaan perdagangan illegal menjadi semakin marak seiring dengan matinya pasar perbatasan dan belum dilaksanakannya kesepakatan lintas batas antara kedua negara ini serta harga yang semakin tinggi di Timor Leste. Kegiatan perdagangan illegal atau penyelundupan akan memberikan keuntungan yang cukup banyak. Dengan demikian, perdagangan illegal cenderung akan menjadi semakin marak.

Kegiatan yang cenderung illegal ini sangat erat kaitannya dengan kondisi pembangunan wilayah yang terbelakang dan kemiskinan. Upaya memecahkan masalah kemiskinan dan keterbelakangan penduduk perbatasan merupakan upaya yang mendasar harus dilakukan oleh pemerintah. Tanpa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk ini akan mempunyai dampak pada kegiatan yang menjurus kepada perbuatan ilegal. Berbagai tindak kejahatan lintas perbatasan (*transnational crime*) akan terjadi seperti

illegal logging, illegal fishing, illegal trafficking in person, perdagangan wanita dan anak, penyelundupan dan kejahatan lainnya (Nainggolan, 2004).

Pola mobilitas orang dan barang biasanya dilakukan secara formal dan legal, melalui prosedur yang telah ditetapkan dan disepakati oleh kedua negara. Namun demikian ditengarai masih banyak dilakukan praktik mobilitas orang dan barang yang dilakukan secara ilegal tanpa melalui prosedur yang resmi. Hal ini dilakukan salah satu alasannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan mengurangi biaya operasional. Keberadaan perdagangan illegal memang diakui oleh sebagian penduduk walaupun ada yang segan untuk mengungkapkannya. Perdagangan illegal atau penyelundupan yang dilakukan selain untuk mencari keuntungan, juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang masih tinggal di wilayah Timor Leste. Salah satu warga Desa Silawan mengungkapkannya sebagai berikut

Ya jalan tikus memang ya bukan apa pak, tetapi kan kemungkinannya ada ya, tapi tidak seberapa dan akhir-akhir ini lebih condong di bahan bakar itu, jadi minyak itu bahan apa-apa tapi terus terang saja pak bukan apa-apa tapi masyarakat udah dalam keadaan terpaksa melakukan hal ini barangkali, walaupun perbuatan itu jelas-jelas melanggar hukum tetapi mau dibilang apa. Memang keadaan terpaksa masyarakat melakukan itu, itupun tidak seberapa pak, karena selalu kan ada keamanan yang membatasi itu, karena itu tidak merugikan.

Di sepanjang perbatasan Belu-Timor Leste hampir dapat dikatakan rawan akan kegiatan perdagangan ilegal, seperti juga fenomena ini terjadi di wilayah perbatasan lainnya. Kebutuhan akan barang-barang kebutuhan sehari-hari, keadaan penduduk yang miskin membuat mereka terpaksa melakukan semua kegiatan ini. Untuk melakukan pengamanan di sepanjang tapal batas tentunya tidak mungkin karena banyaknya keterbatasan aparat keamanan. Oleh karena itu peluang untuk melakukan kegiatan ilegal itu muncul dan dimanfaatkan oleh sebagian penduduk di perbatasan. Perdagangan ilegal di wilayah Belu yang marak tersebut sudah sering dilakukan. Hal ini diungkapkan pula oleh kepala Desa Davala dalam wawancara sebagai berikut.

J: perdagangan Ilegal sering terjadi memang pak...Itu barang minyak, makanan, vetsin dan garam, supermi, rokok...mereka sudah sepakat harganya seperti itu, kita walaupun berteriak-teriak juga tetap saja tidak bisa karena dari sana juga sudah keluarga besar.

T: Mereka membayarnya pakai apa pak?

- J: Pakai dolar pak.
- T: Komunikasinya bagaimana misalnya aku mau bawa barang ini itu sudah di komunikasikan dahulu?
- J: Iya sudah pak, karena mereka banyak yang illegal karena selama ini di wilayah saya illegal, walaupun kita memakai macam-macam tekanan mereka tetap saja tidak dihiraukan, bahkan kadang-kadang ada yang dari pasukan saya sudah tangkap lalu saya suruh lepas.
- T: Kalau kita seperti itu bahasa lokal nya namanya apa pak?
- J: Namanya itu *faan naok* artinya *jual curi*.
- T: Itu dalam seminggu kurang lebih ada berapa kali orang melakukan perdagangan tadi?
- J: Dalam satu minggu paling dua kali pak, ini illegal pak itu juga tergantung pengontrolan keamanan kalau aktif keamanan berarti mereka juga akan ditunda dulu mereka melihat situasi keamanan.

Fenomena perdagangan ilegal khususnya, bagi masyarakat di daerah perbatasan Belu bukan merupakan hal yang baru. Kegiatan ini sudah berlangsung lama semenjak adanya batas wilayah yang memisahkan kedua negara dan masyarakatnya atau sejak jaman penjajahan Potugis maupun Belanda kegiatan ilegal sudah dilakukan. Perdagangan ilegal ini dilakukan melalui jalan-jalan setapak atau istilahnya jalan-jalan tikus yang hanya diketahui oleh penduduk yang biasa melakukan perdagangan atau lintas batas ilegal. Dalam masyarakat Desa Davala kegiatan ilegal ini dinamakan *faan naok* yang artinya *jual curi*, karena dalam menjual barang dagangan dengan cara mencuri-curi.

Penduduk mengakui bahwa perbuatan mereka melakukan penyelundupan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan mereka menyadari akibat dari perbuatan ini.. Oleh karenanya mereka sangat berharap segera dibuka kembali pasar perbatasan dan segera diberlakukan pas lintas batas atau aturan yang dapat mengakomodasi pelintas batas tradisional.

Dengar siaran ya kita baca di koran pak Xanana barangkali mengimbau ya dibuka kembali pasar perbatasan supaya bisa membantu warganya yang diperbatasan ini yang kita anggap kalau lebih cepat, daripada sekarang ya lewat secara kucing-kucingan lewat jalan tikus resikonya terlalu tinggi, cuma dari kami catatan bahwa biar keuntungan tipis sekali tapi hanya untuk perut, jadi mereka sangat mengharapkan bisa ada pasar barangkali bisa merubah apa jualanya itu, minyak karena dilarang mungkin bisa jual rokok, itu merupakan kebutuhan mereka juga

Aktivitas perdagangan sudah dilakukan sejak lama dan hingga saat ini kegiatan ini masih tetap berjalan. Namun demikian, dilihat dari perkembangannya kegiatan perdagangan dari dan ke Timor Leste akhirnya ini hanya dilakukan oleh para pedagang besar, dengan modal yang cukup besar mereka dapat tetap melakukan kegiatan ini. Perdagangan resmi tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat perbatasan yang relative miskin dan dengan modal sangat terbatas. Aktivitas perdagangan sekarang yang masih dapat bertahan dengan melalui kegiatan ekspor barang-barang produksi Indonesia ke Timor Leste. Namun demikian, keadaan sekarang ini juga banyak dikeluhkan oleh para pedagang besar di Atambua. Banyaknya barang-barang pabrikan dari Surabaya yang masuk ke Dili tanpa melalui pelabuhan Atapupu di Belu menyebabkan banyak pengusaha Atambua yang mengundurkan diri dari ekspor berdagang ke Timor Leste.

Dulu banyak rame, sekarang hampir semua tu maksudnya tidak kerja lagi ke sana, karena harga di sana, juga mungkin keuntungannya menipis to harga di sana sama dengan di sini ya itulah pokoknya sekarang tu agak berkurang lah kalau lewat darat sini. Yang lewat darat, kalau lewat laut masih tetap soalnya di sana mungkin kapal masuk terus barang juga banyak kebanyakan pengusaha di sana tu ya orang Indonesia semua yang dari Surabaya bos gitu...ya tahun 2003 tu udah mulai lesu sudah orang-orang pada mundur-mundur makanya akhirnya hampir sma sekali tidak ada yang masuk lagi kalau dari sini. Ya banyak dulu dari Atambua rame kesana kan kesempatan to harga barang masih tinggi orang baru merdeka sekarang kurang sekali. Ya pokoknya barang kebutuhan sehari-harilah. Ya yang paling banyak laku kan tidak terikat to. Apa yang paling laku di ambil Kaya pepsoden, sabun lux, life boy citra-citra kalau itu masih bisa. Ya kalau kayak bimoli, soklin itu tidak bisa di sana sudah ada sekarang. Ya dari Surabaya makanya harga di sana dengan di sini mungkin sama kadang lebih murah sana, wings sekarang ada di sana sekarang banyak di sana kayak jarum juga ada rokok LA, Gudang garam juga ada dari Surabaya langsung kayak rokok nya besar kayak orang buat selundupan di sini kan yaitu di sana ada agen jatah di sini jadi kurang di kasih kurang sini supaya jangan masuk ke sana. Untuk lokal sini saja kan rokok pajaknya agak besar mungkin di sana.

Ditutupnya pasar-pasar perbatasan sangat berdampak kepada penduduk di sekitar perbatasan untuk dapat memanfaatkan keberadaan pasar-pasar perbatasan ini. Masalah keamanan di dalam Negara Timor Leste

maupun di sekitar wilayah perbatasan kedua Negara dan perjanjian lintas batas kedua negara menjadi penyebab ditutupnya pasar-pasar perbatasan. Untuk masa yang akan datang sudah ada aturan yang telah disepakati oleh pemerintah kedua negara. Namun demikian pelaksanaan perjanjian ini selalu tertunda.

Seperti halnya perdagangan lintas batas pada umumnya harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Untuk melakukan kegiatan ekspor impor barang dengan Negara lain harus tetap mengacu kepada kebijakan pemerintah pusat atau dalam hal ini kebijakan yang telah dibuat oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan karena hal ini juga terkait dengan perjanjian perdagangan internasional. Kegiatan ekspor hanya dapat dilakukan oleh orang atau badan yang telah memiliki surat ijin perdaganagan (SIUP), ijin dari instansi teknis terkait dan tanda daftar perusahaan (TDP). Adapun barang atau komoditi yang dapat dieksport dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu (1) barang yang diatur, (2) barang yang diawasi, (3) barang yang dilarang, dan (4) barang umum.

Di dalam melakukan perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Timor Leste terdapat ketentuan khusus yang berlaku di dua Negara tersebut khususnya di wilayah perbatasan. Kesepakatan perjanjian perdagangan lintas batas ini telah ditandatangani pada tanggal 11 Juni 2003 dan dilaksanakan pada pada tanggal 11 Desember 2003. Namun dengan adanya peristiwa penembakan yang terjadi di Turis Kain pada bulan September 2003, perjanjian yang telah disepakati untuk sementara belum dilaksanakan. Isi perjanjian ini sangat menguntungkan kedua belah pihak, terutama masyarakat sekitar perbatasan dan perjanjian ini dapat memfasilitasi para pelintas batas tradisional hanya dengan menggunakan Pas Lintas Batas.. Adapun isi perjanjian lintas batas yang tertuang dalam Pasal 12 tentang Perdagangan Lintas Batas Tradisional dan Kebiasaan sebagai berikut⁴⁸.

1. Warga yang memiliki PLB dapat melakukan kegiatan tradisional dan kebiasaan
2. Barang-barang perdagangan tradisional untuk barang yang diijinkan melalui darat tidak dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya seperti:
 - a. produk pertanian
 - b. barang-barang yang diperdagangkan/dihasilkan di desa di wilayah perbatasan;
 - c. alat-alat perkebunan

⁴⁸ Bahan Sosialisai Tentang Larangan Perdagangan Sembako dan Bahan Kebutuhan Pokok Bersubsidi di Wilayah Perbatasan RI-RDTL yang disebarluaskan oleh Dinas Perindag Kabupaten Belu pada bulan Juni 2005.

- d. peralatan gedung dan bahan bangunan di desa
 - e. alat-alat penerangan desa
 - f. alat keperluan rumah tangga
 - g. peralatan masak di desa
 - h. pakaian untuk perorangan
 - i. barang konsumsi sehari-hari lainnya.
3. Pengecualian/larangan bagi barang-barang perdagangan seperti:
 - a. bahan baker
 - b. senjata
 - c. obat-obatan terlarang
 - d. pakaian militer dan pegawai negeri
 - e. peralatan telekomunikasi
 - f. kayu cendana atau produknya
 - g. emas dan batu mulia
 - h. barang-barang yang disubsidi
 - i. barang yang dilarang sesuai undang-undang
 4. Nilai barang yang dibawa tidak boleh lebih dari US \$ 50 per orang per hari kunjungan atau dalam rupiah yang setara. Pemilik PLB hanya dapat melintas sekali dalam sehari (PP)
 5. Pemegang PLB tidak boleh membawa lebih dari 5 ekor sapi atau hewan berkaki empat lainnya setiap kali masuk
 6. Pergerakan barang selain yang diijinkan dalam pengaturan ini tunduk pada ketentuan pabean atau aturan lainnya yang berlaku
 7. Kelalaian penduduk perbatasan dalam mematuhi pasal ini dapat berakibat pada penahanan Kartu PLB oleh Petugas Perbatasan atau oleh pihak berwenang lainnya.

Selanjutnya peraturan lainnya yaitu Pasal 13 mengenai Pasar yang diatur. Untuk pasar yang diatur berlaku ketentuan sebagai berikut.

1. Warga pemegang PLB dapat menyeberang ke wilayah lainnya selain titik-titik penyeberangan yang telah ditentukan untuk berdagang di pasar yang diatur dan membawa barang-barang komersial
2. Perdagangan di pasar yang diatur terbatas pada barang yang tidak dilarang tersebut di atas.

Kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh kedua pemerintah sudah sangat jelas. Namun demikian, sampai saat ini perjanjian tersebut belum pernah diberlakukan. Masalah perbatasan yang belum tuntas merupakan salah satu kendala. Namun demikian berbagai kendala dihadapi oleh pemerintah Timor Leste lebih merupakan alasan belum diberlakukannya perjanjian ini. Pemerintah Indonesia dalam hal ini pihak imigrasi, beacukai,

dan keamanan sudah mempersiapkan semua persyaratan dan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi kegiatan lintas batas penduduk maupun barang, dan perdagangan di wilayah perbatasan ini. Oleh karena itu, sekarang ini tinggal menunggu sikap dari pemerintah Timor Leste untuk merealisasikan perjanjian perbatasan ini. Penduduk perbatasan Belu maupun Timor Leste sudah sangat berharap agar kesepakatan antara kedua pemerintah segera dapat dilaksanakan karena telah merasakan keuntungan dan manfaatnya dari kemudahan melintasi batas negara maupun keberadaan pasar perbatasan

5. Penutup

Pada awalnya, ketika kedua wilayah perbatasan ini masih dijajah oleh Portugis maupun Belanda, ketergantungan penduduk Belu akan barang-barang kebutuhan sehari-hari kepada penduduk di wilayah Timor Portugis sangat tinggi. Hampir semua barang-barang kebutuhan hanya dapat diperoleh di wilayah Timor Portugis. Seiring perkembangan jaman telah terjadi perubahan orientasi. Setelah Timor Leste menjadi suatu negara yang merdeka, penduduknya menjadi sangat tergantung pada Indonesia. Peluang penduduk perbatasan Belu untuk melakukan perdagangan dengan Timor Leste sangat terbuka lebar. Kebutuhan sehari-hari penduduk Timor Leste banyak didatangkan dari wilayah Indonesia, khususnya wilayah Belu. Ketergantungan penduduk Timor Leste akan barang-barang produksi Indoensia, baik itu berupa produk makanan, minuman, berbagai macam peralatan, dan lain-lain sangat tinggi.

Pelaku lintas batas khususnya yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dapat merupakan pelaku sebagai individu maupun bagian dari jaringan perdagangan. Dengan demikian, para pelintas batas pun akan bervariasi. Pelintas batas merupakan penduduk lokal atau penduduk di sekitar wilayah perbatasan namun juga penduduk di luar wilayah perbatasan.. Dikaitkan dengan komoditi perdagangan akan berbeda, antara pelaku perdagangan penduduk setempat dengan penduduk di luar wilayah perbatasan. Hasil-hasil pertanian akan lebih banyak didominasi oleh penduduk lokal walaupun dalam batas yang sangat kecil. Sebaliknya penduduk di luar wilayah perbatasan yang datang dari Atambua, Kupang, atau bahkan dari Surabaya akan mendominasi perdagangan dalam skala besar dan merupakan barang-barang kebutuhan primer maupun sekunder. Namun demikian, penduduk lokal yang tidak memiliki latar belakang budaya perdagangan, sebagian sudah memanfaatkan pasar perbatasan dengan melakukan kegiatan perdagangan. Upaya penduduk lokal untuk menggeluti perdagangan perlu dikembangkan, karena masih kalah bersaing dengan penduduk di luar wilayah perbatasan. Hal ini diperlukan untuk menangkap peluang ketika perjanjian lintas batas antara kedua negara yang telah

disepekat akan segera dilaksanakan. Selain itu ketrampilan berdagang perlu terus ditingkatkan bagi penduduk perbatasan yang berkecimpung dalam dunia bisnis ini untuk terus berdagang dengan memanfaatkan komoditi perdagangan yang ada di wilayahnya.

Kegiatan mobilitas penduduk dan barang akan menguntungkan kedua belah pihak namun dengan adanya permasalahan perdagangan ilegal menjadi masalah yang justru akan merugikan. Perdagangan merupakan potensi yang harus dikembangkan untuk mensejahterakan masyarakat perbatasan. Bila hal ini dikembangkan dan dikelola dengan baik bukan tidak mungkin perdagangan ke Timor Leste akan dapat menghasilkan devisa bagi negara, yang pada akhirnya digunakan untuk kepentingan pembangunan masyarakat perbatasan itu sendiri. Sementara itu, aktivitas perdagangan juga dapat dijadikan wahana untuk memberdayakan masyarakat NTT, utamanya masyarakat lokal. Selama ini pembangunan kawasan ini yang dirasakan lamban akan semakin terpacu dengan adanya aktivitas perdagangan yang semakin meningkat.

Perjanjian mengenai pengaturan lintas batas penduduk maupun barang antara kedua negara sudah pernah dilakukan. Perjanjian ini dapat mengakomodasi kepentingan penduduk di sekitar wilayah perbatasan dalam berinteraksi dengan penduduk di wilayah perbatasan NTT dan Timor Leste yang pada dasarnya masih mempunyai hubungan kekerabatan. Selain itu dengan perjanjian ini, masyarakat perbatasan dapat melakukan berbagai transaksi perdagangan melalui pasar perbatasan yang terbukti besar manfaat bagi penduduk perbatasan. Oleh karena itu realisasi dari pelaksanaan perjanjian lintas batas antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste sudah merupakan suatu keharusan. Penduduk di wilayah perbatasan baik penduduk Timor Leste atau penduduk Belu akan memperoleh keuntungan dan manfaat dari diberlakukannya perjanjian ini. Pos lintas batas, pas lintas batas, maupun pasar perbatasan akan dibuka kembali dan lintas batas penduduk maupun barang akan dapat berlangsung secara legal, sementara itu lintas batas penduduk dan perdagangan ilegal akan berkurang.

Daftar Pustaka

- Aswatini dan Eniarti Djohan, 1999. *Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Perbatasan Kalimantan Timur: Konsep dan Strategi Alternatif Pembangunan*. Jakarta PPT-LIPI
- Bandiyono, Suko (ed), 1995. *Mobilitas Penduduk Daerah Perbatasan: Timor Timur*. Jakarta: PPT-LIPI
- Hill, Hal, 2006. “Kebijakan Perdagangan dan Perniagaan” dalam Hal Hill dan Joao Mariano Saldanha (eds.), *Membangun Negara Baru Timor Lorosa'e*. Jakarta: Asksara Karunia. Hal. 106-125
- Hugo, Graeme, 1982. “Circular Migration in Indonesia” dalam *Population and Development Review* 8 (1) Hal. 59-83
- Keely, Charles B., 2000. “Demography and International Migration” dalam Caroline B. Brettell dan J F Hollifield (eds) *Migration Theory Talking Across Disciplines*. New York: Routledge
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2004. Kawasan Perbatasan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di Indonesia. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- Kimpraswil, 2002. *Strategi dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara*. Jakarta: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jendral Penataan Ruang.
- Munir, Rozy, 1981. “Migrasi”, dalam *Dasar-dasar demografi*. Jakarta: Lembaga Demografi FEUI
- Nainggolan, P. Partogi (ed), 2004. Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman terhadap Intergritas Teritorial. Jakarta: Tiga putra Utama.
- Susastro, Hadi, 2006. “Hubungan Ekonomi dengan Indonesia” dalam Hal Hill dan Joao Mariano Saldanha (eds.), *Membangun Negara Baru Timor Lorosa'e*. Jakarta: Asksara Karunia. Hal. 126-144
- Pemda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu. 2004. *Kabupaten Belu Dalam Angka 2004*. Atambua: BPS
- Pemda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu. 2006. *Kabupaten Belu Dalam Angka 2005*. Atambua: BPS (akan terbit)

Sekretariat Kementerian Pembangunan Daerah tetinggal, 2005. Keputusan Menteri Negara Pembangunan daerah tertinggal Republik Indonesia, Nomor: 010/KEP/M-PDT/II/2005.

Shryok H.S. dan S. Siegel, 1976. *The method and Material of Demography*. New York: Academic Press

Tirtosudarmo, Riwanto, 2002. Kalimantan Barat sebagai ‘Daerah Perbatasan’: Sebuah Tinjauan Demografi Politik, dalam *Antropologi Indonesia* Th XXVI, No 67

